

Dr. Lili Dasa Putri, M.Pd.
Prof. Dr. Solfema, M.Pd.

CV PACE . 2025

Studi Komparatif Pendidikan Nonformal Antar Negara

Gagasan dari Seluruh Dunia



Studi Komparatif Pendidikan Nonformal Antar Negara: Gagasan dari Seluruh Dunia

Dr. Lili Dasa Putri, M.Pd.
Prof. Dr. Solfema, M.Pd.



2025

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta**

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Studi Komparatif Pendidikan Nonformal Antar Negara: Gagasan dari Seluruh Dunia

Dr. Lili Dasa Putri, M.Pd.
Prof. Dr. Solfema, M.Pd.



2025

Judul

Studi Komparatif Pendidikan Nonformal Antar Negara:
Gagasan dari Seluruh Dunia

Penulis

Dr. Lili Dasa Putri, M.Pd.
Prof. Dr. Solfema, M.Pd.

Copyright@2025

Oleh PACE Padang, Sumatera Barat

Pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Indonesia
xiv + 320 halaman
15,5 x 23 cm

Oleh

PACE

Partnership for Action on Community Education
Padang-Sumatera Barat

Cetakan Pertama: November 2025

ISBN: _____

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit

ANGGOTA



Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya sehingga buku berjudul “Studi Komparatif Pendidikan Nonformal Antar Negara: Gagasan dari Seluruh Dunia” ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini lahir dari keprihatinan sekaligus semangat akademik untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang dinamika pendidikan nonformal yang berkembang di berbagai belahan dunia mulai dari Asia, Eropa, Afrika, Amerika, hingga Australia.

Pendidikan nonformal memiliki makna strategis dalam pembangunan manusia di era globalisasi dan disrupsi digital seperti saat ini. Ketika sistem pendidikan formal sering kali terbentur oleh keterbatasan struktur dan akses, pendidikan nonformal justru membuka ruang-ruang baru bagi masyarakat untuk belajar, berinovasi, dan berdaya sesuai dengan potensi serta konteks kehidupan mereka. Dalam berbagai negara, pendidikan nonformal tumbuh dengan beragam wajah: ada yang terintegrasi secara kuat ke dalam sistem nasional, ada pula yang berkembang secara otonom melalui inisiatif komunitas dan masyarakat sipil.

Buku ini berupaya menelusuri keragaman tersebut melalui pendekatan komparatif lintas benua. Penulis berangkat dari keyakinan bahwa setiap negara memiliki pengalaman unik yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi negara lain. Studi

perbandingan ini bukan untuk mencari siapa yang lebih unggul, melainkan untuk menemukan nilai-nilai universal, inovasi kebijakan, dan praktik terbaik yang dapat diadaptasi sesuai konteks lokal, termasuk bagi penguatan sistem pendidikan nonformal di Indonesia.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan analisis mengenai kebijakan, sistem kelembagaan, strategi pembelajaran, serta peran masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan pendidikan nonformal di berbagai wilayah dunia. Kajian ini diharapkan dapat memperluas wawasan akademik sekaligus memperkaya diskursus ilmiah tentang pendidikan nonformal yang selama ini masih sering terpinggirkan dibandingkan dengan pendidikan formal.

Penulis juga ingin menegaskan bahwa pendidikan nonformal bukan sekadar “pendidikan alternatif,” melainkan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan. Di tengah tantangan global seperti ketimpangan sosial, pengangguran, dan transformasi digital, pendidikan nonformal terbukti menjadi instrumen pemberdayaan yang nyata mendorong masyarakat agar tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dalam perubahan zaman.

Penyusunan buku ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sejawat dosen, para peneliti, mahasiswa, serta para praktisi pendidikan nonformal di berbagai negara yang telah berbagi pengalaman dan wawasan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada lembaga pendidikan, pemerintah daerah, serta mitra organisasi yang turut memberikan data, referensi, dan inspirasi dalam proses penulisan buku ini.

Harapan penulis, buku ini dapat memberikan manfaat luas bagi pembaca baik bagi kalangan akademisi, mahasiswa, praktisi pendidikan, maupun pembuat kebijakan sebagai referensi ilmiah dan bahan refleksi dalam mengembangkan sistem pendidikan

nonformal yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Lebih jauh, semoga karya ini dapat menjadi kontribusi kecil namun bermakna dalam memperkuat posisi pendidikan nonformal sebagai gerakan pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat global.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini pada edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang mencerahkan, memperluas cara pandang, dan menginspirasi berbagai pihak untuk terus berkomitmen memajukan pendidikan nonformal sebagai fondasi pembangunan manusia yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh dunia.

Padang, Oktober 2025

Penulis

— “ —

Di berbagai negara,
pendidikan non
formal tumbuh
dengan wajah
berbeda
**namun semuanya
menegaskan bahwa
belajar adalah
perjalanan yang
abadi.**

— ” —

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I SEKILAS STUDI KOMPARATIF KOMPARATIF PENDIDIKAN NONFORMAL.....	1
A. Tujuan Penulisan	2
B. Kerangka Pemikiran dan Perspektif Kajian.....	4
C. Manfaat dan Implikasi Buku	5
 BAB II PENDIDIKAN NONFORMAL DI INDONESIA.....	7
A. Sejarah Penyelenggaran Pendidikan Nonformal di Indonesia	9
B. Kebijakan Penyelenggaran Pendidikan Nonformal di Indonesia	11
C. Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Indonesia	12
D. Penyelenggara Pendidikan Nonformal di Indonesia	14
E. Penyelenggara Pendidikan Nonformal di Indonesia	16
F. Sumber Pendanaan.....	18
G. Kelebihan dan kelemahan Penyelenggaran Pendidikan Nonformal di Indonesia Kelebihan	20
H. Analisis Studi Komparatif PNF Indonesia dengan Negara Lain	21

BAB III PENDIDIKAN NONFORMAL DI JEPANG25

A. Kebijakan Pendidikan Sosial (Pendidikan Nonformal) dan Kominkan.....	27
B. Sejarah Pendidikan sosial (pendidikan nonformal) dan Kominkan.....	29
C. Tujuan Kominkan.....	30
D. Ciri-ciri Kominkan.....	32
E. Peran dan Fungsi Kominkan Bagi Masyarakat dan Pemerintah.....	34
F. Kelompok Sasaran Kominkan.....	35
G. Penyelenggara Kominkan.....	36
H. Program-Program Kominkan.....	36
I. Metode Penyelenggaraan.....	38
J. Sumber Pendanaan.....	38
K. Kelebihan dan Kelemahan.....	40
L. Analisis Studi Komparatif Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Jepang dengan Negara Benua Asia.....	41

BAB IV PENDIDIKAN NONFORMAL DI FILIPINA45

A. Sejarah Penyelenggaran Pendidikan Nonformal di Filipina.....	46
B. Kebijakan Penyelenggaran Pendidikan Nonformal di Filipina.....	48
C. Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Filipina.....	49
D. Kelompok Sasaran Pendidikan Nonformal di Filipina.....	50
E. Penyelenggara Pendidikan Nonformal di Filipina.....	53
F. Metode Penyelenggaran Pendidikan Nonformal di Filipina.....	55
G. Karakterisitik Penyelenggaran Pendidikan Nonformal di Filipina.....	56
H. Sumber Pendanaan.....	57
I. Kelebihan dan kelemahan Penyelenggaran Pendidikan Nonformal di Indonesia.....	58
J. Analisis Studi Komparatif PNF Filipina.....	60

BAB V PENDIDIKAN NONFORMAL DI TURKI.....	65
A. Sejarah PNF di Turki	66
B. Kebijakan Penyelenggaraan PNF di Turki	69
C. Bentuk Penyelenggaraan PNF di Turki.....	70
D. Kelompok Sasaran PNF di Turki	72
E. Metode Penyelenggaraan PNF di Turki.....	74
F. Karakteristik penyelenggaraan PNF di Turki	75
G. Sumber Pendanaan PNF di Turki.....	78
H. Kelebihan dan Kelemahan PNF di Turki.....	79
I. Analisis Studi Komparatif PNF Turki dengan Negara Lain.....	81
J. Implikasi untuk Pengembangan PNF di Indonesia.....	83
 BAB VI PENDIDIKAN NONFORMAL DI ITALIA	85
A. Sejarah PNF di Italia	88
B. Kebijakan Penyelenggaraan PNF di Italia	90
C. Bentuk Penyelenggaraan PNF di Italia	92
D. Kelompok Sasaran PNF di Italia	93
E. Penyelenggara PNF di Italia	95
F. Metode Penyelenggaraan PNF di Italia	98
G. Karakteristik penyelenggaraan PNF di Italia	100
H. Sumber Pendanaan PNF di Italia.....	103
I. Kelebihan dan Kelemahan PNF di Italia.....	105
J. Analisis Studi Komparatif Italia dengan Negara Lain	110
 BAB VII PENDIDIKAN NONFORMAL DI BELANDA.....	115
A. Kebijakan Penyelenggaraan PNF di Belanda	118
B. Bentuk Penyelenggaraan PNF di Belanda.....	120
C. Kelompok Sasaran PNF di Belanda	124
D. Penyelenggara PNF di Belanda.....	127
E. Metode Penyelenggaraan PNF di Belanda.....	130
F. Karakteristik penyelenggaraan PNF di Belanda	133
G. Sumber Pendanaan PNF di Belanda	135
H. Kelebihan dan Kelemahan PNF di Belanda	138
I. Analisis Studi Komparatif Belanda dengan Negara Lain.....	143

BAB VIII Pendidikan Nonformal di Kenya	147
A. Kebijakan Penyelenggaraan PNF di Kenya	152
B. Bentuk Penyelenggaraan PNF di Kenya.....	154
C. Kelompok Sasaran PNF di Kenya	157
D. Penyelenggara PNF di Kenya.....	160
E. Karakteristik penyelenggaraan PNF di Kenya.....	163
F. Sumber Pendanaan PNF di Kenya	164
G. Kelebihan dan Kelemahan PNF di Kenya	166
H. Analisis Studi Komparatif PNF Kenya dengan Negara Lain.....	169
 BAB IX PENDIDIKAN NONFORMAL DI MESIR.....	173
A. Sejarah Pendidikan di Mesir	175
B. Sistem Pendidikan di Mesir	176
C. Jenis Pendidikan di Mesir	180
D. Sejarah Pendidikan Nonformal di Mesir	183
E. Kebijakan Pemerintahan Mesir terhadap Pendidikan Nonformal.....	186
F. Bentuk Program Pendidikan Nonformal di Mesir	188
G. Kelompok Sasaran Penyelenggaraan Pendidikan Non formal di Mesir.....	195
H. Penyelenggara Pendidikan Nonformal di Mesir	196
I. Karakteristik Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Mesir	198
J. Sumber Dana Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Mesir	199
K. Kelebihan dan Kelemahan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Mesir	201
L. Studi Komparatif Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Mesir dengan Negara Lain	203
 BAB X PENDIDIKAN NONFORMAL DI KONGO	207
A. Pendidikan di Republik Demokratik Kongo	208
B. Sejarah PNF di Kongo.....	211
C. Kebijakan Penyelenggaraan PNF di Kongo	213
D. Bentuk Penyelenggaraan PNF di Kongo	214

E. Kelompok Sasaran PNF di Kongo	222
F. Penyelenggara PNF di Kongo	223
G. Karakteristik	224
H. Sumber Pendanaan.....	226
I. Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan PNF di Kongo Kelebihan.....	228
J. Studi Komparatif PNF di Kongo dengan Negara Lain	230

BAB XI PENDIDIKAN NONFORMAL DI VICTORIA

(AUSTRALIA).....	233
A. Sejarah PNF di Victoria	234
B. Kebijakan Penyelenggaraan PNF di Victoria	237
C. Bentuk Penyelenggaraan PNF di Victoria	239
D. Kelompok Sasaran PNF di Victoria	240
E. Penyelenggara PNF di Victoria	241
F. Karakteristik penyelenggaraan PNF di Victoria	242
G. Sumber Pendanaan PNF di Victoria.....	243
H. Kelebihan dan Kelemahan PNF di Victoria.....	244
I. Analisis Studi Komparatif PNF Victoria dengan Negara Lain.....	246

BAB XII PENDIDIKAN NONFORMAL DI TASMANIA

(AUSTRALIA).....	249
A. Sejarah PNF di Tasmania.....	249
B. Kebijakan Penyelenggaraan PNF di Tasmania	251
C. Bentuk Penyelenggaraan PNF di Tasmania.....	254
D. Kelompok Sasaran PNF di Tasmania	257
E. Penyelenggara PNF di Tasmania.....	259
F. Karakteristik penyelenggaraan PNF di Tasmania	261
G. Sumber Pendanaan PNF di Tasmania	263
H. Kelebihan dan Kelemahan PNF di Tasmania Kelebihan.....	265
I. Analisis Studi Komparatif PNF Tasmania dengan Negara Lain.....	267

BAB XIII PENDIDIKAN NONFORMAL DI QUEENSLAND (AUSTRALIA)	271
A. Sejarah PNF di Queensland.....	272
B. Kebijakan Penyelenggaraan PNF di Queensland	274
C. Bentuk Penyelenggaraan PNF di Queensland	276
D. Kelompok Sasaran PNF di Queensland	278
E. Penyelenggara PNF di Queensland	280
F. Karakteristik penyelenggaraan PNF di Queensland	281
G. Sumber Pendanaan PNF di Queensland.....	283
H. Kelebihan dan Kelemahan PNF di Queensland.....	285
I. Analisis Studi Komparatif PNF Queensland dengan Negara Lain.....	286
 BAB XIV ANALISIS PERBANDINGAN DAN REKOMENDASI	 291
A. Kesamaan Sistem Pendidikan Nonformal Antar Negara	293
B. Perbedaan Karakteristik dan Tantangan	295
C. Temuan Kunci dari Studi Komparatif	297
D. Rekomendasi Pengembangan Pendidikan Nonformal di Indonesia.....	298
E. Penutup	299
 GLOSARIUM	 301
INDEKS	305
DAFTAR PUSTAKA	311
TENTANG PENULIS	317

BAB I

Sekilas Studi Komparatif Komparatif Pendidikan Nonformal

Pendidikan (education) secara semantik berasal dari bahasa Yunani paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak ke dan dari sekolah. Selain itu, di rumahnya anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan para paedagogos. Istilah ini berasal dari kata paedos yang berarti anak, dan agogos yang berarti saya membimbing atau memimpin (Hasbullah, 2015)."

Definisi pendidikan nonformal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Menurut Sudjana (2010 : 13) Pendidikan Nonformal merupakan salah satu dari sekian banyak istilah yang muncul dalam studi kependidikan pada akhir tahun tujuh puluhan. Itulah-istilah pendidikan yang berkembang di tingkat internasional mula saat

itu adalah: pendidikan sepanjang hayat (*life long education*), pendidikan pembaharuan (*recurrent education*), pendidikan abadi (*permanent education*), pendidikan informal (*informal education*), pendidikan masyarakat (*community education*), pendidikan perluasan (*extention education*), pendidikan massa (*mass education*), pendidikan sosial (*social education*), pendidikan orang dewasa (*adult eduction*), dan pendidikan berkelanjutan (*continuing education*)

Buku ini disusun sebagai studi komparatif yang mengkaji model pendidikan Nonformal (PNF) dari dua belas negara dan wilayah, yaitu Indonesia, Jepang, Filipina, Turki, Italia, Belanda, Kenya, Mesir, Kongo, serta tiga wilayah di Australia: Victoria, Tasmania, dan Queensland. Studi ini bertujuan memberikan gambaran bagaimana masing-masing negara merespons tantangan pendidikan melalui jalur Nonformal, sekaligus menampilkan praktik-praktik baik yang dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan PNF di Indonesia

Dengan pendekatan ini, buku memperlihatkan keragaman kebijakan, metode, dan pelaksanaan PNF yang disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi tiap negara. Hal ini memberikan wawasan komprehensif tentang peran PNF dalam memperluas akses pendidikan, mengatasi kesenjangan, serta mendukung pembelajaran sepanjang hayat di berbagai belahan dunia. Studi ini juga menyoroti bagaimana pengalaman internasional dapat menjadi acuan untuk memperkuat dan mengembangkan pendidikan Nonformal di Indonesia secara lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan lokal

A. Tujuan Penulisan

Secara umum, tujuan penulisan buku ini adalah untuk memperluas pemahaman tentang pendidikan nonformal dalam konteks global dan memberikan inspirasi bagi pengembangan sistem pendidikan nonformal di Indonesia. Tujuan khususnya antara lain:

1. Mendeskripsikan model pendidikan nonformal yang diterapkan di berbagai negara dan benua.
2. Menganalisis faktor keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan pendidikan nonformal di setiap negara.
3. Mengidentifikasi prinsip-prinsip universal yang dapat diadaptasi ke dalam sistem pendidikan nonformal Indonesia.
4. Menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi penguatan pendidikan nonformal yang berbasis pada pembelajaran global.

Kontribusi akademik buku ini terletak pada pengayaan wacana komparatif lintas negara dalam bidang pendidikan nonformal, yang masih relatif jarang dilakukan oleh akademisi Indonesia. Sementara itu, kontribusi praktisnya diharapkan dapat membantu pemerintah, lembaga masyarakat, dan pengelola pendidikan nonformal untuk merancang program yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global.

Selanjutnya, Penulisan buku ini memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting dalam konteks pendidikan Nonformal (PNF), yaitu:

- 1. Menyediakan Pemahaman Mendalam tentang Konsep dan Praktik Pendidikan Nonformal di Berbagai Negara**

Buku ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai konsep dan praktik PNF yang diterapkan di berbagai negara. Karena setiap negara memiliki konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda, pendekatan terhadap PNF pun sangat beragam. Dengan memahami perbedaan ini, pembaca dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip umum serta praktik-praktik khas yang efektif dan dapat diaplikasikan secara adaptif.

2. Menjadi Sumber Referensi Komparatif untuk Perancang Kebijakan dan Pelaksana Program PNF di Indonesia

Buku ini dirancang sebagai bahan referensi yang membandingkan kekuatan dan kelemahan sistem PNF di berbagai negara. Informasi ini sangat berguna bagi pembuat kebijakan dan pelaksana program di Indonesia, agar dapat merancang kebijakan PNF yang lebih inklusif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan nasional maupun lokal.

3. Mendorong Refleksi Kritis terhadap Kebijakan Pendidikan Nonformal di Indonesia

Melalui analisis dan perbandingan lintas negara, buku ini mengajak pembaca untuk melakukan refleksi kritis terhadap perkembangan PNF di Indonesia. Pembaca dapat menilai sejauh mana PNF telah berkembang dan mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki agar sistem pendidikan Nonformal di Indonesia semakin efektif dan berdaya guna.

4. Memberikan Wawasan Lintas Budaya dan Global tentang Pendidikan

Selain sebagai sumber informasi, buku ini juga berfungsi sebagai bahan pengayaan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi pendidikan. Dengan memperluas perspektif global dan lintas budaya, pembaca dapat mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang pendidikan alternatif dan inovatif di berbagai belahan dunia.

B. Kerangka Pemikiran dan Perspektif Kajian

Dalam melakukan kajian komparatif ini, buku ini menggunakan kerangka teori Lifelong Learning dan Empowerment Education. Dua teori ini menjadi dasar karena keduanya menempatkan manusia sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Lifelong Learning menekankan bahwa pendidikan tidak berhenti di sekolah formal, tetapi berlangsung sepanjang hayat dalam berbagai konteks. Sementara

Empowerment Education, sebagaimana dikemukakan oleh Paulo Freire, menegaskan bahwa pendidikan adalah proses pembebasan yang mendorong kesadaran kritis, partisipasi sosial, dan perubahan struktur ketidakadilan.

Selain itu, buku ini juga memanfaatkan pendekatan comparative education, yaitu studi sistematis tentang perbandingan kebijakan, struktur, dan praktik pendidikan di berbagai negara dengan tujuan memahami perbedaan, menemukan pola, dan mengidentifikasi inovasi yang dapat diterapkan lintas konteks. Dengan pendekatan ini, pendidikan nonformal dipahami bukan hanya sebagai sistem alternatif, tetapi sebagai kekuatan sosial yang mampu mengubah arah pembangunan manusia secara global.

C. Manfaat dan Implikasi Buku

Manfaat dari buku ini terbagi menjadi tiga ranah: akademik, kebijakan, dan praktis.

1. Manfaat Akademik

Buku ini memperkaya literatur studi perbandingan pendidikan nonformal yang masih terbatas. Kajian lintas benua memungkinkan analisis yang lebih luas dan mendalam tentang dinamika sosial-budaya yang memengaruhi kebijakan pendidikan nonformal.

2. Manfaat Kebijakan

Bagi pembuat kebijakan, buku ini dapat menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan nasional yang berpihak pada pendidikan nonformal, dengan mengambil inspirasi dari praktik terbaik negara lain.

3. Manfaat Praktis

Bagi praktisi pendidikan, buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengembangkan program yang efektif dan

berkelanjutan, memperkuat kapasitas lembaga, serta membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia industri.

Secara lebih luas, buku ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran bahwa pendidikan nonformal memiliki potensi besar dalam menciptakan masyarakat pembelajar (*learning society*), memperkuat ketahanan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.

Pada akhirnya, pendidikan nonformal adalah wajah lain dari pendidikan yang menegaskan esensi kemanusiaan dalam belajar: bahwa setiap individu memiliki hak, potensi, dan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kehidupannya. Melalui buku ini, penulis berupaya menelusuri bagaimana bangsa-bangsa di berbagai belahan dunia menafsirkan dan mempraktikkan pendidikan nonformal sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Studi komparatif antar negara di lintas benua ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bahwa tidak ada satu model yang ideal untuk semua negara, tetapi selalu ada nilai universal yang bisa diadaptasi: semangat belajar tanpa batas, pemberdayaan masyarakat, dan keadilan pendidikan.

Dengan demikian, buku ini tidak hanya dimaksudkan sebagai karya ilmiah deskriptif, tetapi juga sebagai refleksi kritis atas peran pendidikan nonformal dalam menjawab tantangan global. Di tengah dunia yang terus berubah, pendidikan nonformal akan tetap menjadi jalan pembebasan, penguatan kapasitas, dan transformasi sosial menuju masyarakat yang berdaya dan berpengetahuan.

BAB II

Pendidikan Nonformal di Indonesia

Jalur pendidikan di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, mencakup pendidikan dasar (SD dan SMP), pendidikan menengah (SMA/SMK), dan pendidikan tinggi (diploma, sarjana, magister, dan doktor). Pendidikan formal memiliki kurikulum yang baku dan sertifikasi resmi yang diakui oleh pemerintah (Tilaar, 2012). Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar sistem formal yang tetap terstruktur, seperti kursus, pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C), serta program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh lembaga seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Pendidikan nonformal bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi individu agar dapat berpartisipasi lebih baik dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Sudjana, 2010). Sementara itu, pendidikan informal adalah proses pembelajaran yang berlangsung dalam keluarga dan

lingkungan sekitar secara mandiri, tanpa kurikulum baku atau jenjang tertentu. Pendidikan ini mencakup pembelajaran dari orang tua kepada anak, kebiasaan membaca, diskusi keluarga, dan pengalaman hidup sehari-hari (Hasbullah, 2017). Ketiga jalur pendidikan ini saling melengkapi untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan luas dan berdaya saing tinggi.

Pendidikan nonformal merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pendidikan di Indonesia yang berperan penting dalam menyediakan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nonformal diartikan sebagai pendidikan di luar jalur formal yang memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial mereka. Di Indonesia, pendidikan nonformal memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan pemerataan pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, serta memberikan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja (Sudjana, 2010).

Seiring dengan perkembangan globalisasi, pendidikan nonformal juga semakin diakui sebagai solusi dalam mengatasi berbagai masalah ketidakmerataan pendidikan dan kesenjangan sosial (La Belle, 2000). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pendidikan nonformal diselenggarakan di Indonesia, serta membandingkannya dengan praktik-praktik pendidikan nonformal yang diterapkan di negara lain. Perbandingan ini memberikan wawasan yang lebih luas tentang tantangan dan peluang yang ada dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia (Rogers, 2004).

Buku ini bertujuan untuk membahas secara mendalam mengenai kebijakan, bentuk, dan pelaksanaan pendidikan nonformal di Indonesia, serta mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan sistem tersebut. Selain itu, buku ini juga akan membandingkan penyelenggaraan pendidikan nonformal di Indonesia dengan negara-negara lain, guna memperoleh

perspektif yang lebih luas dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nonformal di Indonesia.

Dengan mengkaji dan membandingkan berbagai model pendidikan nonformal, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan adaptif dalam menghadapi tantangan pendidikan di Indonesia, terutama dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Hasbullah, 2017).

A. Sejarah Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Indonesia

Pada masa kolonial, pendidikan formal hanya dapat diakses oleh golongan tertentu, sedangkan masyarakat umum lebih banyak mengandalkan pendidikan nonformal yang lebih sederhana dan berbasis komunitas (Noer, 1999). Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai mengembangkan pendidikan formal dengan lebih fokus pada sistem sekolah yang terstruktur. Namun, dengan terbatasnya akses pendidikan formal di daerah-daerah terpencil, pendidikan nonformal tetap menjadi bagian yang penting dari sistem pendidikan di Indonesia (Tilaar, 2012).

Sejarah kolonialisme dan pascakolonialisme memainkan peran penting dalam membentuk pendekatan studi komparatif di Asia. Banyak negara Asia memiliki pengalaman kolonial yang serupa, yang memengaruhi cara mereka memandang dan berinteraksi dengan dunia luar (Altbach, 2004). Studi komparatif seringkali berfokus pada memahami dampak kolonialisme dan strategi pembangunan pascakolonial. Studi komparatif tentang pendidikan nonformal di Indonesia muncul sebagai upaya untuk memahami dinamika dan keberagaman sistem pendidikan yang ada di luar jalur formal, terutama dalam konteks kebutuhan masyarakat yang beragam (Rogers, 2004).

Pendidikan nonformal memiliki peran penting dalam memberikan akses pendidikan kepada mereka yang tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa (Sudjana, 2010). Di Indonesia, dengan

keragaman budaya, ekonomi, dan geografis, pendidikan nonformal menghadapi tantangan dan peluang yang berbeda-beda di setiap daerah (Hasbullah, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan program-program pendidikan nonformal yang ada di berbagai wilayah, mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan program tersebut.

Dengan demikian, hasil dari studi komparatif ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengembangan kebijakan pendidikan nonformal yang lebih efektif dan inklusif di Indonesia. Studi komparatif pendidikan nonformal di Indonesia bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk dan program pendidikan yang dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal serta mengevaluasi efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendidikan nonformal di Indonesia mencakup berbagai program, seperti kejar paket (setara dengan pendidikan formal), kursus keterampilan, dan lembaga komunikasi sosial. Sebagai contoh, program kejar paket A, B, dan C memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah untuk mendapatkan ijazah setara, sementara lembaga kursus keterampilan di kota-kota besar seperti Jakarta sering kali menawarkan pelatihan dalam bidang teknologi informasi dan kerajinan tangan yang langsung berhubungan dengan kebutuhan pasar kerja (UNESCO, 2011).

Dengan membandingkan pendekatan dan hasil dari berbagai program pendidikan nonformal di berbagai daerah, studi ini dapat mengidentifikasi praktik terbaik serta tantangan yang dihadapi, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan nonformal di seluruh Indonesia.

B. Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia terdiri atas tiga jalur utama, yaitu formal, nonformal, dan informal, yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 13 Ayat 1). Dalam Bab I Pasal 1 Ayat 12, pendidikan nonformal didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lebih lanjut, Pasal 26 Ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Selain itu, Pasal 28 Ayat 4 menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) pada jalur nonformal dapat berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan nonformal memiliki posisi strategis dalam mendukung pembelajaran sepanjang hayat sejak usia dini (Sudjana, 2010; Hasbullah, 2017).

Untuk memperkuat implementasinya, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal, serta Permendiknas Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. Regulasi-regulasi tersebut memberikan kerangka operasional agar penyelenggaraan pendidikan nonformal dapat berjalan secara terarah, berkualitas, dan berkelanjutan (Tilaar, 2012).

C. Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Indonesia

Pendidikan nonformal di Indonesia telah mengalami berbagai bentuk kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Menurut Sudjana (2010), pendidikan nonformal memiliki fungsi strategis sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam kerangka pendidikan sepanjang hayat. Berikut adalah beberapa bentuk kebijakan yang telah dilakukan dalam pendidikan nonformal di Indonesia:

1. Program Paket A, B, dan C

Program ini setara dengan jenjang pendidikan dasar (Paket A), menengah pertama (Paket B), dan menengah atas (Paket C). Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan nonformal dan memperoleh ijazah setara (Hasbullah, 2017).

2. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kebijakan mendukung penyelenggaraan PAUD sebagai upaya untuk memberikan akses pendidikan awal bagi anak-anak sebelum masuk ke pendidikan formal. PAUD bertujuan untuk membangun fondasi perkembangan anak yang berkualitas (Tilaar, 2012).

3. Pelatihan Keterampilan

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Tenaga Kerja menyelenggarakan berbagai program pelatihan keterampilan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja, seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dan program pelatihan vokasi (UNESCO, 2011).

4. Layanan Pendidikan Berbasis Komunitas

Kebijakan ini melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal, seperti program keaksaraan, kursus keterampilan, dan kelompok belajar. Komunitas berperan aktif dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan (La Belle, 2000).

5. Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar

Kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran di luar kurikulum formal, sekaligus mendorong kolaborasi antara pendidikan formal dan nonformal (Kemdikbud, 2020).

6. Program Beasiswa Pendidikan

Berbagai bentuk beasiswa, termasuk bagi lulusan pendidikan nonformal, dirancang untuk melanjutkan pendidikan formal sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf pendidikan mereka (OECD, 2019).

7. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kebijakan ini berfokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pengelola pendidikan nonformal melalui pelatihan, sertifikasi, dan program peningkatan kapasitas lainnya (Rogers, 2004).

8. Digitalisasi Pendidikan Nonformal

Peningkatan akses pendidikan nonformal melalui platform digital, termasuk pembelajaran berbasis daring yang semakin berkembang selama pandemi Covid-19, telah membuka akses lebih luas bagi masyarakat (World Bank, 2021).

9. Kerjasama dengan Organisasi Internasional dan Swasta

Pemerintah menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi internasional dan sektor swasta untuk mendukung program-

program pendidikan nonformal, termasuk penyediaan dana, pelatihan, dan sumber daya (UNESCO, 2016).

10. Promosi Pendidikan Nonformal

Kebijakan ini berfokus pada kampanye dan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan nonformal untuk masyarakat, guna mendorong partisipasi dan kesadaran akan manfaat pendidikan nonformal (Hasbullah, 2017).

D. Penyelenggara Pendidikan Nonformal di Indonesia

Penyelenggaraan pendidikan nonformal di Indonesia melibatkan berbagai tokoh dan lembaga, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Menurut Sudjana (2010), keberhasilan pendidikan nonformal sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, pendidik, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengelola program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

- a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan dan program pendidikan nonformal di tingkat nasional, termasuk pengembangan kurikulum dan pembiayaan.
- b. Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PM) secara khusus menangani program pendidikan nonformal, seperti program paket A, B, dan C, serta pendidikan anak usia dini (Hasbullah, 2017).

2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dinas pendidikan bertanggung jawab dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi implementasi kebijakan pendidikan nonformal di daerah (Tilaar, 2012).

3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM berperan aktif dalam menyediakan program pendidikan nonformal, seperti kursus keterampilan, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan bagi kelompok rentan. La Belle (2000) menekankan bahwa peran LSM penting dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan penyelenggaraan pendidikan.

4. Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama

Tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama turut mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan nonformal serta berperan sebagai fasilitator sosial (Rogers, 2004).

5. Pendidik dan Instruktur Pendidikan Nonformal

Instruktur kursus, guru PAUD, dan fasilitator program keterampilan memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran. Keberhasilan pendidikan nonformal bergantung pada kompetensi pendidiknya (Sudjana, 2010).

6. Pengusaha dan Sektor Swasta

Pengusaha dan lembaga swasta berkontribusi dalam program pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri, serta bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas tenaga kerja (OECD, 2019).

7. Organisasi Internasional

Organisasi internasional seperti UNESCO dan UNICEF mendukung program pendidikan nonformal melalui bantuan teknis, finansial, dan penelitian kebijakan (UNESCO, 2016).

8. Komunitas dan Kelompok Belajar

Masyarakat lokal dalam bentuk kelompok belajar dan komunitas menjadi penggerak dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal yang kontekstual dengan kebutuhan setempat (Hasbullah, 2017).

E. Metode Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Indonesia

Metode penyelenggaraan pendidikan nonformal di Indonesia beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta konteks sosial budaya. Menurut Sudjana (2010), metode dalam pendidikan nonformal harus fleksibel, kontekstual, dan mengutamakan pengalaman belajar langsung sesuai kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan:

1. Pembelajaran Berbasis Komunitas

Metode ini melibatkan masyarakat dalam proses belajar mengajar. Program pendidikan dirancang berdasarkan kebutuhan dan karakteristik komunitas setempat. Rogers (2004) menegaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas sangat efektif karena mendorong partisipasi aktif masyarakat.

2. Pembelajaran Kolaboratif

Metode ini melibatkan kerja sama antara peserta didik dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau proyek bersama. Menurut Johnson & Johnson (1999), pembelajaran kolaboratif meningkatkan interaksi sosial dan keterampilan berpikir kritis.

3. Pembelajaran Mandiri

Pendidikan nonformal sering memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar secara mandiri melalui modul, buku, atau platform online. Knowles (1984) menjelaskan bahwa kemandirian belajar adalah inti dari andragogi, yang menekankan peran aktif orang dewasa dalam proses belajarnya.

4. Kursus dan Pelatihan Keterampilan

Kursus praktis seperti menjahit, memasak, atau otomotif sangat relevan dengan dunia kerja. Tilaar (2012) menekankan pentingnya pendidikan keterampilan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup masyarakat.

5. Metode Praktik Lapangan

Banyak program nonformal mengandalkan pengalaman praktis, seperti magang atau kerja praktek. Kolb (1984) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman memungkinkan peserta didik menginternalisasi pengetahuan lebih mendalam.

6. Diskusi dan Tanya Jawab

Metode ini membangun pemahaman melalui dialog terbuka. Menurut Brookfield (1987), diskusi kelompok memperkuat keterampilan reflektif dan berpikir kritis peserta.

7. Pendidikan Berbasis Proyek

Peserta mengerjakan proyek nyata yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Thomas (2000) menekankan bahwa pembelajaran berbasis proyek meningkatkan motivasi sekaligus keterampilan problem solving.

8. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Dalam era digital, TIK menjadi sarana penting. Menurut Bates (2015), pemanfaatan teknologi memperluas akses pendidikan nonformal dan meningkatkan fleksibilitas belajar.

9. Tutoring atau Bimbingan Belajar

Interaksi langsung antara tutor dan peserta mendukung pemahaman individual. Sudjana (2010) menyatakan bahwa bimbingan personal membantu peserta dengan kebutuhan khusus dalam proses belajarnya.

10. Pendidikan Keaksaraan

Program keaksaraan berfokus pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. UNESCO (2016) menekankan bahwa literasi merupakan fondasi utama untuk pemberdayaan masyarakat.

11. Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan seni, olahraga, dan budaya mendukung pengembangan keterampilan non-akademik. Menurut Hidayat (2013), kegiatan ekstrakurikuler dalam pendidikan nonformal meningkatkan kreativitas dan pembentukan karakter.

F. Sumber Pendanaan

Metode penyelenggaraan pendidikan nonformal di Indonesia beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta konteks sosial budaya. Menurut Sudjana (2010), metode dalam pendidikan nonformal harus fleksibel, kontekstual, dan mengutamakan pengalaman belajar langsung sesuai kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan:

1. Anggaran Pemerintah

- a. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara): Pemerintah pusat mengalokasikan dana melalui anggaran pendidikan di APBN. Dana ini digunakan untuk program-program seperti Paket A, B, C, serta PAUD. Tilaar (2012) menyebutkan bahwa peran negara melalui APBN penting untuk menjamin pemerataan akses pendidikan.
- b. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah): Pemerintah daerah juga menyediakan dana melalui APBD. Menurut Mulyono (2010), alokasi APBD mencerminkan kebutuhan lokal dan menjadi strategi penting dalam mendukung program pendidikan nonformal berbasis daerah.

2. Program Hibah dan Bantuan

Kementerian dan lembaga pemerintah memberikan hibah atau bantuan langsung untuk pengembangan infrastruktur, pelatihan, atau penyediaan materi. Menurut Arcaro (1995), dukungan ini merupakan bagian dari upaya manajemen mutu pendidikan yang melibatkan berbagai sumber daya.

3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan NGO

Banyak LSM mendapat dana dari donor internasional atau yayasan. Rogers (2004) menekankan bahwa peran LSM penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sumber pendanaan yang fleksibel.

4. Bantuan Internasional

Organisasi internasional seperti UNESCO, UNICEF, dan Bank Dunia turut mendukung pendidikan nonformal melalui pendanaan dan asistensi teknis. UNESCO (2016) menyatakan bahwa kemitraan global memperkuat kapasitas pendidikan di negara berkembang, termasuk Indonesia.

5. Sektor Swasta

Perusahaan swasta dapat berkontribusi melalui CSR. Menurut Porter & Kramer (2011), CSR yang diarahkan pada pendidikan mampu meningkatkan keberlanjutan program sekaligus membangun hubungan positif dengan masyarakat.

6. Biaya dari Peserta Didik

Beberapa program nonformal membebankan biaya pendaftaran atau kursus. Menurut Knowles (1984), kemandirian peserta didik dalam membiayai pendidikan mencerminkan prinsip andragogi yang menekankan tanggung jawab individu dalam proses belajar.

7. Sumbangan dan Donasi

Penggalangan dana dari masyarakat juga menjadi sumber penting. Brookfield (1987) menyebut bahwa partisipasi masyarakat dalam pembiayaan memperkuat rasa kepemilikan terhadap program.

8. Kegiatan Ekstrakurikuler dan Komersialisasi

Lembaga nonformal sering mengadakan pelatihan berbayar atau lokakarya. Hidayat (2013) menjelaskan bahwa

strategi ini bukan hanya untuk pemasukan, tetapi juga sarana memperluas layanan pendidikan.

G. Kelebihan dan kelemahan Penyelenggaran Pendidikan Nonformal di Indonesia Kelebihan

Aksesibilitas Lebih Luas, pendidikan nonformal dapat menjangkau masyarakat yang sulit mengakses pendidikan formal.

1. Kelebihan

a. Aksesibilitas Lebih Luas

Pendidikan nonformal dapat menjangkau masyarakat yang sulit mengakses pendidikan formal. Sudjana (2010) menegaskan bahwa pendidikan nonformal berperan sebagai solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang terpinggirkan oleh sistem pendidikan formal.

b. Fleksibilitas Waktu dan Tempat

Peserta dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan jadwal mereka. Menurut Rogers (2004), fleksibilitas adalah ciri khas pendidikan nonformal yang memungkinkan masyarakat belajar sesuai kebutuhan dan kondisi lokal.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Pendidikan nonformal memberikan keterampilan yang langsung dapat diterapkan dalam dunia kerja, meningkatkan kemampuan ekonomi dan sosial masyarakat. Tilaar (2012) menyatakan bahwa pendidikan nonformal berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi tantangan global.

2. Kelemahan

a. Kualitas yang Tidak Merata

Standar pendidikan nonformal masih bervariasi, sehingga kualitasnya tidak konsisten antar lembaga. Menurut Hidayat

(2013), variasi kualitas ini sering terjadi karena belum adanya sistem akreditasi yang seragam pada pendidikan nonformal.

b. Kurangnya Akreditasi dan Pengakuan

Beberapa program pendidikan nonformal tidak mendapatkan pengakuan yang setara dengan pendidikan formal, baik di dunia kerja maupun dalam pendidikan tinggi. Knowles (1984) menambahkan bahwa keterbatasan legitimasi ini menjadi hambatan dalam mengembangkan pendidikan nonformal secara optimal.

c. Keterbatasan Sumber Daya

Banyak lembaga pendidikan nonformal yang kurang memiliki sumber daya memadai untuk menyediakan pendidikan berkualitas. Menurut Brookfield (1987), keterbatasan pendanaan dan tenaga pengajar berdampak langsung pada kualitas pembelajaran yang diberikan.

Penyelenggaraan pendidikan nonformal di Indonesia memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses pendidikan, meskipun mereka tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal. Dalam konteks ini, pendidikan nonformal menjadi solusi atas berbagai kendala pemerataan pendidikan di Indonesia, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau yang terhambat oleh faktor sosial ekonomi (UNESCO, 2016).

H. Analisis Studi Komparatif PNF Indonesia dengan Negara Lain

Pendidikan Nonformal (PNF) di Indonesia memainkan peran penting dalam menyediakan akses pendidikan di luar jalur formal, khususnya bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Seperti yang dikemukakan oleh Sudjana (2010), pendidikan nonformal berfungsi sebagai jalur alternatif yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang

tidak terpenuhi oleh pendidikan formal. Untuk memahami efektivitas dan inovasi dalam penyelenggaraan PNF, penting untuk melakukan analisis komparatif dengan negara lain (Coombs & Ahmed, 1974).

Studi komparatif pendidikan nonformal di Indonesia dengan negara-negara di Benua Asia memberikan wawasan penting mengenai keberagaman pendekatan dan praktik yang diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan di kawasan tersebut. Pendidikan nonformal, menurut Rogers (2004), sangat kontekstual dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan sosial, ekonomi, serta budaya di masing-masing negara.

1. Model Pendidikan Nonformal

Di Indonesia, pendidikan nonformal dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta berbagai lembaga swasta dan komunitas. Program-programnya beragam, mulai dari pembelajaran untuk anak putus sekolah hingga pelatihan keterampilan untuk dewasa. Senada dengan itu, Smith (2021) menegaskan bahwa pendidikan nonformal berfungsi sebagai sarana pemberdayaan sosial-ekonomi melalui pengembangan keterampilan praktis.

2. Tujuan dan Fokus

Tujuan utama pendidikan nonformal di Indonesia adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi kelompok marjinal serta pengembangan keterampilan praktis yang dapat meningkatkan lapangan kerja (UNESCO, 2015). Di negara lain seperti Bangladesh dan Jepang, pendidikan nonformal difokuskan pada pemberdayaan perempuan, anak-anak, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja (Ahmed, 2017).

3. Kualitas dan Standar

Kualitas pendidikan nonformal di Indonesia masih menjadi tantangan, dengan variasi signifikan dalam sistem dan kurikulum. Hal ini diperkuat oleh pandangan Nurhadi (2020) yang menyatakan bahwa ketidakseragaman standar menjadi

salah satu hambatan utama dalam peningkatan mutu pendidikan nonformal di Indonesia.

4. Pendanaan dan Dukungan

Pembiayaan pendidikan nonformal di Indonesia dapat bervariasi, sering kali bergantung pada dana dari pemerintah daerah, lembaga donor, atau sumbangan swasta. Menurut Bray (2003), ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal dapat melemahkan keberlanjutan program pendidikan nonformal.

5. Inovasi dan Teknologi

Meskipun ada beberapa inisiatif berbasis teknologi, adopsi teknologi dalam pendidikan nonformal di Indonesia masih terbatas. Sementara itu, Singapura berhasil mengintegrasikan teknologi untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat (Tan, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pendidikan nonformal di Indonesia.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa pendidikan nonformal di berbagai negara Asia memiliki fokus dan pendekatan yang beragam. Meskipun Indonesia memiliki banyak potensi, masih ada tantangan dalam hal kualitas, regulasi, dan dukungan. Pembelajaran dari model negara lain, seperti Korea Selatan dan Singapura, dapat menjadi rujukan bagi Indonesia untuk meningkatkan sistem pendidikan nonformal (Jarvis, 2010).

Pendidikan di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional, meskipun berbagai upaya reformasi dan inovasi telah dilakukan. Kesenjangan mutu antara wilayah perkotaan dan pedesaan, akses pendidikan yang belum merata, serta rendahnya kompetensi literasi dan numerasi peserta didik menjadi isu mendasar yang memerlukan perhatian serius. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang besar untuk mempercepat pemerataan dan peningkatan kualitas pembelajaran melalui inovasi pendidikan berbasis teknologi,

kolaborasi lintas sektor, dan pemberdayaan komunitas belajar. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu membangun sinergi berkelanjutan agar pendidikan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka partisipasi sekolah, tetapi juga pada pembentukan karakter, keterampilan abad ke-21, dan kemandirian belajar. Dengan arah kebijakan yang inklusif, pemerataan sumber daya, serta komitmen kuat terhadap transformasi pendidikan, Indonesia berpotensi mewujudkan sistem pendidikan yang berkeadilan, adaptif, dan berdaya saing global di masa depan.

BAB III

Pendidikan Nonformal di Jepang

Studi komparatif di bidang pendidikan Nonformal antara Jepang dan negara-negara Asia lainnya didorong oleh kebutuhan untuk memahami berbagai pendekatan, praktik, dan kebijakan dalam pendidikan yang tidak terstruktur ini. Menurut Rogers (2019), pendidikan nonformal di Asia berkembang secara beragam sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Jepang, dengan pengalamannya yang luas dalam pengembangan pendidikan Nonformal, menawarkan model yang dapat dianalisis untuk mengeksplorasi efektivitas program yang mendukung pengembangan keterampilan hidup dan pemberdayaan masyarakat (Gibbons, 2019).

Di sisi lain, negara-negara Asia memiliki konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, yang dapat memberikan wawasan mengenai tantangan dan keberhasilan dalam implementasi pendidikan Nonformal. Hal ini sejalan dengan pandangan Jarvis (2010) bahwa studi komparatif memungkinkan transfer praktik terbaik antarnegara, terutama dalam konteks pembelajaran sepanjang hayat. Melalui studi komparatif ini, diharapkan terdapat pemahaman yang lebih dalam mengenai

faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan pendidikan Nonformal di berbagai negara, serta potensi transfer pengetahuan yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Nonformal secara keseluruhan.

Jepang memiliki sistem pendidikan yang mapan, namun pendidikan Nonformal menjadi semakin penting seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, perhatian terhadap pendidikan Nonformal meningkat untuk memastikan bahwa individu memiliki keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan (Tan, 2018).

Jepang menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk populasi yang menua, urbanisasi, dan pengangguran. Pendidikan Nonformal menjadi solusi untuk meningkatkan keterampilan kerja, mendukung partisipasi masyarakat, dan mengatasi isu-isu sosial seperti penyalahgunaan zat dan isolasi sosial. Menurut Ogawa (2020), budaya Jepang yang menekankan pada *lifelong learning* dan kolektivisme sangat mendukung pertumbuhan pendidikan Nonformal, terutama dalam program berbasis komunitas. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam program-program lokal serta keinginan individu untuk terus belajar dan berkembang.

Pemerintah Jepang telah mengakui pentingnya pendidikan Nonformal dan mengembangkan berbagai kebijakan untuk mendukungnya. Ini termasuk pendanaan untuk program-program pendidikan Nonformal yang membantu orang dewasa, meningkatkan keterampilan kerja, serta memberdayakan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Yamaguchi (2017), kebijakan publik Jepang menempatkan pendidikan Nonformal sebagai strategi penting dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi modern. Studi komparatif dalam pendidikan Nonformal di Jepang mencakup berbagai faktor yang saling berhubungan, termasuk perkembangan pendidikan, kebijakan pemerintah, tantangan sosial, dan konteks budaya. Melalui studi ini, diharapkan dapat ditemukan inovasi dan solusi yang dapat

memperkuat sistem pendidikan Nonformal, baik di Jepang maupun di negara-negara Asia lainnya.

A. Kebijakan Pendidikan Sosial (Pendidikan Nonformal) dan Kominkan

Kebijakan pendidikan Nonformal di Jepang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal. Menurut Yamaguchi (2017), kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan keterampilan serta kapasitas individu agar selaras dengan tuntutan sosial dan ekonomi.

1. Pengakuan dan Dukungan Pemerintah

Pemerintah Jepang secara resmi mengakui pentingnya pendidikan Nonformal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pendidikan nasional mencakup strategi untuk memperluas akses pendidikan, termasuk pendidikan Nonformal, dan memberikan dukungan kepada berbagai lembaga yang menyelenggarakan program-program ini (Ogawa, 2020).

2. Pendidikan Sepanjang Hayat

Salah satu prinsip utama dari kebijakan pendidikan Nonformal adalah pembelajaran sepanjang hayat. Pemerintah mendorong individu dari berbagai usia untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan, yang mencakup pelatihan profesional, kursus bahasa, dan program keterampilan hidup (Rohidi, 2018).

3. Pengembangan Kurikulum yang Fleksibel

Kebijakan pendidikan Nonformal mengutamakan pengembangan kurikulum yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individu dan masyarakat. Rogers (2019) menekankan bahwa fleksibilitas kurikulum adalah kunci keberhasilan

pendidikan Nonformal, karena memungkinkan adaptasi terhadap kebutuhan lokal.

4. Komunitas dan Keterlibatan Sosial

Pemerintah mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah lokal, dan masyarakat untuk menciptakan program pendidikan Nonformal yang relevan. Menurut Jarvis (2010), partisipasi komunitas merupakan faktor penentu dalam memastikan keberlanjutan program pendidikan Nonformal.

5. Pendanaan dan Sumber Daya

Kebijakan pendidikan Nonformal juga mencakup pendanaan untuk program-program yang diusulkan oleh masyarakat dan lembaga lokal. Hal ini sejalan dengan temuan Gibbons (2019), yang menunjukkan bahwa pendanaan publik dan swasta merupakan elemen vital untuk menjamin keberlanjutan pendidikan Nonformal.

6. Pelatihan dan Pengembangan Pengajar

Kebijakan ini mencakup pengembangan kapasitas pengajar dalam pendidikan Nonformal. Pemerintah dan lembaga pendidikan berusaha untuk memberikan pelatihan bagi instruktur agar mereka dapat menyampaikan materi yang relevan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta (Tan, 2018).

7. Program Khusus

Jepang juga mengembangkan program-program khusus dalam pendidikan Nonformal, misalnya untuk pemberdayaan perempuan, pendidikan bagi penyandang disabilitas, dan pelatihan keterampilan untuk imigran. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap inklusi sosial dalam pendidikan (Ogawa, 2020).

8. Pengukuran dan Evaluasi

Kebijakan pendidikan Nonformal di Jepang juga mencakup dukungan untuk evaluasi dan pengukuran dampak program-program Nonformal. Menurut Yamaguchi (2017), evaluasi diperlukan untuk menjaga kualitas sekaligus mengarahkan perbaikan kebijakan.

9. Integrasi dengan Pendidikan Formal

Kebijakan pendidikan Nonformal bertujuan untuk menciptakan keterhubungan dengan pendidikan formal, sehingga individu yang mengikuti pendidikan Nonformal dapat mendapatkan pengakuan dan kesempatan melanjutkan pendidikan lebih tinggi (Rogers, 2019).

Kebijakan pendidikan Nonformal di Jepang mencerminkan komitmen negara untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembelajaran yang fleksibel, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang mendukung partisipasi masyarakat dan kolaborasi antara berbagai pihak, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang terdidik dan berdaya saing.

B. Sejarah Pendidikan sosial (pendidikan nonformal) dan Kominkan

Jepang sebagai negara maju memiliki sejarah perjalanan pendidikan yang khas, khususnya dalam pendidikan sosial (social education) atau yang dalam Bahasa Jepang dikenal sebagai shakai kyoiku, yang di Indonesia dikenal dengan pendidikan luar sekolah. Pada tahun 2007, berdasarkan Perpres No.17, konsep ini diubah menjadi pendidikan nonformal. Diterapkannya konsep pendidikan sosial diharapkan mampu mengubah budaya belajar masyarakat secara revolusioner (Maruyama, 2006). Menurut Yamaguchi (2017), perkembangan pendidikan sosial sangat pesat sejak mendapatkan pengesahan

pada tahun 1949 hingga disusunnya Lifelong Learning Promotion Law pada tahun 1990.

Salah satu bentuk kegiatannya adalah Kominkan. Kominkan berdiri satu tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II dan telah berkembang selama hampir enam dekade (Maruyama, 2006; Ogawa, 2020). Dengan demikian, Kominkan didirikan sekitar tahun 1946, lebih tua empat tahun dari Undang-Undang Pendidikan Sosial yang resmi.

Kominkan didirikan dan disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat Jepang sebagai wujud kepedulian pemerintah akan pentingnya rekonstruksi bidang pendidikan untuk mengembalikan kejayaan Jepang sebagai negara yang berdaulat dan demokratis (Yamaguchi, 2017). Pemerintah Jepang pada saat itu menganggap bahwa rekonstruksi pendidikan melalui sekolah atau pendidikan anak-anak tidaklah cukup, sehingga diperlukan model pendidikan yang mampu menyatu dan melayani seluruh kebutuhan pendidikan masyarakat. Model pendidikan orang dewasa dan pendidikan masyarakat dianggap mampu memenuhi kebutuhan ini, termasuk program-program keterampilan bagi orang dewasa (Rogers, 2019).

Pada saat itulah konsep *citizens' public halls* (Kominkan) direkomendasikan oleh pemerintah sebagai fasilitas pendidikan sosial di setiap pemerintahan kota (*city*), dengan harapan Kominkan dapat membangun dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kepercayaan diri masyarakat Jepang (Maruyama, 2006; Ogawa, 2020). Hal ini menegaskan peran pendidikan nonformal dalam mendukung pembangunan kapasitas masyarakat secara luas dan berkelanjutan.

C. Tujuan Kominkan

Kominkan (*Citizens' Public Halls*) merupakan pusat kegiatan belajar orang dewasa dan masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan/keahlian, hobi, atau bakat yang difasilitasi oleh pemerintah Jepang (Maruyama, 2006). Sejalan dengan desentralisasi pendidikan (*Chiho Bunken*

Ikkatsu-ho, Decentralization Law), pengelolaan dan fasilitasi Kominkan menjadi tanggung jawab pemerintah kota, sehingga Kominkan lebih independen meskipun pada awalnya pemerintah kota menerima bantuan anggaran dari pemerintah pusat dan prefektur (Ogawa, 2020). Beberapa tujuan Kominkan sebagai berikut:

1. Memperkenalkan demokrasi secara partisipatif di tengah masyarakat Jepang,
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat Jepang untuk memperoleh pendidikan yang layak,
3. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Maruyama, 2006; Yamaguchi, 2017).

Kegiatan Kominkan pada saat itu lebih diarahkan pada program-program pendidikan dan keterampilan bagi orang dewasa (adult education) (Ogawa, 2020). Keberadaan Kominkan di tengah masyarakat diharapkan dapat:

1. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendidikan orang dewasa yang memadai,
2. Mampu memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan pemerintahan setempat,
3. Menjadi pusat interaksi sosial budaya masyarakat setempat (Rogers, 2019).

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pendidikan sosial menyebabkan definisi Kominkan terus disempurnakan, menyesuaikan kondisi masyarakat, daerah, model pengelolaan, dan integrasinya dengan sistem pendidikan formal (Tan, 2018). Peran Kominkan sebagai lembaga pendidikan sosial mengalami perubahan drastis, tercermin dari program-program baru dan aturan pemerintah kota berdasarkan revisi Social Education Law 2001 dan laporan *National Lifelong Learning Council* (Yamaguchi, 2017). Program baru mencakup:

1. Pendidikan keluarga bagi ibu-ibu muda
2. Pengembangan masyarakat sukarelawan
3. Sertifikasi tutor pendidikan orang dewasa

4. Pendidikan karier bagi orang dewasa sebagai sukarelawan
5. Berbagai tipe pembelajaran experiential learning lainnya (Rogers, 2019)

Dengan karakteristik tersebut, Kominkan dapat disebut sebagai lembaga pendidikan nonformal yang memberikan berbagai materi pembelajaran bagi masyarakat umum, khususnya orang dewasa, pemuda, dan anak-anak, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang menunjang karier, pekerjaan, sekolah, keluarga, dan kehidupan bermasyarakat (Maruyama, 2006; Ogawa, 2020).

Selanjutnya dipaparkan juga tujuan Kominkan mencakup:

1. Memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang mendukung karier, pekerjaan, sekolah, organisasi, keluarga, dan kehidupan bermasyarakat (human relations)
2. Memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dari segi sosial politik, teknologi, ekonomi, bisnis, maupun olahraga dan rekreasi
3. Menyediakan sumber informasi terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat
4. Memfasilitasi kegiatan masyarakat untuk pengembangan budaya tradisional dan modern Jepang (Yamaguchi, 2017; Tan, 2018)

D. Ciri-ciri Kominkan

Lembaga pendidikan Kominkan memiliki tiga ciri utama (Maruyama, 2006; National Kominkan Association, 2006):

1. Kominkan adalah institusi pendidikan yang tidak hanya menanamkan informasi khusus atau keterampilan kerja, tetapi juga memberikan berbagai informasi tambahan melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Contoh institusi serupa dapat ditemukan di Inggris melalui

- community center* dan adult education colleges, sedangkan di Indonesia terdapat PKBM dan SKB (Rogers, 2019).
2. Beberapa kegiatan Kominkan disesuaikan tidak hanya untuk tujuan pekerjaan, tetapi juga untuk membantu peserta didik dalam pencarian aktualisasi diri (self-actualization) dan makna hidup. Pendidikan di Kominkan ditujukan untuk meningkatkan tingkat budaya dan kualitas hidup individu (Tan, 2018).
 3. Kominkan bersifat inklusif dan terbuka bagi semua kalangan, tidak terbatas pada pendidikan orang dewasa, tetapi juga melibatkan pemuda dan anak-anak. Keberhasilan pengelolaan Kominkan secara sukarela maupun oleh pemerintah kota menunjukkan respons positif masyarakat secara luas (Ogawa, 2020).

Berdasarkan karakteristik tersebut, asas dasar pengembangan Kominkan meliputi (National Kominkan Association, 2006; Maruyama, 2006):

1. Terjaminnya asas kebebasan dan persamaan hak, misalnya dengan menyediakan layanan penitipan anak bagi ibu muda yang ingin ikut serta dalam kegiatan.
2. Layanan yang disediakan Kominkan bersifat gratis, termasuk tutor, pelajaran, dan penggunaan fasilitas, mirip prinsip perpustakaan publik di Jepang (Rogers, 2019).
3. Otonomi sebagai institusi belajar dan pengembangan budaya, sehingga staf Kominkan dapat mengatur tutor dan pelajaran sesuai kebutuhan (Tan, 2018).
4. Memiliki staf yang kompeten, sehingga memungkinkan pelaksanaan program pendidikan baca-tulis, pendidikan bagi penyandang disabilitas, dan layanan untuk individu yang kehilangan kesempatan belajar sebelumnya (Ogawa, 2020).
5. Lokasi Kominkan harus mudah diakses, misalnya di setiap distrik Sekolah Menengah Pertama, agar masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan belajar (National Kominkan Association, 2006).

6. Sarana fisik memadai untuk mendukung akses bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas, termasuk akses jalan khusus, lift, toilet, dan transportasi (Maruyama, 2006).
7. Partisipasi masyarakat setempat diwajibkan dalam pengelolaan, termasuk pengawasan program oleh perwakilan komunitas melalui rapat, pertemuan informal, dan Dewan Manajemen Kominkan (National Kominkan Association, 2006).

E. Peran dan Fungsi Kominkan Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Tugas utama Kominkan adalah merencanakan berbagai program pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik (warga belajar) serta masyarakat lokal, sekaligus mendukung kebutuhan pemerintah kota (Maruyama, 2006; National Kominkan Association, 2006). Ruang lingkup program kegiatan bagi peserta didik atau masyarakat mencakup lima fungsi utama:

1. Pertemuan

Kominkan menyediakan fasilitas untuk kegiatan atau tempat berkumpul masyarakat. Di tempat ini, warga belajar dapat belajar bersama guna meningkatkan pembangunan daerahnya (Rogers, 2019).

2. Tempat Pembelajaran

Masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta sikap hidup yang lebih baik melalui pembelajaran bersama. Pembelajaran ini tidak terbatas pada jenis pengetahuan, keterampilan, atau kebudayaan tertentu, tetapi relevan dengan semua aspek kehidupan (Tan, 2018).

3. Jaringan

Kominkan membantu mengembangkan jaringan antar anggota masyarakat dan antar kelompok, sehingga terjadi

pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan keahlian yang bermanfaat bagi pembangunan daerah (Ogawa, 2020).

4. Pembangunan Masyarakat

Kominkan menyediakan tempat dan kesempatan bagi warga untuk membangun diri dan masyarakatnya (develop themselves and their communities), sesuai prinsip pendidikan sosial Jepang (Maruyama, 2006).

5. Penemuan Baru (Inovasi)

Kominkan mendorong penemuan hal-hal baru serta pengembangan temuan yang sudah ada di masyarakat. Hasil temuan ini diinformasikan kepada masyarakat luas sehingga menjadi sumber pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pihak lain (National Kominkan Association, 2006).

F. Kelompok Sasaran Kominkan

1. Anak-anak dan Remaja

Kominkan menawarkan program yang dirancang khusus untuk anak-anak dan remaja, termasuk kursus seni, olahraga, dan kegiatan budaya lainnya. Program ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, minat, dan kreativitas mereka di luar kurikulum sekolah formal (Maruyama, 2006; Tan, 2018).

2. Orang Dewasa

Bagi orang dewasa, Kominkan menyediakan berbagai kursus yang mencakup keterampilan praktis, seperti memasak, kerajinan tangan, dan teknologi, serta program pendidikan lanjutan yang mendukung pengembangan pribadi dan profesional (Rogers, 2019; Ogawa, 2020).

3. Lansia

Kominkan juga memiliki program yang ditujukan untuk lansia, termasuk kegiatan yang mempromosikan kesehatan, kebugaran, dan partisipasi sosial, guna meningkatkan kualitas

hidup mereka di usia lanjut (National Kominkan Association, 2006).

4. Kelompok Khusus

Beberapa Kominkan menawarkan program yang ditujukan untuk kelompok khusus, seperti komunitas minoritas atau individu dengan kebutuhan khusus, untuk memastikan inklusivitas dan aksesibilitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat (Maruyama, 2006; Tan, 2018).

G. Penyelenggara Kominkan

Terdapat dua model Kominkan yang ada di bawah pengawasan social education administration, yaitu urban Kominkan dan rural Kominkan. Kedua Kominkan ini sering disebut sebagai legal Kominkan karena pengelolaannya berada di bawah aturan administrasi pemerintah kota (Maruyama, 2006; National Kominkan Association, 2006). Namun, ada juga Kominkan yang didirikan oleh masyarakat, asosiasi sukarela, atau lembaga independen (non-pemerintah). Kominkan jenis ini dikenal sebagai autonomous Kominkan atau Kominkan mandiri. yang lebih fleksibel dalam menyelenggarakan program pendidikan nonformal sesuai kebutuhan komunitas (Tan, 2018; Rogers, 2019).

H. Program-Program Kominkan

Program-program yang dikembangkan Kominkan biasanya secara teratur disosialisasikan atau ditawarkan kepada seluruh masyarakat melalui berbagai media, seperti internet, televisi, radio, surat kabar, majalah yang diterbitkan Kominkan, atau buletin dan papan pengumuman (Maruyama, 2006; National Kominkan Association, 2006). Dengan media dan kriteria tersebut, Kominkan semakin menjadi pengikat bagi tumbuhnya kebiasaan dan budaya belajar masyarakat. Melalui konsep pembelajaran sepanjang hayat, masyarakat tidak hanya

tersadarkan akan pentingnya belajar, tetapi aktivitas belajar ini juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya, sehingga mendorong pemerintah kota dan Kominkan untuk mengembangkan fasilitas yang menumbuhkan minat dan kebiasaan belajar (Rogers, 2019).

Setiap program yang ditawarkan Kominkan selalu mendapat respons positif dari masyarakat. Program-program ini berbasis fasilitas yang tersedia dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran. Jumlah fasilitas untuk kegiatan Kominkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan museum dan perpustakaan yang disediakan untuk pendidikan sosial lainnya (Tan, 2018).

Berbagai program yang dikembangkan Kominkan antara lain:

1. Kegiatan pembelajaran keterampilan masyarakat, seperti memasak, tata rias rambut, tata boga, workshop teknologi, belajar berpidato, belajar Bahasa Jepang dan Bahasa Inggris, keterampilan bermain, menggambar bagi anak-anak, serta pendidikan kesehatan keluarga (Lifelong Learning in Japan, 1992).
2. Kursus keterampilan khusus, seperti kursus berdansa, seminar, upacara minum teh (tea ceremony/sado), kursus alat musik modern, serta privat lainnya. Kegiatan ini bersifat rekreatif dan sebagai pelengkap pendidikan formal atau pekerjaan (Maruyama, 2006).
3. Kegiatan olahraga dan kunjungan, termasuk study tour bagi keluarga dan masyarakat ke tempat rekreasi atau situs bersejarah (Rogers, 2019).
4. Program pelengkap pendidikan formal, seperti pendidikan setara Diploma khusus bahasa asing bagi siswa sekolah formal (Lifelong Learning in Japan, 1992).

Sebagian besar program Kominkan bersifat rekreatif, pengembangan hobi, gaya hidup, dan peningkatan pengetahuan tambahan, sementara program yang diarahkan untuk pengembangan karier dan profesi relatif terbatas. Dengan

demikian, pendidikan nonformal di Jepang banyak menekankan aktualisasi diri dan pengembangan diri (self-development) masyarakat (Tan, 2018). Fasilitas pendidikan sosial, khususnya Kominkan, jauh lebih banyak dibandingkan fasilitas pendidikan sosial lainnya, seperti perpustakaan, pusat pengembangan generasi muda, anak-anak, maupun museum. Data ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan nonformal dalam bentuk kegiatan belajar masyarakat mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah kota. Fasilitas ini tidak hanya melayani kebutuhan pendidikan sosial, tetapi juga mendukung sistem pendidikan formal (Maruyama, 2006; National Kominkan Association, 2006).

I. Metode Penyelenggaraan

Terdapat dua model Kominkan yang ada di bawah pengawasan social education administration, yaitu urban Kominkan dan rural Kominkan. Kedua Kominkan ini sering disebut sebagai legal Kominkan karena pengelolaannya berada di bawah aturan administrasi pemerintah kota (Maruyama, 2006; National Kominkan Association, 2006). Namun, ada juga Kominkan yang didirikan oleh masyarakat, asosiasi sukarela, atau lembaga independen (non-pemerintah). Kominkan jenis ini dikenal sebagai autonomous Kominkan atau Kominkan mandiri. yang lebih fleksibel dalam menyelenggarakan program pendidikan nonformal sesuai kebutuhan komunitas (Tan, 2018; Rogers, 2019).

J. Sumber Pendanaan

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Jepang berasal dari berbagai sumber yang berbeda. Menurut Rogers (2019) dan Maruyama (2006), pendanaan ini melibatkan kombinasi antara dukungan pemerintah, sektor swasta, dan partisipasi masyarakat. Beberapa sumber utama pendanaan pendidikan Nonformal di Jepang antara lain:

1. Dana Pemerintah

- a. Pemerintah Pusat: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (MEXT) menyediakan dana untuk program pendidikan Nonformal, terutama yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat dan pendidikan orang dewasa. Dana ini digunakan untuk pelatihan dan pembelajaran berbasis komunitas (National Kominkan Association, 2006).
- b. Pemerintah Daerah: Pemerintah prefektur dan kotamadya juga menyediakan anggaran untuk pusat pembelajaran komunitas dan program peningkatan keterampilan masyarakat (Tan, 2018).

2. Biaya Pendaftaran dan Sumbangan

- a. Biaya Pendaftaran: Banyak program mengenakan biaya pendaftaran atau kuliah bagi peserta untuk mendukung operasional program (Rogers, 2019).
- b. Sumbangan dari Masyarakat: Beberapa pusat pendidikan menerima sumbangan dari individu, perusahaan, atau organisasi non-profit sebagai dukungan terhadap program pendidikan (Maruyama, 2006).

3. Kemitraan dengan Sektor Swasta

Sponsor dan donasi dari perusahaan mendukung program pendidikan Nonformal, baik melalui dana, fasilitas, maupun sumber daya manusia (Tan, 2018).

4. Pendanaan dari Organisasi Non-Pemerintah (NGO)

- a. Pendanaan Proyek: LSM mendapatkan dana untuk proyek tertentu dari hibah, sumbangan perorangan, atau dukungan pemerintah (National Kominkan Association, 2006).
- b. Program Internasional: Beberapa LSM menerima dukungan dari organisasi internasional yang fokus pada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat (Rogers, 2019).

5. Pendanaan Melalui Program Khusus

Pemerintah Jepang menyediakan hibah atau subsidi untuk mendukung program pendidikan Nonformal, khususnya yang ditujukan bagi kelompok marginal atau pengembangan keterampilan kerja (Maruyama, 2006).

6. Biaya Operasional dari Lembaga Pendidikan

Lembaga swasta seperti universitas atau pusat pelatihan mendanai program melalui biaya kuliah dan pendapatan dari berbagai aktivitas (Tan, 2018).

7. Pendapatan dari Kegiatan Eksternal

Banyak pusat pendidikan Nonformal menghasilkan pendapatan dari kegiatan tambahan seperti kursus spesial, seminar, atau pelatihan untuk kebutuhan tertentu (National Kominkan Association, 2006).

Keberagaman sumber pendanaan ini menciptakan fleksibilitas dan keberlanjutan program pendidikan Nonformal, memungkinkan program-program tersebut terus berkembang dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat (Rogers, 2019; Maruyama, 2006).

K. Kelebihan dan Kelemahan

1. Kelebihan Kominkan

- a. Pendidikan Sepanjang Hayat: Kominkan menyediakan kesempatan belajar bagi semua usia, dari anak-anak hingga lansia, mendukung konsep pendidikan sepanjang hayat (Maruyama, 2006; Rogers, 2019).
- b. Pendekatan Partisipatif: Program dirancang berdasarkan kebutuhan dan minat masyarakat setempat, memastikan relevansi dan efektivitas pembelajaran (National Kominkan Association, 2006).
- c. Fleksibilitas Program: Kegiatan yang ditawarkan bersifat fleksibel, memungkinkan peserta memilih sesuai minat dan

jadwal mereka, termasuk kursus seni, olahraga, dan keterampilan praktis (Tan, 2018).

- d. Pemberdayaan Komunitas: Kominkan berperan dalam pemberdayaan komunitas dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan warga, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup mereka (Rogers, 2019; Maruyama, 2006).

2. Kelemahan Kominkan

- a. Fokus Program Terbatas: Program pendidikan sosial di Jepang, khususnya yang diselenggarakan melalui Kominkan, kurang menekankan pada pendidikan dasar masyarakat dan pelatihan kejuruan. Implementasi program lebih menekankan pada budaya, gaya hidup (lifestyle), olahraga, rekreasi, dan kegiatan pembelajaran masyarakat lainnya (Narushima, 2004).
- b. Tantangan Partisipasi Masyarakat: Meskipun program dirancang untuk melayani kebutuhan masyarakat, beberapa Kominkan mengalami kesulitan dalam menarik partisipasi aktif warga. Kurangnya minat atau kesadaran akan manfaat pendidikan nonformal dapat mengurangi efektivitas program yang ditawarkan (National Kominkan Association, 2006).

L. Analisis Studi Komparatif Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Jepang dengan Negara Benua Asia

Studi komparatif dalam bidang pendidikan nonformal di Jepang dan negara-negara Asia lainnya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting. Berikut adalah beberapa poin yang bisa digunakan sebagai acuan untuk melakukan perbandingan:

1. Definisi dan Konsep Pendidikan Nonformal

Jepang: Pendidikan Nonformal diartikan sebagai program yang tidak terstruktur di luar sistem pendidikan formal, seperti

kelas keterampilan, kursus bahasa, dan pendidikan orang dewasa (Maruyama, 2006; Rogers, 2019). Negara-negara Asia Lainnya: Di India, misalnya, banyak program pendidikan Nonformal yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan keterampilan kerja (Narushima, 2004; Tan, 2018).

2. Tujuan dan Fokus Program

Jepang: Pendidikan Nonformal berkaitan dengan pengembangan keterampilan hidup, peningkatan kualitas hidup, dan partisipasi komunitas (Gibbons, 2019). Negara-negara Asia: Di Filipina, pendidikan Nonformal lebih banyak berfokus pada akses pendidikan bagi mereka yang tidak terjangkau sekolah formal (Rogers, 2019).

3. Infrastruktur dan Dukungan

Jepang: Infrastruktur baik, termasuk pusat pembelajaran komunitas dan program yang didanai pemerintah (National Kominkan Association, 2006). Negara-negara Asia: Beberapa negara menghadapi tantangan infrastruktur yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan Nonformal (Tan, 2018).

4. Metode Pengajaran

Jepang: Metode interaktif, mengutamakan diskusi dan kolaborasi antar peserta (Maruyama, 2006). Negara-negara Asia: Metode bervariasi; beberapa masih tradisional, sedangkan lainnya menerapkan metode modern (Rogers, 2019).

5. Keterlibatan Masyarakat dan Lembaga

Jepang: Keterlibatan masyarakat tinggi, dengan banyak LSM dan komunitas lokal berpartisipasi (National Kominkan Association, 2006). Negara-negara Asia: Keterlibatan masyarakat bervariasi; dukungan pemerintah dan organisasi internasional sering penting (Gibbons, 2019).

6. Dampak terhadap Masyarakat

Jepang: Pendidikan Nonformal berkontribusi pada masyarakat yang lebih terdidik dan koheren sosial (Maruyama, 2006). Negara-negara Asia: Dampak bervariasi; di beberapa negara lebih terbatas pada kelompok tertentu (Narushima, 2004).

7. Regulasi dan Kebijakan

Jepang: Adanya kebijakan pemerintah mendukung pendidikan Nonformal, termasuk pendanaan dan pelatihan pengajar (MEXT, 2018). Negara-negara Asia: Kebijakan Nonformal sering kurang teratur dan dukungan pemerintah terbatas (Rogers, 2019).

Studi komparatif ini memungkinkan pemahaman tentang perbedaan dan kesamaan pendekatan, tantangan, dan keberhasilan pendidikan Nonformal. Penelitian lebih lanjut dapat melibatkan analisis data rigor, wawancara dengan pengajar dan peserta, serta evaluasi dampak program terhadap masyarakat (Tan, 2018; Gibbons, 2019).

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

BAB IV

Pendidikan Nonformal di Filipina

Pendidikan adalah hak dasar yang harus diberikan kepada setiap individu (UNESCO, 2015). Secara umum, pendidikan terbagi menjadi tiga kategori utama: pendidikan formal, pendidikan Nonformal, dan pendidikan informal. Ketiga jenis pendidikan ini memiliki karakteristik, metode, dan tujuan yang berbeda, namun tetap saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan kualitas hidup manusia (Illeris, 2018).

Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan dalam lembaga pendidikan yang terstruktur, seperti sekolah dan universitas, yang mengikuti kurikulum tertentu dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sistematis (Bray, Adamson, & Mason, 2014). Pendidikan Nonformal (PNF), berbeda dengan pendidikan formal, tidak terikat pada kurikulum yang kaku dan lebih fleksibel dalam waktu, tempat, dan metode. PNF berfokus pada pemberian keterampilan hidup, pelatihan vokasional, dan pengembangan diri yang dapat dilaksanakan di luar lingkungan sekolah (Rogers, 2019).

Di Filipina, PNF memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pendidikan bagi mereka yang terpinggirkan atau tidak dapat mengakses pendidikan formal (Arceo, 2016). Pendidikan informal adalah bentuk pendidikan yang terjadi secara alami, di luar lembaga pendidikan formal, seperti yang terjadi dalam interaksi keluarga, masyarakat, atau pengalaman sehari-hari (Livingstone, 2001).

Di Filipina, pendidikan Nonformal memiliki peran strategis, karena negara ini menghadapi tantangan besar dalam memastikan seluruh warga negara, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang mampu, memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan (Arceo, 2016). PNF menyediakan kesempatan bagi individu untuk belajar keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, baik dari segi sosial maupun ekonomi (Rogers, 2019).

Pendidikan Nonformal di Filipina diatur dan diselenggarakan oleh pemerintah melalui kebijakan yang fleksibel, yang bertujuan untuk menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal (UNESCO, 2015). Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana PNF diselenggarakan di Filipina, mulai dari sejarah, kebijakan, bentuk penyelenggaraan, hingga analisis komparatif dengan negara lain (Bray, Adamson, & Mason, 2014).

A. Sejarah Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Filipina

Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (PNF) di Filipina memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik (Arceo, 2016; Rogers, 2019). Filipina, sebagai negara yang pernah dijajah oleh Spanyol dan Amerika, memiliki sistem pendidikan yang dulunya sangat bergantung pada pendidikan formal (Salazar, 2009). Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya populasi, menjadi jelas bahwa pendidikan formal tidak dapat menjangkau seluruh

lapisan masyarakat, terutama mereka yang terpinggirkan (UNESCO, 2015).

1. Awal Mula Pendidikan Nonformal di Filipina

Pada masa kolonial, pendidikan di Filipina hampir sepenuhnya bersifat formal, dengan sedikit perhatian terhadap pendidikan Nonformal (Salazar, 2009). Setelah kemerdekaan Filipina pada tahun 1946, kebutuhan untuk mengembangkan sistem pendidikan yang inklusif dan dapat diakses oleh lebih banyak orang menjadi semakin mendesak (Arceo, 2016). Pada tahun 1970-an, pemerintah Filipina mulai menyadari bahwa banyak anak dan orang dewasa di daerah pedesaan dan kumuh tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Selain itu, sistem pendidikan formal juga tidak selalu memberikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja (Rogers, 2019). Pada tahun 1970-an, berbagai inisiatif pendidikan Nonformal mulai muncul untuk menjawab kebutuhan ini. Lembaga Pendidikan Dewasa didirikan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi orang dewasa yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Pada waktu yang sama, kelompok-kelompok non-pemerintah (NGO) mulai berperan aktif dalam mengembangkan program-program pendidikan Nonformal, yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keterampilan hidup (Arceo, 2016).

2. Perkembangan Program Pendidikan Nonformal

Pada tahun 1980-an, pemerintah Filipina melalui Department of Education (DepEd) mulai mengembangkan Alternative Learning System (ALS) sebagai bagian dari kebijakan pendidikan nasional. ALS dirancang untuk menjangkau individu yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, seperti anak putus sekolah, pekerja dewasa yang membutuhkan pelatihan keterampilan baru, dan kelompok-kelompok marginal lainnya (Rogers, 2019). Di tahun-tahun berikutnya, ALS berkembang pesat dan menjadi program pendidikan Nonformal yang paling penting di Filipina. Program ini menawarkan berbagai kursus

yang bisa diikuti oleh peserta didik di luar waktu sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar hingga pelatihan keterampilan vokasional. Pendekatan yang lebih fleksibel ini membantu mengatasi masalah ketidaksetaraan pendidikan di Filipina, di mana banyak individu, terutama di daerah pedesaan dan daerah terpencil, tidak dapat mengakses sekolah formal karena keterbatasan geografis dan ekonomi (Arceo, 2016; UNESCO, 2015).

B. Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Filipina

Kebijakan pendidikan Nonformal di Filipina terutama difokuskan pada Alternative Learning System (ALS) yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan (DepEd) (Rogers, 2019; Arceo, 2016). ALS adalah program pendidikan yang fleksibel, yang memungkinkan peserta didik untuk mengejar pendidikan di luar sistem formal. Program ini bertujuan untuk menjangkau mereka yang tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal, seperti anak-anak yang putus sekolah, orang dewasa yang ingin belajar keterampilan baru, dan kelompok masyarakat yang kurang terlayani (UNESCO, 2015).

Beberapa kebijakan utama yang terkait dengan PNF di Filipina adalah sebagai berikut:

1. Alternative Learning System (ALS)

ALS adalah kebijakan utama yang dirancang untuk menyediakan pendidikan yang setara dengan pendidikan dasar dan menengah bagi mereka yang tidak dapat mengikuti sekolah formal. Dalam ALS, peserta didik memiliki kebebasan untuk memilih program yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu literasi, matematika dasar, keterampilan hidup, atau pelatihan vokasional (Rogers, 2019).

2. Kebijakan untuk Kelompok Marginal

Pemerintah Filipina juga mengembangkan kebijakan yang mendukung pendidikan bagi kelompok-kelompok marginal, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah terpencil. Program-program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara kelompok-kelompok tersebut dengan masyarakat umum (Arceo, 2016).

3. Undang-Undang Alternatif Sistem Pembelajaran (Republic Act No. 9155)

Undang-undang ini diberlakukan untuk menegaskan pentingnya pendidikan Nonformal dalam sistem pendidikan Filipina. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan program ALS dan memastikan bahwa program tersebut dapat beroperasi di seluruh wilayah Filipina, dengan tujuan memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua warga negara (Salazar, 2009). Kebijakan PNF ini didukung oleh berbagai lembaga dan organisasi internasional, seperti UNESCO dan Asian Development Bank (ADB), yang bekerja sama dengan pemerintah Filipina untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan program pendidikan Nonformal (UNESCO, 2015; ADB, 2017).

C. Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Filipina

Penyelenggaraan PNF di Filipina sangat beragam, karena ditujukan untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan kebutuhan yang berbeda. Bentuk- bentuk penyelenggaraan ini antara lain:

1. Program Literasi

Banyak program pendidikan Nonformal di Filipina yang berfokus pada pengembangan literasi, khususnya bagi orang dewasa yang tidak mendapatkan pendidikan formal. Program ini mencakup pelatihan membaca, menulis, dan berhitung dasar. Selain itu, beberapa program juga mengajarkan keterampilan

tambahan, seperti keterampilan teknologi informasi (IT) yang sangat penting di era digital ini.

2. Pelatihan Keterampilan Vokasional

Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan yang dapat langsung diterapkan dalam dunia kerja, seperti pelatihan menjahit, memasak, mekanik, dan lain-lain. Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan keterampilan masyarakat yang terpinggirkan dan membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha mereka sendiri.

3. Kursus Pendidikan Dewasa

Kursus-kursus ini dirancang untuk membantu orang dewasa yang ingin melanjutkan pendidikan mereka. Program ini sering kali mencakup pendidikan dasar dan menengah, yang dapat dijalani secara fleksibel.

4. Program Pendidikan Komunitas

Pendidikan Nonformal di Filipina juga dilaksanakan dalam komunitas, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Program-program ini sering kali berfokus pada pemberdayaan wanita, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kesadaran sosial di tingkat komunitas.

D. Kelompok Sasaran Pendidikan Nonformal di Filipina

Pendidikan Nonformal (PNF) di Filipina dirancang untuk melayani kelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, serta mereka yang memerlukan pendidikan tambahan atau pelatihan khusus untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam konteks ini, kelompok sasaran pendidikan Nonformal di Filipina sangat beragam, termasuk anak-anak yang putus sekolah, orang dewasa, perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat lainnya yang terpinggirkan oleh sistem pendidikan formal. Kelompok Sasaran Utama PNF di Filipina:

1. Anak-Anak yang Putus Sekolah

Salah satu kelompok utama yang menjadi sasaran pendidikan Nonformal di Filipina adalah anak-anak yang putus sekolah. Banyak faktor yang menyebabkan anak-anak ini terlepas dari sistem pendidikan formal, termasuk kemiskinan, kesulitan transportasi, masalah keluarga, atau ketidakmampuan untuk mengikuti sistem pendidikan yang kaku. PNF, melalui program seperti Alternative Learning System (ALS), memungkinkan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan mereka dalam bentuk yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi mereka. Statistik dan Dampak: Mengutip data dari DepEd dan lembaga terkait lainnya, anak-anak yang putus sekolah mencapai jumlah yang signifikan di Filipina, terutama di daerah pedesaan. Meskipun banyak dari mereka kembali ke sekolah.

Melalui program ALS, tantangan untuk memastikan kelanjutan pendidikan mereka tetap besar. Strategi Penyuluhan dan Pemberdayaan: Program PNF membantu meningkatkan literasi dan keterampilan dasar bagi anak-anak putus sekolah dengan menyediakan modul pendidikan yang disesuaikan dengan usia dan kebutuhan mereka.

2. Orang Dewasa yang Memerlukan Pendidikan Keterampilan

Pendidikan Nonformal di Filipina juga berfokus pada orang dewasa yang membutuhkan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Banyak orang dewasa di Filipina yang tidak memiliki pendidikan formal yang memadai dan memerlukan keterampilan untuk bekerja atau memulai usaha mereka sendiri. PNF menyediakan kursus vokasional yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keterampilan yang relevan dan praktis, seperti pelatihan di bidang teknisi, tata boga, perawatan kesehatan, dan lainnya. Pelatihan dan Sertifikasi: Banyak dari program pelatihan ini dilengkapi dengan sertifikasi yang diakui, memberi para peserta kesempatan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau

membangun usaha mereka sendiri. Program-program ini sangat penting dalam membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup keluarga.

3. Perempuan dan Kelompok Marginal

Perempuan, khususnya di daerah pedesaan dan miskin, adalah salah satu kelompok yang sangat diuntungkan dengan adanya pendidikan Nonformal di Filipina. Banyak perempuan di daerah ini tidak memiliki akses ke pendidikan formal atau terlambat memulai pendidikan mereka karena alasan budaya dan sosial. Program PNF memungkinkan perempuan untuk memperoleh keterampilan yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga mereka dan meningkatkan posisi mereka dalam masyarakat. Kesetaraan Gender dalam PNF: Program pendidikan Nonformal sering kali memperkenalkan topik pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, membantu mengurangi hambatan sosial yang menghalangi perempuan untuk mengakses pendidikan formal.

4. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah kelompok lain yang juga mendapat manfaat besar dari program PNF di Filipina. Pendidikan Nonformal menawarkan akses ke kursus keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Aksesibilitas dan Inklusi: PNF juga membantu memperkenalkan teknologi dan metode pembelajaran yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, yang memungkinkan mereka untuk mengakses pendidikan tanpa batasan fisik atau sensorik.

5. Masyarakat Pedesaan dan Terpencil

Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan terpencil Filipina seringkali terpinggirkan dalam sistem pendidikan formal karena keterbatasan infrastruktur dan jarak dari sekolah-sekolah. Program PNF sangat penting bagi mereka, dengan

menyediakan kursus dan pelatihan yang disesuaikan dengan kehidupan di pedesaan dan kebutuhan ekonomi lokal. Program Pembelajaran Berbasis Komunitas: Salah satu pendekatan yang efektif untuk mencapai masyarakat pedesaan adalah dengan menyelenggarakan program pembelajaran berbasis komunitas, yang tidak hanya mengajarkan keterampilan tetapi juga memperkenalkan praktik sosial dan budaya yang relevan dengan kehidupan mereka.

E. Penyelenggara Pendidikan Nonformal di Filipina

Pendidikan Nonformal di Filipina melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraannya, baik pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi non-pemerintah (NGO). Peran masing-masing penyelenggara ini sangat krusial dalam memastikan bahwa PNF dapat diakses oleh semua kelompok sasaran dan memberikan dampak yang maksimal terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

1. Pemerintah (Departemen Pendidikan - DepEd)

Peran DepEd dalam PNF: Pemerintah Filipina, melalui Departemen Pendidikan (DepEd), adalah penyelenggara utama pendidikan Nonformal di negara ini. DepEd bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan, kurikulum, dan pengelolaan program- program seperti Alternative Learning System (ALS), yang dirancang untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak putus sekolah dan orang dewasa yang membutuhkan pelatihan keterampilan. Tantangan dalam Pengelolaan PNF: Walaupun DepEd berperan penting, seringkali terdapat tantangan dalam hal pendanaan, pelatihan tenaga pengajar, serta pengawasan dan evaluasi program yang efektif. Pemerintah berusaha untuk memperbaiki aspek-aspek ini melalui berbagai reformasi dan kolaborasi dengan lembaga internasional.

2. Lembaga Non-Pemerintah (NGO)

Peran NGO dalam PNF: Banyak organisasi non-pemerintah (NGO) yang aktif dalam menyelenggarakan program PNF di Filipina, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pemerintah. NGO sering kali berfokus pada pemberdayaan perempuan, peningkatan keterampilan untuk orang dewasa, dan pendidikan untuk anak-anak yang terabaikan. Kolaborasi dengan DepEd: Beberapa NGO bekerja sama dengan DepEd dalam menyelenggarakan program-program pendidikan Nonformal. Kolaborasi ini memperluas akses pendidikan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan memperkaya metode dan materi.

3. Sektor Swasta

Keterlibatan Sektor Swasta dalam PNF: Perusahaan-perusahaan besar di Filipina juga berperan dalam pendidikan Nonformal dengan memberikan pelatihan keterampilan atau program magang ri pembelajaran yang ditawarkan.

untuk orang dewasa. Perusahaan sering kali bekerja sama dengan DepEd atau NGO untuk memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Program Corporate Social Responsibility (CSR): Banyak perusahaan swasta di Filipina yang menggunakan CSR mereka untuk mendanai program-program pelatihan keterampilan dan pendidikan di komunitas-komunitas yang kurang terlayani.

4. Institusi Pendidikan dan Universitas

Peran Institusi Pendidikan: Beberapa universitas di Filipina juga menyelenggarakan program-program pendidikan Nonformal, terutama pelatihan keterampilan atau program untuk meningkatkan literasi. Kolaborasi antara universitas dan masyarakat setempat sangat penting dalam memperkuat penyelenggaraan PNF. Untuk memastikan keberhasilan pendidikan Nonformal di Filipina, kolaborasi antara pemerintah, NGO, sektor swasta, dan institusi pendidikan sangat penting. Sinergi ini membantu memperluas jangkauan program,

meningkatkan kualitas materi pembelajaran, serta mengurangi ketergantungan pada satu sumber daya saja.

F. Metode Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Filipina

Metode penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Filipina sangat bervariasi, tergantung pada kelompok sasaran, tujuan program, serta sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini lebih fleksibel dan adaptif dibandingkan dengan pendidikan formal, memungkinkan program untuk disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

1. Metode Pembelajaran Berbasis Komunitas

Salah satu metode yang paling efektif untuk penyelenggaraan PNF di Filipina adalah pembelajaran berbasis komunitas. Metode ini memungkinkan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dengan kehidupan mereka. Dalam model ini, pengajaran sering dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan pelatihan atau pengajaran oleh fasilitator terlatih.

2. Pembelajaran Daring (*E-Learning*)

Seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak program pendidikan Nonformal di Filipina yang mulai mengintegrasikan *e-learning* sebagai bagian dari metode penyelenggaraan. Program-program ini memungkinkan peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran melalui internet, yang sangat membantu bagi mereka yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau. *E-learning* memungkinkan pembelajaran dilakukan secara fleksibel dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja, membuat pendidikan lebih inklusif.

3. Metode Partisipatif

Program pendidikan Nonformal di Filipina sering kali menggunakan pendekatan partisipatif, yang mendorong peserta untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, peserta tidak hanya mendengarkan materi tetapi juga terlibat langsung dalam diskusi, praktek, dan kegiatan kelompok. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan kepemimpinan peserta.

4. Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning*)

Banyak program PNF di Filipina menggunakan project-based learning sebagai metode utama. Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk bekerja dalam proyek nyata yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Misalnya, mereka bisa terlibat dalam proyek yang mengajarkan keterampilan bertani, menjahit, atau membuat produk lokal. Keuntungan Pendekatan Proyek: Pendekatan ini mempersiapkan peserta didik untuk menerapkan keterampilan yang telah dipelajari dalam konteks nyata, sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi tantangan dunia kerja atau kehidupan sehari-hari.

G. Karakteristik Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Filipina

Penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Filipina memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari pendidikan formal. Karakteristik- karakteristik ini sangat penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

1. Fleksibilitas

Pendidikan Nonformal di Filipina sangat fleksibel dalam hal waktu dan tempat. Hal ini memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki jadwal yang sibuk atau tinggal di daerah terpencil untuk mengakses pendidikan dengan lebih

mudah. Program-program PNF sering kali diadakan pada waktu yang fleksibel, seperti malam hari atau pada akhir pekan.

2. Keterlibatan Komunitas

Pendidikan Nonformal sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembelajaran. Di Filipina, banyak program PNF diselenggarakan di tingkat komunitas, di mana warga lokal dapat berpartisipasi dalam proses belajar mengajar.

3. Fokus pada Pemberdayaan

Program pendidikan Nonformal di Filipina sangat berfokus pada pemberdayaan individu dan masyarakat. PNF bertujuan untuk tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian peserta didik.

4. Pelatihan Keterampilan Praktis

Sebagian besar program pendidikan Nonformal di Filipina berfokus pada pelatihan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dunia kerja. Kursus keterampilan ini sangat penting untuk membantu peserta meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka.

5. Kurikulum yang Disesuaikan

Kurikulum pendidikan Nonformal di Filipina lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Program-program ini dirancang untuk mengatasi kekurangan yang ada dalam sistem pendidikan formal, dengan menyediakan pelajaran yang lebih relevan dan langsung dapat diterapkan.

H. Sumber Pendanaan

Pendanaan adalah salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan pendidikan Nonformal di Filipina. Pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional

memainkan peran penting dalam mendanai program-program ini. Tanpa pendanaan yang memadai, banyak program pendidikan Nonformal yang tidak dapat berjalan efektif.

1. Pendanaan Pemerintah, pemerintah Filipina melalui Departemen Pendidikan (DepEd) menyediakan dana untuk menjalankan program pendidikan Nonformal, seperti Alternative Learning System (ALS). Selain itu, beberapa anggaran pendidikan juga dialokasikan untuk memberikan pelatihan keterampilan vokasional dan kursus bagi masyarakat yang kurang mampu.
2. Sumber Pendanaan dari NGO dan Organisasi Internasional, banyak organisasi non- pemerintah (NGO) dan lembaga internasional seperti UNESCO dan ADB yang turut serta mendanai program PNF. Dana dari organisasi ini sering kali digunakan untuk mendukung infrastruktur pembelajaran, pelatihan pengajar, serta penyediaan alat dan materi ajar.
3. Pendanaan Swasta, sektor swasta juga berperan dalam mendanai pendidikan Nonformal di Filipina, terutama dalam pelatihan keterampilan yang relevan dengan industri. Banyak perusahaan yang memberikan dana melalui program CSR untuk mendukung pelatihan keterampilan bagi komunitas lokal.
4. Tantangan Pendanaan, meskipun ada banyak sumber pendanaan untuk pendidikan Nonformal di Filipina, masih ada tantangan besar terkait dengan ketidakmerataan distribusi dana, minimnya investasi dalam program pelatihan yang lebih mendalam, dan kurangnya keberlanjutan pendanaan.

I. Kelebihan dan kelemahan Penyelenggaran Pendidikan Nonformal di Indonesia

Kelebihan Pendidikan Nonformal (PNF) di Filipina memiliki berbagai kelebihan dan kelemahan yang harus diperhatikan untuk meningkatkan efektivitasnya. Meskipun

telah memberikan banyak manfaat, program PNF tetap menghadapi tantangan besar.

Kelebihan:

1. **Fleksibilitas dalam Waktu dan Metode**, pendidikan Nonformal sangat fleksibel dan memungkinkan peserta untuk belajar sesuai dengan jadwal mereka. Ini membuatnya dapat diakses oleh kelompok-kelompok yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal.
2. **Mengurangi Kesenjangan Pendidikan**, PNF sangat efektif dalam mengurangi kesenjangan pendidikan antara kelompok kaya dan miskin, serta membantu anak-anak putus sekolah dan orang dewasa yang membutuhkan pelatihan keterampilan.
3. **Akses untuk Kelompok Terpinggirkan**, program PNF di Filipina telah memberikan akses pendidikan bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh pendidikan formal.

Kelemahan:

1. **Kurangnya Sumber Daya dan Infrastruktur**, salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya sumber daya yang memadai, baik dalam hal dana, fasilitas, maupun tenaga pengajar yang terlatih.
2. **Kualitas Pendidikan yang Tidak Merata**, karena penyelenggaraan PNF sering kali dilakukan di tingkat komunitas dengan sedikit pengawasan, ada variasi dalam kualitas pendidikan yang diberikan. Hal ini dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik.
3. **Tantangan dalam Evaluasi dan Pengawasan**, sistem evaluasi untuk program PNF sering kali tidak sekuat pendidikan formal, yang menyulitkan untuk mengukur dampak dan efektivitas program secara menyeluruh.

J. Analisis Studi Komparatif PNF Filipina dengan Negara Lain

Untuk mengembangkan analisis studi komparatif PNF, kamu dapat membandingkan sistem pendidikan Nonformal di Filipina dengan negara lain, seperti Thailand, India, atau Indonesia. Berikut adalah beberapa elemen yang bisa dibandingkan:

1. Pendekatan Kebijakan, Filipina mengandalkan Alternative Learning System (ALS), sementara Thailand memiliki model PNF terstruktur melalui Nonformal Education Division yang berfokus pada kursus keterampilan dasar.
2. Program dan Bentuk Penyelenggaraan, di Filipina, PNF banyak bergantung pada kursus vokasional dan keterampilan praktis, sedangkan di negara-negara lain seperti India, PNF lebih berfokus pada peningkatan literasi dan numerasi dasar.
3. Infrastruktur dan Pendanaan, negara-negara seperti Indonesia dan India menghadapi tantangan serupa dengan Filipina dalam hal pendanaan dan penyelenggaraan, dengan kontribusi besar dari lembaga swasta dan NGO untuk mendanai program-program PNF.
4. Keberhasilan dan Dampak, setiap negara memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda dalam mencapai tujuan pendidikan Nonformal mereka. Filipina memiliki keberhasilan dalam menjangkau kelompok marginal, namun masih perlu memperbaiki kualitas pengajaran dan sistem evaluasi.

Pendidikan Nonformal (PNF) di Filipina memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand, dan India. Meski setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda, PNF menjadi alat penting untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan, terutama bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau tidak dapat mengakses pendidikan formal.

Di Filipina, Alternative Learning System (ALS) berfungsi sebagai program utama pendidikan Nonformal yang dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada mereka yang putus sekolah atau tidak bisa mengikuti sistem pendidikan formal. Program ini menekankan fleksibilitas waktu dan metode, dengan pembelajaran berbasis komunitas yang memungkinkan peserta didik belajar di luar jam sekolah formal. Filipina juga dikenal dengan keberhasilan pendirian kursus keterampilan vokasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, membantu banyak individu memperoleh keterampilan yang langsung dapat diterapkan. Dalam hal ini, Filipina mengutamakan pendekatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan kemandirian, seperti yang tercermin dalam banyaknya program pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Sebagai perbandingan, Indonesia juga memiliki sistem PNF yang sangat mirip, terutama dengan program-program seperti Pendidikan Keaksaraan yang menysasar penduduk dewasa yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Indonesia cenderung menekankan pengembangan keaksaraan dasar dan keterampilan hidup untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Meski demikian, program-program PNF di Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait dengan kualitas pengajaran yang tidak merata dan sumber daya yang terbatas, terutama di daerah terpencil. Hal ini agak mirip dengan tantangan yang dihadapi Filipina, tetapi Indonesia mungkin sedikit tertinggal dalam hal pengintegrasian teknologi dalam pendidikan Nonformal.

Di Thailand, pendidikan Nonformal juga berkembang pesat melalui Nonformal Education Division, yang berfokus pada pendidikan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu dan komunitas. Salah satu perbedaan utama antara Thailand dan Filipina adalah struktur penyelenggaraan yang lebih terpusat di Thailand. Meskipun ada kemiripan dalam hal pemberdayaan komunitas dan fleksibilitas, Thailand lebih menekankan pada standar kurikulum yang terpusat dan evaluasi

yang lebih formal dibandingkan Filipina. Thailand juga memiliki kebijakan yang lebih terorganisir dalam hal integrasi pendidikan Nonformal dengan pendidikan formal, sementara Filipina lebih mengandalkan inisiatif berbasis komunitas yang lebih spontan dan fleksibel.

India, dengan populasi yang jauh lebih besar dan keragaman budaya yang lebih luas, menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal implementasi PNF. India memiliki berbagai program pendidikan Nonformal yang lebih berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan, seperti program National Literacy Mission dan pelatihan keterampilan untuk kelompok marginal. Namun, seperti di Filipina, India masih berjuang dengan tantangan pendanaan yang tidak merata dan kualitas pengajaran yang bervariasi. Di sisi lain, India memiliki lebih banyak dukungan dari sektor swasta dan NGO yang bekerja bersama pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, sebuah aspek yang juga terlihat di Filipina, namun dengan skala yang lebih terbatas.

Dengan demikian negara-negara seperti Filipina, Indonesia, Thailand, dan India memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjalankan pendidikan Nonformal, mereka semua mengakui pentingnya PNF dalam menyediakan akses pendidikan bagi mereka yang tidak bisa mengakses pendidikan formal. Filipina, dengan sistem ALS yang sangat fleksibel dan berbasis komunitas, memiliki keunggulan dalam hal keterjangkauan dan keberagaman program. Namun, tantangan terkait kualitas pengajaran dan ketidakmerataan pendanaan tetap menjadi masalah yang perlu diatasi, sama halnya dengan negara-negara lain. Penerapan teknologi, penguatan kualitas kurikulum, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas PNF di Filipina dan negara-negara lainnya.

Pendidikan Nonformal (PNF) di Filipina memainkan peran penting dalam menyediakan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau mereka yang tidak dapat

mengakses pendidikan formal. Dengan berbagai program seperti Alternative Learning System (ALS) dan pelatihan keterampilan vokasional, PNF berkontribusi signifikan dalam pengurangan angka putus sekolah, peningkatan keterampilan untuk orang dewasa, pemberdayaan perempuan, serta inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya.

Metode penyelenggaraan PNF di Filipina sangat fleksibel dan berbasis komunitas, memungkinkan pembelajaran yang lebih relevan dengan kehidupan peserta didik. Namun, tantangan utama yang dihadapi termasuk keterbatasan pendanaan, kualitas pengajaran yang tidak merata, serta kurangnya infrastruktur yang memadai di daerah terpencil. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, NGO, dan masyarakat lokal menjadi kunci dalam keberhasilan program PNF.

Selain itu, meskipun Filipina telah mencapai banyak keberhasilan dalam pendidikan Nonformal, ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, seperti sistem evaluasi yang kurang kuat dan pendanaan yang tidak merata. Sebagai perbandingan dengan negara lain, seperti Thailand, India, dan Indonesia, Filipina memiliki keunggulan dalam hal jangkauan kelompok sasaran yang lebih luas, namun masih perlu memperkuat kualitas pendidikan dan evaluasi.

Secara keseluruhan, PNF di Filipina menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun untuk mencapai tujuan yang lebih besar, perlu ada peningkatan dalam hal pendanaan, kualitas pengajaran, dan evaluasi program.

[illegible]

BAB V

Pendidikan Nonformal di Turki

Negara Turki menekankan prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sistem pendidikan Turki secara umum terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar dan menengah bersifat wajib dan gratis di bawah pengawasan pemerintah. Pendidikan tinggi di Turki menawarkan berbagai program studi yang diakui secara internasional, baik di universitas negeri maupun swasta. Secara keseluruhan, sistem pendidikan formal di Turki berkembang pesat dan memiliki kualitas yang semakin meningkat seiring dengan berbagai reformasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, pendidikan Nonformal (PNF) juga mendapatkan perhatian khusus karena berperan dalam meningkatkan kualitas SDM, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan global dan kemajuan teknologi.

Pendidikan Nonformal di Turki telah menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan dan keterampilan bagi berbagai kalangan

masyarakat. Latar belakang sosial dan ekonomi Turki, yang meliputi tingkat urbanisasi yang cepat, migrasi internal, kesenjangan wilayah, serta tingkat buta huruf yang relatif tinggi di beberapa daerah, mendorong pentingnya pendidikan Nonformal sebagai solusi praktis dan fleksibel. Selain itu, sebagai negara dengan populasi yang beragam, termasuk komunitas pengungsi yang besar dari Suriah dan negara-negara lain, Turki menghadapi tantangan besar dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan mampu merespons kebutuhan kelompok-kelompok yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal.

Pendidikan Nonformal di Turki dirancang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang terpinggirkan atau yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan hidup dan pekerjaan. Pemerintah Turki, melalui Kementerian Pendidikan Nasional (*Milli Eğitim Bakanlığı - MEB*), berperan aktif dalam merumuskan kebijakan pendidikan non-formal. Salah satu inisiatif utama dalam bidang ini adalah pendirian Pusat Pendidikan Rakyat (*Halk Eğitim Merkezleri*) di seluruh penjuru negara. Lembaga-lembaga ini menyediakan berbagai kursus yang mencakup pendidikan dasar, keterampilan vokasional, seni, budaya, serta pelatihan profesional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki akses yang cukup ke sekolah formal.

A. Sejarah PNF di Turki

Pendidikan Nonformal di Turki memiliki akar yang dalam yang terkait dengan perkembangan sosial dan ekonomi negara ini. Sejak awal abad ke-20, Turki telah menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki tingkat literasi di kalangan warga negara, terutama di wilayah pedesaan yang kurang berkembang. Pemerintah Turki, pada saat itu, mulai berfokus pada program literasi untuk orang dewasa sebagai upaya untuk mengurangi tingkat buta huruf yang tinggi. Salah satu program penting yang

dilaksanakan adalah melalui organisasi masyarakat sipil dan lembaga sosial.

Pendidikan Nonformal di Turki memiliki akar yang kuat terkait dengan perkembangan sosial dan ekonomi negara tersebut, terutama sejak awal abad ke-20 ketika pemerintah berupaya meningkatkan tingkat literasi, khususnya di wilayah pedesaan yang kurang berkembang. Pada masa itu, Turki menghadapi tantangan besar dengan tingkat buta huruf yang tinggi, sehingga pemerintah mulai fokus pada program literasi orang dewasa sebagai upaya pengurangan buta huruf. Salah satu cara pelaksanaannya adalah melalui peran organisasi masyarakat sipil dan lembaga sosial yang aktif dalam mengelola program-program pendidikan Nonformal tersebut

Pendidikan Nonformal di Turki dirancang untuk memberikan akses pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal, termasuk kelompok rentan dan komunitas pengungsi. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Milli Eğitim Bakanlığı - MEB), mendirikan Pusat Pendidikan Rakyat (Halk Eğitim Merkezleri) di berbagai daerah sebagai pusat kegiatan pendidikan Nonformal yang fleksibel dan praktis

Selain itu, gerakan sosial seperti Hizmet yang dipimpin oleh Fethullah Gülen juga berperan penting dalam pengembangan pendidikan Nonformal di Turki. Gerakan ini mendirikan banyak lembaga pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai keislaman dan ke-Turki-an, serta mengutamakan pelayanan profesional dengan tenaga pengajar berkualitas tinggi. Hizmet berkontribusi dalam memperluas akses pendidikan Nonformal melalui sekolah-sekolah dan program pembelajaran yang tersebar di dalam dan luar Turki

Secara historis, pendidikan di Turki mengalami reformasi besar sejak masa Mustafa Kemal Atatürk, yang menekankan pendidikan yang terpusat dan modern, termasuk pengembangan pendidikan Nonformal sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan Nonformal di Turki mencakup berbagai kegiatan di dalam dan luar sekolah yang bertujuan

membantu perkembangan fisik, mental, dan sosial peserta didik serta meningkatkan keterampilan hidup dan kerja masyarakat

Pada 1950-an, pemerintah Turki menyadari pentingnya meningkatkan literasi dan keterampilan teknis di kalangan warga negara, terutama di kalangan orang dewasa yang tidak memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan formal. Pada periode ini, pendidikan Nonformal mulai mendapatkan perhatian lebih besar. Pemerintah Turki membentuk lembaga pendidikan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan kursus kewirausahaan yang ditujukan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.

Pada tahun 1980-an, pendidikan Nonformal semakin formal dengan pembentukan Direktorat Pendidikan Nonformal di bawah Kementerian Pendidikan Nasional Turki. Lembaga ini memiliki tanggung jawab besar dalam merancang dan mengelola program-program yang menjangkau orang dewasa dan kelompok marginal, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan pekerja yang terpinggirkan oleh sistem pendidikan formal. Di tahun-tahun berikutnya, pendidikan Nonformal di Turki semakin berkembang, menyusul peluncuran kebijakan yang mendukung pendidikan berbasis keterampilan, yang bertujuan untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan daya saing negara dalam sektor global.

Pada awal 2000-an, pentingnya pendidikan Nonformal dalam konteks pembangunan negara di Turki semakin terlihat setelah Turki menandatangani Deklarasi Pendidikan untuk Semua (Education for All/EFA) yang diluncurkan oleh UNESCO. Kebijakan ini mendorong pemerintah Turki untuk memperluas akses pendidikan Nonformal, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan sulit mengakses pendidikan formal. Upaya ini bertujuan mengurangi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan inklusi sosial melalui program-program yang lebih fleksibel dan adaptif

Selain itu, di awal tahun 2010-an, Turki melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem pendidikan Nonformal. Reformasi ini mencakup modernisasi kurikulum dan metode

pelatihan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman. Reformasi tersebut juga sejalan dengan perubahan struktur pendidikan formal yang memperpanjang masa wajib belajar menjadi 12 tahun melalui sistem 4+4+4, yang membagi pendidikan menjadi tiga tingkatan: dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Modernisasi ini bertujuan menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil, produktif, dan kreatif, serta mengurangi ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Secara keseluruhan, reformasi dan kebijakan ini menunjukkan komitmen Turki dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan Nonformal sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, sekaligus mendukung pembangunan sosial dan ekonomi negara secara berkelanjutan.

B. Kebijakan Penyelenggaraan PNF di Turki

Landasan kebijakan pendidikan nonformal di Turki didasarkan pada kerangka hukum, sosial, dan ekonomi yang bertujuan memberikan akses pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal. Kebijakan ini dirumuskan dan diimplementasikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Milli Eğitim Bakanlığı - MEB) yang memfokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal melalui program seperti Pusat Pendidikan Rakyat (Halk Eğitim Merkezleri), pelatihan vokasional, dan kursus keterampilan bersifat fleksibel dan praktis.

Secara sosial, kebijakan pendidikan nonformal di Turki menanggapi tantangan seperti urbanisasi cepat, migrasi internal, kesenjangan wilayah, serta populasi pengungsi yang besar, dengan tujuan menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok-kelompok yang kurang terjangkau pendidikan formal. Pendidikan nonformal juga dirancang untuk memberdayakan masyarakat yang

terpinggirkan dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk kehidupan dan pekerjaan mereka.

Dari sisi ekonomi, kebijakan ini mendukung pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tuntutan dunia kerja modern melalui modernisasi kurikulum dan metode pelatihan yang adaptif, termasuk pelatihan vokasional yang terintegrasi dengan kebutuhan industry. Pemerintah juga berperan dalam penyediaan pendanaan, pelatihan guru, dan pengembangan infrastruktur pendidikan nonformal agar program-program tersebut dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Selain peran pemerintah, kebijakan pendidikan nonformal di Turki juga melibatkan lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi sosial sebagai mitra penting dalam pelaksanaan program, sehingga tercipta sinergi yang memperkuat ekosistem pendidikan nonformal di berbagai wilayah. Kebijakan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan program pendidikan nonformal.

Dengan demikian, landasan kebijakan pendidikan nonformal di Turki mencerminkan upaya terpadu untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan bagi seluruh masyarakat, khususnya mereka yang berada di luar jangkauan pendidikan formal, sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial dan ekonomi negara.

C. Bentuk Penyelenggaraan PNF di Turki

Pendidikan Nonformal di Turki diselenggarakan dalam berbagai bentuk yang fleksibel dan bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal. Berikut adalah bentuk-bentuk utama penyelenggaraan PNF di Turki:

1. Program Pelatihan dan Kursus

Pendidikan Nonformal mencakup kursus-kursus keterampilan, pelatihan vokasional, kursus bahasa, dan program pengembangan pribadi yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan praktis dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

2. Pusat Pendidikan Rakyat (Halk Eğitimi Merkezleri)

Salah satu bentuk utama penyelenggaraan PNF adalah melalui Pusat Pendidikan Rakyat yang tersebar di seluruh Turki. Pusat ini menyediakan berbagai kursus dan pelatihan yang bersifat fleksibel dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan pengungsi. Pusat ini berperan penting dalam meningkatkan literasi, keterampilan kerja, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pendidikan Pra-Sekolah Nonformal

Selain pendidikan pra-sekolah formal, terdapat juga program pendidikan pra-sekolah Nonformal yang bertujuan membantu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak-anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Program ini dapat berupa kelompok bermain dan taman kanak-kanak yang diselenggarakan oleh berbagai instansi terkait.

4. Pelatihan Kejuruan dan Pendidikan Vokasional Nonformal

Pendidikan Nonformal di Turki juga meliputi pelatihan kejuruan yang memberikan keterampilan praktis sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja. Program ini mendukung pengembangan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai, serta membantu mengurangi kesenjangan keterampilan di masyarakat.

5. Program Pendidikan untuk Kelompok Khusus

Turki menyediakan program pendidikan Nonformal yang ditujukan khusus bagi kelompok-kelompok tertentu, seperti pengungsi, migran internal, dan masyarakat di wilayah terpencil. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan dan pelatihan yang inklusif dan sesuai kebutuhan mereka.

6. Pendidikan Agama Nonformal

Selain pendidikan formal agama, terdapat juga pendidikan agama Nonformal yang diselenggarakan oleh lembaga swasta dan komunitas, yang meliputi pelajaran Al-Qur'an dan pendidikan keagamaan lainnya. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak mengikuti pendidikan agama formal untuk memperoleh pendidikan keagamaan.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Turki bersifat inklusif, fleksibel, dan beragam, dengan tujuan utama meningkatkan akses pendidikan, memberdayakan masyarakat, dan menjawab tantangan sosial-ekonomi yang ada di negara tersebut.

D. Kelompok Sasaran PNF di Turki

Pendidikan Nonformal di Turki dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang kurang terlayani oleh pendidikan formal, dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan, keterampilan, dan pemberdayaan sosial-ekonomi. Berikut adalah kelompok sasaran utama PNF di Turki:

1. Kelompok Muda dan Dewasa yang Tidak Terjangkau Pendidikan Formal

PNF memberikan kesempatan belajar bagi mereka yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal, terutama di wilayah pedesaan dan daerah yang kurang berkembang, guna meningkatkan literasi dan keterampilan hidup.

2. Perempuan, Terutama di Wilayah Pedesaan

Pendidikan Nonformal menaruh perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan, yang sering kali mengalami keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi. Program literasi dan pelatihan keterampilan membantu meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan kehidupan sosial.

3. Pengungsi dan Migran

Dengan populasi pengungsi yang besar, terutama dari Suriah, PNF menjadi jembatan penting untuk integrasi sosial dan ekonomi mereka melalui pembelajaran bahasa Turki, keterampilan kerja, dan literasi budaya.

4. Kelompok Rentan dan Terpinggirkan

Termasuk masyarakat di daerah terpencil, kelompok miskin, serta individu dengan keterbatasan fisik atau sosial yang membutuhkan akses pendidikan yang fleksibel dan inklusif.

5. Pekerja dan Individu yang Ingin Meningkatkan Keterampilan

PNF menyediakan pelatihan vokasional, kursus teknologi informasi, kewirausahaan, dan bahasa asing yang memungkinkan pekerja dan individu dewasa untuk meningkatkan kompetensi tanpa harus meninggalkan pekerjaan mereka.

Secara keseluruhan, pendidikan Nonformal di Turki berperan strategis dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui program yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok-kelompok yang kurang terlayani oleh pendidikan formal, mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan dan inklusif.

E. Metode Penyelenggaraan PNF di Turki

Penyelenggaraan Pendidikan nonformal di negara Turki dilakukan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Pendekatan Berbasis Keterampilan Praktis (Vokasional)

Pendidikan nonformal di Turki sangat berfokus pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat diterapkan langsung di dunia kerja. Kursus vokasional diadakan dalam berbagai bidang, seperti teknologi informasi, kuliner, pertanian, pariwisata, kerajinan tangan, dan lain-lain. Program ini menggunakan pendekatan yang sangat praktis, di mana peserta didik tidak hanya mendapatkan teori tetapi juga melakukan praktik langsung. Misalnya, pelatihan di bidang kerajinan tangan atau teknologi informasi menggabungkan teori dasar dengan pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

2. Pembelajaran Blended (Campuran)

Mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan tren digital, pendidikan non-formal di Turki juga memanfaatkan pendekatan blended learning, yaitu kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan online. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, memberikan fleksibilitas lebih besar terutama bagi mereka yang sibuk bekerja atau memiliki keterbatasan mobilitas.

3. Pelatihan Berbasis Komunitas

Pendidikan Nonformal di Turki banyak diselenggarakan dalam bentuk pelatihan berbasis komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat setempat. Pelatihan ini sering kali dilakukan di pusat-pusat komunitas atau tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat lokal. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan pendidikan kepada masyarakat dan menciptakan keterlibatan langsung antara penyelenggara pendidikan dan peserta.

4. Pendidikan Berbasis Kebutuhan (*Needs-Based Learning*)

Salah satu prinsip dasar dari pendidikan Nonformal di Turki adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kursus dan program pelatihan dirancang untuk menjawab kebutuhan praktis individu atau kelompok, baik dalam konteks pekerjaan, pengembangan diri, atau kebutuhan sosial. Program-program ini memungkinkan peserta untuk memilih pelatihan yang paling relevan dengan situasi mereka, seperti pelatihan komputer bagi pekerja dewasa atau kursus bahasa Turki bagi pengungsi.

F. Karakteristik penyelenggaraan PNF di Turki

Karakteristik dalam Pendidikan nonformal di negara Turki dapat dilihat sebagai berikut:

1. Fleksibilitas dalam Waktu dan Tempat

Salah satu karakteristik utama pendidikan Nonformal di Turki adalah fleksibilitasnya dalam hal waktu dan tempat penyelenggaraan. Program-program pendidikan Nonformal ini dirancang agar dapat diakses oleh individu dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau mobilitas. Kelas-kelas dan kursus sering diselenggarakan pada waktu yang tidak mengganggu rutinitas sehari-hari, misalnya pada sore atau akhir pekan, sehingga pekerja atau orang dewasa yang sudah berkeluarga tetap dapat mengakses pendidikan tersebut. Selain itu, penyelenggaraan program ini tidak terbatas pada ruang kelas formal. Kursus-kursus dapat diadakan di pusat komunitas, pusat pelatihan, bahkan secara online, yang mempermudah peserta untuk mengikuti pendidikan di tempat yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.

2. Pendidikan yang Relevan dengan Kebutuhan Pasar Kerja

Pendidikan Nonformal di Turki sangat berfokus pada peningkatan keterampilan praktis yang dibutuhkan di pasar

kerja. Kursus vokasional dan pelatihan keterampilan teknis yang disediakan bertujuan untuk mempersiapkan peserta agar siap bekerja dalam sektor-sektor yang dibutuhkan oleh industri. Misalnya, kursus dalam bidang teknologi informasi, kuliner, pariwisata, dan kerajinan tangan sangat populer karena mereka memberikan keterampilan yang langsung bisa diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Program ini dirancang dengan masukan dari dunia industri dan dunia kerja, sehingga materi yang diajarkan sesuai dengan perkembangan pasar kerja. Sertifikasi yang diberikan setelah mengikuti program pelatihan vokasional juga diakui secara nasional, membantu peserta untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

3. Inklusivitas dan Aksesibilitas

PNF di Turki sangat inklusif dan bertujuan untuk mengakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau kurang terlayani oleh sistem pendidikan formal. Program ini melayani orang dewasa yang belum mendapat pendidikan dasar, perempuan, pengungsi, kelompok miskin, dan orang dengan disabilitas. Pemerintah Turki melalui lembaga-lembaga seperti Pusat Pendidikan Rakyat (*Halk Eğitimi Merkezleri*) sangat aktif dalam memastikan bahwa pendidikan Nonformal dapat diakses oleh kelompok-kelompok ini dengan berbagai cara, baik melalui pengajaran bahasa, kursus keterampilan, ataupun program literasi. Hal ini juga mencakup daerah-daerah terpencil dan pedesaan di mana akses terhadap pendidikan formal terbatas.

4. Pendidikan Sepanjang Hayat (Lifelong Learning)

Pendidikan Nonformal di Turki mendorong prinsip pendidikan sepanjang hayat, yang menekankan pentingnya pembelajaran yang tidak terbatas pada usia muda saja, tetapi berlangsung sepanjang hidup seseorang. Program ini tidak hanya terbuka untuk mereka yang baru keluar dari sekolah atau universitas, tetapi juga bagi orang dewasa yang ingin mengembangkan keterampilan baru atau memperbarui

pengetahuan mereka. Kursus-kursus yang ditawarkan tidak hanya terbatas pada pelatihan keterampilan teknis, tetapi juga meliputi pelatihan pengembangan pribadi, keterampilan hidup, dan pengembangan profesional. Prinsip pendidikan sepanjang hayat ini memungkinkan individu untuk terus berkembang dalam berbagai aspek kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan, pengembangan pribadi, maupun interaksi sosial.

5. Pengembangan Program yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Program pendidikan Nonformal di Turki sering kali dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal atau komunitas yang terlibat. Program ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masyarakat setempat, serta tantangan ekonomi dan sosial yang mereka hadapi. Misalnya, di daerah pedesaan, kursus pelatihan pertanian atau kerajinan tangan sering kali ditawarkan, sementara di kota-kota besar, pelatihan di bidang teknologi informasi atau pariwisata lebih populer. Penyelenggaraan pendidikan Nonformal yang berbasis kebutuhan ini memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan pelatihan yang relevan dan langsung bermanfaat bagi kondisi sosial dan ekonomi mereka.

6. Kerjasama dengan Organisasi Lokal dan Internasional

Penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Turki melibatkan kerjasama dengan berbagai organisasi lokal, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta organisasi internasional. Dalam program-program seperti pelatihan untuk pengungsi, pemerintah Turki bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNICEF, UNHCR, dan Uni Eropa untuk menyediakan dukungan teknis dan keuangan yang diperlukan. Kerjasama ini memungkinkan pendidikan Nonformal di Turki untuk menjangkau lebih banyak kelompok sasaran, serta meningkatkan efektivitas dan kualitas program.

G. Sumber Pendanaan PNF di Turki

Pendanaan pendidikan Nonformal di Turki bersumber dari berbagai pihak dan mekanisme yang terstruktur guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program-program PNF. Berikut adalah sumber utama pendanaan PNF di Turki:

1. Anggaran Pemerintah Pusat

Pemerintah Turki melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Milli Eğitim Bakanlığı - MEB) menyediakan dana utama untuk pendidikan Nonformal. Alokasi anggaran ini mencakup pembiayaan operasional Pusat Pendidikan Rakyat (Halk Eğitim Merkezleri), pelatihan guru, pengembangan kurikulum, serta infrastruktur pendidikan Nonformal. Kebijakan pendanaan ini merupakan bagian dari anggaran pendidikan nasional yang mencapai sekitar 6,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan sekitar 16,2% dari total belanja pemerintah, dengan sebagian besar dialokasikan untuk pengeluaran rutin pendidikan.

2. Anggaran Pemerintah Daerah

Pemerintah provinsi dan kabupaten juga berkontribusi dalam pendanaan PNF, terutama dalam mendukung pelaksanaan program di tingkat lokal. Hal ini penting mengingat sistem pendidikan di Turki bersifat sentralistik tetapi tetap melibatkan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan.

3. Dukungan dari Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga Swasta

Organisasi non-pemerintah, lembaga sosial, dan sektor swasta turut memberikan kontribusi pendanaan maupun sumber daya lain untuk mendukung program pendidikan Nonformal, khususnya yang menyangkut kelompok rentan dan pengungsi.

4. Beasiswa dan Bantuan Keuangan

Turki menyediakan berbagai program beasiswa, seperti Türkiye Bursları, yang mendukung pelajar asing maupun warga lokal dalam melanjutkan pendidikan, termasuk pendidikan Nonformal yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan dan pelatihan vokasional.

5. Pendanaan Mandiri dan Partisipasi Masyarakat

Beberapa program PNF juga didukung oleh kontribusi masyarakat, seperti biaya pendaftaran kursus, donasi dari orang tua peserta didik, dan dukungan komunitas lokal yang berperan aktif dalam pelaksanaan pendidikan Nonformal.

H. Kelebihan dan Kelemahan PNF di Turki

Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh negara Turki dalam penyelenggaraan Pendidikan nonformal dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sistem Terstruktur dan Terintegrasi

Turki memiliki dua badan pendidikan yang mengelola pendidikan formal dan Nonformal secara terpisah namun terkoordinasi, yakni Kementerian Pendidikan Nasional untuk pendidikan dasar dan menengah serta Dewan Pendidikan Tinggi untuk jenjang universitas. Hal ini memungkinkan pengelolaan PNF yang lebih fokus dan terarah.

2. Akses yang Luas dan Inklusif

Pendidikan Nonformal di Turki diselenggarakan di berbagai tempat, termasuk tempat ibadah dan komunitas lokal, sehingga menjangkau kelompok yang sulit mengakses pendidikan formal seperti pengungsi, perempuan di pedesaan, dan kelompok rentan lainnya.

3. Fleksibilitas Kurikulum dan Metode Pembelajaran

Reformasi pendidikan di awal 2010 an memodernisasi kurikulum dan metode pelatihan PNF agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman, termasuk pelatihan vokasional yang terintegrasi dengan industry.

4. Peran Aktif Pemerintah dan Masyarakat Sipil

Pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil berperan aktif dalam penyelenggaraan PNF, seperti melalui Pusat Pendidikan Rakyat (Halk Eğitimi Merkezleri), yang menyediakan berbagai program pelatihan dan kursus bagi masyarakat.

5. Dukungan Teknologi dan Inovasi

Penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan Nonformal semakin berkembang, termasuk keterlibatan orang tua dalam memantau kegiatan belajar anak melalui sistem digital di sekolah-sekolah yang berkolaborasi dengan PNF.

Disamping itu tentunya penyelenggaraan Pendidikan nonformal di negara Turki juga memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut:

1. Ketimpangan Akses Pendidikan

Meskipun pendidikan dasar diwajibkan, masih terdapat kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Hal ini juga berdampak pada akses PNF yang belum merata

2. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Beberapa daerah masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan PNF secara optimal.

3. Tantangan Integrasi Pengungsi

Dengan populasi pengungsi yang besar, terutama dari Suriah, Turki menghadapi tantangan dalam menyediakan pendidikan Nonformal yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan khusus kelompok ini.

4. Keterbatasan Dana dan Ketergantungan pada Pemerintah

Pendanaan PNF sebagian besar bergantung pada anggaran pemerintah, sehingga ketergantungan ini bisa menjadi kendala jika alokasi dana tidak mencukupi atau tidak merata di seluruh wilayah.

5. Perbedaan Standar dan Kualitas Pendidikan

Variasi dalam kualitas program PNF di berbagai daerah menyebabkan tidak meratanya mutu pendidikan Nonformal, yang dapat mempengaruhi hasil pembelajaran dan relevansi keterampilan yang diperoleh peserta.

I. Analisis Studi Komparatif PNF Turki dengan Negara Lain

Studi komparatif pendidikan Nonformal (PNF) antara Turki dan negara lain menunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan yang penting dalam konteks kebijakan, pelaksanaan, dan tantangan yang dihadapi. Berikut adalah analisis utama berdasarkan studi komparatif tersebut:

1. Persamaan

a. Fokus pada Inklusi dan Akses Luas

Seperti banyak negara lain, Turki menempatkan pendidikan Nonformal sebagai instrumen penting untuk meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal, termasuk masyarakat di daerah terpencil, perempuan, dan pengungsi. Hal ini juga terlihat di negara-negara seperti Filipina dan Australia yang

menekankan inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat melalui PNF.

b. Peran Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil

Pemerintah Turki bersama lembaga masyarakat sipil aktif dalam penyelenggaraan PNF, mirip dengan praktik di negara lain yang mengandalkan sinergi antara sektor publik dan non-pemerintah untuk menjangkau berbagai kelompok sasaran.

c. Modernisasi Kurikulum dan Metode Pembelajaran

Turki melakukan reformasi besar dalam kurikulum dan metode pelatihan PNF agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sejalan dengan tren global yang menekankan keterampilan vokasional dan teknologi sebagai bagian dari pendidikan Nonformal.

2. Perbedaan

a. Landasan Ideologis dan Kebijakan

Sistem pendidikan Turki berlandaskan prinsip Kemalisme yang menekankan sekularisme dan modernisasi, berbeda dengan Indonesia yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila yang menggabungkan aspek agama dan modernitas. Perbedaan ini mempengaruhi pendekatan dan struktur pendidikan Nonformal di kedua Negara.

b. Tingkat Otonomi Akademik

Turki memberikan otonomi akademik yang lebih besar di tingkat universitas dibandingkan dengan beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Hal ini berdampak pada fleksibilitas dan inovasi dalam pengembangan program pendidikan Nonformal di tingkat tinggi.

c. Tantangan Ketimpangan dan Infrastruktur

Meskipun Turki telah berinvestasi besar dalam pendidikan, masih terdapat ketimpangan akses dan kualitas pendidikan

antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kondisi ini juga dialami oleh negara-negara lain, namun tingkat dan bentuk ketimpangan bisa berbeda tergantung konteks sosial-ekonomi masing-masing Negara.

d. Populasi Pengungsi dan Integrasi Sosial

Turki menghadapi tantangan unik dengan populasi pengungsi yang besar, terutama dari Suriah, sehingga pendidikan Nonformal juga berfungsi sebagai alat integrasi sosial dan ekonomi. Tantangan ini tidak selalu sama di negara lain yang menjadi objek studi komparatif.

J. Implikasi untuk Pengembangan PNF di Indonesia

Studi komparatif ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam mengembangkan PNF, seperti:

1. Menyaring praktik terbaik yang sesuai dengan konteks lokal tanpa meniru secara mentah.
2. Mengintegrasikan modernisasi kurikulum dan pelatihan vokasional yang adaptif terhadap kebutuhan industri dan masyarakat.
3. Memperkuat peran sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan PNF.
4. Mengatasi ketimpangan akses pendidikan dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas.

Dengan demikian, studi komparatif PNF Turki dengan negara lain memperlihatkan bahwa meskipun terdapat perbedaan konteks dan kebijakan, prinsip inklusivitas, modernisasi, dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan pendidikan Nonformal dalam menghadapi tantangan global dan lokal.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

BAB VI

Pendidikan Nonformal di Italia

Italia dikenal memiliki sistem pendidikan Nonformal yang berkembang dengan baik dan berfokus pada inklusivitas serta aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan Nonformal di Italia tidak hanya ditujukan untuk orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan, tetapi juga menjangkau berbagai kelompok seperti imigran, pekerja, dan mereka yang sulit mengakses pendidikan formal. Sistem ini memberikan peluang bagi individu untuk memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, dan berkontribusi pada perekonomian negara secara efektif.

Secara umum, pendidikan Nonformal di berbagai negara, termasuk Italia, berperan penting dalam menciptakan akses pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Pendidikan Nonformal menawarkan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh pendidikan formal dan mampu menjangkau kelompok terpinggirkan, seperti yang juga terlihat dalam konteks pendidikan Nonformal di Indonesia. Kolaborasi antara pendidikan formal dan Nonformal dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan menurunkan angka

putus sekolah, serta memperluas akses pendidikan secara inklusif

Pendidikan inklusif, yang menjadi fokus utama dalam pendidikan Nonformal, bertujuan untuk mengakomodasi keberagaman peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, serta mempromosikan akses yang setara dan partisipasi dalam pendidikan bagi semua pelajar. Pendekatan ini melibatkan kebijakan yang mendukung, pelatihan guru, penggunaan teknologi, dan kemitraan antara sekolah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat

Pentingnya pendidikan Nonformal di Italia dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang telah diterapkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan ini. Pemerintah Italia, melalui berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan, menyediakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas akses pendidikan kepada masyarakat. Selain itu, pendidikan Nonformal juga menjadi sarana untuk memperkuat integrasi sosial, terutama bagi kelompok marginal, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja Italia di pasar global.

Buku ini bertujuan mengkaji secara mendalam sistem pendidikan Nonformal di Italia dengan pembahasan meliputi beberapa aspek penting. Pertama, sejarah perkembangan pendidikan Nonformal di Italia yang menunjukkan bagaimana sistem ini tumbuh dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, termasuk imigran, pekerja, dan kelompok yang sulit mengakses pendidikan formal. Kedua, kebijakan yang diterapkan pemerintah Italia untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan Nonformal, yang menekankan inklusivitas dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya, buku ini akan membahas berbagai bentuk penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Italia, mulai dari kursus keterampilan hingga program pemberdayaan sosial yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup peserta. Kelompok sasaran yang diutamakan juga menjadi fokus, dengan

penekanan pada pemberian kesempatan belajar bagi orang dewasa, pekerja, dan kelompok marginal.

Metode pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan Nonformal di Italia akan diuraikan, termasuk pendekatan yang berbeda dari pendidikan formal, seperti fleksibilitas waktu, metode partisipatif, dan penyesuaian materi dengan kebutuhan peserta. Karakteristik khas pendidikan Nonformal yang membedakannya dari pendidikan formal juga akan dijelaskan, seperti sifatnya yang lebih terbuka, tidak berjenjang secara ketat, dan lebih menekankan pada pengembangan keterampilan praktis.

Terakhir, buku ini akan mengkaji tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan Nonformal di Italia, seperti pendanaan, pengakuan sertifikat, dan integrasi dengan sistem pendidikan formal, serta peluang yang muncul dari perkembangan teknologi dan kerjasama internasional. Pendekatan komprehensif ini diharapkan memberikan gambaran lengkap tentang peran strategis pendidikan Nonformal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di Italia.

Tidak hanya itu, untuk memberikan perspektif yang lebih luas, Buku ini akan melakukan studi komparatif antara pendidikan Nonformal di Italia dengan beberapa negara lainnya, seperti Indonesia, Jepang, Filipina, Thailand, dan Turki. Studi komparatif ini bertujuan untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam sistem pendidikan non-formal yang diterapkan di berbagai negara, serta untuk melihat bagaimana kebijakan dan praktik pendidikan Nonformal dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam di tiap negara.

Dengan demikian, diharapkan Buku ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sistem pendidikan Nonformal di Italia dan bagaimana sistem tersebut dapat diadaptasi atau diimplementasikan di negara lain, termasuk Indonesia, untuk memaksimalkan potensi pendidikan Nonformal dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya saing.

A. Sejarah PNF di Italia

Pendidikan Nonformal di Italia memiliki akar yang kuat dalam tradisi pendidikan inklusif yang berfokus pada kebutuhan masyarakat luas. Sejarahinya tidak bisa dilepaskan dari perubahan sosial-ekonomi yang terjadi sepanjang abad ke-20, terutama akibat perkembangan industri dan urbanisasi yang cepat. Pada masa itu, banyak pekerja dan anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak dapat mengakses pendidikan formal secara penuh karena harus membantu orang tua bekerja, sehingga pendidikan Nonformal muncul sebagai solusi untuk memberikan akses keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam dunia kerja.

Perkembangan pendidikan Nonformal di Italia ini berawal dari kebutuhan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tertinggal dalam sistem pendidikan formal, terutama di daerah pedesaan dan kalangan pekerja. Sistem ini berperan penting dalam memberikan kesempatan belajar bagi orang dewasa dan anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan dan berpartisipasi lebih efektif dalam perekonomian. Pendidikan Nonformal di Italia juga berkembang seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendukung inklusivitas dan akses pendidikan yang lebih luas, termasuk pembebasan biaya pendidikan dasar dan kewajiban belajar hingga usia tertentu.

Pada tahun 1940-an, pendidikan Nonformal di Italia memasuki momen penting dengan fokus pada pengembangan pelatihan keterampilan bagi orang dewasa. Hal ini didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi tingkat buta huruf yang masih tinggi, terutama di daerah pedesaan, di tengah perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi negara tersebut. Kesadaran bahwa kemajuan ekonomi dan keadilan sosial memerlukan akses pendidikan yang lebih inklusif menjadi pendorong utama pengembangan pendidikan Nonformal pada masa itu.

Salah satu momen penting dalam sejarah pendidikan Nonformal di Italia adalah pada tahun 1940-an, ketika negara ini

mulai fokus pada pengembangan pelatihan keterampilan untuk orang dewasa. Hal ini didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi tingkat buta huruf yang masih tinggi di kalangan masyarakat Italia, terutama di daerah pedesaan. Italia pada waktu itu mengalami perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi, dan masyarakat mulai menyadari bahwa untuk memajukan ekonomi dan membangun masyarakat yang lebih adil, akses pendidikan harus lebih inklusif.

Pada 1950-an dan 1960-an, Italia menyaksikan lahirnya berbagai inisiatif pendidikan Nonformal yang lebih terstruktur. Pemerintah mulai membentuk program-program pelatihan untuk orang dewasa yang bertujuan untuk mengurangi tingkat buta huruf dan meningkatkan keterampilan pekerja. Ini juga didorong oleh kebutuhan untuk membangun tenaga kerja yang terampil, mengingat Italia pada masa itu mengalami pertumbuhan industri yang pesat. Selain itu, pasca Perang Dunia II, banyak organisasi swasta dan gereja juga ikut serta dalam menyediakan pendidikan Nonformal bagi masyarakat yang kurang terlayani oleh sistem pendidikan formal.

Pendidikan Nonformal di Italia mulai berkembang lebih pesat pada akhir abad ke-20, dengan semakin banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang menyediakan kursus vokasional, pelatihan keterampilan, dan program pendidikan untuk orang dewasa. Program-program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan keterampilan hidup yang lebih luas, termasuk keterampilan sosial dan pribadi. Pada 1990-an, pemerintah Italia semakin memperkuat sistem pendidikan Nonformal melalui kebijakan yang mendukung penyelenggaraan kursus pelatihan bagi orang dewasa dan masyarakat marginal lainnya, termasuk imigran dan kelompok yang kurang terlayani.

Sejak tahun 1990-an, Italia mulai mengembangkan sistem pendidikan Nonformal yang lebih terintegrasi dengan pendidikan formal. Salah satu langkah penting adalah penciptaan program yang memberikan sertifikat atau pengakuan resmi atas keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan

Nonformal. Inisiatif ini membuka peluang bagi individu untuk meningkatkan kualifikasi mereka dan memperoleh akses ke pekerjaan yang lebih baik, sehingga pendidikan Nonformal tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai jalur yang diakui secara formal dalam sistem pendidikan dan pasar kerja Italia

Pada abad ke-21, dengan meningkatnya tantangan globalisasi dan perubahan pasar tenaga kerja, pendidikan Nonformal di Italia semakin diakui sebagai bagian integral dari sistem pendidikan negara. Fokus utama dari pendidikan Nonformal kini mencakup pemberdayaan individu untuk berpartisipasi dalam dunia kerja yang terus berubah dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berbasis pengetahuan. Pemerintah Italia terus mendukung berbagai inisiatif pendidikan Nonformal untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, dapat memperoleh keterampilan dan pendidikan yang diperlukan untuk berkembang di masyarakat yang lebih luas.

B. Kebijakan Penyelenggaraan PNF di Italia

Pendidikan Nonformal di Italia didukung oleh kebijakan yang menekankan inklusivitas dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal seperti anak-anak berkebutuhan khusus, imigran, dan pekerja dewasa. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada jalur formal, melainkan juga memberikan ruang bagi berbagai bentuk pembelajaran yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.

1. Kebijakan Inklusif dan Dukungan Pemerintah

Sejak tahun 1970-an, Italia menerapkan kebijakan pendidikan inklusif yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama di kelas umum dengan dukungan guru yang memiliki kompetensi khusus. Pemerintah menyediakan tenaga pendamping dan pelatihan bagi guru untuk

mengoptimalkan pencapaian pendidikan anak-anak tersebut. Kebijakan ini juga mencakup pembebasan biaya pendidikan hingga akhir pendidikan dasar dan kewajiban belajar hingga usia 16 tahun, sehingga menjamin akses pendidikan yang merata bagi semua anak di Italia.

2. Pengakuan dan Integrasi Pendidikan Nonformal

Sejak 1990-an, Italia mengembangkan sistem pendidikan Nonformal yang lebih terintegrasi dengan pendidikan formal. Program-program Nonformal mulai memberikan sertifikat atau pengakuan resmi atas keterampilan yang diperoleh, membuka peluang bagi individu untuk meningkatkan kualifikasi dan akses ke dunia kerja yang lebih baik. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam mengakui pendidikan Nonformal sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional.

3. Pendekatan Holistik dan Nilai-Nilai Pendidikan

Kebijakan pendidikan Nonformal di Italia juga menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual, kemanusiaan, dan rasa hormat dalam proses pembelajaran. Pendidikan Nonformal tidak hanya berorientasi pada pengembangan keterampilan teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesadaran sosial peserta didik agar pembelajaran berjalan harmonis dan sesuai dengan tujuan sosial yang lebih luas.

4. Perencanaan dan Pengelolaan

Penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Italia dilakukan dengan perencanaan yang matang, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan komunitas. Hal ini memastikan bahwa program pendidikan Nonformal dapat berjalan efektif, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berkontribusi pada pemberdayaan individu serta pembangunan sosial-ekonomi.

C. Bentuk Penyelenggaraan PNF di Italia

Pendidikan Nonformal di Italia diselenggarakan dalam berbagai bentuk yang fleksibel dan beragam, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dari berbagai latar belakang sosial dan usia. Meskipun konteks spesifik Italia tidak selalu sama persis dengan contoh di negara lain, secara umum bentuk-bentuk pendidikan Nonformal yang berkembang di Italia mencakup:

1. Pelatihan Keterampilan dan Kursus Praktis

Program pelatihan keterampilan yang ditujukan untuk orang dewasa dan pekerja guna meningkatkan kemampuan teknis dan profesional mereka. Kursus ini dapat berupa pelatihan komputer, bahasa asing, keterampilan teknis, dan kewirausahaan, yang memberikan sertifikat pengakuan resmi atas kompetensi yang diperoleh.

2. Program Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan Nonformal di Italia juga mencakup program yang memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara penuh untuk memperoleh kualifikasi setara, mirip dengan program kesetaraan di negara lain. Ini penting untuk menjangkau kelompok yang terpinggirkan, termasuk imigran dan pekerja dewasa.

3. Kegiatan Pembelajaran Seumur Hidup

Pendidikan Nonformal di Italia mendukung konsep pembelajaran sepanjang hayat dengan menyediakan berbagai program yang dapat diakses oleh individu di berbagai tahap usia dan kondisi sosial, termasuk pelatihan ulang dan pengembangan diri.

4. Lokakarya, Seminar, dan Diskusi Interaktif

Bentuk kegiatan yang menekankan partisipasi aktif peserta, diskusi, dan pembelajaran berbasis proyek atau simulasi untuk meningkatkan pemahaman praktis dan keterampilan sosial.

5. Pendidikan Inklusif dan Khusus

Program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus kelompok tertentu, seperti penyandang disabilitas, imigran, dan kelompok marginal lainnya, dengan pendekatan yang adaptif dan dukungan khusus.

6. Penggunaan Teknologi dan Pembelajaran Jarak Jauh

Pemanfaatan teknologi digital untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, memungkinkan peserta belajar kapan saja dan di mana saja, meningkatkan aksesibilitas pendidikan Nonformal.

Bentuk-bentuk penyelenggaraan ini mencerminkan fleksibilitas dan keberagaman pendidikan Nonformal di Italia yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan keterampilan teknis, tetapi juga pada pemberdayaan sosial dan peningkatan kualitas hidup peserta didik. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai spiritual, kemanusiaan, dan rasa hormat yang menjadi bagian dari filosofi pendidikan Nonformal di Italia.

D. Kelompok Sasaran PNF di Italia

Pendidikan nonformal di Italia dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan di luar jalur formal. Kelompok sasaran utama PNF di Italia meliputi:

1. Orang Dewasa yang Ingin Meningkatkan Keterampilan

PNF memberikan peluang bagi orang dewasa, terutama pekerja, untuk meningkatkan keterampilan teknis dan profesional mereka agar dapat bersaing di pasar kerja yang dinamis.

2. Imigran dan Kelompok Minoritas

Pendidikan Nonformal di Italia juga menysasar imigran dan kelompok minoritas yang seringkali mengalami kesulitan mengakses pendidikan formal, dengan program yang mendukung integrasi sosial dan peningkatan keterampilan.

3. Anak-anak dan Remaja dari Keluarga Kurang Mampu

Anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara penuh, misalnya karena kondisi ekonomi atau sosial, menjadi sasaran penting pendidikan Nonformal untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar.

4. Kelompok dengan Keterbatasan Akses Pendidikan Formal

Termasuk penyandang disabilitas dan mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang terlayani oleh sistem pendidikan formal, yang mendapat perhatian melalui program inklusif dan adaptif.

5. Masyarakat Umum yang Membutuhkan Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan Nonformal di Italia juga mendukung konsep pembelajaran seumur hidup, memberikan kesempatan belajar bagi siapa saja yang ingin mengembangkan diri di berbagai tahap kehidupan.

Kelompok sasaran ini mencerminkan komitmen Italia dalam menyediakan pendidikan yang inklusif dan merata, memastikan bahwa tidak ada lapisan masyarakat yang tertinggal dalam akses dan kesempatan pendidikan Nonformal.

E. Penyelenggara PNF di Italia

Pendidikan Nonformal di Italia diselenggarakan oleh berbagai aktor yang mencakup lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan swasta, asosiasi budaya, serta sektor bisnis. Keberagaman penyelenggara ini mencerminkan fleksibilitas dan pluralitas dalam pendekatan terhadap pendidikan Nonformal yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Masing-masing penyelenggara memiliki peran yang unik dan saling melengkapi dalam sistem pendidikan Nonformal di Italia.

1. Lembaga Pemerintah

Pemerintah Italia memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal melalui berbagai kementerian dan badan publik. Salah satu kementerian yang terlibat langsung adalah Kementerian Pendidikan, Universitas, dan Penelitian (*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca* atau MIUR). Kementerian ini bertanggung jawab untuk merancang kebijakan pendidikan yang mencakup pendidikan Nonformal, baik dalam hal pelatihan keterampilan bagi orang dewasa, integrasi sosial bagi imigran, maupun pemberdayaan masyarakat miskin.

Kementerian Pekerjaan dan Kebijakan Sosial (*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*) juga memiliki peran dalam mendanai dan mendukung penyelenggaraan pendidikan Nonformal di sektor pelatihan tenaga kerja. Melalui berbagai program, kementerian ini bekerja sama dengan lembaga pendidikan, perusahaan, dan asosiasi masyarakat untuk menyediakan pelatihan yang membantu pekerja memperoleh keterampilan yang relevan dengan pasar tenaga kerja.

Lembaga pemerintah lainnya yang terlibat dalam pendidikan Nonformal di Italia adalah Kementerian Kehakiman, yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program pendidikan bagi narapidana. Dalam sistem masyarakat Italia, pendidikan Nonformal sangat penting dalam memfasilitasi rehabilitasi sosial dan memberikan keterampilan yang dapat membantu narapidana setelah kembali ke masyarakat.

2. Lembaga Pendidikan Swasta

Selain lembaga pemerintah, lembaga pendidikan swasta juga memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Italia. Lembaga swasta ini mencakup universitas, lembaga pelatihan vokasional, dan lembaga pendidikan lainnya yang menawarkan berbagai kursus, pelatihan, dan sertifikasi di luar sistem pendidikan formal. Banyak dari lembaga ini mengkhususkan diri dalam memberikan pelatihan di bidang keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan di pasar tenaga kerja, seperti teknologi informasi, desain grafis, atau manajemen proyek.

Universitas di Italia juga sering kali terlibat dalam pendidikan Nonformal dengan menawarkan program pelatihan yang fleksibel, termasuk kursus malam atau kursus online. Banyak universitas yang bekerja sama dengan industri dan perusahaan untuk menciptakan kursus yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, universitas juga menyelenggarakan program pendidikan Nonformal bagi masyarakat umum, seperti kursus bahasa Italia, seni, dan humaniora.

3. Asosiasi Budaya dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Asosiasi budaya dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan penyelenggara penting dalam pendidikan Nonformal di Italia. Asosiasi ini sering kali menyediakan program-program pendidikan Nonformal yang berfokus pada pengembangan budaya, seni, dan keterampilan sosial. Program-

program ini biasanya diselenggarakan untuk kelompok-kelompok tertentu, seperti komunitas lokal, wanita, atau imigran, yang memerlukan pendekatan yang lebih terfokus untuk integrasi sosial.

Misalnya, banyak asosiasi yang menawarkan kursus keterampilan seni dan kerajinan tangan yang tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan bakat tetapi juga untuk memberdayakan individu dan menciptakan kesempatan ekonomi bagi mereka. Beberapa asosiasi juga menawarkan kursus yang membantu peserta untuk memperoleh keterampilan sosial dan emosional, yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berinteraksi dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial.

4. Perusahaan dan Sektor Industri

Perusahaan dan sektor industri di Italia juga memainkan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal, terutama dalam pelatihan vokasional dan pengembangan keterampilan tenaga kerja. Banyak perusahaan besar di Italia yang memiliki pusat pelatihan internal yang memberikan pendidikan Nonformal kepada karyawan mereka. Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial yang diperlukan dalam sektor tertentu, seperti otomotif, teknologi, atau manufaktur.

Selain itu, sektor swasta juga sering berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk menawarkan kursus pelatihan eksternal yang dapat diakses oleh individu yang ingin meningkatkan keterampilan mereka dalam dunia kerja. Kolaborasi ini sering kali memastikan bahwa kursus dan pelatihan yang diselenggarakan relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus berkembang.

5. Organisasi Internasional dan Proyek Bersama

Italia juga terlibat dalam berbagai proyek pendidikan Nonformal yang didanai oleh organisasi internasional, seperti Uni Eropa, PBB, dan UNESCO. Proyek-proyek ini sering kali

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan integrasi sosial bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau kurang terlayani, seperti migran, wanita, atau masyarakat miskin.

Beberapa program pendidikan Nonformal yang didanai oleh Uni Eropa memberikan dana kepada lembaga-lembaga pendidikan di Italia untuk menyelenggarakan pelatihan vokasional dan pendidikan keterampilan untuk pekerja yang terpinggirkan. Proyek ini juga bertujuan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam meningkatkan mobilitas dan akses pendidikan bagi masyarakat di seluruh Eropa.

F. Metode Penyelenggaraan PNF di Italia

1. Pembelajaran Berbasis Proyek

Salah satu metode yang umum digunakan dalam pendidikan Nonformal di Italia adalah pembelajaran berbasis proyek (project-based learning). Dalam pendekatan ini, peserta didorong untuk bekerja pada proyek nyata yang relevan dengan kehidupan atau pekerjaan mereka. Pendekatan ini sangat efektif dalam mengembangkan keterampilan praktis karena peserta dapat belajar melalui pengalaman langsung dan menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam konteks dunia nyata.

Pembelajaran berbasis proyek memungkinkan peserta untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif dan kolaboratif. Peserta sering bekerja dalam kelompok, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi yang penting, selain keterampilan teknis atau akademis. Proyek dapat berkisar dari kegiatan seni dan budaya hingga proyek teknologi atau kewirausahaan, tergantung pada jenis pelatihan yang diselenggarakan.

2. Pembelajaran Jarak Jauh dan E-Learning

Dengan perkembangan teknologi, metode pembelajaran jarak jauh dan e-learning semakin banyak digunakan dalam pendidikan Nonformal di Italia. Pendidikan online memungkinkan peserta untuk mengakses materi pelatihan

kapan saja dan di mana saja, tanpa harus hadir di kelas fisik. Hal ini sangat berguna bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu, seperti pekerja dewasa atau individu yang tinggal di daerah terpencil.

Platform e-learning di Italia menyediakan berbagai kursus dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, manajemen, bahasa, dan desain. Peserta dapat mengikuti kursus dengan tempo yang fleksibel dan memperoleh sertifikat atau pengakuan atas pencapaian mereka. Selain itu, banyak universitas dan lembaga pelatihan di Italia yang menawarkan program pembelajaran online, yang memungkinkan peserta untuk mengakses pendidikan tinggi secara Nonformal.

3. Pelatihan Keterampilan Praktis

Metode lain yang sering digunakan dalam pendidikan Nonformal di Italia adalah pelatihan keterampilan praktis. Program pelatihan ini biasanya terfokus pada pengembangan keterampilan yang dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari, seperti pelatihan komputer, pemasaran digital, dan keterampilan teknis lainnya. Keterampilan praktis ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan membantu peserta memperoleh pekerjaan atau memperbaiki posisi mereka di pasar kerja.

Pelatihan ini sering kali dilaksanakan di pusat pelatihan atau lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan industri atau perusahaan. Dengan demikian, pelatihan ini selalu relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan memberikan keterampilan yang diinginkan oleh pemberi kerja.

4. Pembelajaran Kolaboratif dan Inklusif

Pendidikan Nonformal di Italia sering menggunakan pendekatan pembelajaran kolaboratif, yang menekankan kerjasama antara peserta untuk mencapai tujuan bersama. Metode ini sangat sesuai untuk pendidikan Nonformal karena memungkinkan individu untuk belajar satu sama lain dan

berbagi pengalaman. Ini juga menciptakan suasana inklusif di mana peserta merasa dihargai dan diberdayakan.

Selain itu, pendekatan ini juga mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi yang penting, yang sering kali kurang diperhatikan dalam pendidikan formal. Pembelajaran kolaboratif memungkinkan peserta untuk berbicara tentang pengalaman hidup mereka dan belajar dari berbagai perspektif yang berbeda.

G. Karakteristik penyelenggaraan PNF di Italia

Italia memiliki karakteristik sendiri dalam penyelenggaraannya Pendidikan nonformal di negaranya, Adapun karakteristiknya sebagai berikut:

1. Fleksibilitas

Salah satu karakteristik utama pendidikan Nonformal di Italia adalah fleksibilitas dalam hal waktu, tempat, dan format pelaksanaan. Pendidikan Nonformal memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengikuti kursus atau pelatihan tanpa harus terikat oleh jadwal yang kaku, seperti yang terjadi dalam sistem pendidikan formal. Ini sangat bermanfaat bagi orang dewasa yang bekerja, orang yang memiliki tanggung jawab keluarga, atau mereka yang tinggal di daerah terpencil dan tidak dapat menghadiri kelas reguler.

Pendidikan Nonformal di Italia sering kali diselenggarakan dalam berbagai bentuk, seperti pelatihan paruh waktu, kursus malam, kelas online, atau pelatihan berbasis komunitas yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Fleksibilitas ini memungkinkan individu untuk belajar dengan tempo mereka sendiri, mengakses materi pelajaran melalui platform digital, atau bahkan menghadiri kelas yang dilaksanakan di luar jam kerja mereka.

2. Fokus pada Pengembangan Keterampilan Praktis

Pendidikan Nonformal di Italia sangat berorientasi pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam dunia kerja atau kehidupan sehari-hari. Banyak program pendidikan Nonformal dirancang untuk memberikan peserta keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja atau yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pelatihan vokasional, misalnya, mengajarkan keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam berbagai sektor industri, seperti teknologi informasi, desain grafis, pemasaran digital, atau manajemen. Program-program ini tidak hanya menekankan teori, tetapi lebih kepada penerapan pengetahuan dalam situasi praktis. Hal ini memastikan bahwa peserta memperoleh keterampilan yang dapat langsung digunakan di tempat kerja, yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing mereka di pasar tenaga kerja.

3. Keterlibatan Berbagai Lembaga dan Sektor

Penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Italia melibatkan berbagai lembaga dan sektor. Lembaga pemerintah, universitas, lembaga swasta, asosiasi budaya, organisasi masyarakat sipil, serta perusahaan bekerja sama dalam menyediakan berbagai program pelatihan dan kursus yang dapat diakses oleh masyarakat. Kolaborasi antara sektor-sektor ini menciptakan ekosistem yang saling mendukung dan memperkaya peluang pendidikan bagi masyarakat.

Misalnya, universitas di Italia sering berkolaborasi dengan industri dan perusahaan untuk menyelenggarakan kursus pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, lembaga pemerintah juga terlibat dalam mendanai program-program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan pekerja dewasa, seperti kursus bahasa, pelatihan keterampilan teknis, dan kursus pengembangan pribadi.

4. Pendekatan Inklusif dan Aksesibilitas

Pendidikan Nonformal di Italia dirancang untuk menjadi inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Program-program ini tidak hanya tersedia bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikan formal, tetapi juga bagi individu yang kurang terlayani oleh sistem pendidikan formal, seperti imigran, pekerja dewasa, orang dengan disabilitas, dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Banyak program pendidikan Nonformal di Italia yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan menyediakan kesempatan belajar bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Misalnya, kursus bahasa Italia yang diselenggarakan untuk imigran atau pelatihan keterampilan untuk pekerja yang terpinggirkan di sektor informal. Pendekatan ini membantu individu mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

5. Penekanan pada Pembelajaran Sepanjang Hayat

Pendidikan Nonformal di Italia juga sangat berfokus pada konsep pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*). Hal ini berarti bahwa pendidikan tidak berhenti pada usia muda atau setelah seseorang menyelesaikan pendidikan formal. Sebaliknya, pendidikan adalah proses yang berkelanjutan yang memungkinkan individu untuk terus berkembang dan memperoleh keterampilan baru sepanjang hidup mereka.

Pendidikan sepanjang hayat sangat penting dalam dunia yang terus berubah dan berkembang pesat, di mana keterampilan yang relevan di pasar kerja dapat berubah dengan cepat. Oleh karena itu, banyak program pendidikan Nonformal di Italia yang ditujukan untuk orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan mereka atau mempelajari keterampilan baru untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar tenaga kerja.

6. Sertifikasi dan Pengakuan Keterampilan

Pendidikan Nonformal di Italia juga memberikan pengakuan terhadap keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan Nonformal. Sertifikasi ini sangat penting karena membantu peserta memperoleh pengakuan resmi atas kemampuan mereka, yang meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau kemajuan dalam karier mereka. Misalnya, banyak kursus pelatihan vokasional di Italia yang menawarkan sertifikat yang diakui oleh pemerintah atau lembaga industri tertentu.

Sertifikasi ini juga membantu individu yang telah memperoleh keterampilan melalui pengalaman kerja atau pelatihan Nonformal untuk mendapatkan pengakuan atas kompetensi mereka. Sistem pengakuan kompetensi ini memungkinkan individu untuk mendapatkan sertifikat yang valid dan sah yang meningkatkan kredibilitas mereka di mata pemberi kerja.

H. Sumber Pendanaan PNF di Italia

Sumber endanaan untuk penyelenggaraan Pendidikan nonformal di negara Italia adalah sebagai berikut:

1. Pendanaan Pemerintah

Pemerintah Italia memainkan peran utama dalam pendanaan pendidikan non-formal. Melalui kementerian pendidikan dan kementerian tenaga kerja, pemerintah menyediakan dana untuk berbagai program pendidikan Nonformal yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pekerja, memfasilitasi integrasi sosial, dan memberdayakan kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

Anggaran Pendidikan Nasional: Pemerintah Italia mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mendanai pendidikan Nonformal yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, seperti program pelatihan keterampilan untuk orang dewasa, kursus bahasa untuk imigran, dan pelatihan untuk sektor-sektor

ekonomi tertentu. Anggaran ini digunakan untuk mendukung lembaga-lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program-program tersebut, termasuk penyediaan materi pelajaran, pelatih, dan infrastruktur.

Program Subsidi dan Insentif untuk Perusahaan: Pemerintah Italia juga menyediakan insentif finansial bagi perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan untuk karyawan mereka. Subsidi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Italia dan mendukung perkembangan sektor-sektor industri yang penting bagi perekonomian negara.

2. Hibah dari Uni Eropa dan Organisasi Internasional

Italia juga menerima dana dari organisasi internasional, terutama Uni Eropa, untuk mendukung pendidikan Nonformal. Uni Eropa memiliki berbagai program yang menyediakan hibah bagi negara-negara anggota, termasuk Italia, untuk mendanai inisiatif pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan, integrasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Program Erasmus adalah salah satu contoh program Uni Eropa yang mendanai pendidikan Nonformal di Italia. Program ini menyediakan dana untuk kursus pelatihan, pertukaran pelajar, dan pengembangan keterampilan di seluruh Eropa. Banyak lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat di Italia yang berpartisipasi dalam program Erasmus+ untuk mendukung program pendidikan Nonformal mereka. Selain itu, organisasi internasional seperti PBB dan UNESCO juga mendukung pendidikan non-formal di Italia, terutama dalam konteks pengembangan keterampilan untuk kelompok yang lebih rentan, seperti imigran, wanita, dan masyarakat miskin.

3. Pendanaan dari Sektor Swasta dan Perusahaan

Sektor swasta juga berperan penting dalam mendanai pendidikan Nonformal di Italia, terutama dalam hal pelatihan vokasional dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja. Banyak perusahaan besar yang menyelenggarakan program pelatihan internal untuk karyawan

mereka, yang didanai oleh perusahaan itu sendiri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial di dalam perusahaan, serta meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global.

Selain itu, perusahaan-perusahaan swasta juga dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pelatihan yang lebih besar dan lebih terstruktur. Banyak lembaga pelatihan swasta di Italia yang menerima pendanaan dari perusahaan besar untuk menawarkan kursus yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri.

4. Dana dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Asosiasi Budaya

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan asosiasi budaya juga berkontribusi dalam pendanaan pendidikan Nonformal, terutama untuk program yang menyasar kelompok masyarakat yang kurang terlayani, seperti imigran, wanita, dan masyarakat pedesaan. LSM ini sering mendapatkan dana dari pemerintah, hibah internasional, atau donasi swasta untuk mendanai kursus keterampilan, pelatihan bahasa, dan program pemberdayaan sosial.

I. Kelebihan dan Kelemahan PNF di Italia

1. Kelebihan Pendidikan Nonformal di Italia

a. Aksesibilitas yang Luas

Salah satu kelebihan utama pendidikan Nonformal di Italia adalah tingkat aksesibilitas yang sangat tinggi. Pendidikan Nonformal terbuka bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk individu yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal, seperti pekerja dewasa, imigran, dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya. Selain itu, pendidikan Nonformal juga memberikan kesempatan bagi mereka yang telah meninggalkan pendidikan formal pada usia muda untuk kembali belajar dan mengembangkan keterampilan baru.

Bentuk pendidikan ini juga sangat fleksibel, yang memungkinkan peserta untuk mengikuti kursus atau pelatihan sesuai dengan jadwal mereka, baik itu paruh waktu, kursus malam, atau kursus berbasis online. Fleksibilitas ini sangat berguna bagi pekerja yang tidak dapat meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengikuti pendidikan formal atau bagi mereka yang memiliki kewajiban keluarga.

b. Pengembangan Keterampilan Praktis yang Relevan dengan Pasar Kerja

Pendidikan Nonformal di Italia memiliki fokus utama pada pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Banyak program pendidikan Nonformal disesuaikan dengan industri dan sektor tertentu, sehingga memungkinkan peserta untuk mempelajari keterampilan yang dapat langsung diterapkan dalam dunia kerja.

Misalnya, program pelatihan vokasional di Italia berfokus pada keterampilan yang diperlukan dalam berbagai sektor, seperti teknologi informasi, pemasaran digital, desain grafis, atau manajemen. Kursus-kursus ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini, yang menjadikan peserta lebih siap dan terampil dalam mencari pekerjaan atau meningkatkan posisi mereka di dunia kerja.

Selain itu, pendidikan Nonformal memungkinkan individu untuk memperoleh sertifikat atau pengakuan resmi terhadap keterampilan yang diperoleh. Sertifikasi ini sangat berharga karena dapat meningkatkan kredibilitas peserta di mata pemberi kerja dan membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau mendapatkan promosi di tempat kerja.

c. Pembelajaran Sepanjang Hayat (*Lifelong Learning*)

Italia mendorong konsep pembelajaran sepanjang hayat, yang memberikan kesempatan bagi individu untuk terus mengembangkan keterampilan mereka sepanjang hidup. Ini

adalah pendekatan yang sangat relevan dalam dunia yang terus berubah, di mana keterampilan yang diperlukan di pasar kerja sering kali berubah dengan cepat. Dengan pendidikan Nonformal, individu tidak hanya mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan pada saat ini, tetapi mereka juga diberdayakan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan di masa depan.

Pendidikan Nonformal memungkinkan peserta untuk mengakses pelatihan kapan saja, dan dengan begitu, mereka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan industri atau memperbaiki keterampilan yang sudah ada. Hal ini memungkinkan individu untuk tetap relevan dalam dunia kerja dan terus berkembang sesuai dengan tuntutan ekonomi dan sosial.

d. Pendekatan Inklusif dan Keterlibatan Masyarakat

Pendidikan Nonformal di Italia juga dikenal dengan pendekatan inklusifnya. Pendidikan ini tidak hanya ditujukan untuk mereka yang mengikuti jalur pendidikan formal, tetapi juga untuk berbagai kelompok masyarakat yang mungkin tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal. Ini termasuk imigran, wanita, orang dewasa yang ingin melanjutkan pendidikan mereka, serta kelompok-kelompok marginal yang mungkin tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai.

Selain itu, banyak program pendidikan Nonformal yang berfokus pada pemberdayaan komunitas lokal, meningkatkan keterlibatan sosial, dan membantu membangun kohesi sosial di antara masyarakat. Asosiasi budaya dan organisasi masyarakat sipil berperan dalam menyelenggarakan kursus dan pelatihan yang dapat mengembangkan keterampilan sosial, budaya, dan profesional bagi individu dan kelompok di berbagai komunitas.

e. Keterlibatan Sektor Swasta dan Kolaborasi dengan Industri

Pendidikan Nonformal di Italia juga memiliki kelebihan dalam hal kolaborasi antara lembaga pendidikan dan sektor industri. Banyak lembaga pendidikan Nonformal bekerja sama

dengan perusahaan dan sektor industri untuk menciptakan program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Kolaborasi ini memastikan bahwa pelatihan yang diselenggarakan relevan dengan permintaan pasar dan memberikan keterampilan yang dapat langsung diterapkan di tempat kerja.

Misalnya, kursus pelatihan untuk pekerja di sektor teknologi atau manufaktur sering kali dikembangkan bersama dengan perusahaan-perusahaan besar di Italia, yang menyediakan keahlian industri dan sumber daya untuk menciptakan pelatihan yang tepat guna.

2. Kelemahan Pendidikan Nonformal di Italia

a. Ketimpangan Akses dan Kualitas Program

Meskipun pendidikan Nonformal di Italia sangat terbuka untuk berbagai lapisan masyarakat, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah ketimpangan dalam akses dan kualitas program. Tidak semua individu atau kelompok memiliki akses yang sama terhadap program pendidikan Nonformal, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Di daerah-daerah ini, fasilitas pendidikan Nonformal mungkin kurang tersedia, atau pelatihan yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Selain itu, kualitas program pendidikan Nonformal juga dapat bervariasi tergantung pada penyelenggara. Sementara beberapa lembaga pendidikan menawarkan kursus berkualitas tinggi yang diakui secara internasional, banyak kursus lainnya mungkin tidak memenuhi standar yang memadai atau tidak terhubung dengan pasar tenaga kerja. Hal ini berisiko membuat peserta merasa tidak mendapatkan manfaat maksimal dari pendidikan yang mereka jalani.

b. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Sistem pendidikan Nonformal di Italia melibatkan berbagai lembaga, termasuk pemerintah, lembaga swasta, universitas, dan asosiasi budaya. Meskipun keragaman penyelenggara ini memberikan fleksibilitas dan keberagaman pilihan pendidikan,

kurangnya koordinasi antar lembaga dapat mengarah pada duplikasi program atau kekosongan dalam pelatihan yang tersedia. Kurangnya komunikasi antara berbagai penyelenggara ini dapat menyebabkan peserta bingung dalam memilih program pelatihan yang tepat atau sulit untuk mengetahui program yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, meskipun sertifikasi untuk pendidikan Nonformal semakin banyak tersedia, tidak semua sertifikat diakui secara luas di seluruh sektor atau perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi peserta dalam hal pengakuan keterampilan yang telah mereka peroleh.

c. Masalah Pendanaan dan Ketergantungan pada Hibah

Pendanaan untuk pendidikan Nonformal di Italia sebagian besar bergantung pada dana pemerintah, hibah internasional, dan sektor swasta. Meskipun ini memungkinkan pendidikan Nonformal untuk berkembang, ketergantungan pada hibah dan pendanaan eksternal dapat menjadi kelemahan. Ketidakpastian pendanaan dapat mengancam kelangsungan program-program pendidikan Nonformal, terutama dalam situasi krisis ekonomi atau jika prioritas anggaran pemerintah berubah.

Sumber pendanaan yang terbatas juga dapat membatasi jangkauan dan cakupan program pendidikan Nonformal, khususnya dalam menyediakan pelatihan yang mencakup seluruh wilayah Italia, termasuk daerah-daerah yang lebih terisolasi dan terpencil.

d. Stigma terhadap Pendidikan Nonformal

Meskipun pendidikan Nonformal memiliki banyak manfaat, ada stigma sosial tertentu terhadapnya, terutama di kalangan individu yang lebih memilih jalur pendidikan formal. Beberapa orang mungkin melihat pendidikan Nonformal sebagai pilihan yang kurang prestisius dibandingkan dengan pendidikan formal, yang dapat menghambat partisipasi dalam program-program ini. Stigma ini dapat berkurang seiring dengan meningkatnya pengakuan terhadap sertifikasi dan keterampilan

yang diperoleh melalui pendidikan Nonformal, namun tantangan budaya ini masih perlu diatasi.

e. Kurangnya Pengakuan Formal terhadap Keterampilan yang Diperoleh

Meskipun pendidikan Nonformal dapat memberikan keterampilan yang sangat relevan bagi pasar kerja, pengakuan terhadap keterampilan yang diperoleh melalui jalur Nonformal masih menjadi masalah di Italia. Meskipun ada kemajuan dalam pengakuan sertifikat pendidikan Nonformal, tidak semua program atau kursus diakui secara luas oleh industri atau lembaga pendidikan formal. Hal ini menyebabkan tantangan bagi individu yang berharap dapat mengonversi keterampilan yang mereka pelajari menjadi peluang kerja yang lebih baik.

J. Analisis Studi Komparatif Italia dengan Negara Lain

1. Pendidikan Nonformal di Italia

Kebijakan dan Struktur Penyelenggaraan Italia memiliki sistem pendidikan non-formal yang sangat fleksibel dan inklusif, dengan fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan pasar kerja. Pemerintah Italia mendukung pendidikan Nonformal melalui kebijakan yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat, pelatihan vokasional, dan pemberdayaan sosial, terutama bagi kelompok marginal seperti imigran, pekerja dewasa, dan orang dengan disabilitas.

Pendidikan Nonformal di Italia banyak difokuskan pada pelatihan vokasional yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, universitas, dan lembaga swasta. Ada juga program yang berfokus pada integrasi sosial bagi imigran, dengan kursus bahasa dan pelatihan keterampilan.

Pendanaan Pendidikan untuk pendidikan Nonformal berasal dari berbagai sumber: pemerintah, Uni Eropa, sektor swasta, dan hibah internasional. Pemerintah Italia melalui berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pekerjaan, memberikan dana untuk berbagai

program yang mendukung keterampilan pekerja dan integrasi sosial.

Kelebihan dan Kelemahan Kelebihan utama pendidikan Nonformal di Italia adalah aksesibilitas yang luas, fleksibilitas, dan relevansi dengan pasar kerja. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk ketimpangan dalam akses, terutama di daerah pedesaan, serta ketidakpastian pendanaan yang bergantung pada hibah.

2. Pendidikan Nonformal di Indonesia

Kebijakan dan Struktur Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Indonesia lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat, khususnya mereka yang tidak bisa mengakses pendidikan formal. Dalam konteks ini, Indonesia telah mengembangkan berbagai program pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah, LSM, dan sektor swasta. Program-program ini biasanya berfokus pada keterampilan hidup, keterampilan vokasional, serta pendidikan bagi orang dewasa dan anak-anak yang terpinggirkan.

Pendanaan Pendidikan untuk pendidikan Nonformal di Indonesia sebagian besar berasal dari anggaran pemerintah, yang dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta lembaga terkait lainnya. Selain itu, sektor swasta dan LSM berperan dalam mendanai dan menjalankan program-program pelatihan keterampilan di komunitas.

Kelebihan dan Kelemahan Pendidikan Nonformal di Indonesia sangat efektif dalam menjangkau masyarakat yang kurang terlayani oleh pendidikan formal. Namun, tantangannya adalah ketimpangan dalam akses, dengan program yang sering kali terpusat di kota-kota besar, serta kualitas program yang bervariasi.

3. Pendidikan Nonformal di Jepang

Kebijakan dan Struktur Penyelenggaraan Jepang memiliki sistem pendidikan non-formal yang sangat terstruktur, dengan fokus pada pengembangan keterampilan teknis dan vokasional.

Program pendidikan Nonformal di Jepang melibatkan kolaborasi antara lembaga pendidikan, perusahaan, dan pemerintah untuk mengembangkan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Sistem ini mencakup berbagai jenis pelatihan vokasional, kursus pengembangan diri, serta pelatihan untuk orang dewasa.

Pendanaan Pendanaan untuk pendidikan Nonformal di Jepang berasal dari pemerintah, terutama melalui program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (MEXT). Selain itu, sektor swasta sangat terlibat dalam pendanaan program pelatihan vokasional dan teknis.

Kelebihan dan Kelemahan Kelebihan pendidikan Nonformal di Jepang adalah sistem yang terstruktur dengan baik dan terintegrasi dengan industri. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya fleksibilitas dalam beberapa program, serta ketergantungan pada perusahaan besar yang memiliki dana dan sumber daya lebih untuk menjalankan pelatihan.

4. Pendidikan Nonformal di Filipina

Kebijakan dan Struktur Penyelenggaraan Di Filipina, pendidikan Nonformal sangat penting dalam mengatasi masalah akses pendidikan. Negara ini memiliki program yang luas yang melibatkan berbagai lembaga, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan LSM. Program-program pendidikan Nonformal di Filipina mencakup kursus keterampilan, pelatihan bagi orang dewasa yang terpinggirkan, serta kursus literasi untuk orang yang tidak dapat mengakses pendidikan formal.

Pendanaan Pendanaan untuk pendidikan Nonformal di Filipina berasal dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, LSM, dan hibah internasional. Program pendidikan Nonformal di Filipina sering kali disponsori oleh organisasi-organisasi internasional dan lembaga donor yang berfokus pada pemberdayaan sosial.

Kelebihan dan Kelemahan Kelebihan utama pendidikan Nonformal di Filipina adalah kemampuannya untuk menjangkau kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan menyediakan keterampilan praktis yang langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kelemahannya termasuk ketergantungan pada pendanaan eksternal dan variasi kualitas program.

5. Pendidikan Nonformal di Turki

Kebijakan dan Struktur Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Turki juga memiliki tempat yang penting dalam sistem pendidikan, dengan fokus pada peningkatan keterampilan dan pelatihan vokasional. Turki memiliki berbagai lembaga pendidikan Nonformal yang menyediakan pelatihan keterampilan, kursus bahasa, dan pendidikan bagi orang dewasa. Lembaga seperti Halk Eğitimi Merkezleri (Pusat Pendidikan Masyarakat) memberikan program pelatihan yang mendukung pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pendanaan Pendidikan Nonformal di Turki sebagian besar berasal dari anggaran pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Nasional, serta sektor swasta. Pemerintah Turki sangat mendukung pengembangan pendidikan vokasional dan pelatihan keterampilan dengan menyediakan dana untuk kursus-kursus yang mengembangkan keterampilan praktis di masyarakat.

Kelebihan dan Kelemahan Kelebihan dari sistem pendidikan Nonformal di Turki adalah adanya dukungan yang kuat dari pemerintah dan integrasi program dengan kebutuhan ekonomi. Program-program ini sangat mendukung pengembangan keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing pasar kerja. Namun, tantangan yang ada termasuk ketergantungan pada sektor pemerintah untuk pendanaan dan ketidaksesuaian antara jenis pelatihan yang tersedia dengan kebutuhan pasar di beberapa daerah.

Pendidikan Nonformal di Italia memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan akses pendidikan yang lebih

luas dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya berbagai kebijakan dan dukungan dari pemerintah, pendidikan Nonformal di Italia tidak hanya menawarkan fleksibilitas dalam bentuk dan waktu, tetapi juga berfokus pada pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan pasar kerja. Program-program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak dapat diakomodasi oleh sistem pendidikan formal, seperti pekerja dewasa, imigran, serta kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya.

Salah satu kekuatan utama pendidikan Nonformal di Italia adalah fleksibilitasnya. Dengan beragam bentuk penyelenggaraan yang mencakup kursus vokasional, pelatihan keterampilan teknis, kursus bahasa, hingga pengembangan keterampilan sosial, pendidikan Nonformal dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat tanpa batasan usia atau latar belakang. Selain itu, Italia juga sangat menekankan pembelajaran sepanjang hayat, memberikan kesempatan kepada individu untuk terus mengembangkan keterampilan mereka di sepanjang hidup mereka.

Penyelenggaraan pendidikan juga melibatkan berbagai sektor, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan swasta, hingga organisasi masyarakat sipil. Kerja sama ini menciptakan ekosistem pendidikan yang saling mendukung, memperluas jangkauan dan keberagaman program yang ditawarkan. Program pelatihan dan kursus yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, seperti teknologi informasi, manajemen, dan keterampilan teknis lainnya, memastikan bahwa peserta memperoleh keterampilan yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja.

BAB VII

Pendidikan Nonformal di Belanda

Di Belanda, pendidikan Nonformal memiliki peran yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan belajar masyarakat, khususnya bagi individu yang memerlukan pelatihan atau keterampilan tambahan di luar pendidikan formal. Sistem pendidikan Belanda sendiri dikenal dengan pendekatannya yang inklusif, yang mengakomodasi berbagai bentuk pembelajaran dan mendukung partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali mereka yang tidak dapat mengakses pendidikan formal.

Dengan demikian, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana pendidikan Nonformal di Belanda dikembangkan dan dijalankan. Negara ini menjadi contoh yang baik dalam menerapkan kebijakan dan metode penyelenggaraan pendidikan Nonformal yang dapat diadaptasi oleh negara lain, termasuk Indonesia, untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan warganya. Dalam Buku ini, kita akan mengupas lebih lanjut mengenai sejarah, kebijakan, bentuk, serta keberhasilan dan tantangan pendidikan Nonformal di Belanda.

Pendidikan Nonformal di Belanda dapat ditelusuri kembali pada awal abad ke-20, di mana negara ini mengalami perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi. Pada masa ini, sektor industri di Belanda berkembang pesat, memerlukan tenaga kerja yang lebih terampil dan memiliki pengetahuan tambahan. Namun, tidak semua lapisan masyarakat dapat mengakses pendidikan formal yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pendidikan Nonformal mulai berkembang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi orang dewasa, pekerja, dan kelompok yang kurang beruntung.

Pada awalnya, pendidikan Nonformal berfokus pada pengajaran keterampilan praktis yang berkaitan langsung dengan pekerjaan, seperti pelatihan teknis dan vokasional. Kursus-kursus ini diselenggarakan oleh organisasi-organisasi sosial, gereja, dan lembaga-lembaga lain yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lembaga-lembaga ini menyediakan pelatihan di bidang kerajinan tangan, pertanian, serta keterampilan kerja lainnya yang dibutuhkan di industri.

Setelah Perang Dunia II, Belanda mengalami periode rekonstruksi dan modernisasi yang pesat. Pada masa ini, pendidikan Nonformal mulai mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Negara mulai menyadari pentingnya pendidikan Nonformal untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah perang. Seiring dengan perkembangan industri dan urbanisasi, banyak individu yang perlu dilatih ulang untuk menyesuaikan keterampilan mereka dengan kebutuhan pasar kerja yang baru.

Pada tahun 1950-an dan 1960-an, berbagai lembaga pendidikan Nonformal didirikan di Belanda, yang menawarkan pelatihan bagi orang dewasa yang ingin memperbaharui keterampilan mereka atau memperoleh keterampilan baru. Lembaga-lembaga ini menawarkan kursus yang berfokus pada keterampilan praktis dan pengetahuan yang lebih aplikatif. Selain itu, pendidikan Nonformal juga mulai diperluas untuk mencakup kursus-kursus yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup

secara keseluruhan, seperti pendidikan untuk kesehatan, keterampilan hidup, dan integrasi sosial.

Pada tahun 1970-an, Belanda mulai mengadopsi kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Pemerintah Belanda mulai memberikan perhatian lebih besar pada penyelenggaraan pendidikan Nonformal sebagai bagian dari kebijakan sosial yang lebih luas. Hal ini tercermin dalam pembentukan lembaga-lembaga yang menyediakan pelatihan untuk orang dewasa di berbagai bidang. Pemerintah juga menyediakan pendanaan untuk program-program pendidikan Nonformal yang ditujukan untuk kelompok yang kurang beruntung, seperti pekerja yang terdampak pengangguran, migran, dan perempuan.

Selain itu, tahun 1970-an juga menandai awal dari pengakuan pemerintah terhadap pentingnya pendidikan Nonformal dalam memfasilitasi integrasi sosial, khususnya bagi migran yang datang ke Belanda setelah perang. Program-program pendidikan Nonformal untuk migran diperkenalkan, termasuk kursus bahasa Belanda dan pelatihan keterampilan untuk membantu mereka beradaptasi dengan budaya dan pasar kerja Belanda.

Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, Belanda semakin memperkuat komitmennya terhadap pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*). Pendidikan Nonformal di Belanda berkembang semakin fleksibel dan bervariasi, dengan munculnya berbagai kursus online, program pelatihan berbasis komunitas, dan kursus yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Sistem pendidikan Nonformal kini tidak hanya berfokus pada pelatihan kerja, tetapi juga mencakup pengembangan pribadi, keterampilan sosial, dan pengembangan komunitas.

Pemerintah Belanda mulai melihat pendidikan Nonformal sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi ketimpangan sosial. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan program yang mendukung pendidikan Nonformal, seperti subsidi dan bantuan keuangan, diperkenalkan untuk memfasilitasi akses yang lebih

luas bagi masyarakat. Salah satu contoh adalah pembentukan program pendidikan untuk kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, migran, dan lansia.

A. Kebijakan Penyelenggaraan PNF di Belanda

1. Pendidikan Sepanjang Hayat dan Keterampilan untuk Semua

Salah satu kebijakan penting yang mendorong perkembangan pendidikan Nonformal di Belanda adalah konsep *lifelong learning* (pendidikan sepanjang hayat). Konsep ini menekankan pentingnya memberikan peluang belajar bagi individu di berbagai tahap kehidupan mereka, baik itu untuk tujuan pengembangan pribadi, perbaikan keterampilan profesional, atau peningkatan partisipasi sosial. Pemerintah Belanda percaya bahwa pendidikan tidak terbatas pada usia tertentu dan bahwa pembelajaran seharusnya berlanjut sepanjang hidup seseorang.

Sebagai bagian dari kebijakan pendidikan sepanjang hayat, Belanda juga memfokuskan pada pengembangan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Pekerja di Belanda diberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka melalui program pelatihan Nonformal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, perusahaan, dan organisasi non-profit. Program-program ini sering kali dirancang untuk menanggapi perubahan teknologi dan perkembangan ekonomi, serta untuk memastikan bahwa masyarakat Belanda memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk berkompetisi di pasar kerja global. Selain itu, kebijakan ini mendukung pengurangan kesenjangan keterampilan di kalangan berbagai kelompok sosial. Melalui program pelatihan dan kursus keterampilan, pendidikan Nonformal dapat mengatasi masalah ketidaksetaraan dalam akses pendidikan formal, terutama di kalangan kelompok-kelompok yang lebih terpinggirkan, seperti orang dewasa yang kurang terdidik, migran, dan penyandang disabilitas.

2. Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Pendidikan Nonformal

Kebijakan pemerintah Belanda dalam pendidikan Nonformal juga tercermin dalam pembentukan sejumlah lembaga yang khusus menangani pendidikan bagi orang dewasa. Salah satu lembaga yang memainkan peran penting adalah Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO), yang berfokus pada pendidikan dan pelatihan untuk orang dewasa. CVO menyelenggarakan kursus dalam berbagai bidang, mulai dari keterampilan profesional, kursus bahasa Belanda untuk migran, hingga kursus pengembangan pribadi dan sosial. Pemerintah Belanda juga memberikan subsidi kepada lembaga-lembaga ini untuk memastikan bahwa kursus-kursus ini dapat diakses oleh masyarakat luas dengan biaya yang terjangkau.

Salah satu kebijakan yang relevan adalah Subsidi Pendidikan untuk Dewasa (Volwasseneneducatie), yang memungkinkan warga negara untuk mengakses pendidikan Nonformal tanpa terkendala biaya. Melalui kebijakan ini, Belanda berusaha memastikan bahwa tidak ada individu yang terhalang untuk mengikuti kursus atau pelatihan hanya karena keterbatasan ekonomi. Program ini juga bertujuan untuk mendukung transisi tenaga kerja di pasar kerja yang dinamis, memberikan peluang bagi pekerja untuk memperoleh keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang ada.

Selain itu, pendidikan Nonformal di Belanda juga didorong oleh kerjasama antara sektor publik dan swasta. Lembaga pendidikan Nonformal bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang lebih praktis dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini memungkinkan pekerja untuk mengikuti pelatihan yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan di tempat kerja.

3. Inovasi dalam Pendanaan Pendidikan Nonformal

Pemerintah Belanda juga berkomitmen untuk menyediakan dana yang cukup bagi pengembangan pendidikan Nonformal.

Sebagai contoh, Fonds voor Cultuurparticipatie (Dana untuk Partisipasi Budaya) menyediakan pendanaan untuk berbagai program pendidikan Nonformal yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan budaya dan sosial. Selain itu, terdapat program pendanaan untuk pelatihan kerja dan pengembangan keterampilan untuk orang dewasa yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal.

Di tingkat Eropa, Belanda juga memanfaatkan pendanaan dari program-program Uni Eropa, seperti Erasmus+, yang mendukung inisiatif pendidikan Nonformal di seluruh Eropa. Melalui program ini, Belanda dapat mendanai berbagai kursus internasional dan proyek kerjasama antar lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Nonformal dan memfasilitasi mobilitas pelajar.

B. Bentuk Penyelenggaraan PNF di Belanda

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Di Belanda, pendidikan anak usia dini yang merupakan bagian dari pendidikan Nonformal disebut "Peuterspeelzaal" atau "KDV" (Kinderdagverblijf) yang berarti tempat penitipan anak. Program ini adalah bagian penting dalam pengembangan awal anak-anak sebelum mereka memasuki sekolah dasar. PAUD di Belanda memberikan pengalaman belajar yang berfokus pada pengembangan sosial, emosional, fisik, dan kognitif anak-anak, meskipun pendidikan ini tidak terstruktur seperti pendidikan formal.

Pendidikan anak usia dini ini sangat penting karena membantu anak-anak mengembangkan keterampilan dasar yang mereka perlukan di masa depan, seperti keterampilan bahasa, matematika dasar, serta keterampilan sosial dan emosional yang mendasar untuk berinteraksi dengan orang lain. Program ini sering diadakan oleh lembaga swasta atau komunitas lokal, dan tersedia dalam berbagai bentuk, mulai dari kelompok bermain hingga program penitipan anak yang lebih terstruktur. Fokus utama dari PAUD di Belanda adalah:

- a. Menstimulasi perkembangan bahasa dan sosial.
- b. Membantu anak-anak memahami aturan dasar dalam masyarakat.
- c. Mempersiapkan anak-anak untuk beradaptasi dengan lingkungan pendidikan formal di masa depan.

PAUD di Belanda bersifat fleksibel, memungkinkan orang tua untuk memilih program yang sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarga mereka, baik yang berbasis waktu penuh maupun part-time.

2. Pendidikan Orang Dewasa

Pendidikan Nonformal untuk orang dewasa di Belanda disebut "*Volwasseneneducatie*" atau pendidikan orang dewasa. Pendidikan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dewasa yang ingin melanjutkan pembelajaran di luar sistem pendidikan formal. Program pendidikan untuk orang dewasa ini sangat beragam, mulai dari kursus keterampilan praktis, pengembangan pribadi, hingga pelatihan vokasional yang relevan dengan dunia kerja.

Berbagai lembaga, baik publik maupun swasta, menyelenggarakan pendidikan orang dewasa ini. Salah satu contoh utama adalah Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO), yang menawarkan berbagai kursus dan pelatihan untuk orang dewasa dalam berbagai bidang, seperti bahasa, keterampilan profesional, seni, dan pendidikan kewarganegaraan. Beberapa jenis pendidikan untuk orang dewasa di Belanda meliputi:

a. Kursus Keterampilan Profesional

Pelatihan di bidang-bidang seperti teknologi informasi, perdagangan, perawatan kesehatan, dan konstruksi. Kursus ini biasanya dirancang untuk membantu individu meningkatkan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja atau berkarir di pasar yang berkembang.

- 1) Kursus Bahasa: Salah satu bentuk pendidikan yang sangat penting bagi migran di Belanda adalah kursus bahasa

- Belanda, yang sering disebut Inburgering. Kursus ini membantu migran untuk belajar bahasa Belanda dan menyesuaikan diri dengan budaya dan sistem sosial Belanda.
- 2) Pelatihan Pengembangan Pribadi: Program ini fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional, seperti keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan keterampilan interpersonal lainnya yang diperlukan dalam kehidupan pribadi dan profesional.
 - 3) Pendidikan orang dewasa di Belanda bertujuan untuk memberdayakan individu agar dapat berkembang lebih lanjut dalam kehidupan pribadi dan karir mereka. Kebijakan ini juga mendukung prinsip pendidikan sepanjang hayat, di mana orang dewasa terus belajar dan berkembang sepanjang hidup mereka.

b. Pendidikan untuk Migran dan Pengungsi

Salah satu bentuk utama pendidikan Nonformal di Belanda adalah untuk migran dan pengungsi. Inburgering adalah program integrasi bagi migran yang baru datang ke Belanda. Program ini termasuk pelatihan bahasa Belanda, pemahaman budaya, serta keterampilan sosial yang diperlukan untuk beradaptasi dengan kehidupan di Belanda. Inburgering juga mengajarkan tentang hak dan kewajiban warga negara Belanda, serta memberikan pengetahuan dasar tentang masyarakat Belanda. Program ini penting untuk membantu migran berintegrasi ke dalam masyarakat dan dunia kerja Belanda. Selain itu, ada juga berbagai kursus dan pelatihan yang dirancang untuk membantu migran memperoleh keterampilan teknis dan vokasional, yang meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di Belanda. Kursus ini dapat diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta, lembaga non-profit, atau bahkan perusahaan yang fokus pada pemberdayaan migran.

c. Kursus Kewirausahaan dan Pelatihan Profesional

Belanda memiliki banyak lembaga yang menyelenggarakan kursus kewirausahaan untuk orang dewasa, terutama bagi mereka yang ingin memulai bisnis atau mengembangkan usaha mereka. Program ini memberikan pelatihan dalam hal perencanaan bisnis, manajemen keuangan, pemasaran, dan berbagai aspek lainnya yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan bisnis. Kursus kewirausahaan ini sering kali dilengkapi dengan pelatihan praktis dan mentor yang dapat membimbing peserta dalam menjalankan usaha mereka. Program ini sangat penting di Belanda karena membantu mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lebih banyak usaha dan lapangan pekerjaan baru.

d. Pendidikan Sosial dan Pengembangan Komunitas

Pendidikan sosial dan pengembangan komunitas juga merupakan bagian penting dari pendidikan Nonformal di Belanda. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas sosial dan budaya, serta mendukung pembangunan komunitas yang lebih inklusif dan adil. Beberapa program dalam kategori ini termasuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sosial, kegiatan budaya yang melibatkan seni dan olahraga, serta program-program yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan, anak muda, atau kelompok yang terpinggirkan.

e. Pembelajaran Daring (*Online Learning*)

Belanda juga memiliki banyak pilihan pendidikan Nonformal daring (*online learning*) yang semakin berkembang pesat. Kursus daring ini memungkinkan individu untuk mengakses materi pendidikan kapan saja dan di mana saja, memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang dewasa yang bekerja atau memiliki keterbatasan waktu. Platform-platform yang khusus menyediakan kursus daring memberikan berbagai pilihan mulai dari pelatihan keterampilan

teknis hingga pengembangan pribadi dan soft skills. Hal ini memudahkan siapa saja untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri.

C. Kelompok Sasaran PNF di Belanda

1. Anak-Anak (Pendidikan Anak Usia Dini)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) di Belanda memiliki peran penting dalam perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak-anak sebelum mereka memasuki pendidikan formal. Meskipun PAUD bukanlah bagian dari sistem pendidikan formal, program-program ini seringkali diselenggarakan oleh lembaga-lembaga masyarakat atau swasta. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak untuk masuk ke sekolah dasar dengan memberikan pengalaman belajar yang melibatkan pengembangan keterampilan sosial, bahasa, dan motorik. Kelompok sasaran utama dari PAUD di Belanda adalah anak-anak usia 0 hingga 6 tahun, yang mencakup anak-anak dari keluarga dengan beragam latar belakang sosial dan budaya. Meskipun anak-anak pada usia ini tidak mengikuti pendidikan formal, PAUD memberikan kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan belajar keterampilan dasar yang diperlukan untuk beradaptasi dengan lingkungan pendidikan formal di masa depan. Istilah yang digunakan Program PAUD di Belanda sering disebut dengan "Peuterspeelzaal" (kelompok bermain untuk anak usia dini) atau Kinderdagverblijf (tempat penitipan anak).

a. Remaja

Remaja yang berusia lebih dari 12 tahun, terutama mereka yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan formal atau yang menghadapi kesulitan di sekolah, juga menjadi kelompok sasaran pendidikan Nonformal di Belanda. Program-program ini bertujuan untuk memberikan peluang bagi anak muda untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan

untuk sukses di dunia kerja atau kehidupan sosial mereka. Kelompok sasaran ini mencakup:

- 1) Remaja yang putus sekolah: Banyak remaja di Belanda yang tidak menyelesaikan pendidikan formal mereka karena berbagai alasan, seperti kesulitan belajar, masalah pribadi, atau kurangnya motivasi. Pendidikan Nonformal dapat memberikan mereka kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan kualifikasi yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pekerjaan.
- 2) Anak muda yang berisiko sosial: Termasuk remaja yang terlibat dalam perilaku berisiko atau gangguan sosial, yang memerlukan dukungan dan bimbingan melalui pendidikan Nonformal untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional.

Program-program untuk remaja ini sering kali mencakup kursus keterampilan praktis, pelatihan vokasional, dan pelatihan pengembangan diri yang bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan pekerjaan mereka di masa depan.

b. Orang Dewasa

Pendidikan Nonformal di Belanda juga sangat relevan bagi orang dewasa yang sudah bekerja. Kelompok ini meliputi individu yang ingin meningkatkan keterampilan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, mengikuti perkembangan industri, atau mengubah karier. Pendidikan Nonformal untuk orang dewasa ini memberikan akses ke berbagai kursus yang berkaitan dengan keterampilan teknis, profesional, dan pengembangan pribadi. Kelompok sasaran utama dalam kategori ini adalah Pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan atau mendapatkan sertifikasi baru, Orang dewasa yang ingin memperoleh keterampilan baru yang relevan dengan dunia kerja atau yang perlu memperbarui keterampilan mereka agar dapat beradaptasi dengan

perkembangan teknologi dan perubahan pasar kerja, Individu yang ingin beralih karier: Orang dewasa yang memutuskan untuk beralih ke sektor pekerjaan lain dan membutuhkan pelatihan ulang atau peningkatan keterampilan.

c. Migran dan Pengungsi

Kelompok sasaran penting dalam pendidikan Nonformal di Belanda adalah migran dan pengungsi. Di Belanda, migran dan pengungsi sering kali menghadapi kesulitan dalam berintegrasi dengan masyarakat, terutama terkait dengan bahasa dan budaya. Untuk itu, pendidikan Nonformal berfokus pada memberikan pelatihan bahasa, keterampilan sosial, dan pengetahuan budaya yang diperlukan untuk memfasilitasi integrasi mereka ke dalam masyarakat Belanda.

Program Inburgering adalah contoh utama yang ditujukan untuk migran yang baru datang ke Belanda. Program ini meliputi pelatihan bahasa Belanda, pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban warga negara Belanda, serta pengetahuan mengenai nilai-nilai budaya Belanda. Kursus ini memberikan migran kesempatan untuk memahami kehidupan sosial dan profesional di Belanda.

d. Kelompok Rentan dan Penyandang Disabilitas

Pendidikan Nonformal di Belanda juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, atau individu yang menghadapi tantangan sosial-ekonomi. Program-program ini berfokus pada pemberdayaan mereka melalui pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan mereka dan mendukung partisipasi mereka dalam kehidupan sosial.

e. Warga Lansia

Kelompok sasaran terakhir dalam pendidikan Nonformal di Belanda adalah warga lanjut usia. Pendidikan Nonformal untuk lansia berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan pribadi, serta pemberdayaan mereka untuk hidup lebih

mandiri dan aktif dalam masyarakat. Program-program ini juga memberikan kesempatan bagi lansia untuk terus belajar sepanjang hayat, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain.

D. Penyelenggara PNF di Belanda

1. Lembaga Pemerintah

Pemerintah Belanda memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal, terutama untuk kelompok masyarakat yang kurang terlayani, seperti migran, orang dewasa yang kurang berpendidikan, serta penyandang disabilitas. Beberapa lembaga pemerintah yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal antara lain:

a. Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO)

Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) adalah lembaga pendidikan yang khusus menyelenggarakan pendidikan Nonformal untuk orang dewasa. CVO menawarkan kursus dalam berbagai bidang, mulai dari keterampilan profesional, pendidikan bahasa (termasuk kursus bahasa Belanda untuk migran), hingga pelatihan kewarganegaraan. CVO bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja orang dewasa, memberi mereka keterampilan baru, serta memperbaiki kemampuan sosial dan intelektual mereka.

CVO biasanya memiliki banyak cabang di seluruh Belanda dan bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah untuk menyediakan pelatihan berbasis keterampilan, pelatihan bahasa, dan program integrasi sosial.

b. Inburgering

Program Inburgering adalah program yang dirancang oleh pemerintah Belanda untuk membantu migran berintegrasi ke dalam masyarakat Belanda. Program ini mencakup pelatihan bahasa Belanda, pemahaman tentang hukum Belanda, serta pembelajaran tentang budaya dan nilai-nilai sosial yang berlaku

di Belanda. Program ini merupakan salah satu bentuk pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah, dengan tujuan agar migran dapat lebih mudah beradaptasi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi di Belanda.

c. Pusat Pembelajaran Dewasa (Volwasseneneducatie)

Selain CVO, pemerintah Belanda juga mendukung lembaga-lembaga lain yang berfokus pada pendidikan orang dewasa. Lembaga ini menyediakan kursus untuk meningkatkan keterampilan kerja dan pribadi bagi orang dewasa. Mereka juga sering bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk menyelenggarakan pelatihan profesional.

2. Lembaga Swasta

Selain lembaga pemerintah, banyak lembaga swasta yang turut berperan dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Belanda. Lembaga-lembaga ini sering kali berfokus pada kursus keterampilan praktis, pelatihan teknis, serta kursus pengembangan pribadi dan sosial.

a. Organisasi Pelatihan dan Kursus Swasta

Lembaga pelatihan swasta banyak menawarkan kursus dalam bidang-bidang seperti teknologi, keterampilan bisnis, seni, olahraga, bahasa, dan pengembangan pribadi. Kursus-kursus ini dirancang untuk membantu individu memperoleh keterampilan yang dapat langsung diterapkan dalam dunia kerja atau kehidupan sehari-hari. Kursus ini biasanya lebih fleksibel dalam hal waktu dan tempat, sehingga sangat cocok bagi individu yang sibuk atau tidak dapat mengakses pendidikan formal.

b. Platform Pendidikan Daring

Beberapa lembaga swasta di Belanda juga menyelenggarakan kursus pendidikan Nonformal secara daring. Platform seperti Coursera, Udemy, dan FutureLearn menawarkan berbagai kursus yang mencakup keterampilan teknis, pengembangan pribadi, hingga keterampilan manajerial. Kursus daring ini memberi fleksibilitas bagi para

peserta untuk belajar kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kebutuhan mereka. Lembaga-lembaga ini bekerja sama dengan universitas, perusahaan, atau instruktur ahli di berbagai bidang.

c. Pelatihan Perusahaan

Banyak perusahaan besar di Belanda juga menyediakan program pelatihan Nonformal untuk karyawan mereka. Program pelatihan ini dapat berupa kursus untuk meningkatkan keterampilan teknis, kursus bahasa, serta pelatihan kepemimpinan dan manajerial. Dengan pelatihan ini, perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan, mendukung pengembangan karier mereka, dan menjaga daya saing perusahaan.

3. Organisasi Non-Profit dan Komunitas

Organisasi non-profit dan komunitas juga memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Belanda. Lembaga-lembaga ini sering kali menawarkan kursus dan program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti migran, penyandang disabilitas, perempuan, atau anak muda yang menghadapi kesulitan dalam pendidikan formal.

a. Organisasi Sosial dan Kemanusiaan

Lembaga-lembaga sosial seperti Humanitas dan VluchtelingenWerk Nederland (Organisasi untuk Pengungsi Belanda) seringkali menyediakan program pelatihan dan pendidikan Nonformal yang bertujuan untuk membantu kelompok-kelompok rentan seperti pengungsi, migran, dan individu yang terpinggirkan dalam masyarakat. Program-program ini dapat mencakup kursus bahasa, pelatihan pekerjaan, dan kegiatan yang mendukung integrasi sosial.

b. Kelompok Sosial dan Komunitas

Di Belanda, ada banyak komunitas dan kelompok sosial yang juga berperan dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal. Misalnya, organisasi-organisasi berbasis agama atau

budaya sering mengadakan kursus untuk meningkatkan keterampilan sosial dan pribadi, kursus pengembangan seni dan kerajinan, serta kegiatan rekreasi dan olahraga. Program-program ini biasanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Beberapa contoh organisasi yang menyediakan pendidikan Nonformal untuk kelompok rentan termasuk Stichting Lezen en Schrijven (Yayasan untuk Membaca dan Menulis) yang menawarkan pelatihan untuk orang dewasa yang kurang terampil dalam membaca dan menulis, serta program-program untuk penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan pendidikan khusus.

c. Perpustakaan dan Pusat Pembelajaran Komunitas

Perpustakaan umum di Belanda juga menjadi penyelenggara pendidikan Nonformal yang penting, khususnya dalam menyediakan akses ke materi pendidikan, kursus, dan pelatihan berbasis komunitas. Perpustakaan ini sering menawarkan kursus-kursus dalam bidang literasi digital, membaca, dan pengetahuan umum. Selain itu, banyak perpustakaan yang memiliki program belajar bersama dan tempat untuk komunitas lokal melakukan berbagai kegiatan sosial dan edukatif. Pusat pembelajaran komunitas, yang dikelola oleh lembaga lokal, juga menyediakan kursus-kursus Nonformal bagi warga untuk meningkatkan keterampilan pribadi, seperti kursus memasak, bahasa asing, keterampilan komunikasi, dan kegiatan kebudayaan lainnya.

E. Metode Penyelenggaraan PNF di Belanda

1. Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning*)

Pembelajaran berbasis proyek (PBL) adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam pendidikan Nonformal di Belanda. Metode ini melibatkan peserta didik dalam sebuah proyek nyata yang bertujuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk. Peserta didik akan bekerja dalam

kelompok atau individu untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelesaikan proyek tersebut. Dalam konteks PNF, PBL memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan cara yang lebih aplikatif dan praktis. Mereka tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga belajar melalui pengalaman langsung yang berhubungan dengan dunia nyata. Misalnya, pelatihan kewirausahaan bagi orang dewasa bisa melibatkan peserta didik dalam proyek pengembangan bisnis kecil, di mana mereka belajar tentang perencanaan bisnis, manajemen keuangan, dan strategi pemasaran.

2. Pembelajaran Mandiri (i)

Metode pembelajaran mandiri adalah pendekatan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengatur proses belajarnya sendiri. Dalam model ini, peserta didik diberikan materi, sumber daya, dan bimbingan minimal, namun mereka bertanggung jawab penuh untuk menetapkan tujuan belajar mereka sendiri, mencari sumber daya yang relevan, serta mengevaluasi kemajuan mereka. Pendidikan Nonformal di Belanda sering menggunakan metode pembelajaran mandiri ini, terutama dalam kursus yang diselenggarakan secara daring (online) atau dalam program pelatihan berbasis keterampilan yang lebih fleksibel. Misalnya, program pelatihan keterampilan yang berfokus pada teknologi informasi, pengembangan karir, atau seni bisa memberikan materi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri.

3. Pembelajaran Kolaboratif (*Collaborative Learning*)

Metode pembelajaran kolaboratif mengutamakan interaksi dan kerjasama antara peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Metode ini dapat dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok, kerja tim, atau proyek kolaboratif yang mengharuskan peserta didik untuk bekerja bersama dalam *menyelesaikan* tugas atau masalah yang diberikan. Di Belanda, banyak program pendidikan Nonformal yang menggunakan

pendekatan ini, terutama dalam pelatihan yang melibatkan orang dewasa yang bekerja atau kelompok sosial yang ingin meningkatkan keterampilan mereka dalam bekerja secara tim. Misalnya, pelatihan manajerial atau kursus pengembangan pribadi sering kali melibatkan peserta didik dalam diskusi kelompok, permainan peran (role-playing), dan pemecahan masalah bersama-sama.

4. Pembelajaran Praktik (*Experiential Learning*)

Metode pembelajaran praktik atau *experiential learning* adalah pendekatan di mana peserta didik belajar melalui pengalaman langsung. Dalam konteks pendidikan Nonformal, ini sering kali melibatkan kegiatan praktis yang memungkinkan peserta didik untuk mencoba langsung keterampilan yang mereka pelajari dalam situasi dunia nyata. Pembelajaran praktik dapat mencakup kegiatan seperti pelatihan magang, simulasi, atau proyek lapangan. Contoh yang dapat ditemui dalam PNF di Belanda adalah pelatihan keterampilan teknis seperti kursus komputer, kursus memasak, atau pelatihan keahlian tangan (craftsmanship), di mana peserta didik tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam mengaplikasikan keterampilan tersebut.

5. Pembelajaran Daring (*Online Learning*)

Pendidikan Nonformal di Belanda juga semakin mengandalkan pembelajaran daring (*online learning*) sebagai metode yang fleksibel dan efisien. Pembelajaran daring memungkinkan peserta didik untuk mengakses materi pendidikan kapan saja dan dari mana saja, memberikan fleksibilitas waktu yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang dewasa yang sibuk atau tidak dapat mengikuti program pendidikan formal. Lembaga- lembaga pendidikan Nonformal, seperti universitas atau platform pelatihan daring, menyediakan berbagai kursus yang dapat diakses secara online, termasuk kursus dalam keterampilan teknologi, bahasa, atau manajemen. Pembelajaran daring ini sering kali menggunakan metode yang

interaktif, seperti video pembelajaran, kuis, forum diskusi, dan sesi bimbingan langsung (live sessions).

6. Mentoring dan Pembelajaran Berbasis Pengalaman (Mentoring and Coaching)

Metode mentoring dan coaching juga sering digunakan dalam pendidikan Nonformal di Belanda, terutama untuk pengembangan pribadi atau karir. Dalam konteks ini, seorang mentor atau pelatih berpengalaman membantu peserta didik dengan memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Program mentoring di Belanda dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan kewirausahaan, pengembangan kepemimpinan, serta kursus pengembangan diri. Dalam hal ini, mentor berperan untuk memberikan wawasan dan pengalaman praktis yang tidak bisa diajarkan melalui teori semata.

F. Karakteristik penyelenggaraan PNF di Belanda

1. Fleksibilitas dalam Waktu dan Tempat

Salah satu karakteristik utama pendidikan Nonformal di Belanda adalah fleksibilitas yang sangat tinggi dalam hal waktu dan tempat pelaksanaan program. PNF di Belanda dirancang untuk memberi kesempatan belajar kepada individu yang memiliki keterbatasan waktu atau mobilitas, seperti pekerja dewasa, orang yang memiliki komitmen keluarga, atau mereka yang tinggal di daerah terpencil. Kursus dan pelatihan sering kali diselenggarakan dalam berbagai format, mulai dari pembelajaran tatap muka yang berlangsung pada akhir pekan atau malam hari, hingga pembelajaran daring yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Fleksibilitas ini memastikan bahwa semua orang, terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi mereka, dapat mengakses peluang pendidikan yang relevan dengan kebutuhan mereka.

2. Pendekatan Pembelajaran Sepanjang Hayat (*Lifelong Learning*)

Pendidikan Nonformal di Belanda sangat mendukung konsep pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*). Konsep ini mengakui bahwa pembelajaran tidak terbatas pada usia muda atau masa sekolah, tetapi berlangsung sepanjang hidup seseorang. Oleh karena itu, PNF di Belanda diselenggarakan untuk berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa dan lansia. Lembaga pendidikan Nonformal di Belanda tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan untuk dunia kerja, tetapi juga pada pengembangan pribadi, keterampilan sosial, dan kualitas hidup. Program pendidikan ini disesuaikan dengan tahap kehidupan masing-masing individu, dan memungkinkan mereka untuk terus belajar dan berkembang.

3. Inklusif dan Aksesibilitas untuk Semua

Pendidikan Nonformal di Belanda memiliki karakteristik yang inklusif, artinya ia dirancang untuk dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang mungkin terpinggirkan atau tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Pendidikan Nonformal di Belanda menekankan pada pemerataan akses, sehingga setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, budaya, atau fisik, dapat memanfaatkannya. Misalnya, untuk migran dan pengungsi, Belanda menawarkan kursus integrasi yang mencakup bahasa Belanda, nilai-nilai sosial, dan keterampilan yang membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan di negara tersebut. Untuk penyandang disabilitas, ada program-program pelatihan khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memberikan mereka keterampilan yang sesuai dengan kondisi mereka.

4. Pembelajaran yang Berorientasi pada Praktik dan Keterampilan

PNF di Belanda cenderung memiliki orientasi praktis yang kuat. Kursus dan pelatihan yang ditawarkan sering kali berfokus

pada pengembangan keterampilan yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dunia kerja. Pendekatan berbasis praktik ini memberikan peserta kesempatan untuk mengembangkan keterampilan teknis atau sosial yang berguna dalam profesi mereka atau untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara langsung. Metode pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning banyak digunakan dalam PNF di Belanda. Program-program pelatihan berfokus pada tugas praktis, proyek dunia nyata, dan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk mengasah keterampilan mereka melalui pengalaman langsung.

5. Berbasis pada Kebutuhan Masyarakat dan Dunia Kerja

Penyelenggaraan PNF di Belanda sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pasar kerja yang terus berubah. Banyak kursus dan pelatihan yang diselenggarakan di Belanda berfokus pada keterampilan yang dibutuhkan dalam sektor-sektor tertentu, seperti teknologi, kesehatan, atau manajemen. Oleh karena itu, pendidikan Nonformal di Belanda sering kali disesuaikan dengan tren industri dan perkembangan ekonomi global, sehingga peserta didik dapat memperoleh keterampilan yang relevan dan up-to-date. Sebagai contoh, di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat, banyak lembaga pendidikan Nonformal di Belanda yang menawarkan kursus keterampilan digital, seperti coding, desain web, dan pengelolaan data, yang semakin penting dalam dunia kerja saat ini.

G. Sumber Pendanaan PNF di Belanda

1. Pendanaan Pemerintah (Publik)

Pemerintah Belanda memainkan peran utama dalam pendanaan pendidikan Nonformal, baik melalui anggaran nasional maupun kebijakan pendanaan yang ditujukan untuk sektor pendidikan. Pendanaan dari pemerintah ini tidak hanya

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Nonformal, tetapi juga untuk memastikan pemerataan kesempatan pendidikan di seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk kelompok-kelompok yang sulit dijangkau oleh pendidikan formal.

2. Subsidi Pemerintah untuk Program Pendidikan Nonformal

Pemerintah Belanda memberikan subsidi untuk berbagai program pendidikan Nonformal, terutama yang dirancang untuk membantu kelompok-kelompok tertentu seperti migran, penyandang disabilitas, atau pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan mereka. Subsidi ini disalurkan melalui lembaga pendidikan, organisasi non-profit, atau lembaga pelatihan yang menyelenggarakan kursus-kursus atau program-program pelatihan. Sebagai contoh, program Inburgering yang membantu migran berintegrasi ke dalam masyarakat Belanda mendapatkan dana dari pemerintah untuk penyelenggaraan kursus bahasa, pelatihan kewarganegaraan, dan pemahaman budaya. Program ini sering kali difasilitasi oleh lembaga pendidikan yang menerima subsidi pemerintah untuk memastikan bahwa biaya pelatihan tidak menjadi hambatan bagi peserta.

3. Dana untuk Pendidikan Sepanjang Hayat (*Lifelong Learning*)

Pemerintah Belanda juga menyediakan dana untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*). Dana ini digunakan untuk menyelenggarakan kursus dan pelatihan bagi orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan mereka untuk pasar kerja. Program pendidikan Nonformal yang diselenggarakan di bawah kebijakan ini sering kali berfokus pada peningkatan keterampilan kerja, pelatihan teknis, dan kursus pengembangan pribadi. Contoh: Program yang diadakan oleh Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) yang menyediakan pelatihan keterampilan profesional untuk orang dewasa dan kelompok rentan.

4. Pendanaan Sektor Swasta

Selain pemerintah, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam penyediaan pendanaan untuk pendidikan Nonformal di Belanda. Banyak perusahaan besar yang menyediakan dana untuk pelatihan internal bagi karyawan mereka, yang berfokus pada pengembangan keterampilan profesional dan kepemimpinan. Pendanaan dari sektor swasta ini umumnya ditujukan untuk program pelatihan yang lebih praktis dan terfokus pada kebutuhan industri. Perusahaan besar di Belanda sering menyediakan dana pelatihan untuk karyawan mereka, baik melalui program pelatihan internal yang dikelola langsung oleh perusahaan, maupun melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan eksternal. Pendanaan ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan keterampilan karyawan mereka sesuai dengan kebutuhan bisnis dan perkembangan pasar. Selanjutnya Corporate Social Responsibility (CSR), Beberapa perusahaan juga mendanai program-program pendidikan Nonformal sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Program ini biasanya berfokus pada pemberdayaan komunitas atau pengembangan keterampilan bagi kelompok yang terpinggirkan. Misalnya, perusahaan dapat menyelenggarakan kursus keterampilan untuk migran atau kelompok sosial ekonomi rendah, yang bertujuan untuk meningkatkan akses mereka terhadap pasar tenaga kerja.

5. Pendanaan dari Uni Eropa dan Organisasi Internasional

Belanda juga menerima pendanaan dari Uni Eropa untuk program-program pendidikan Nonformal, terutama yang berfokus pada pengembangan keterampilan, pelatihan untuk migran, dan pemberdayaan sosial. Uni Eropa memiliki beberapa program yang mendukung pendidikan Nonformal di negara anggotanya, termasuk Belanda.

Salah satu sumber utama pendanaan dari Uni Eropa untuk pendidikan Nonformal adalah Erasmus+, sebuah program yang mendukung pendidikan, pelatihan, pemuda, dan olahraga di Eropa. Program ini menyediakan dana untuk berbagai inisiatif

pendidikan Nonformal, seperti kursus pengembangan keterampilan, pertukaran pelajar, dan pelatihan untuk pekerja muda dan profesional. Melalui Erasmus+, lembaga-lembaga di Belanda dapat menerima pendanaan untuk menyelenggarakan pelatihan internasional, pertukaran pelajar, dan program pembelajaran antar negara anggota Uni Eropa. Hal ini juga mendukung kolaborasi internasional dalam bidang pendidikan Nonformal, yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan global.

6. Pendanaan dari Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dan Lembaga Internasional

Beberapa lembaga internasional juga memberikan pendanaan untuk program pendidikan Nonformal di Belanda, terutama yang berfokus pada pengembangan sosial, pemberdayaan perempuan, dan integrasi migran. Organisasi-organisasi seperti PBB, UNESCO, dan lembaga internasional lainnya sering mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan Nonformal bagi kelompok rentan atau terpinggirkan.

7. Dana dari Organisasi Sosial dan Non-Profit

Organisasi sosial dan non-profit juga memainkan peran penting dalam penyediaan pendanaan untuk pendidikan Nonformal di Belanda. Banyak organisasi yang didedikasikan untuk memfasilitasi akses pendidikan bagi kelompok yang kurang terlayani, seperti migran, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpendapatan rendah. Dana untuk program-program ini biasanya berasal dari donasi, hibah, atau kerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta.

H. Kelebihan dan Kelemahan PNF di Belanda

Dalam penyelenggaraannya, Pendidikan nonformal di negara Belanda memiliki kelemahan dan kekurangan yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kelebihan Pendidikan Nonformal di Belanda

a. Fleksibilitas Akses dan Waktu

Salah satu kelebihan utama dari PNF di Belanda adalah fleksibilitas yang sangat tinggi, baik dari segi waktu maupun tempat. Pendidikan Nonformal dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan individu yang memiliki jadwal sibuk, seperti orang dewasa yang bekerja, ibu rumah tangga, atau migran yang baru datang ke negara tersebut. Program PNF sering kali diselenggarakan di luar jam kerja atau dalam format daring (online), yang memungkinkan peserta untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Sebagai contoh, banyak kursus bahasa Belanda yang diselenggarakan pada akhir pekan atau malam hari, sehingga dapat diakses oleh migran yang bekerja. Fleksibilitas ini sangat penting untuk memperluas akses ke pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.

b. Penyediaan Keterampilan yang Relevan dengan Dunia Kerja

PNF di Belanda sangat berorientasi pada pengembangan keterampilan praktis yang langsung diterapkan dalam dunia kerja. Banyak program pelatihan dan kursus di Belanda yang berfokus pada keterampilan teknis dan vokasional, seperti kursus di bidang teknologi, manufaktur, desain, hingga kewirausahaan. Hal ini sangat membantu untuk meningkatkan employability (kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan) dan memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan perubahan pasar kerja yang cepat. Program pelatihan ini juga sering kali disesuaikan dengan kebutuhan industri, sehingga lebih relevan dan membantu individu untuk meningkatkan kualitas kerja mereka.

c. Inklusif dan Aksesibel untuk Semua Kelompok Masyarakat

Salah satu keunggulan lain dari PNF di Belanda adalah sifatnya yang inklusif dan aksesibel. PNF memberikan kesempatan belajar bagi kelompok yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, seperti migran, orang dewasa yang tidak berpendidikan formal, atau penyandang disabilitas. Di Belanda,

pemerintah memberikan subsidi dan pendanaan khusus untuk memastikan bahwa pendidikan Nonformal dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, banyak program yang diselenggarakan untuk mendukung integrasi sosial, seperti kursus bahasa Belanda untuk migran atau program pelatihan untuk penyandang disabilitas. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa lebih banyak individu dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi negara.

d. Mendukung Pendidikan Sepanjang Hayat (Lifelong Learning)

PNF di Belanda mendukung konsep pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning), yang memungkinkan individu untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka sepanjang hidup. PNF menawarkan kesempatan belajar tidak hanya untuk anak-anak dan remaja, tetapi juga untuk orang dewasa dan lansia, yang ingin meningkatkan keterampilan kerja mereka atau mengembangkan minat baru. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, kebutuhan pasar kerja, atau hanya untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

2. Kelemahan Pendidikan Nonformal di Belanda

a. Ketergantungan pada Biaya Pribadi

Meskipun banyak program pendidikan Nonformal di Belanda yang disubsidi oleh pemerintah atau lembaga lain, biaya pribadi untuk beberapa kursus atau pelatihan masih bisa menjadi hambatan bagi sebagian orang, terutama mereka yang berada di kelompok sosial ekonomi rendah. Meskipun ada bantuan keuangan atau subsidi dari pemerintah untuk beberapa program, tidak semua kursus atau pelatihan mendapat dukungan tersebut. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi, biaya kursus bisa menjadi penghalang untuk mengakses pelatihan atau pendidikan Nonformal yang mereka perlukan.

b. Kurangnya Standar yang Konsisten

Meskipun banyak kursus pendidikan Nonformal di Belanda yang berkualitas tinggi, ada beberapa yang mungkin tidak memiliki standar yang konsisten. Sebagian besar program PNF di Belanda diselenggarakan oleh lembaga swasta atau organisasi non-profit, yang terkadang tidak memiliki regulasi yang sama ketatnya dengan sistem pendidikan formal. Ini dapat menyebabkan kualitas yang bervariasi antara satu kursus dengan kursus lainnya. Pendidikan Nonformal yang tidak terstandarisasi dengan baik bisa menyebabkan peserta didik merasa kebingungannya dalam memilih program yang tepat, atau merasa bahwa mereka tidak mendapatkan keterampilan yang cukup relevan atau berkualitas tinggi.

c. Tantangan dalam Mengukur Hasil dan Keberhasilan

Salah satu tantangan dalam PNF adalah menilai efektivitas dan keberhasilan program. Karena banyak kursus dan pelatihan di Belanda tidak diakui secara formal oleh sistem pendidikan negara, sulit untuk mengukur sejauh mana peserta didik berhasil dalam meningkatkan keterampilan atau mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan kursus. Penilaian terhadap hasil pendidikan Nonformal sering kali bersifat subjektif dan tidak selalu memiliki pengakuan yang sama seperti program pendidikan formal. Ini bisa membuatnya lebih sulit untuk peserta untuk menunjukkan kepada calon pemberi kerja bahwa keterampilan mereka diperoleh melalui pelatihan yang kredibel dan terstandarisasi.

d. Ketidakmerataan Akses di Daerah Terpencil

Meskipun Belanda secara umum memiliki sistem pendidikan Nonformal yang inklusif, akses ke program-program tersebut bisa terbatas, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau pedesaan. Beberapa kursus atau pelatihan Nonformal lebih mudah diakses di kota-kota besar, sementara individu di daerah pedesaan mungkin tidak memiliki banyak pilihan pelatihan atau harus melakukan perjalanan jauh untuk

mengaksesnya. Meskipun ada kursus daring yang membantu mengatasi masalah ini, masih ada tantangan bagi mereka yang tidak memiliki akses internet yang baik atau keterampilan digital untuk memanfaatkan pembelajaran online.

e. Keterbatasan Pengakuan Resmi

Meskipun banyak program pendidikan Nonformal di Belanda yang relevan dan bermanfaat, pengakuan resmi terhadap sertifikat atau kualifikasi yang diperoleh melalui PNF sering kali terbatas. Beberapa kursus Nonformal tidak diakui oleh lembaga pemerintah atau perusahaan besar, yang dapat membatasi kesempatan peserta didik untuk menggunakan kualifikasi mereka dalam mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Kursus yang diambil di luar sistem pendidikan formal mungkin tidak selalu dihargai oleh pemberi kerja atau lembaga pendidikan tinggi, yang lebih memilih gelar dan sertifikat dari sistem pendidikan formal.

Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (PNF) di Belanda memiliki pendekatan yang fleksibel, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Pemerintah Belanda memberikan dukungan yang kuat melalui pendanaan dan kebijakan yang mendukung pendidikan sepanjang hayat, memastikan akses yang luas bagi berbagai kelompok, termasuk migran dan kelompok rentan. Program-program PNF di Belanda sangat relevan dengan perkembangan dunia kerja, memberikan kesempatan belajar yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta menekankan pada peningkatan keterampilan praktis yang langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun memiliki tantangan terkait dengan pengakuan resmi dan ketidakmerataan akses di daerah terpencil, PNF di Belanda tetap menjadi sistem yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup, pemberdayaan sosial, dan keterampilan masyarakat

I. Analisis Studi Komparatif Belanda dengan Negara Lain

Indonesia, Jepang, Filipina, Turki, dan Italia, meskipun setiap negara memiliki pendekatan yang unik berdasarkan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Di Belanda, PNF sangat berfokus pada fleksibilitas, inklusivitas, dan relevansi dengan dunia kerja. Program-program pendidikan Nonformal di Belanda sering kali disesuaikan dengan perkembangan pasar kerja dan menawarkan kursus yang praktis, seperti pelatihan keterampilan teknis dan kursus bahasa, dengan banyaknya dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan lembaga non-profit. Hal ini memungkinkan akses yang luas bagi masyarakat, termasuk migran dan kelompok rentan, untuk terus mengembangkan keterampilan mereka sepanjang hayat.

Di Indonesia, meskipun konsep PNF sudah diterima luas, tantangan utama adalah ketidakmerataan akses pendidikan dan keterbatasan sumber daya. PNF di Indonesia lebih banyak diselenggarakan oleh lembaga swasta dan non-profit, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan vokasional dan kewirausahaan. Namun, pengakuan formal terhadap sertifikat PNF masih menjadi masalah, dan kebijakan pendidikan Nonformal belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat, berbeda dengan Belanda yang sudah memiliki kebijakan jelas dan pendanaan yang konsisten untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Di Jepang, PNF juga sangat berkembang dengan fokus yang kuat pada peningkatan keterampilan teknis dan vokasional. Jepang dikenal dengan program pelatihan yang berorientasi pada dunia kerja, seperti pelatihan industri dan teknologi. Namun, Jepang memiliki pendekatan yang lebih terpusat, dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta bekerja sama dalam menyediakan pelatihan bagi pekerja dewasa, terutama mereka yang berusia lanjut. Berbeda dengan Belanda yang lebih menekankan pada pembelajaran sepanjang hayat untuk semua kelompok usia, Jepang cenderung lebih fokus pada pembelajaran

untuk pekerja dan peningkatan keterampilan dalam sektor industri.

Di Filipina, PNF berperan penting dalam mengatasi ketidaksetaraan pendidikan dan meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja global. Filipina, dengan ekonomi yang bergantung pada pekerja migran, menyelenggarakan banyak kursus bahasa dan pelatihan keterampilan untuk mempersiapkan warganya bekerja di luar negeri. Pendidikan Nonformal di Filipina juga sangat berfokus pada komunitas dan pemberdayaan masyarakat, dengan lembaga-lembaga lokal yang mengadakan pelatihan dalam berbagai bidang seperti pertanian, kerajinan tangan, dan layanan rumah tangga. Sama halnya dengan Indonesia, tantangan utama di Filipina adalah kualitas dan pengakuan terhadap kualifikasi yang diperoleh dari pendidikan Nonformal.

Turki memiliki sistem pendidikan Nonformal yang kuat dengan fokus pada pemberdayaan sosial dan peningkatan keterampilan pekerja. Turki memiliki program pelatihan Nonformal yang sangat berkembang untuk migran dan perempuan, dengan lembaga pemerintah dan organisasi non-profit yang menyediakan kursus di berbagai bidang, termasuk bahasa, keterampilan teknis, dan kewirausahaan. PNF di Turki sangat mendukung integrasi sosial dan ekonomi, mirip dengan Belanda yang memiliki kebijakan inklusif untuk migran, tetapi Turki juga menghadapi tantangan dalam menyediakan akses yang merata di daerah pedesaan.

Di Italia, pendidikan Nonformal sering kali diselenggarakan oleh organisasi masyarakat sipil dan lembaga swasta, dengan fokus pada seni, budaya, dan pengembangan keterampilan sosial. Italia juga memiliki program pelatihan untuk pengembangan keterampilan di sektor-sektor tertentu, seperti pariwisata dan kerajinan tangan. Meskipun PNF di Italia mendukung partisipasi sosial dan ekonomi, sistem ini lebih beragam dalam kualitas dan akses dibandingkan Belanda, yang memiliki sistem yang lebih terorganisir dan didukung oleh kebijakan pemerintah yang lebih konsisten. Di Italia, pendanaan

untuk PNF sering bergantung pada sektor swasta dan inisiatif komunitas lokal.

Secara keseluruhan, PNF di Belanda lebih terintegrasi dengan kebijakan pemerintah yang jelas, dukungan pendanaan yang berkelanjutan, dan berfokus pada fleksibilitas serta akses universal bagi semua kelompok masyarakat. Sementara itu, negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Turki juga memiliki kebijakan yang mendukung pemberdayaan sosial melalui PNF, tetapi tantangan besar seperti ketidakmerataan akses, keterbatasan pengakuan kualifikasi, dan perbedaan tingkat pendanaan menjadi kendala utama. Jepang dan Italia memiliki fokus yang lebih besar pada peningkatan keterampilan vokasional dan teknis untuk pekerja, dengan Italia memiliki variasi yang lebih besar dalam kualitas dan aksesibilitas program pendidikan Nonformal.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

BAB VIII

Pendidikan Nonformal di Kenya

Pendidikan sekolah dasar di Kenya selama 8 tahun gratis, tetapi tidak wajib. Murid naik kelas setiap tahun dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Namun, jika mereka gagal total dalam ujian akhir tahun, mereka mungkin harus mengulang. Sebagian besar sekolah dasar adalah milik negara, meskipun standarnya mungkin berbeda di daerah pedesaan. Selanjutnya pendidikan menengah di Kenya. Terdapat 3 kategori sekolah menengah, yaitu sekolah negeri, sekolah swasta, dan sekolah harambee yang menerima sejumlah dukungan negara. Siswa yang memperoleh hasil sekolah dasar terbaik bersekolah di sekolah nasional yang lebih baik, sementara yang lain harus menerima nilai terbaik kedua. Setelah 4 tahun belajar, mereka menulis ujian sertifikat pendidikan menengah Kenya mereka. Untuk pendidikan kejuruan di Kenya, Sertifikat dan diploma sekolah pasca-sekolah menengah ditawarkan oleh sekolah kejuruan dan perguruan tinggi. Sekolah-sekolah ini menyediakan berbagai macam mata pelajaran profesional. Berdasarkan peringkatnya, sekolah-sekolah ini meliputi politeknik, lembaga pelatihan, perguruan tinggi keguruan, dan lembaga swasta. Selanjutnya terdapat 30

universitas di Kenya, 23 di antaranya swasta dan 7 didanai negara. Universitas tertua di kelompok terakhir adalah Universitas Kenya yang berdiri sejak 1856, tetapi baru berdiri sepenuhnya pada tahun 1970. Universitas ini terdiri dari 7 kampus perguruan tinggi yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala sekolah, yaitu pertanian & ilmu kedokteran hewan, arsitektur & teknik, ilmu biologi & fisika, pendidikan & studi eksternal, ilmu kesehatan, humaniora & ilmu sosial, dan bisnis.

Di banyak negara, pendidikan Nonformal telah memainkan peran penting dalam mengatasi masalah kesenjangan pendidikan, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Pendidikan Nonformal memberikan peluang bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses pendidikan formal untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan nilai yang penting dalam kehidupan mereka. Salah satu negara yang mengalami perkembangan signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal adalah Kenya. Dalam konteks ini, PNF di Kenya telah menjadi salah satu pilar utama dalam sistem pendidikan negara tersebut, memberikan kesempatan bagi individu, khususnya mereka yang berada di luar jangkauan pendidikan formal, untuk mengembangkan keterampilan hidup yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pendidikan Nonformal di Kenya mencakup berbagai program pelatihan keterampilan, pendidikan kewirausahaan, literasi, dan pengembangan komunitas, yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi non-pemerintah (LSM). Pendidikan ini dirancang untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Kenya, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan formal, kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan kebutuhan akan keterampilan praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Program PNF ini bukan hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk

memberdayakan individu agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara.

Kenya, seperti banyak negara berkembang lainnya, menghadapi tantangan besar dalam menyediakan pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Di banyak daerah, terutama di pedesaan, akses terhadap pendidikan formal masih terbatas, sementara jumlah penduduk yang membutuhkan pendidikan Nonformal semakin meningkat. Oleh karena itu, penting untuk menggali dan memahami bagaimana penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Kenya telah berkembang, kebijakan yang mendasari implementasinya, serta kelebihan dan kekurangan dari sistem tersebut.

Buku ini bertujuan untuk mengulas secara mendalam pendidikan Nonformal di Kenya, dengan membahas sejarahnya, kebijakan yang mendasari, bentuk penyelenggaraannya, serta kelompok sasaran yang dilayani. Selain itu, Buku ini juga akan membahas tantangan-tantangan yang dihadapi serta peluang yang ada untuk memperkuat sistem pendidikan Nonformal di Kenya. Sebagai bagian dari pemahaman yang lebih luas, Buku ini juga akan melakukan studi komparatif pendidikan Nonformal di Kenya dengan negara-negara lain, seperti Indonesia, Jepang, Filipina, Turki, dan Italia, untuk melihat perbedaan dan persamaan dalam pendekatan pendidikan Nonformal di berbagai belahan dunia.

Pendidikan Nonformal (PNF) di Kenya memiliki sejarah yang panjang dan berakar kuat dalam upaya negara untuk mengatasi tantangan ketidakmerataan akses terhadap pendidikan formal. Sejak kemerdekaan Kenya pada tahun 1963, negara ini menghadapi sejumlah hambatan dalam menyediakan pendidikan yang inklusif bagi seluruh warganya, terutama di daerah-daerah terpencil dan di kalangan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Seiring waktu, pendidikan Nonformal berkembang menjadi salah satu alternatif penting untuk menjangkau kelompok-kelompok yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal.

Pada awalnya, pendidikan Nonformal di Kenya berfokus pada pemberian keterampilan praktis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pendidikan Nonformal pertama kali banyak diluncurkan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah dan organisasi internasional yang bekerja sama dengan pemerintah. Fokus utamanya adalah untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi orang dewasa yang buta huruf atau tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal. Banyak program yang mengajarkan keterampilan dasar seperti pertanian, kerajinan tangan, dan perdagangan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Pada tahun 1970-an, pemerintah Kenya mulai mengakui pentingnya pendidikan Nonformal sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pada saat itu, tantangan terbesar adalah tingkat buta huruf yang masih sangat tinggi, terutama di pedesaan, di mana banyak anak-anak tidak dapat mengakses pendidikan formal karena faktor kemiskinan, jarak, dan kekurangan fasilitas. Program-program pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi tingkat buta huruf melalui kursus literasi untuk orang dewasa dan anak-anak yang tidak dapat mengakses sekolah formal.

Pada tahun 1980-an, dengan dukungan dari badan-badan internasional seperti UNESCO dan UNICEF, pendidikan Nonformal di Kenya mulai mengalami perubahan signifikan. Berbagai inisiatif pendidikan untuk semua (Education for All/EFA) dimulai, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang inklusif dan setara bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang tidak terdaftar di sekolah formal. Dalam periode ini, pendidikan Nonformal berkembang tidak hanya dalam bentuk pelatihan keterampilan, tetapi juga mencakup pendidikan kesehatan, pendidikan lingkungan, dan pendidikan kewirausahaan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan media, pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, pendidikan Nonformal di Kenya semakin terdiversifikasi. Program berbasis teknologi

seperti pendidikan melalui radio dan televisi mulai diperkenalkan, memungkinkan peserta didik di daerah-daerah terpencil untuk mengakses pembelajaran tanpa harus pergi ke sekolah. Pendidikan jarak jauh menjadi alternatif yang sangat penting, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau.

Di sisi lain, pemerintah Kenya juga mulai mengintegrasikan pendidikan non- formal ke dalam kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan Pendidikan untuk Semua (EFA) yang diperkenalkan oleh pemerintah Kenya pada awal 2000-an mendorong penyelenggaraan berbagai program pendidikan Nonformal untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, terutama di sektor pertanian dan kesehatan. Program- program ini lebih menekankan pada pendidikan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pendidikan Nonformal di Kenya terus berkembang hingga saat ini, mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan literasi untuk orang dewasa, pelatihan keterampilan teknis, pendidikan kewirausahaan, dan pengembangan kapasitas untuk kelompok-kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan pemuda. Meskipun sistem pendidikan formal di Kenya terus berkembang, pendidikan Nonformal tetap memainkan peran yang sangat penting dalam menjangkau masyarakat yang tidak terlayani oleh pendidikan formal dan memberi mereka kesempatan untuk belajar keterampilan yang relevan dan berguna dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, sejarah pendidikan Nonformal di Kenya menggambarkan perjalanan panjang dari upaya awal untuk mengatasi buta huruf dan keterbatasan akses pendidikan, hingga berkembangnya berbagai program yang lebih terstruktur dan menyeluruh. Kini, pendidikan Nonformal di Kenya tidak hanya berfokus pada pembelajaran keterampilan dasar, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendidikan kesehatan, dan peningkatan kemampuan ekonomi.

A. Kebijakan Penyelenggaraan PNF di Kenya

1. Kebijakan Pendidikan untuk Semua (*Education for All - EFA*)

Salah satu kebijakan penting yang mendasari pendidikan Nonformal di Kenya adalah kebijakan Pendidikan untuk Semua (*Education for All, EFA*), yang diperkenalkan pada tahun 1990. EFA bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua warga negara, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosial. Sebagai bagian dari komitmen internasional Kenya terhadap EFA, negara ini berfokus pada pengurangan angka buta huruf di kalangan orang dewasa, serta meningkatkan akses pendidikan untuk anak-anak dan remaja yang tidak terdaftar di sekolah formal.

Melalui kebijakan EFA, pendidikan Nonformal di Kenya semakin ditekankan sebagai alat untuk mengatasi ketidaksetaraan pendidikan. Program literasi untuk orang dewasa, pelatihan keterampilan vokasional, dan kursus pengembangan kapasitas lainnya diperkenalkan untuk membantu masyarakat mengembangkan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. EFA juga memfasilitasi kerjasama antara pemerintah dan lembaga internasional, organisasi non-pemerintah (LSM), serta sektor swasta dalam menyediakan berbagai jenis pendidikan Nonformal.

2. Kebijakan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif di Kenya telah menjadi landasan penting dalam kebijakan pendidikan Nonformal. Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang dapat diakses oleh semua individu, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan masyarakat di daerah pedesaan. Dalam konteks ini, pendidikan Nonformal di Kenya difokuskan pada upaya pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal lainnya yang sering kali terpinggirkan dalam sistem pendidikan formal.

Kebijakan pendidikan inklusif ini berusaha untuk mengurangi hambatan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tertentu dalam mengakses pendidikan, baik itu hambatan fisik, sosial, atau ekonomi. Program-program Nonformal, seperti pelatihan kewirausahaan untuk perempuan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas, dirancang untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada kelompok-kelompok ini agar dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

3. Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Nonformal

Pendidikan Nonformal di Kenya juga mendapat perhatian dalam kebijakan desentralisasi pendidikan. Pemerintah Kenya telah memulai berbagai inisiatif untuk memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan Nonformal. Desentralisasi ini memungkinkan lebih banyak program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, yang dapat disesuaikan dengan budaya dan konteks sosial masing-masing komunitas.

Desentralisasi pendidikan Nonformal ini juga mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam penyusunan kebijakan pendidikan Nonformal, program-program ini menjadi lebih relevan dan lebih diterima oleh masyarakat, serta lebih mudah diakses oleh peserta didik.

4. Kebijakan Pengembangan Keterampilan dan Pemberdayaan Ekonomi

Salah satu kebijakan utama yang mendasari pendidikan Nonformal di Kenya adalah pengembangan keterampilan praktis dan pemberdayaan ekonomi. Pendidikan Nonformal di Kenya banyak berfokus pada pelatihan keterampilan vokasional yang dapat langsung diterapkan dalam dunia kerja. Program pelatihan dalam bidang pertanian, kerajinan tangan, teknologi, serta kewirausahaan diberikan untuk meningkatkan kapasitas

masyarakat dalam mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Pemerintah Kenya melalui berbagai lembaga pendidikan, seperti National Industrial Training Authority (NITA) dan Kenya Institute of Education (KIE), juga bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga internasional untuk menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Program-program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh keterampilan yang sangat dibutuhkan di dunia industri dan bisnis.

5. Kebijakan Kemitraan dengan Lembaga Swasta dan LSM

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Kenya juga melibatkan kemitraan erat antara pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi non-pemerintah (LSM). Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam merancang dan melaksanakan program-program PNF yang dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kemitraan ini penting untuk memperluas cakupan program dan menyediakan dana serta sumber daya yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan program pendidikan Nonformal.

Kerjasama ini memungkinkan berbagai organisasi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keahlian dalam merancang program pendidikan yang relevan dan berdampak. LSM lokal dan internasional sering kali berfokus pada bidang-bidang tertentu, seperti pemberdayaan perempuan, pendidikan kesehatan, atau perlindungan hak-hak kelompok rentan, yang sangat penting dalam konteks pendidikan Nonformal di Kenya.

B. Bentuk Penyelenggaraan PNF di Kenya

Pendidikan Nonformal (PNF) di Kenya memainkan peran yang sangat penting dalam menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Pemerintah Kenya dan berbagai organisasi non-pemerintah (LSM) serta sektor swasta

telah bekerja sama untuk mengembangkan berbagai bentuk penyelenggaraan PNF yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan PNF di Kenya sangat beragam dan melibatkan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Beberapa bentuk penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Kenya antara lain pendidikan literasi, pelatihan keterampilan, pendidikan kewirausahaan, serta pendidikan berbasis komunitas.

1. Program Literasi dan Pengurangan Buta Huruf

Salah satu bentuk utama penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Kenya adalah program literasi, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat buta huruf di kalangan orang dewasa dan anak-anak yang tidak terdaftar di sekolah formal. Program literasi ini sangat penting, terutama di daerah pedesaan di mana tingkat buta huruf masih cukup tinggi. Program ini sering diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi internasional, dan sering kali ditujukan untuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan dan penyandang disabilitas.

Pelaksanaan program literasi biasanya dilakukan dalam bentuk kelas-kelas kecil yang dipandu oleh fasilitator atau pengajar yang telah dilatih. Materi yang diajarkan dalam program literasi ini mencakup dasar-dasar membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, pelatihan bahasa juga diberikan kepada peserta yang ingin meningkatkan kemampuan komunikasi mereka, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Swahili.

2. Pelatihan Keterampilan Vokasional

Pelatihan keterampilan vokasional adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan Nonformal yang sangat populer di Kenya. Program pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam dunia kerja. Pelatihan keterampilan vokasional mencakup berbagai bidang, seperti pertanian, teknologi, kerajinan tangan,

menjahit, dan keterampilan teknis lainnya yang penting untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Program ini sering diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta lembaga pelatihan teknis seperti National Industrial Training Authority (NITA). Pelatihan ini bersifat praktis dan sering kali melibatkan workshop atau pelatihan langsung di lapangan, yang memungkinkan peserta untuk memperoleh pengalaman langsung dalam bidang yang mereka pelajari.

3. Pendidikan Kewirausahaan

Pendidikan kewirausahaan adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan Nonformal yang berfokus pada pengembangan kemampuan individu untuk memulai dan mengelola usaha mereka sendiri. Program ini bertujuan untuk menciptakan peluang kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan ekonomi lokal melalui pengembangan usaha kecil dan menengah.

Di Kenya, berbagai lembaga penyelenggara pendidikan Nonformal telah mengembangkan program pelatihan kewirausahaan yang mencakup berbagai topik, seperti manajemen usaha, perencanaan bisnis, pemasaran, keuangan, dan pengembangan produk. Program ini sering kali diikuti oleh individu yang ingin memulai usaha kecil atau individu yang bekerja di sektor informal namun ingin meningkatkan keterampilan mereka dalam menjalankan usaha.

4. Pendidikan Berbasis Komunitas

Pendidikan berbasis komunitas adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan non-formal yang sangat populer di Kenya, terutama di daerah-daerah pedesaan. Program ini dirancang untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dengan mengandalkan kekuatan komunitas setempat dalam menyelenggarakan pembelajaran. Pendidikan berbasis komunitas sering kali dilakukan melalui kelompok-kelompok

belajar atau pusat-pusat pendidikan yang didirikan di tingkat desa atau kampung.

Program pendidikan berbasis komunitas ini bersifat fleksibel dan mudah diakses oleh anggota komunitas, yang sering kali tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena keterbatasan geografis, sosial, atau ekonomi. Di komunitas-komunitas ini, program-program pendidikan sering kali disesuaikan dengan kebutuhan lokal, seperti pendidikan kesehatan, keterampilan bertani, dan pengelolaan lingkungan. Hal ini memungkinkan program pendidikan lebih relevan dengan konteks dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

5. Pendidikan untuk Perempuan dan Kelompok Rentan

Pendidikan Nonformal di Kenya juga sangat fokus pada pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, dan remaja yang tidak terdaftar di sekolah formal. Program-program ini bertujuan untuk memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Program pendidikan untuk perempuan sering kali difokuskan pada pelatihan keterampilan praktis, seperti menjahit, kerajinan tangan, dan kewirausahaan. Selain itu, ada pula program pendidikan kesehatan yang memberikan informasi penting mengenai kesehatan reproduksi, hak-hak perempuan, dan pencegahan penyakit. Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan Nonformal menjadi penting, mengingat peran perempuan yang signifikan dalam pembangunan keluarga dan masyarakat.

C. Kelompok Sasaran PNF di Kenya

1. Anak-anak yang Tidak Terdaftar di Sekolah Formal

Salah satu kelompok sasaran utama dalam pendidikan Nonformal di Kenya adalah anak-anak yang tidak terdaftar di sekolah formal. Meskipun Kenya telah membuat kemajuan

signifikan dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar melalui kebijakan Pendidikan untuk Semua (EFA), masih banyak anak-anak, terutama di daerah pedesaan dan daerah kumuh perkotaan, yang tidak memiliki akses ke sekolah formal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan fasilitas pendidikan, masalah transportasi, kemiskinan, dan kebijakan yang tidak inklusif terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Pendidikan Nonformal memberikan solusi bagi anak-anak ini melalui program- program literasi dasar, kelas-kelas pembelajaran yang lebih fleksibel, dan penggunaan teknologi untuk memungkinkan mereka belajar di luar ruang kelas formal. Program- program ini sering diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi internasional yang berfokus pada pendidikan inklusif.

2. Orang Dewasa yang Buta Huruf

Kelompok sasaran kedua adalah orang dewasa yang buta huruf. Meskipun Kenya telah mencapai kemajuan dalam mengurangi tingkat buta huruf di kalangan generasi muda, tingkat buta huruf di kalangan orang dewasa, terutama di daerah pedesaan, masih cukup tinggi. Ini mencakup banyak orang dewasa yang tidak memiliki kesempatan untuk menerima pendidikan formal pada masa kecil mereka, baik karena kemiskinan, jarak yang jauh ke sekolah, atau alasan lainnya.

Pendidikan Nonformal di Kenya sangat berfokus pada pengurangan tingkat buta huruf di kalangan orang dewasa melalui program literasi. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung, yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan akses ekonomi orang dewasa. Kursus literasi biasanya diberikan dalam kelompok-kelompok kecil dengan pendekatan pembelajaran yang fleksibel, memungkinkan orang dewasa belajar pada waktu yang sesuai dengan rutinitas harian mereka.

3. Perempuan dan Kelompok Rentan Lainnya

Perempuan, terutama di daerah pedesaan, merupakan kelompok sasaran yang sangat penting dalam pendidikan Nonformal di Kenya. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, masih ada kesenjangan gender yang signifikan dalam pendidikan formal di Kenya. Pendidikan Nonformal memberikan kesempatan bagi perempuan yang mungkin tidak dapat melanjutkan pendidikan formal karena alasan sosial, ekonomi, atau budaya.

Program pendidikan Nonformal yang dirancang untuk perempuan biasanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan, keterampilan teknis, dan pengembangan kapasitas dalam hal kesehatan dan hak-hak perempuan. Program-program ini memberi perempuan keterampilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, meningkatkan partisipasi mereka dalam ekonomi lokal, dan membantu mereka mengatasi tantangan sosial dan ekonomi. Selain perempuan, kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, pemuda yang terlibat dalam pekerjaan anak, dan kelompok minoritas etnis, juga menjadi sasaran pendidikan Nonformal di Kenya. Program-program ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh keterampilan yang dapat meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi mereka.

4. Pemuda dan Remaja yang Tidak Terdaftar di Sekolah

Pemuda dan remaja yang tidak terdaftar di sekolah formal adalah kelompok sasaran penting lainnya dalam pendidikan Nonformal di Kenya. Beberapa faktor menyebabkan pemuda dan remaja ini tidak melanjutkan pendidikan formal, seperti kebutuhan untuk bekerja, kurangnya dukungan keluarga, atau kurangnya sekolah yang tersedia di daerah mereka. Pendidikan Nonformal memberikan kesempatan kepada pemuda dan remaja untuk memperoleh keterampilan praktis, pelatihan kewirausahaan, serta pembelajaran kehidupan yang dapat

meningkatkan kesiapan mereka untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat.

Program pelatihan keterampilan dan pendidikan kewirausahaan bagi pemuda ini sangat penting dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kenya. Melalui pendidikan Nonformal, pemuda dapat memperoleh keterampilan yang relevan dengan pasar kerja atau memulai usaha mereka sendiri.

5. Komunitas yang Tertinggal Secara Geografis

Kelompok sasaran lainnya adalah komunitas yang tinggal di daerah terpencil dan kurang berkembang secara ekonomi. Di banyak daerah pedesaan Kenya, akses terhadap pendidikan formal masih terbatas, dan banyak anak-anak serta orang dewasa yang terpaksa mencari alternatif pendidikan. Pendidikan Nonformal memberikan peluang bagi mereka untuk mengakses pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Program-program pendidikan berbasis komunitas sering diselenggarakan untuk menjangkau kelompok-kelompok ini, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan penyelenggara yang dapat bekerja langsung di lapangan. Dengan cara ini, pendidikan Nonformal dapat dijangkau oleh mereka yang berada di wilayah yang jauh dari pusat- pusat kota besar atau sekolah-sekolah formal.

D. Penyelenggara PNF di Kenya

1. Pemerintah Kenya

Pemerintah Kenya melalui Kementerian Pendidikan memiliki peran sentral dalam pengembangan dan pengelolaan pendidikan Nonformal. Sebagai pengatur kebijakan, pemerintah mengembangkan kerangka kerja yang memungkinkan berbagai program pendidikan Nonformal berjalan dengan baik. Kebijakan yang mengarah pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan Nonformal di Kenya tercermin dalam berbagai

program yang dirancang untuk meningkatkan literasi, keterampilan vokasional, dan kewirausahaan di masyarakat.

Melalui lembaga-lembaga pemerintah seperti Kenya Institute of Education (KIE) dan National Industrial Training Authority (NITA), pemerintah memberikan dukungan kepada penyelenggara PNF, serta menyediakan pelatihan bagi instruktur atau fasilitator. Selain itu, pemerintah juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyediakan dana bagi program-program pendidikan Nonformal, baik melalui alokasi anggaran negara maupun dana internasional.

Sebagai bagian dari kebijakan Pendidikan untuk Semua (EFA), pemerintah Kenya telah menargetkan pengurangan tingkat buta huruf di kalangan orang dewasa dan anak-anak yang tidak terdaftar di sekolah formal. Hal ini tercermin dalam berbagai program literasi yang dikelola oleh pemerintah di tingkat lokal, termasuk program-program untuk orang dewasa yang buta huruf dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin.

2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Kenya, terutama dalam merancang dan melaksanakan program-program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Banyak LSM yang bekerja di lapangan untuk menjangkau kelompok-kelompok yang paling rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan anak-anak di daerah terpencil.

LSM sering kali menyediakan program pelatihan keterampilan teknis, kewirausahaan, dan literasi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, LSM berperan dalam mengembangkan dan menyelenggarakan program-program yang sangat relevan dengan kebutuhan lokal, seperti pendidikan kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan kapasitas masyarakat.

Beberapa LSM terkenal yang terlibat dalam pendidikan Nonformal di Kenya termasuk Kenya National Federation of Agricultural Producers (KENFAP), yang fokus pada pelatihan pertanian untuk komunitas pedesaan, serta The Kenya Red Cross, yang menawarkan pelatihan dalam bidang pertolongan pertama dan kewirausahaan.

3. Sektor Swasta

Sektor swasta juga berperan dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Kenya, terutama dalam penyediaan pelatihan keterampilan vokasional dan kewirausahaan. Banyak perusahaan dan lembaga pendidikan swasta yang menawarkan kursus singkat dalam berbagai bidang, seperti teknologi informasi, bisnis, dan keterampilan praktis lainnya. Sektor swasta sering kali bekerja sama dengan pemerintah dan LSM untuk menyelenggarakan program pendidikan Nonformal yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar.

Sektor swasta di Kenya tidak hanya terbatas pada pelatihan formal, tetapi juga menyediakan pelatihan berbasis industri yang lebih terfokus pada kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus berkembang. Selain itu, sektor swasta juga berkontribusi dalam inovasi teknologi pendidikan dengan menyediakan platform online untuk pelatihan keterampilan.

4. Organisasi Internasional

Organisasi internasional memainkan peran yang sangat besar dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Kenya. Beberapa lembaga internasional seperti UNICEF, UNESCO, dan The World Bank menyediakan dana dan bantuan teknis untuk pengembangan pendidikan Nonformal, terutama untuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan kurang terlayani.

Misalnya, UNICEF telah mendukung berbagai inisiatif pendidikan Nonformal yang berfokus pada peningkatan literasi di kalangan anak-anak dan orang dewasa, terutama di daerah-daerah pedesaan dan kumuh. Selain itu, lembaga-lembaga

internasional juga membantu mengembangkan kurikulum pelatihan keterampilan dan menyediakan pelatihan untuk fasilitator pendidikan Nonformal.

5. Komunitas dan Pemimpin Lokal

Pemimpin lokal dan komunitas juga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Kenya. Di banyak daerah, terutama di pedesaan, pendidikan Nonformal diselenggarakan dalam bentuk kelompok belajar atau pusat pembelajaran komunitas yang dipimpin oleh anggota komunitas setempat. Ini memungkinkan pendidikan Nonformal menjadi lebih relevan dan diterima, karena program tersebut didasarkan pada kebutuhan dan tantangan lokal.

Pemimpin komunitas sering kali bertindak sebagai fasilitator atau instruktur dalam program pendidikan Nonformal, dan mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka. Mereka juga berperan dalam memotivasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program pembelajaran.

E. Karakteristik penyelenggaraan PNF di Kenya

Pendidikan Nonformal di Kenya memiliki karakteristik yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi peserta didiknya, sehingga bentuk dan akses pendidikan Nonformal sangat bervariasi antara kelompok kaya, menengah, dan kurang mampu. Untuk kelompok masyarakat yang lebih kaya dan kelas menengah di Kenya, pendidikan Nonformal sering kali diselenggarakan dalam bentuk kursus keterampilan khusus, pelatihan profesional, workshop, atau pelatihan bisnis yang diselenggarakan oleh lembaga swasta atau institusi pelatihan yang berstandar internasional. Program-program ini biasanya menawarkan fasilitas yang lebih lengkap, tenaga pengajar yang berpengalaman, serta materi pembelajaran yang modern dan berorientasi pada pengembangan karir dan bisnis. Selain itu, mereka lebih mudah mengakses teknologi pembelajaran daring dan sumber belajar digital yang memadai.

Sebaliknya, bagi masyarakat kurang mampu, pendidikan Nonformal di Kenya lebih banyak berbentuk program literasi dasar, pelatihan keterampilan hidup, pelatihan pertanian, dan program pemberdayaan komunitas yang biasanya difasilitasi oleh organisasi non-pemerintah (LSM) dan komunitas lokal. Program ini lebih menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi dan sosial, serta dirancang agar mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari peserta. Sering kali, pendidikan Nonformal untuk kelompok kurang mampu ini diselenggarakan di pusat-pusat komunitas, gereja, atau ruang publik, dengan biaya yang sangat terjangkau atau bahkan gratis. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan program bagi kelompok ini, termasuk keterbatasan akses teknologi dan tenaga pengajar yang berkualitas.

Secara umum, pendidikan Nonformal di Kenya mencerminkan ketimpangan sosial-ekonomi yang signifikan, di mana akses, kualitas, dan bentuk pendidikan sangat bergantung pada status ekonomi peserta didik. Meski demikian, upaya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat terus dilakukan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan Nonformal, terutama bagi kelompok rentan dan kurang mampu, dengan tujuan memberdayakan masyarakat secara luas melalui pembelajaran yang relevan dan inklusif.

F. Sumber Pendanaan PNF di Kenya

1. Pendanaan Pemerintah

Pemerintah Kenya melalui Kementerian Pendidikan berperan penting dalam pendanaan program pendidikan Nonformal. Meskipun sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk pendidikan formal, pemerintah tetap menyediakan dana untuk mendukung pendidikan Nonformal, terutama untuk program-program literasi dan pelatihan keterampilan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Pemerintah sering kali mengalokasikan anggaran melalui kebijakan seperti

Program Pendidikan untuk Semua (EFA), yang bertujuan untuk mengurangi tingkat buta huruf dan meningkatkan akses pendidikan bagi orang dewasa dan anak-anak yang tidak terdaftar di sekolah formal.

Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga internasional dan sektor swasta untuk mendapatkan dana tambahan bagi program-program pendidikan Nonformal. Salah satu contoh adalah kolaborasi dengan UNICEF dan UNESCO untuk mendanai program pendidikan literasi dan pemberdayaan perempuan.

2. Donor Internasional dan LSM

Selain pemerintah, lembaga internasional dan LSM memainkan peran penting dalam pendanaan pendidikan Nonformal di Kenya. Banyak program PNF yang didanai oleh donor internasional seperti World Bank, USAID, UNICEF, dan DFID. Lembaga-lembaga ini memberikan dana dan dukungan teknis untuk berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Nonformal di Kenya, termasuk pelatihan keterampilan, pendidikan kesehatan, dan pelatihan kewirausahaan.

LSM juga berperan dalam menyediakan dana untuk program-program berbasis komunitas, yang sering kali lebih terfokus pada kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan pemuda. Program yang diselenggarakan oleh LSM sering kali lebih fleksibel dalam hal anggaran dan dapat lebih cepat merespons kebutuhan yang berkembang di masyarakat.

3. Sektor Swasta

Sektor swasta juga berkontribusi dalam pendanaan pendidikan Nonformal di Kenya, terutama melalui investasi dalam pelatihan keterampilan dan kewirausahaan.

Banyak perusahaan yang beroperasi di Kenya menawarkan pelatihan kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam bidang industri tertentu. Selain itu,

beberapa lembaga pendidikan swasta juga menyelenggarakan kursus dan pelatihan dalam berbagai keterampilan teknis yang mendukung perkembangan ekonomi lokal.

4. Pendanaan Lokal dan Kolaborasi Komunitas

Pendanaan lokal juga memainkan peran dalam mendukung program pendidikan Nonformal. Di tingkat komunitas, sering kali ada kontribusi dari anggota masyarakat atau pemimpin lokal yang mendukung pendidikan melalui donasi atau pengumpulan dana untuk membiayai pusat-pusat pembelajaran. Kolaborasi dengan pemimpin lokal memastikan bahwa dana yang ada dapat digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di tingkat komunitas.

G. Kelebihan dan Kelemahan PNF di Kenya

1. Kelebihan Pendidikan Nonformal di Kenya

Salah satu kelebihan utama pendidikan Nonformal di Kenya adalah fleksibilitas dalam hal waktu dan tempat. Program-program pendidikan Nonformal sering kali diselenggarakan di luar sekolah formal dan tidak terikat pada jadwal yang ketat. Ini memberi peserta didik kebebasan untuk memilih kapan dan di mana mereka ingin belajar. Hal ini sangat penting bagi orang dewasa yang memiliki kewajiban bekerja atau bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil dan tidak memiliki akses ke sekolah formal. Selain itu, pendidikan Nonformal di Kenya juga sangat berbasis komunitas, yang memungkinkan program pendidikan untuk lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan menggunakan pendekatan berbasis komunitas, program-program ini lebih mudah diterima oleh masyarakat karena disesuaikan dengan budaya dan tantangan yang dihadapi oleh mereka.

Pendidikan Nonformal juga memberikan akses yang lebih luas bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan pemuda yang tidak terdaftar di sekolah formal. Program-program PNF

memungkinkan mereka untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Misalnya, program literasi dan pelatihan keterampilan membantu mengurangi tingkat buta huruf di kalangan orang dewasa dan memberikan kesempatan ekonomi kepada mereka yang kurang beruntung. Relevansi juga menjadi kelebihan utama dari pendidikan Nonformal ini, karena materi yang diajarkan sering kali terkait langsung dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan kehidupan sehari-hari peserta didik, seperti pelatihan pertanian, kerajinan tangan, atau kewirausahaan.

Pendidikan Nonformal di Kenya juga memiliki biaya yang lebih terjangkau dibandingkan pendidikan formal, baik bagi peserta didik maupun penyelenggara. Program PNF sering kali tidak memerlukan biaya tinggi untuk infrastruktur dan fasilitas, yang memungkinkan lebih banyak masyarakat yang kurang mampu untuk mengaksesnya. Selain itu, PNF memungkinkan masyarakat untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri, sehingga dapat menyesuaikan tempo belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

2. Kelemahan Pendidikan Nonformal di Kenya

Meskipun memiliki banyak kelebihan, pendidikan Nonformal di Kenya juga menghadapi beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya standarisasi dalam penyelenggaraan program. Karena PNF sering kali diselenggarakan oleh berbagai penyelenggara, baik pemerintah, LSM, atau sektor swasta, kualitas program bisa sangat bervariasi. Tidak adanya kurikulum yang baku atau mekanisme evaluasi yang jelas dapat mengakibatkan ketidakmerataan dalam kualitas pendidikan diterima peserta didik.

Selain itu, pendanaan yang terbatas sering menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Kenya. Meskipun ada dukungan dari pemerintah dan lembaga internasional, pendanaan untuk PNF masih seringkali tidak mencukupi, terutama untuk program-program jangka panjang.

Kurangnya sumber daya yang memadai dapat membatasi skala dan cakupan program, serta menghambat kemampuan untuk menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan pendidikan non- formal.

Kelemahan lain dari pendidikan Nonformal di Kenya adalah ketergantungan pada fasilitator yang tidak terlatih. Dalam banyak kasus, program PNF dijalankan oleh instruktur atau fasilitator yang mungkin tidak memiliki pelatihan profesional atau sertifikasi yang diperlukan untuk memberikan pengajaran yang berkualitas. Meskipun mereka sering kali memiliki pengetahuan lokal yang berharga, kurangnya pelatihan formal dapat mempengaruhi efektivitas pengajaran dan kualitas materi yang diberikan.

Selain itu, kurangnya pengakuan resmi terhadap kualifikasi atau sertifikat yang diberikan oleh program pendidikan Nonformal menjadi masalah. Banyak peserta didik yang menyelesaikan program PNF tidak memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah atau lembaga pendidikan formal, yang dapat membatasi kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Hal ini dapat menyebabkan mereka merasa bahwa pendidikan Nonformal kurang dihargai dibandingkan dengan pendidikan formal, meskipun sering kali lebih relevan dan aplikatif.

Secara keseluruhan, meskipun pendidikan Nonformal di Kenya memiliki banyak kelebihan dalam menyediakan pendidikan yang lebih inklusif dan relevan, tantangan-tantangan seperti ketidakmerataan kualitas, pendanaan yang terbatas, dan kurangnya pengakuan resmi terhadap kualifikasi tetap menjadi hambatan yang harus diatasi. Penyempurnaan dan standarisasi program, serta peningkatan pendanaan dan pelatihan untuk fasilitator, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pendidikan Nonformal di Kenya.

H. Analisis Studi Komparatif PNF Kenya dengan Negara Lain

Pendidikan Nonformal (PNF) memiliki peran yang sangat penting di berbagai negara, meskipun setiap negara menghadapinya dengan pendekatan yang berbeda, tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Di Kenya, PNF sangat berfokus pada pemberdayaan ekonomi, pengurangan buta huruf, dan peningkatan keterampilan untuk masyarakat yang terpinggirkan. Di negara lain, seperti Indonesia, Jepang, Filipina, Turki, dan Italia, pendidikan Nonformal juga memainkan peran penting, meskipun dengan fokus dan tantangan yang berbeda.

Di Kenya, pendidikan Nonformal terutama diorientasikan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dan menyediakan keterampilan praktis bagi mereka yang tidak terakses oleh sistem pendidikan formal. Program-program ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, seperti pelatihan keterampilan di bidang pertanian dan kewirausahaan. Pemerintah Kenya bekerja sama dengan lembaga internasional dan LSM untuk menyediakan dana bagi program literasi, pelatihan keterampilan, dan pendidikan kewirausahaan bagi perempuan dan kelompok marginal. Program ini sangat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan komunitas.

Di Indonesia, pendidikan Nonformal juga memiliki peran yang penting dalam menciptakan akses pendidikan yang lebih luas, khususnya di daerah-daerah terpencil. Indonesia memiliki berbagai lembaga penyelenggara PNF, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyediakan pelatihan keterampilan dan pendidikan kewirausahaan. Pemerintah Indonesia memfokuskan pada pemberdayaan perempuan dan anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, mirip dengan di Kenya, tetapi Indonesia juga menekankan pada pendidikan berbasis teknologi dan keterampilan digital untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun, Indonesia menghadapi tantangan yang lebih besar terkait pendanaan dan koordinasi antar lembaga penyelenggara pendidikan Nonformal.

Di Jepang, pendidikan Nonformal juga penting, tetapi lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan lanjutan dan pendidikan untuk usia dewasa. Program pendidikan Nonformal di Jepang sering kali diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan sektor swasta dengan fokus pada pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) untuk memastikan bahwa warga negara memiliki keterampilan yang dapat terus berkembang seiring waktu. Jepang juga menekankan pentingnya pengembangan keterampilan yang relevan dengan industri, seperti teknologi dan manajemen. Pendidikan Nonformal di Jepang lebih terstruktur dan cenderung didorong oleh kebutuhan pasar tenaga kerja yang sangat maju.

Di Filipina, pendidikan Nonformal diorientasikan pada pengurangan tingkat buta huruf dan pemberdayaan ekonomi. Program-program seperti Alternative Learning System (ALS) diselenggarakan oleh pemerintah Filipina untuk menyediakan pendidikan bagi mereka yang tidak terdaftar di sekolah formal. Program ini memiliki kesamaan dengan pendidikan Nonformal di Kenya, yang menekankan pada peningkatan literasi dan pelatihan keterampilan. Namun, Filipina juga fokus pada pendidikan kesehatan dan sosial yang lebih luas, dengan banyak program yang ditujukan untuk perempuan dan kelompok marginal di daerah pedesaan.

Di Turki, pendidikan Nonformal sangat penting untuk pengembangan keterampilan di kalangan orang dewasa dan pemuda. Turki memiliki sistem pelatihan keterampilan yang komprehensif melalui Public Education Centers yang menyediakan pelatihan keterampilan teknis dan kejuruan bagi warga negara. Meskipun fokus utama Turki adalah pada pemberdayaan ekonomi melalui keterampilan teknis, pendidikan non-formal di Turki juga mencakup pembelajaran sosial dan budaya, dengan menekankan pentingnya integrasi sosial di antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Di Italia, pendidikan Nonformal lebih banyak berfokus pada pendidikan untuk orang dewasa dan pemuda, serta

pengembangan keterampilan sosial dan profesional. Italia memiliki sistem pelatihan yang kuat melalui Centro Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), yang menyediakan pendidikan bagi orang dewasa yang tidak memiliki sertifikat pendidikan formal. Program-program di Italia lebih terstruktur dan berfokus pada kesetaraan gender dan integrasi sosial, dengan menawarkan peluang pendidikan bagi imigran dan minoritas.

Secara keseluruhan, meskipun negara-negara ini memiliki karakteristik pendidikan Nonformal yang serupa dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pendidikan, mereka juga menghadapi tantangan yang berbeda dalam hal implementasi dan pendanaan. Kenya, Indonesia, dan Filipina lebih berfokus pada pendidikan dasar dan keterampilan praktis untuk masyarakat yang kurang terlayani, sedangkan Jepang, Turki, dan Italia lebih menekankan pada pelatihan keterampilan lanjutan dan pemberdayaan sosial melalui sistem yang lebih terstruktur dan terorganisir. Setiap negara memiliki pendekatan unik berdasarkan konteks sosial dan ekonominya, tetapi semuanya sepakat bahwa pendidikan Nonformal adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi.

Pendidikan Nonformal (PNF) di Kenya memainkan peran yang sangat penting dalam menyediakan akses pendidikan kepada berbagai lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Dengan karakteristik yang fleksibel, relevan, dan berbasis komunitas, PNF memberikan kesempatan bagi mereka yang terpinggirkan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendidikan Nonformal di Kenya berfokus pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan literasi, pelatihan keterampilan teknis, serta pengembangan kapasitas sosial dan kesehatan masyarakat, dengan perhatian khusus kepada perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Program-program ini sering kali diadakan di tingkat lokal, memungkinkan masyarakat untuk

belajar sesuai dengan kebutuhan mereka, serta mendukung pembangunan lokal yang lebih inklusif.

Kebijakan pendidikan Nonformal di Kenya, yang didukung oleh berbagai lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi internasional, telah berfokus pada pengurangan tingkat buta huruf, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kapasitas komunitas. Kebijakan seperti Pendidikan untuk Semua (EFA) dan program literasi untuk orang dewasa telah berhasil menciptakan ruang bagi mereka yang sebelumnya tidak dapat mengakses pendidikan formal. Meskipun demikian, tantangan seperti pendanaan yang terbatas, ketergantungan pada fasilitator yang tidak terlatih, dan kurangnya standarisasi kualitas program masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Kenya dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, sektor swasta, dan komunitas lokal. Pendanaan untuk program ini berasal dari berbagai sumber, baik dari alokasi anggaran pemerintah, lembaga donor internasional, maupun kontribusi sektor swasta. Namun, keberlanjutan dan efektivitas program PNF sering kali terhambat oleh keterbatasan dana dan kurangnya koordinasi antar lembaga penyelenggara. Meskipun demikian, pendidikan Nonformal di Kenya terus berkembang dan semakin diakui sebagai alat yang sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IX

Pendidikan Nonformal di Mesir

Sistem pendidikan di Mesir memiliki sejarah panjang yang bermula sejak zaman kuno Mesir. Pendidikan di Mesir telah dikenal sebagai salah satu yang tertua di dunia, bahkan sebelum adanya pendidikan formal, masyarakat Mesir kuno telah mengembangkan sistem pendidikan informal untuk memberikan pengetahuan kepada generasi muda. Meskipun telah mengalami transformasi seiring dengan perkembangan zaman, tradisi dan nilai-nilai pendidikan yang kaya masih tetap dilestarikan hingga saat ini.

Pendidikan di Mesir saat ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan sistem tersebut terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar di Mesir wajib dilalui oleh setiap anak mulai dari usia 6 tahun hingga 14 tahun. Sedangkan pendidikan menengah dibagi lagi menjadi dua, yaitu mesir dan teknis. Di tingkat pendidikan tinggi, terdapat berbagai universitas dan institusi pendidikan lainnya yang menawarkan berbagai macam program studi. Mesir juga sangat mementingkan nilai-nilai agama dalam sistem pendidikannya.

Islam adalah agama mayoritas di Mesir dan pengaruh agama Islam sangat kuat dalam kurikulum pendidikan. Setiap siswa diwajibkan mempelajari kitab suci Al-Qur'an dan kelas agama Islam juga menjadi mata pelajaran wajib. Meskipun demikian, Mesir juga menerapkan pendidikan multikultural yang mencakup pembelajaran bahasa Inggris, teknologi, dan ilmu pengetahuan lainnya untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia modern.

Pendidikan nonformal merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan di seluruh dunia, termasuk di Mesir. Pendidikan ini memberikan alternatif bagi individu yang tidak memiliki akses atau kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal, serta menawarkan berbagai program yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Di Mesir, pendidikan Nonformal telah menjadi semakin relevan dalam konteks sosial dan ekonomi yang terus berubah, dimana kebutuhan untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup semakin mendesak.

Seiring dengan pertumbuhan populasi dan tantangan ekonomi yang dihadapi banyak keluarga, pendidikan Nonformal menjadi solusi strategi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang beragam. Program-program seperti pelatihan keterampilan, kursus literasi, dan pendidikan bagi orang dewasa memainkan peran penting dalam meningkatkan akses pendidikan, terutama bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti wanita, anak-anak, dan masyarakat di daerah pedesaan.

Pemerintah Mesir, bersama dengan berbagai organisasi non-pemerintah (LSM) dan lembaga internasional, telah berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Nonformal. Namun, meskipun ada beberapa kemajuan, masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi, termasuk masalah pendanaan, kualitas program, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan Nonformal.

Buku ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Mesir, dengan fokus pada kebijakan, program, tantangan, dan solusi yang dihadapi. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang konteks dan praktik pendidikan Nonformal di Mesir, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah strategi untuk meningkatkan efektivitas dan keinginan program-program pendidikan tersebut. Selain itu, Buku ini juga akan membandingkan praktik pendidikan Nonformal di Mesir dengan negara lain, untuk menggali pengalaman dan pelajaran yang dapat diterapkan dalam konteks lokal.

A. Sejarah Pendidikan di Mesir

1. Pendidikan Tradisional dan Modernisasi Awal

a. Masa Abad Sebelum ke-19

Pendidikan di Mesir pada awalnya sangat terfokus pada ajaran agama, khususnya Islam, lembaga dengan pendidikan utama seperti Al-Azhar yang Didirikan pada abad ke- 10. Sistem pendidikan ini dikelola oleh pemimpin dan tokoh agama.

b. Penaklukan Napoleon Bonaparte (1798)

Secara historis, modernisasi pendidikan di Mesir dimulai dengan pengenalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Napoleon Bonaparte saat penaklukan Mesir. Pendaratan Napoleon di Mesir menandai awal modernisasi pendidikan. Inovasi yang dibawa oleh Napoleon dari Prancis ini memberikan dorongan besar bagi para reformis Mesir untuk memperbaiki sistem pendidikan mereka. Ia memperkenalkan konsep-konsep Barat yang mendorong reformasi dalam sistem pendidikan yang stagnan. Di antara tokoh-tokoh pembaharu tersebut adalah Muhammad Abduh dan Muhammad Ali Pasha. Pada tahun 1805 M atau 1220 H. Muhammad Ali Pasha memulai belajar di Prancis, mempelajari ilmu kedokteran, teknik, militer, dan bidang lainnya.

2. Perkembangan Abad ke-20

a. Reformasi Pendidikan (Awal Abad ke-20)

Setelah Revolusi 1919, Mesir mendirikan sekolah-sekolah dasar dan menengah yang lebih formal. Ini juga menciptakan kebutuhan akan guru yang berkualitas, sehingga pusat pelatihan guru seperti Dar-Al-Ulum didirikan untuk melatih pengajar di berbagai bidang.

b. Pendidikan Gratis dan Wajib Belajar

Pada tahun 1981, pemerintah menetapkan kebijakan wajib belajar dan pendidikan dasar menjadi gratis. Ini bertujuan untuk meningkatkan angka melek huruf di kalangan penduduk.

B. Sistem Pendidikan di Mesir

Sistem pendidikan di Mesir, seperti halnya di berbagai negara lain di seluruh dunia, dipengaruhi oleh banyak aspek. Sebagai salah satu negara dengan peradaban tertua, pendidikan di Mesir telah melalui berbagai revolusi dan reformasi. Beberapa faktor utama yang memainkan peran penting dalam hal ini meliputi faktor sejarah, geografi, demografi, dan politik. Dalam perkembangan sistem pendidikan di Mesir hingga masa kemerdekaan pada tahun 1956, terdapat lima jenis sistem persekolahan, yaitu:

1. Al-Azhar dengan sekolah-sekolah atau madrasah di bawah naungannya, juga dikenal sebagai "Kuttab".
2. Sistem sekolah pengajaran bahasa asing.
3. Sistem sekolah berbahasa Arab
4. Sekolah-sekolah pemerintah
5. Sekolah asing dengan kurikulum sendiri.

Tugas pertama pemerintah adalah menciptakan satu sistem pendidikan nasional untuk menyatukan berbagai sistem pendidikan yang ada. Oleh karena itu, sejak tahun 1953 hingga 1960, berbagai peraturan pendidikan dikeluarkan untuk mengintegrasikan dan mengkonsolidasi sistem pendidikan yang semula otonom menjadi satu sistem pendidikan nasional. Anak-

anak mulai sekolah dasar pada usia hingga 12 tahun. Pendidikan dasar selama 6 tahun biaya menjadi gratis setelah integrasi, terutama melanjutkan. Pendidikan bahasa asing dihapuskan 6 tahun ini bersifat wajib dan gratis. Sekolah swasta yang sebelumnya memungut untuk tingkat sekolah dasar, bagi yang di tingkat ko-edukatif. Sekolah persiapan untuk sekolah menengah berlangsung selama 3 tahun dengan kurikulum umum tanpa pembagian 3 tahun, perguruan kejuruan sekolah dasar. Tidak ada ujian akhir untuk kecuali ujian masuk ke sekolah lanjutan sekolah dasar dan sekolah ini harus bersifat jurusan. Sekolah menengah juga berlangsung selama umumnya berfungsi sebagai persiapan untuk tinggi. Di daerah pedesaan, tersedia sekolah-sekolah dan teknik. Pada tahap ini, sekolah-sekolah diadakan secara terpisah untuk anak laki-laki dan perempuan. Saat ini, sistem pendidikan di Mesir terbagi dalam tiga tahapan:

1. Pendidikan Dasar (Altaklimil Islamiy)
2. Pendidikan Menengah (Altaklimil altsanamy)
3. Pascapendidikan Sekunder (Altaklimil jaamiyy)

Sejak perluasan wajib belajar yang diterapkan pada tahun 1981, peraturan baru ditetapkan, yakni pendidikan dasar dan sekolah persiapan menjadi gratis, sedangkan perguruan tinggi negeri hanya memerlukan pembayaran biaya pendaftaran.

Landasan Filsafat Pendidikan, Untuk menetapkan tujuan pendidikan, sangat penting memiliki landasan pendidikan yang akan membantu menentukan arah kemajuan yang diinginkan. Landasan ini berfungsi sebagai landasan filosofis, yaitu prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam menetapkan tujuan dan arah pendidikan. Pendidikan yang baik bertujuan untuk menghasilkan generasi yang baik, oleh karena itu sejak awal perlu ditentukan filosofi pendidikan yang akan dikembangkan.

Dalam sistem pendidikan Mesir, tujuan pendidikan adalah untuk mendidik akal dan jiwa serta mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, yang dilakukan dengan cara mengembangkan potensi anak didik sesuai dengan batas-batas

perkembangan mereka. Diharapkan proses pendidikan ini dapat membentuk individu muslim yang memiliki karakter seimbang, yang tidak hanya memprioritaskan aspek kognitif (intelijensi), tetapi juga diselaraskan dengan aspek afektif (emosi) dan psikomotorik (keterampilan).

Mesir diberlakukan libur Jumat-Sabtu, dengan sebagian besar sekolah beroperasi dari Minggu hingga Kamis. Namun, beberapa lembaga swasta mungkin mengikuti jadwal yang berbeda, seperti Sabtu hingga Rabu. Selain hari libur resmi negara, baik keagamaan maupun sekuler, kalender akademik mencakup dua periode liburan utama. Liburan musim panas biasanya dimulai pada awal hingga pertengahan Juni dan berlangsung hingga sekitar pertengahan September, sedangkan liburan musim dingin berlangsung dari pertengahan Januari hingga awal Februari.

Secara struktur, pendidikan Mesir terlihat sentralistis, di mana hal tersebut dapat dilihat dari tahapan jenjang sekolahnya sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar (Altaklimil Islamiy)

Dalam pendidikan dasar, Mesir menerapkan sistem wajib belajar selama 9 tahun, dengan rentang usia pendidikan antara 6 hingga 14 tahun. Setiap satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengatur kebijakan masing-masing, dan semua jenjang pendidikan disediakan secara gratis di sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah.

Seluruh pelaksanaan pendidikan berada di bawah pengawasan Departemen Pendidikan, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Departemen bertanggung jawab dalam pemilihan buku pelajaran dan distribusinya ke sekolah-sekolah. Dalam hal ini, Departemen Pendidikan menetapkan pedoman bahwa jumlah siswa prasekolah tidak boleh melebihi 45 siswa.

Departemen juga menerima dukungan sistem dari lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak usia dini, disertai dengan membangun kualitas dan kapasitas guru guna

memperbaiki mutu pembelajaran (Saudi, 2020). Selanjutnya, tahapan persiapan untuk sekolah menengah pertama, yang berlangsung selama tiga tahun, menjadi lapisan kedua dari wajib belajar dalam pendidikan dasar. Pentingnya menyelesaikan tingkat pendidikan dasar adalah untuk mengantisipasi munculnya buta huruf, yang diidentifikasi sebagai masalah serius bagi siswa dalam mencapai keterampilan hidup, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan.

2. Pendidikan Menengah (Altaklimil altsanamy)

Jalur pendidikan menengah terbagi menjadi tiga kategori, yaitu pendidikan umum, pendidikan kejuruan/teknis, dan sistem ganda. Pendidikan umum dilaksanakan selama tiga tahun dan ditujukan bagi peserta didik berusia 12 hingga 15 tahun. Sementara itu, pendidikan menengah kejuruan berlangsung antara tiga hingga lima tahun, dengan salah satu contohnya adalah sekolah yang dikenal dengan nama Kohli Mubarak. Untuk sistem ganda dalam pendidikan kejuruan tingkat menengah, program ini dirancang selama tiga tahun. Agar dapat memperoleh sertifikat kelulusan, siswa diharuskan mengikuti ujian nasional yang diadakan pada akhir tahap pendidikan sekunder. (Ramayulis : 1994, h. 30).

Pada tahun 2004, persentase siswa yang berhasil melewati tahap persiapan mencapai 77,3% dan terdaftar di tingkat sekunder. Penilaian formatif dan sumatif juga dilakukan untuk siswa pada tahun pertama, sementara pada tahun kedua dan ketiga, kualifikasi siswa diukur dengan nilai rata-rata akhir tahun melalui ujian berstandar nasional. Setelah itu, mereka diberikan sertifikat Pendidikan Menengah Umum (Thanawiya Amma), yang juga merupakan salah satu syarat untuk melanjutkan ke jenjang universitas.

3. Pendidikan Tinggi

Terkait sistem Pendidikan Tinggi di Mesir memiliki cakupan yang sangat luas. Di mana sebesar 30% dari populasi

penduduk Mesir usia pelajar/ mahasiswa melanjutkan pendidikan ke universitas (M. Nurul Ikhsan Saleh : 2015, h. 50). Dalam hal ini tingkat pendidikan tersier tersebut diawasi langsung oleh Departemen Pendidikan Tinggi. Lembaga pendidikan yang terdapat saat sekarang ini berupa 17 perguruan tinggi (universitas) umum dan 51 lembaga pendidikan masyarakat nonuniversitas, dan untuk perguruan tinggi swasta terdapat 89 lembaga. Universitas yang terkenal di Mesir adalah Universitas al-Azhar, yang didirikan oleh panglima Jauhar alSiqli setelah berdirinya kota Cairo pada tahun 970 M. Sejak tahun 1961, Universitas alAzhar tidak hanya memiliki fakultas-fakultas agama, tetapi juga menawarkan berbagai fakultas umum seperti kedokteran, farmasi, pendidikan, bisnis, ekonomi, sains, pertanian, dan lain-lain. (Azra : 1999, h. 244). Setiap fakultas juga dilengkapi dengan perpustakaan otonom, ditambah dengan perpustakaan yang tersedia di asrama mahasiswa. (Assegaf : 2003, h. 61).

C. Jenis Pendidikan di Mesir

1. Pendidikan Formal

Secara umum, ada dua entitas yang bertanggung jawab atas sistem sekolah formal, yaitu kementerian pendidikan untuk sekolah-sekolah yang bersifat sekuler, dan kementerian Al-Azhar untuk sistem pendidikan Al-Azhar. Selain kedua struktur ini, terdapat juga jenis sekolah yang ditujukan untuk sejumlah anak khusus, seperti anakanak penyandang disabilitas yang bersekolah di institusi berkebutuhan khusus. Di sisi lain, bagi mereka yang memiliki ketertarikan di bidang militer, tersedia kesempatan untuk masuk ke sekolah militer.

Selain itu, sebagian anak muda juga bisa mendaftar untuk mengikuti program pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh lembaga atau badan tertentu setelah mereka meninggalkan sekolah reguler.

a. Sistem Sekolah Umum

Program wajib belajar di Mesir berlaku sampai dengan Grade 8 yang dikenal sebagai pendidikan dasar yang meliputi pendidikan TK dan play group sebelum memasuki pendidikan dasar, namun jumlahnya minim dan hanya terdapat di daerah perkotaan. Pembagian jenjang pendidikan dasar yang dikenal dengan Sekolah Dasar mulai dari Grade 1 sampai Grade 5, kemudian jenjang kedua terdapat sekolah persiapan, mulai dari Grade 6 sampai Grade 8.

Setelah menjalani pendidikan dasar wajib 8 tahun, terdapat tiga pilihan bagi muridmurid yaitu: memasuki jalur sekolah menengah umum, masuk jalur sekolah teknik menengah 3 tahun, atau masuk ke sekolah teknik 5 tahun. Proses pendidikan di sekolah menengah umum yaitu tahun pertama (Grade 9) merupakan kelas gabungan (bersama).

Sedangkan pada grade 10 dan grade 11 murid dapat memilih dan menentukan bidang sains dan non-sains (IPA vs Non-IPA) yang akan ditekuninya. Selanjutnya pendidikan universitas dan pendidikan tinggi dengan spesialisasi bidang mengikuti sistem akademik secara umum. Pada lembaga perguruan tinggi proses pendidikan berlangsung selama dua, empat atau lima tahun sesuai pilihan mahasiswa dengan bidang dan programnya.

Pada tahun 1999, mulai dibuka bagi alumni sekolah teknik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan pertumbuhan penduduk Mesir yang begitu cepat, berdampak pula pada peningkatan kualifikasi pendidikan, sehingga berakibat pula pada peningkatan jumlah murid. Sistem Sekolah Al-Azhar.

Dalam sistem sekolah Al-Azhar penekanan pada pembelajaran Agama Islam yang lebih dirasakan dominasinya namun untuk kurikulum mata pelajaran umumnya relatif sama dengan sekolah sekuler, perbedaan dengan sistem sekolah sekuler padat singkat pendidikan dasar yaitu Grade 10 dan 11 berlaku untuk seluruh murid, kemudian di akhir grade 11, murid diberikan pilihan untuk masuk dua tahun lagi ke sekolah umum, atau ke sekolah agama. Pada tingkat universitas, fakultas-

fakultasnya sistem sekolah Al-Azhar boleh dikatakan sama dengan sistem pendidikan sekuler namun lebih menekankan pada aspek keagamaan pada kurikulumnya. (Sulaiman : 2021, h. 401).

b. Pendidikan Teknik Kejuruan (Vokasional)

Upaya untuk mengembangkan pendidikan kejuruan (vokasional) dan pendidikan teknik supaya lebih berpengaruh luas diawali tahun 1950-an. Jumlah lembaga vokasional dan teknik meningkat dari 134 sekolah (dengan 31.800 siswa) pada tahun 1952 menjadi 460 sekolah (dengan 115.600 siswa) pada tahun 1960.

2. Pendidikan Nonformal

Pendidikan Nonformal bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada kelompok-kelompok tertentu yang memerlukan pendidikan. Pendidikan nonformal ditujukan kepada berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan, petani, pedagang, hingga pengrajin; mencakup juga mereka dari kalangan dengan status ekonomi kaya maupun kurang mampu.

Oleh karena itu, sebagian besar program yang dirancang lebih difokuskan pada pendidikan nonformal dalam aspek vokasional. Kemudian, peserta akan diberikan kesempatan untuk berlatih di tempat (workshop) unit produksi. Selanjutnya, peserta pelatihan akan ditempatkan di sektor pemerintah atau swasta untuk bekerja secara profesional. Kementerian Perindustrian mengawasi 33 lembaga atau pusat pelatihan yang tersebar di berbagai provinsi. Pusat-pusat pelatihan tersebut melaksanakan peningkatan keterampilan bagi para teknisi melalui program latihan cepat bagi pekerja pemula dengan memberikan mereka kesempatan untuk magang di industri yang relevan.

Program semi-skilled ini umumnya diikuti oleh pemuda berusia sekitar 17 tahun dengan durasi kegiatan berlangsung selama enam bulan. Dalam program pemagangan tersebut, juga

terdapat siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dasar serta mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan teknik formal. Lama pemagangan berlangsung sekitar tiga tahun, dan untuk meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan melakukan seleksi terhadap pekerja yang telah berpengalaman minimal lima tahun untuk mengikuti pelatihan yang dijadwalkan pada malam hari selama tiga bulan. (Saudi, 2020).

D. Sejarah Pendidikan Nonformal di Mesir

Pendidikan Nonformal di Mesir memiliki sejarah yang panjang dan beragam, mencerminkan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting dalam perkembangan pendidikan Nonformal di Mesir:

1. *Era Pra-Islam* : Sebelum masuknya Islam, Mesir memiliki tradisi pendidikan yang kuat, terutama di kalangan elit. Pendidikan pada masa ini lebih bersifat informal dan terfokus pada pengajaran agama, bahasa, dan sains.
2. *Masa Islam Awal* : Setelah masuknya Islam pada abad ke-7, pendidikan mulai berkembang dengan hadirnya madrasah yang mengajarkan ilmu agama. Namun, pendidikan nonformal tetap ada melalui pengajaran di rumah dan komunitas.
3. *Era Modern (Abad ke-19)* : Pada abad ke-19, Mesir mulai mengadopsi sistem pendidikan Barat. Pendidikan nonformal mulai mendapat perhatian, terutama dengan berdirinya lembaga-lembaga yang menawarkan kursus keterampilan dan pelatihan bagi masyarakat.
4. *Reformasi Pendidikan (Awal Abad ke-20)* : Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Muhammad Ali Pasha, Mesir melakukan reformasi pendidikan yang mencakup pendidikan Nonformal. Lembaga-lembaga seperti pusat pelatihan kerja dan kursus-kursus keterampilan mulai bermunculan.

5. *Era Nasser (1950-an-1960-an)* : Dari perspektif kebijakan dan reformasi pendidikan, beberapa peneliti sepakat bahwa konsep pendidikan nonformal muncul pada tahun 1960 dan 1970 (Brennan, 1997a; Carron & CarrHill, 1993; Rogers, 2005; Thompson, 2001).

Setelah Perang Dunia II dan hingga awal tahun 1970, sistem pendidikan formal telah berkembang pesat dengan jumlah pendaftaran sekolah meningkat dua kali lipat di banyak negara. Perluasan sekolah secara linier diinginkan dan dipandang sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Ada harapan besar bahwa perluasan pendidikan akan mengarah pada pembangunan ekonomi; semakin banyak orang terdidik berarti semakin banyak pekerjaan (Fordham, 1993).

Namun, selama awal tahun enam puluhan, menjadi jelas bahwa ada 'Krisis Pendidikan Dunia' sebagaimana Coombs (1969) menyebutnya dalam bukunya yang sangat berpengaruh. Sistem pendidikan formal menghadapi krisis dalam beberapa aspek: tuntutan sosial terhadap pendidikan meningkat sementara sumber daya tidak cukup untuk memenuhi tuntutan tersebut, kurikulum tidak sesuai dan tantangan untuk menyiapkan guru, dan lapangan pekerjaan tidak muncul seperti yang diharapkan dari pendidikan.

Krisis dan ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan ini menyebabkan terciptanya berbagai cara untuk menangani krisis. Rogers (2005) berpendapat bahwa berbagai agenda reformasi diusulkan, dari mengubah sekolah yang berfokus pada kualitas dan kurikulum menjadi berfokus pada pendidikan teknis dan kejuruan serta transisi dari sekolah ke dunia kerja, sementara itu memperkenalkan pendidikan nonformal baik sebagai pelengkap atau bahkan alternatif untuk pendidikan formal. Meskipun pendidikan nonformal dianggap serius oleh lembaga bantuan Barat seperti USAID dan Bank Dunia (lihat misalnya Coombs & Ahmed, 1974), pendidikan nonformal dianggap lebih rendah kualitasnya daripada pendidikan formal. Hal ini akhirnya

menyebabkan reformasi diarahkan kembali ke pendidikan formal, dan siklus tersebut dimulai lagi.

Di bawah Presiden Gamal Abdel Nasser, pendidikan Nonformal semakin diperkuat sebagai bagian dari program pembangunan sosial. Pemerintah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung.

1. Penghapusan Iliterasi : Pendidikan nonformal di Mesir terutama dikaitkan dengan upaya penghapusan buta huruf. Pada tahun 1960, sekitar 70% penduduk di atas usia 10 tahun adalah buta huruf. Meskipun angka ini menurun seiring waktu, tantangan tetap ada.
2. Program dan Inisiatif : Sejak tahun 1967, Kementerian Pendidikan Mesir telah menyelenggarakan program pelatihan bagi individu yang telah menyelesaikan pendidikan dasar tetapi putus sekolah. Program ini dirancang untuk melatih keterampilan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
- a. *Dekade 1970-an dan 1980-an* : Pendidikan Nonformal mulai diakui sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Program-program seperti pendidikan untuk orang dewasa dan pelatihan keterampilan menjadi lebih umum. Pendidikan Nonformal sebagai Bagian dari Wacana Pembelajaran Sepanjang Hayat, Konsep pendidikan/pembelajaran sepanjang hayat dan kemunculannya dalam kebijakan dan pembangunan, biasanya dikaitkan dengan karya UNESCO, yang mengadopsi konsep ini pada awal tahun tujuh puluhan.

Di Mesir, pendidikan magang ditawarkan kepada pemuda kelas menengah dan bawah setelah pendidikan formal untuk bekerja dengan keluarga mereka (Pendidikan di Mesir Kuno, t.t.). Komunitas Muslim merupakan yang pertama kali percaya pada pembelajaran seumur hidup. Bahkan dengan keberadaan lembaga Islam, pembelajaran tidak terbatas pada itu. Berbagai mata pelajaran lain, seperti filsafat, matematika, kedokteran, dan

ilmu pengetahuan alam, juga dipelajari dengan cara nonformal dan di luar batasan lembaga (Makdisi, 1981).

- b. *Reformasi Ekonomi (1990-an)* : Dengan adanya reformasi ekonomi, pendidikan non- formal di Mesir fokus pada pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja. Banyak lembaga swasta dan LSM mulai terlibat dalam penyediaan pendidikan non- formal.
- c. *Era Kontemporer (2000-an hingga sekarang)* : Saat ini, pendidikan Nonformal di Mesir mencakup berbagai bentuk, termasuk kursus online, pelatihan vokasi, dan program literasi. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Nonformal, terutama di kalangan perempuan dan kelompok marginal. Pendidikan Nonformal di Mesir terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi, menjadikannya komponen penting dalam sistem pendidikan secara keseluruhan.

E. Kebijakan Pemerintahan Mesir terhadap Pendidikan Nonformal

Etorika, wacana, dan kebijakan tentang pendidikan di Mesir sebagian besar dipengaruhi oleh modernisasi (El-Nagar & Krugly-Smolksa, 2011). Salah satu aspek modernisasi adalah memandang praktik dan pengetahuan Barat sebagai tujuan dan tidak selalu mempertimbangkan kebutuhan dan budaya masyarakat itu sendiri.

Potensi pendidikan nonformal belum sepenuhnya diakui atau diimplementasikan. Seperti yang dapat dilihat dalam Kerangka Kualifikasi Nasional (NQF), pengakuan pendidikan nonformal di Mesir belum sepenuhnya beroperasi (European Training Foundation TEF, 2021). Selain itu, laporan terbaru dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang pembelajaran

seumur hidup di Mesir terutama berfokus pada upaya pendidikan formal (Organisasi Perburuhan Internasional, 2021).

1. Pemberdayaan Literasi dan Pendidikan Dasar

Untuk mengurangi tingkat buta aksara, pemerintah meluncurkan program literasi nasional yang menargetkan individu yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Program ini menawarkan kursus membaca, menulis, dan matematika dasar, seringkali diselenggarakan di pusat komunitas dan melalui kemitraan dengan organisasi non-pemerintah.

2. Pelatihan Keterampilan dan Pendidikan Vokasional

Mengakui pentingnya keterampilan teknis untuk pembangunan ekonomi, pemerintah menyediakan pelatihan vokasional dalam bidang seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi informasi. Program ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, dengan menawarkan kursus yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.

3. Pendidikan Berbasis Komunitas dan Pusat Pembelajaran Masyarakat

Pemerintah mendirikan pusat pembelajaran masyarakat di seluruh negeri untuk menyediakan pendidikan Nonformal yang fleksibel dan terjangkau. Pusat ini menawarkan berbagai program, termasuk kursus literasi, pelatihan keterampilan, dan program pendidikan kewarganegaraan, dengan tujuan memberdayakan individu dan komunitas.

4. Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Lembaga Internasional

Untuk meningkatkan kualitas dan relevansi program pendidikan Nonformal, pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga internasional. Kemitraan ini mendukung pengembangan kurikulum, pelatihan instruktur, dan penyediaan

sumber daya pendidikan, memastikan bahwa program tersebut memenuhi standar internasional dan kebutuhan pasar kerja.

F. Bentuk Program Pendidikan Nonformal di Mesir

Hoppers (2006) menjelaskan bahwa berbagai bentuk program pendidikan nonformal meliputi: pendidikan paraformal, pendidikan populer, keterampilan teknis dan kejuruan, literasi dengan pengembangan keterampilan, pendidikan dan pengasuhan anak usia dini (ECCE), pengembangan pribadi, dan program pendidikan nonformal tambahan.

1. Para Formal

Ini adalah jenis program yang merupakan mitra sistem pendidikan formal dan beroperasi dalam hubungan yang erat dengannya. Tujuan utamanya adalah untuk “memberikan kesempatan kedua kepada mereka yang, karena berbagai alasan, tidak dapat memperoleh manfaat dari sistem sekolah reguler pada saat yang ditentukan” (Carron & Carr-Hill, 1993, hlm. 21). Program ini terutama melengkapi sistem pendidikan, dan lebih terlihat di negara-negara maju (Brennan, 1997). Program-program ini biasanya disponsori oleh otoritas nasional dan sangat relevan dengan kebijakan pendidikan (Hoppers, 2006).

Jenis pendidikan ini dipimpin oleh para pendidik dan praktisi pembangunan yang mengakui beberapa tantangan sistem pendidikan formal seperti tidak menjangkau populasi yang dibutuhkan, mahal dan tidak hemat biaya, mengorbankan kualitas demi kuantitas, tidak relevannya kurikulum, dan kesenjangan antara pendidikan tinggi dan pendidikan dasar. Sering kali diyakini bahwa tantangan-tantangan ini dapat diatasi dan dapat diselesaikan di dalam sistem pendidikan itu sendiri (Rogers, 2005).

Contoh program semacam ini di Mesir adalah program literasi orang dewasa yang diselenggarakan oleh Otoritas Umum Literasi dan Pendidikan Orang Dewasa yang memungkinkan

orang dewasa yang buta huruf untuk membaca, menulis, dan menggunakan keterampilan berhitung dengan kurikulum yang berfokus pada masalah kehidupan sehari-hari (Sywelem, 2020).

2. Pendidikan Populer dan Pendidikan Nonformal untuk Perubahan Sosial

Pendidikan populer adalah bentuk pendidikan orang dewasa yang berdiri di sisi yang berlawanan atau ekstrem dari sistem pendidikan formal dan terkadang menentang prinsip-prinsip dasar dan fungsinya (Carron & Carr-Hill, 1993; Hoppers, 2006). Kata 'populer' dalam bahasa Spanyol dan Portugis berarti 'rakyat' sehingga pendidikan populer adalah jenis pendidikan yang "berpihak pada 'rakyat' ini - dari petani hingga pekerja pabrik, kelompok masyarakat hingga gerakan sosial - dalam upaya mereka untuk mewujudkan transformasi sosial yang progresif" (Kane, 2018, hlm. 277).

Pendidikan populer muncul sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi sosial dan politik mereka dan mewujudkannya dalam tindakan sosial, mendorong reformasi di tingkat masyarakat (La Belle, 2000). Yang membedakan pendidikan populer dari pendidikan orang dewasa umum adalah bahwa pendidikan populer terutama berfungsi untuk perubahan sosial dan memiliki tindakan serta perubahan politik dan sosial sebagai intinya (Westoby et al., 2019). Pendidikan populer adalah yang paling tidak dilembagakan.

Sektor dalam bidang pendidikan nonformal yang beragam ini (Carron & Carr-Hill, 1993) dan dapat mengambil bentuk asosiasi sosial budaya, kelompok agama, partai politik, proyek literasi orang dewasa, pelatihan kooperatif, mobilisasi politik, dan kegiatan pengembangan masyarakat. Asal usul bentuk-bentuk ini adalah Amerika Latin. Meskipun pendidikan populer memiliki sejarah yang kaya dalam gerakan sosial yang mendahului karya Paulo Freire, karya Freire merupakan tonggak penting dan sangat memengaruhinya (Kuk & Tarlau, 2020; La Belle, 2000). Freire berpendapat bahwa pendidikan tidak netral,

pengetahuan adalah kekuatan, pendidikan perbankan adalah kekuatan koersif dan karenanya perlu dialog dan membangun pengetahuan bersama dengan para pelajar. Semua ini mengarah pada "Konscientization" seperti yang dijelaskan Paulo Freire. Kesadaran, atau peningkatan kesadaran, adalah proses membantu orang untuk melihat posisi mereka di dunia dan realitas sosial-budaya yang membentuk kehidupan mereka dan mengenali kekuatan mereka untuk mengubahnya (Freire, 1970).

Bidang pendidikan populer ini sangat beragam, karena bergantung pada konteks sosial dan politik tempat bidang tersebut beroperasi, tantangan apa yang mereka hadapi, dan bagaimana pendidikan dapat membantu. Perubahan sosial bukanlah proses linier atau berkelanjutan, dan tidak ada satu cara yang seragam untuk mengembangkannya, karena masyarakat yang berbeda berkembang dengan cara yang berbeda tergantung pada kondisi yang ada (Odame, 2017). Seringkali sulit untuk membedakan antara gerakan perubahan sosial lainnya dan pendidikan populer karena orang mengintegrasikan ide-ide pendidikan populer ke dalam praktik mereka tanpa menyebut diri mereka atau pekerjaan mereka sebagai pendidikan populer (Kane, 2018). Contoh Pendidikan Populer di Mesir yaitu mengajarkan Sejarah dalam Lingkungan Nonformal.

Contoh program pendidikan populer di Mesir adalah apa yang coba dilakukan oleh beberapa inisiatif dan organisasi di Mesir melalui kegiatan pendidikan sejarah nonformal sebagaimana dipelajari oleh Soliman & Yehia (2018). Inisiatif tersebut berupaya menawarkan pendidikan sejarah menggunakan pedagogi dan konten yang tidak ditawarkan di sekolah. Pendidikan sejarah secara umum, dipandang sebagai cara untuk membentuk identitas pelajar, membentuk tindakan dan dunia di sekitar mereka. Namun, buku teks sejarah di sekolah-sekolah Mesir tidak mendorong aspek ini. Buku-buku tersebut menyediakan narasi tunggal tentang sejarah Mesir yang mengabaikan dan membungkam suara-suara lain (Botros, 2012).

Revolusi 2011 meningkatkan minat banyak orang dalam ilmu sosial dan humaniora, mengajukan pertanyaan tentang politik, identitas, dan kewarganegaraan di antara yang lainnya. Minat tersebut mendorong dimulainya berbagai kegiatan dan inisiatif dalam pengajaran sejarah dalam lingkungan nonformal. Ciri-ciri umum pendidikan populer:

- a. Pertama, ada posisi oposisional terhadap narasi resmi sejarah yang ditawarkan di sekolah atau media. Hal ini tercermin dalam kegiatan mereka, sehingga pengajaran sejarah dilakukan dengan cara kritis yang menantang narasi yang ditawarkan di sekolah melalui penjelajahan berbagai materi dan narasi sejarah.
- b. Kedua, adalah pedagogi yang ditawarkan oleh kegiatan-kegiatan ini. Hal ini dapat diimplementasikan pertama-tama, melalui penawaran berbagai sumber pengetahuan untuk didiskusikan dan dianalisis, seperti surat kabar, kunjungan lapangan, arsip, film, buku, dan wawancara lisan.
- c. Ketiga, ketergantungan yang besar pada diskusi sebagai alat pedagogis yang penting adalah hal yang umum di antara semua inisiatif. Diskusi semacam itu menyediakan ruang untuk mempertanyakan pengetahuan yang diperoleh peserta didik, dan untuk membantu peserta mencapai kesimpulan mereka sendiri berdasarkan bukti. Ini sama sekali berbeda dari bagaimana sejarah ditawarkan di sekolah. yang ditawarkan melalui narasi tunggal yang mencerminkan pandangan politik partai yang berkuasa dan mengabaikan narasi lain (Soliman & Yehia, 2018).

3. Program Literasi dengan Pengembangan Keterampilan

Kemampuan Kerja Kategori pendidikan nonformal ini mungkin merupakan jenis yang paling luas dan beragam dan dipelajari melalui beberapa studi kasus berbasis negara dalam literatur (Comyn, 2018; Durlak & Weissberg, 2007; Islam et al., 2012; Mayombe & Lombard, 2015). Untuk literasi, kita beralih dari konsep sempit yang mendefinisikan literasi sebagai "kontinum pembelajaran dan kemahiran dalam membaca,

menulis, dan menggunakan angka sepanjang hidup." (UNESCO, 2023, paragraf 2) dan mendefinisikan orang sebagai melek huruf atau buta huruf ke literasi sebagai proses pembelajaran seumur hidup (Torres, 2002). Ini adalah proses pembelajaran berkelanjutan yang terjadi sepanjang hidup, dan ini terkait dengan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat (Hanemann & Robinson, 2022)

Keterampilan seperti keterampilan komunikasi, keterampilan organisasi/perencanaan, keterampilan pengambilan keputusan, keterampilan kerja tim, kepercayaan diri, dan otonomi. Mereka menemukan bahwa para pemberi kerja menghargai keterampilan ini dan senang melihat CV yang mencantumkan partisipasi pemuda dalam kegiatan pendidikan nonformal. Mereka juga melaporkan literatur lain yang menyatakan bahwa para pemberi kerja mengaitkan partisipasi pemuda dalam pendidikan nonformal dan kerja komunitas dengan pengembangan keterampilan pribadi dan motivasi tingkat tinggi.

Selain itu, para pemberi kerja memandang positif resume dengan jumlah partisipasi pendidikan nonformal yang tinggi tetapi kualifikasi akademis yang rendah (Campion 1994, Cole et al., 2007 sebagaimana dikutip dalam Souto-Otero (2016)). Wacana seputar pengembangan keterampilan tidak hanya terkait dengan keterampilan lunak, seperti yang disebutkan, tetapi juga keterampilan teknis dan kejuruan yang dapat membantu lulusan menemukan peluang kerja atau memulai bisnis mereka secara efektif dan berkelanjutan (Rose, 2018). Keterampilan ini mungkin lebih menonjol daripada keterampilan lunak dalam hal ini.

Mayombe & Lombard (2015) menguraikan bahwa agar organisasi pendidikan nonformal benar-benar berdampak pada kemampuan kerja, mereka perlu memiliki "faktor pendukung" seperti kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, fasilitator yang berkualifikasi, dan infrastruktur yang berkelanjutan. Pendidikan literasi di Mesir telah menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan tingkat melek huruf dan pengetahuan masyarakat. Berbagai program literasi telah

diluncurkan untuk menjangkau berbagai kalangan, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Berikut adalah beberapa inisiatif dan program literasi yang sedang berlangsung di Mesir:

- a. Program Literasi Informasi di Perpustakaan, Salah satu program yang menonjol adalah Program Literasi Informasi yang diadakan di perpustakaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan menggunakan informasi secara efektif. Melalui pelatihan dan workshop, peserta diajarkan cara mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber. Ini sangat penting dalam era digital saat ini, di mana informasi tersedia dalam jumlah yang sangat besar.
- b. Pengembangan Literasi di Kalangan Mahasiswa, Organisasi seperti Keluarga Mahasiswa Aceh (KMA) di Mesir telah meluncurkan kampanye literasi yang bertujuan untuk meningkatkan minat membaca di kalangan mahasiswa. Salah satu kegiatan yang diadakan adalah Cairo Book Party, di mana mahasiswa berkumpul untuk membaca dan mendiskusikan buku. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan membaca tetapi juga membangun komunitas di antara mahasiswa Indonesia di Mesir.
- c. Program Literasi Keagamaan Lintas Budaya, Program Literasi Keagamaan Lintas Budaya yang diinisiasi oleh Institut Leimena juga berfokus pada pengembangan literasi di kalangan guru madrasah dan pesantren. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman lintas agama dan kolaborasi antar komunitas. Pelatihan ini mencakup pendekatan yang menekankan kompetensi pribadi, komparatif, dan kolaboratif dalam berinteraksi dengan orang dari latar belakang agama yang berbeda.

- d. Inisiatif oleh PPMI Mesir, Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia (PPMI) di Mesir juga aktif dalam mengembangkan program literasi. Mereka mengadakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis dan membaca di kalangan mahasiswa. Kegiatan ini termasuk seminar, workshop, dan diskusi yang melibatkan penulis dan akademisi.

Program literasi di Mesir mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis di kalangan masyarakat. Dari program di perpustakaan hingga kampanye di kalangan mahasiswa, upaya ini sangat penting untuk meningkatkan tingkat melek huruf dan pengetahuan masyarakat Mesir secara keseluruhan. Dengan dukungan dari berbagai organisasi dan lembaga, diharapkan program-program ini dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

4. Pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini (ECCE)

Sistem pendidikan anak usia dini di Mesir terdiri dari taman kanak-kanak dan kelompok bermain. Taman kanak-kanak adalah program yang dirancang untuk yang bersiap ke sekolah. Kelompok bermain dirancang untuk Pengasuhan anak lebih kecil, dan kualitasnya bervariasi. Taman kanak-kanak adalah kelas pra sekolah dasar untuk anak usia(4-6) tahun. Kelompok Bermain dirancang untuk anak-anak yang lebih kecil (usia 2-4). Kelompok bermain dan Taman kanak-kanak berada di bawah pengawasan beberapa Kompilasi, termasuk Kementerian Sosial & Kementerian Pendidikan. Jenis lembaga pendidikan anak-anak di Mesir:

1. Sekolah pribadi; sebagian besar program di swasta dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sekolah-sekolah agama di sistem Al-Azhar.
2. Pusat penitipan anak di tempat kerja,
3. Pengasuhan anak formal di organisasi dan rumah pribadi.

ECCE di Mesir mencakup berbagai program yang dirancang untuk mendukung perkembangan fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak-anak di usia dini, biasanya dari lahir hingga usia enam tahun. Tujuannya adalah untuk memberikan fondasi yang kuat bagi pendidikan formal selanjutnya serta untuk memajukan kesejahteraan anak. Pemerintah Mesir telah mengembangkan kebijakan untuk mendukung PAUD, termasuk standar untuk lembaga pendidikan anak usia dini. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial bertanggung jawab untuk mengatur dan memfasilitasi program-program PAUD.

G. Kelompok Sasaran Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Mesir

Pendidikan Nonformal (PNF) di Mesir dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Program-program PNF ini tidak terbatas pada usia atau status sosial tertentu, melainkan ditujukan untuk meningkatkan literasi, keterampilan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

1. Anak-anak dan Remaja

Pendidikan Nonformal di Mesir menyediakan program literasi dan pelatihan keterampilan untuk anak-anak dan remaja yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Program ini mencakup kursus membaca, menulis, dan berhitung dasar, serta pelatihan keterampilan vokasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Tujuannya adalah memberikan kesempatan belajar bagi mereka yang putus sekolah atau tidak memiliki akses ke pendidikan formal.

2. Orang Dewasa

Salah satu sasaran utama pendidikan Nonformal di Mesir adalah orang dewasa yang belum memiliki keterampilan baca-tulis. Program literasi ditujukan untuk mengurangi tingkat buta

aksara yang masih tinggi di kalangan penduduk dewasa. Selain itu, program pelatihan keterampilan vokasional ditujukan untuk meningkatkan kemampuan kerja dan produktivitas, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup peserta. Kementerian Perindustrian, misalnya, mengawasi pusat-pusat pelatihan yang menawarkan program peningkatan keterampilan bagi teknisi melalui pelatihan cepat dan magang di industri terkait.

3. Kelompok Rentan dan Penyandang Disabilitas

Pendidikan Nonformal juga ditujukan untuk kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Program-program khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan mereka, sehingga dapat berkontribusi secara produktif dalam masyarakat. Misalnya, penyediaan materi pembelajaran yang disesuaikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan mental peserta.

4. Masyarakat Umum untuk Peningkatan Kesadaran

Selain kelompok-kelompok di atas, pendidikan Nonformal juga ditujukan untuk masyarakat umum guna meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kesehatan, lingkungan, dan sosial. Program-program ini sering diselenggarakan oleh organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sosial. Melalui pendekatan yang inklusif dan beragam, pendidikan Nonformal di Mesir berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang terdidik, terampil, dan produktif, serta mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

H. Penyelenggara Pendidikan Nonformal di Mesir

Pendidikan Nonformal (PNF) di Mesir diselenggarakan oleh berbagai entitas, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan keagamaan, organisasi non-pemerintah (LSM), dan sektor swasta. Keberagaman penyelenggara ini mencerminkan

komitmen Mesir untuk menyediakan pendidikan yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

1. Pemerintah

Pemerintah Mesir memainkan peran utama dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal melalui kementerian terkait. Kementerian Pendidikan bertanggung jawab atas program literasi dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan literasi dan keterampilan kerja masyarakat. Selain itu, Kementerian Urusan Al-Azhar mengelola pendidikan Nonformal yang berfokus pada studi agama Islam, menawarkan program seperti kursus tafsir Al-Qur'an dan hadis.

2. Lembaga Pendidikan Keagamaan

Al-Azhar, sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua dan paling terkemuka di dunia Islam, memiliki peran signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal. Selain pendidikan formal, Al-Azhar menyediakan program Nonformal yang mencakup kursus bahasa Arab, studi Islam, dan pelatihan keagamaan lainnya. Program ini ditujukan untuk memperdalam pemahaman agama dan bahasa bagi masyarakat luas.

3. Organisasi Non-Pemerintah (LSM)

Berbagai LSM di Mesir berkontribusi signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal. Organisasi seperti SEKEM menawarkan program pendidikan yang mencakup taman kanak-kanak, sekolah inklusif, pusat pelatihan vokasional, dan program literasi untuk masyarakat sekitar. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan komunitas melalui pendidikan.

4. Sektor Swasta

Sektor swasta juga berperan dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Mesir. Banyak sekolah swasta dan pusat pelatihan yang menawarkan program tambahan di luar kurikulum formal, seperti kursus bahasa asing, pelatihan

komputer, dan keterampilan teknis lainnya. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik individu dan pasar kerja.

5. Komunitas dan Individu

Selain entitas formal, komunitas lokal dan individu di Mesir turut berperan dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal. Misalnya, kelompok belajar di masjid, pusat komunitas, dan inisiatif individu yang menyediakan pelajaran privat atau kelompok kecil. Inisiatif ini seringkali berfokus pada pengajaran membaca, menulis, dan keterampilan dasar lainnya.

I. Karakteristik Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Mesir

Karakteristik pendidikan Nonformal di Mesir sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, yang menghasilkan variasi akses dan kualitas layanan pendidikan bagi kelompok berbeda. Bagi kalangan kaya, pendidikan Nonformal seringkali tersedia dalam bentuk kursus eksklusif, pelatihan keterampilan khusus, atau program pengembangan pribadi yang dilengkapi dengan fasilitas modern dan instruktur profesional. Program-program ini biasanya berorientasi pada pengembangan kemampuan bahasa asing, teknologi, atau bidang bisnis, yang menunjang mobilitas sosial dan peluang karir global.

Sementara itu, bagi kelompok masyarakat menengah, pendidikan Nonformal cenderung berupa pelatihan vokasional dan kursus keterampilan praktis yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau organisasi swasta dengan biaya yang lebih terjangkau. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan kerja dan penghidupan mereka di pasar tenaga kerja lokal. Sedangkan untuk kalangan kurang mampu, pendidikan Nonformal biasanya difokuskan pada program literasi dasar, pelatihan kerja sederhana, dan pemberdayaan komunitas yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat sipil atau organisasi internasional. Program ini bersifat sangat inklusif

dan berorientasi pada peningkatan kapasitas dasar guna mendorong kemandirian sosial-ekonomi, meskipun sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur.

Selanjutnya Pemerintah Mesir dan beberapa organisasi masyarakat sipil maupun lembaga keagamaan menyediakan program pendidikan Nonformal yang ditujukan untuk membantu imigran, termasuk pekerja migran, agar dapat beradaptasi lebih baik di lingkungan baru mereka. Program PNF bagi pekerja imigran di Mesir biasanya berfokus pada pembelajaran bahasa Arab atau bahasa Inggris, pelatihan keterampilan kerja tertentu, pendidikan kewarganegaraan, serta sosialisasi mengenai hak-hak tenaga kerja dan perlindungan hukum. Hal ini penting agar para pekerja migran dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, memahami aturan dan budaya setempat, serta memperoleh keterampilan yang dapat meningkatkan peluang kerja dan kesejahteraan mereka selama berada di Mesir.

Selain itu, beberapa organisasi internasional dan LSM yang bekerja di Mesir juga aktif mengadakan pelatihan dan program pemberdayaan untuk pekerja migran, termasuk TKI, dengan tujuan memperkuat kapasitas mereka menghadapi tantangan sosial-ekonomi serta mencegah eksploitasi atau pelanggaran hak asasi manusia.

J. Sumber Dana Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Mesir

Sumber dana untuk penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Mesir berasal dari berbagai sumber, yang mencakup baik dana publik maupun swasta. Berikut adalah beberapa sumber utama dana yang mendukung pendidikan Nonformal di Mesir:

1. Pemerintah

Pemerintah Mesir melalui Kementerian Pendidikan dan lembaga terkait menyediakan dana dari anggaran negara untuk

mendukung program pendidikan non- formal. Meliputi pelatihan untuk pendidik, pengembangan kurikulum, dan penyediaan fasilitas. Kadang-kadang, pemerintah meluncurkan program khusus dengan alokasi dana tertentu untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Nonformal, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani.

2. Organisasi Non-Pemerintah (LSM)

Banyak LSM yang beroperasi di Mesir ikut aktif dalam memuat dan menyelenggarakan program pendidikan Nonformal. Mereka sering kali mendapatkan dana dari donor internasional, yayasan, dan individu yang mendukung pendidikan dan pengembangan masyarakat.

3. Donor Internasional

Badan PBB dan Organisasi Internasional : Organisasi seperti UNICEF, UNESCO, dan lembaga-lembaga internasional lainnya sering memberikan dukungan finansial untuk program pendidikan Nonformal di Mesir. Ini termasuk proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan literasi, keterampilan vokasi, dan pendidikan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Bantuan Bilateral : Beberapa negara juga memberikan bantuan keuangan untuk mendukung inisiatif pendidikan Nonformal di Mesir sebagai bagian dari kerjasama bilateral. Sektor Swasta, seperti Perusahaan dan Korporasi : Beberapa perusahaan swasta berinvestasi dalam program pendidikan Nonformal sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Mereka dapat memahami pelatihan, program literasi, atau inisiatif lain yang bermanfaat bagi masyarakat.

4. Komunitas dan Kontribusi Lokal

Sumbangan dari Masyarakat : Dalam beberapa kasus, komunitas lokal dapat memberikan kontribusi berupa dana, sumber daya, atau fasilitas untuk mendukung pendidikan Nonformal. Kegiatan Penggalangan Dana : Program-program

yang melibatkan masyarakat dalam penggalangan dana, seperti acara amal atau bazar, juga dapat menjadi sumber dana untuk pendidikan Nonformal.

5. Program Pendanaan Khusus

Proyek Berbasis Hibah : Banyak program pendidikan Nonformal yang didanai melalui hibah yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga internasional atau yayasan yang fokus pada pendidikan dan pengembangan sosial.

K. Kelebihan dan Kelemahan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Mesir

Pendidikan Nonformal di Mesir memainkan peran penting dalam melengkapi sistem pendidikan formal dengan menyediakan alternatif yang fleksibel dan terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat. Namun, seperti sistem pendidikan lainnya, penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Mesir memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dianalisis untuk meningkatkan efektivitasnya.

1. Kelebihan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Mesir

a. Aksesibilitas dan Inklusivitas

Pendidikan Nonformal di Mesir dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak-anak, remaja, orang dewasa, perempuan, penyandang disabilitas, petani, pedagang, dan pengrajin. Program ini memberikan kesempatan belajar bagi mereka yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal, sehingga meningkatkan inklusivitas pendidikan di seluruh negeri.

b. Fleksibilitas Waktu dan Metode

Program pendidikan Nonformal menawarkan fleksibilitas dalam hal waktu dan metode pembelajaran. Kursus dan pelatihan sering diselenggarakan di luar jam kerja atau pada akhir pekan, memungkinkan individu yang bekerja untuk

berpartisipasi. Metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta, menggunakan pendekatan praktis dan kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

c. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial

Melalui pelatihan keterampilan vokasional, pendidikan Nonformal membantu peserta mengembangkan kemampuan yang dapat meningkatkan peluang kerja dan pendapatan. Program ini berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya, sehingga meningkatkan taraf hidup dan mengurangi ketidaksetaraan sosial.

d. Penguatan Nilai Budaya dan Agama

Pendidikan Nonformal di Mesir juga berperan dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan agama. Melalui program yang diselenggarakan oleh lembaga seperti Al- Azhar, peserta dapat memperdalam pemahaman mereka tentang tradisi dan nilai-nilai Islam, yang merupakan bagian integral dari identitas budaya Mesir.

e. Peningkatan Literasi dan Keterampilan Dasar

Program literasi dalam pendidikan Nonformal secara signifikan berkontribusi pada peningkatan tingkat melek huruf di Mesir. Dengan memberikan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung dasar, program ini membantu individu untuk lebih berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

2. Kelemahan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Mesir

a. Keterbatasan Sumber Daya dan Fasilitas

Banyak program pendidikan Nonformal di Mesir menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk dana, fasilitas, dan materi pembelajaran. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas program dan membatasi jangkauannya, terutama di daerah-daerah terpencil.

b. Kurangnya Standarisasi dan Regulasi

Tidak adanya standar dan regulasi yang jelas untuk program pendidikan non- formal dapat menyebabkan variasi dalam kualitas dan konten pendidikan yang diberikan. Hal ini menyulitkan dalam mengevaluasi efektivitas program dan menjamin kualitas pendidikan yang diterima oleh peserta.

c. Keterbatasan Keterampilan dan Kualifikasi Pengajar

Kualitas pengajaran dalam pendidikan Nonformal dapat terhambat oleh keterbatasan keterampilan dan kualifikasi pengajar. Tanpa pelatihan dan dukungan yang memadai, pengajar mungkin kesulitan dalam menyampaikan materi secara efektif dan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta.

d. Ketergantungan pada Pendanaan Eksternal

Banyak program pendidikan Nonformal di Mesir bergantung pada pendanaan dari donor eksternal atau LSM.

L. Studi Komparatif Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Mesir dengan Negara Lain

Studi komparatif penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Mesir dengan negara lain dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik, tantangan, dan strategi yang berbeda dalam mengatasi masalah pendidikan. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dibandingkan antara Mesir dan negara lain, seperti Indonesia dan Brasil, dalam konteks pendidikan Nonformal:

1. Kebijakan dan Regulasi

- a. Mesir : Pemerintah Mesir telah mengembangkan kebijakan untuk mendukung pendidikan Nonformal, dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas. Namun, implementasi kebijakan sering kali menghadapi tantangan dalam hal pendanaan dan koordinasi antar lembaga.
- b. Indonesia : Di Indonesia, pendidikan nonformal diatur oleh

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan berbagai program seperti Paket A, B, dan C untuk pendidikan setara SD, SMP, dan SMA. Kebijakan ini memberikan harapan bagi peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan mereka.

- c. Brasil : Brasil memiliki sistem pendidikan Nonformal yang kuat, dengan program seperti "*Educação de Jovens e Adultos*" (EJA) yang ditujukan untuk orang dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Pemerintah Brasil juga aktif dalam mendukung inisiatif pendidikan berbasis komunitas.

2. Model dan Jenis Program

- a. Mesir : Program pendidikan Nonformal di Mesir mencakup pendidikan untuk orang dewasa, pelatihan keterampilan, dan program literasi. Namun, variasi dalam kualitas program dapat menjadi tantangan.
- b. Indonesia : Indonesia menawarkan berbagai jenis program nonformal, termasuk kursus keterampilan, pendidikan masyarakat, dan program literasi. Banyak lembaga swasta dan LSM yang ikut aktif dalam penyelenggaraan program-program ini.
- c. Brasil : Brasil memiliki beragam program Nonformal yang mencakup pendidikan berbasis komunitas, pelatihan keterampilan, dan program-program yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di daerah pedesaan dan perkotaan.

3. Pendanaan dan Sumber Daya

- a. Mesir : Pendanaan untuk pendidikan Nonformal sering kali berasal dari pemerintah, LSM, dan donor internasional. Namun, ada tantangan dalam hal alokasi dana yang memadai dan berkelanjutan.
- b. Indonesia : Pendidikan Nonformal di Indonesia juga didanai melalui kombinasi sumber dana pemerintah, swasta, dan masyarakat. Program-program sering kali bergantung pada dukungan lokal dan inisiatif komunitas.

- c. Brasil : Brasil memiliki model pendanaan yang lebih terintegrasi, dengan dukungan dari pemerintah federal, negara bagian, dan lokal. Program-program pendidikan non-formal sering kali mendapatkan dana dari berbagai tingkat pemerintahan.

4. Keterlibatan Komunitas

- a. Mesir : Keterlibatan komunitas dalam pendidikan Nonformal di Mesir masih perlu ditingkatkan, meskipun ada beberapa inisiatif berbasis komunitas.
- b. Indonesia : Di Indonesia, keterlibatan masyarakat sangat kuat, dengan banyaknya program Nonformal yang melibatkan partisipasi aktif dari orang tua dan komunitas lokal.
- c. Brasil : Brasil memiliki tradisi panjang dalam pendidikan berbasis komunitas, dengan banyak program yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses pendidikan.

5. Tantangan dan Solusi

- a. Mesir : Tantangan utama di Mesir termasuk akses yang tidak merata, kualitas program yang bervariasi, dan kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan Nonformal.
- b. Indonesia : Tantangan di Indonesia meliputi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidik dalam program non-formal.
- c. Brasil : Brasil menghadapi tantangan dalam hal inklusi sosial dan akses pendidikan bagi kelompok marginal, tetapi telah mengimplementasikan program-program inovatif untuk mengatasi masalah ini.

Pendidikan Nonformal di Mesir memainkan peran yang sangat penting dalam menyediakan akses pendidikan yang fleksibel dan inklusif bagi berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti

pendidikan formal. Melalui berbagai program seperti pelatihan keterampilan, kursus literasi, dan pendidikan untuk orang dewasa, pendidikan Nonformal berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup, memberdayakan individu, serta mendorong pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Meskipun terdapat kemajuan dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Mesir, tantangan signifikan masih dihadapi, termasuk masalah pendanaan yang tidak memadai, variasi dalam kualitas program, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan Nonformal. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, serta kebijakan pengembangan yang mendukung keberlanjutan dan efektivitas program-program pendidikan Nonformal.

Studi komparatif dengan negara lain menunjukkan bahwa Mesir dapat mengambil pelajaran berharga dari praktik terbaik di negara lain dalam mengembangkan pendidikan non-formal. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pendidikan Nonformal di Mesir dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi.

Secara keseluruhan, pendidikan Nonformal di Mesir memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih terdidik dan berdaya saing. Dengan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan non-formal, Mesir dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi pada pembangunan negara.

BAB X

Pendidikan Nonformal di Kongo

Sistem pendidikan di DRC mirip dengan Belgia , yakni memiliki 6 tahun pendidikan dasar yang diikuti oleh 6 tahun pendidikan menengah (sistem pendidikan ini telah menderita akibat konflik selama beberapa dekade meskipun beberapa tahun terakhir telah menunjukkan perbaikan).

Pada tahun 2000, 65 persen anak usia 10 hingga 14 tahun bersekolah. Sebagai akibat dari perang saudara selama 6 tahun, lebih dari 5,2 juta anak di negara tersebut tidak mendapatkan pendidikan. Angka resmi untuk tahun ajaran 2009–10 melaporkan terdapat 35.915 sekolah dasar yang melayani 10.572.422 siswa; dan 17.373 sekolah menengah yang melayani 3.484.459 siswa lainnya. Dari 10 provinsi yang paling terdampak oleh kurangnya pendidikan adalah Kivu Utara dan Kivu Selatan . Lebih dari 42% anak-anak di provinsi-provinsi ini tidak pernah bersekolah.

Meskipun pemerintah telah menggratiskan pendidikan dasar di Republik Demokratik Kongo (DRC) pada tahun 2010, akses dan kehadiran anak-anak masih rendah. Saat ini, 25 persen anak usia sekolah dasar dan 60 persen remaja tidak terdaftar di

sekolah. Kekurangan guru yang parah di sekolah negeri merupakan masalah lain dalam sistem pendidikan. Rata-rata nasional untuk sekolah dasar adalah satu guru untuk 37 murid; namun, daerah terpinggirkan atau pedesaan mengalami rasio yang jauh lebih buruk. Rata-rata, program pendidikan di daerah terpinggirkan terdiri dari satu guru untuk 100 murid per kelas. Komplikasi dalam sistem pendidikan DRC bermula dari tahun 1980-an ketika anggaran negara pada dasarnya menguap. Karena perubahan struktural dan implementasi program dalam pemerintah, anggaran pendidikan dipotong dari 25% menjadi 7% dari pengeluaran negara nasional. Antara tahun 1982 dan 2002, gaji bulanan guru menurun dari \$68 menjadi \$13. Selain perubahan pemerintahan yang mengakibatkan krisis ekonomi pada tahun 1990-an, perang juga menghancurkan DRC. Hingga saat ini, banyak penduduk asli berjuang melawan dampak perang yang berkecamuk antara tahun 1996 dan 2003. Kekerasan yang terjadi di wilayah timur negara tersebut serta korupsi dan tata kelola yang buruk juga menjadi kendala bagi pendidikan.

A. Pendidikan di Republik Demokratik Kongo

Sistem pendidikan di Republik Demokratik Kongo diatur oleh tiga kementerian yaitu: *Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel* (MEPSP), *Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire* (MESU) dan *Ministère des Affaires Sociales* (MAS). Akibat perang saudara selama 6 tahun pada akhir tahun 1990-an awal tahun 2000-an lebih dari 5,2 juta anak di negara Kongo tersebut tidak memperoleh pendidikan. Sejak berakhirnya perang saudara, situasi telah membaik dengan pesat dengan jumlah anak yang terdaftar di sekolah dasar meningkat dari 5,5 juta pada tahun 2002 menjadi 13,5 juta pada tahun 2014, dan jumlah anak yang terdaftar di sekolah menengah meningkat menjadi dari 2,8 juta pada tahun 2007 menjadi 4,4 juta pada tahun 2014 menurut UNESCO.

Pada tahun 2000, 65 persen anak usia 10 hingga 14 tahun bersekolah. Sebagai akibat dari perang saudara selama 6 tahun, lebih dari 5,2 juta anak di negara tersebut tidak mendapatkan pendidikan. Angka resmi untuk tahun ajaran 2009–10 melaporkan terdapat 35.915 sekolah dasar yang melayani 10.572.422 siswa; dan 17.373 sekolah menengah yang melayani 3.484.459 siswa lainnya.

Dari 10 provinsi yang paling terdampak oleh kurangnya pendidikan adalah Kivu Utara dan Kivu Selatan. Lebih dari 42% anak-anak di provinsi-provinsi ini tidak pernah bersekolah. Meskipun pemerintah telah menggratiskan pendidikan dasar di Republik Demokratik Kongo (DRC) pada tahun 2010, akses dan kehadiran anak-anak masih rendah. Saat ini, 25 persen anak usia sekolah dasar dan 60 persen remaja tidak terdaftar di sekolah. Kekurangan guru yang parah di sekolah negeri merupakan masalah lain dalam sistem pendidikan. Rata-rata nasional untuk sekolah dasar adalah satu guru untuk 37 murid; namun, daerah terpinggirkan atau pedesaan mengalami rasio yang jauh lebih buruk. Rata-rata, program pendidikan di daerah terpinggirkan terdiri dari satu guru untuk 100 murid per kelas. Komplikasi dalam sistem pendidikan DRC bermula dari tahun 1980-an ketika anggaran negara pada dasarnya menguap. Karena perubahan struktural dan implementasi program dalam pemerintah, anggaran pendidikan dipotong dari 25% menjadi 7% dari pengeluaran negara nasional. Antara tahun 1982 dan 2002, gaji bulanan guru menurun dari \$68 menjadi \$13. Selain perubahan pemerintahan yang mengakibatkan krisis ekonomi pada tahun 1990-an, perang juga menghancurkan DRC. Hingga saat ini, banyak penduduk asli berjuang melawan dampak perang yang berkecamuk antara tahun 1996 dan 2003. Kekerasan yang terjadi di wilayah timur negara tersebut serta korupsi dan tata kelola yang buruk juga menjadi kendala bagi pendidikan.

Pendidikan dasar universal merupakan salah satu Tujuan Pembangunan Milenium utama dan ditetapkan sebagai prioritas oleh pemerintah Kongo, namun pendanaan untuk program pendidikan masih sangat terbatas. "Investasi internasional dan

pemerintah di sektor pendidikan Kongo sangat tidak memadai,"Ciaran Donnelly, Direktur Regional Komite Penyelamatan Internasional di Kongo. "Jika terus menggunakan pendekatan biasa, pendidikan dasar akan tetap menjadi mimpi yang mustahil bagi jutaan anak Kongo."

Menurut pemerintah Kongo, donor internasional hanya menginvestasikan \$150 juta untuk pendidikan pada tahun 2007 dan 2008, hanya 5% dari semua bantuan asing untuk Kongo. Jumlah tersebut setara dengan \$2 per tahun untuk bantuan asing bagi setiap anak usia sekolah dasar, dibandingkan dengan \$19 per anak Afghanistan. Sementara itu, pemerintah Kongo gagal memenuhi janjinya sendiri untuk mengalokasikan 16% dari anggaran nasionalnya pada tahun 2008 untuk pendidikan, yang hanya mengalokasikan 8%. Menggandakannya akan membuat negara tersebut setara dengan rata-rata negara Sub-Sahara.

Sistem pendidikan Kongo sebagian besar dibiayai oleh biaya sekolah dan itu berarti keluarga miskin Kongo, dengan rata-rata enam anak, berjuang untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Biaya bulanan dapat mencapai \$5 per anak dan upah normal sekitar \$50 per bulan. Akibatnya, angka putus sekolah tinggi. Setengah dari anak-anak yang masuk kelas satu tidak pernah menyelesaikan sekolah dasar.

Di negara yang dilanda perang seperti Kongo, tempat hampir 2 juta orang mengungsi, pendidikan juga memberikan perlindungan. Menjaga anak-anak tetap bersekolah merupakan langkah penting untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan pelecehan serta memberikan kehidupan normal bagi ribuan anak terlantar," Ulrika Blom- Mondlane, Direktur Negara Dewan Pengungsi Norwegia di Kongo. Tanpa pendanaan yang memadai untuk sektor pendidikan, kualitas pendidikan di Kongo akan terus menurun, Jennifer Poidatz, Perwakilan Negara untuk Catholic Relief Services (CRS). Bahwa kurangnya pendanaan menghambat pelatihan dan dukungan guru yang sistematis dan penting yang dibutuhkan untuk memastikan pembelajaran yang berkualitas.

Untuk meningkatkan pendaftaran dan penyelesaian pendidikan dasar, meringankan beban keuangan masyarakat miskin, dan bergerak lebih dekat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium di bidang pendidikan, Catholic Relief Services, International Rescue Committee, Norwegian Refugee Council, dan Save the Children mendesak pemerintah Kongo untuk menggandakan anggaran pendidikannya menjadi 16%. Kelompok-kelompok tersebut juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk secara signifikan meningkatkan pengeluaran bantuan luar negeri di sektor pendidikan Kongo untuk mendukung program-program nasional multi-tahun.

B. Sejarah PNF di Kongo

Pendidikan Nonformal (PNF) di Republik Demokratik Kongo, yang secara filosofis memiliki kesamaan dengan konsep Elimu ya Gumbaru di Afrika Timur seperti Kenya, berakar dari masa kolonial ketika sistem pendidikan formal yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belgia hanya terbatas pada kelompok masyarakat tertentu, khususnya elite dan warga Eropa. Pada masa kolonial tersebut, akses pendidikan formal sangat terbatas bagi masyarakat pribumi Kongo, sehingga mayoritas populasi tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dasar. Hal ini mengakibatkan tingginya tingkat buta huruf dan rendahnya tingkat keterampilan kerja di kalangan masyarakat umum. Sebagai respons atas ketimpangan tersebut, berbagai inisiatif pendidikan informal yang dikelola oleh komunitas dan misi keagamaan mulai muncul untuk memberikan alternatif akses pendidikan dasar serta pelatihan keterampilan sederhana bagi warga pribumi.

Setelah Kongo memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1960, pemerintah baru menghadapi berbagai tantangan dalam mereformasi sistem pendidikan nasional, termasuk pendidikan Nonformal. Konflik politik berkepanjangan, ketidakstabilan pemerintahan, serta keterbatasan anggaran menyebabkan rendahnya prioritas pendidikan formal dan semakin

meningkatnya kebutuhan terhadap pendidikan alternatif. Pada masa inilah, berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaganya berbasis komunitas mulai memainkan peran penting dalam mengisi kesenjangan pendidikan dengan mendirikan pusat-pusat pelatihan keterampilan, kursus literasi, serta program-program pendidikan kesehatan. Pendidikan Nonformal saat itu tidak sekadar menjadi pelengkap pendidikan formal tetapi juga menjadi solusi utama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke sekolah formal akibat kemiskinan, perang, atau isolasi geografis.

Pada tahun-tahun berikutnya, khususnya selama periode 1980-an hingga 1990-an, konsep pendidikan Nonformal di Kongo semakin berkembang dan dilembagakan sebagai respons terhadap krisis kemanusiaan akibat konflik bersenjata yang berkepanjangan. Lembaga internasional seperti UNESCO dan UNICEF mulai aktif berperan dalam mendukung program-program pendidikan alternatif di wilayah konflik untuk membantu pemulihan pasca-konflik dan rekonstruksi sosial. Program-program ini melibatkan pelatihan literasi fungsional, keterampilan hidup (life skills), pendidikan perdamaian, serta pendidikan kesehatan reproduksi yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam kondisi krisis.

Seiring dengan perkembangan tersebut, pada awal abad ke-21, pemerintah Kongo mulai memberikan perhatian lebih serius terhadap PNF dengan menetapkan kebijakan-kebijakan strategis seperti Strategi Nasional Literasi dan Pendidikan Nonformal periode 2012–2020. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan target yang jelas untuk meningkatkan angka literasi dan akses pendidikan Nonformal secara signifikan, melalui kolaborasi erat dengan NGO lokal dan internasional, lembaga komunitas, serta mitra internasional seperti Bank Dunia dan UNESCO. Hingga saat ini, pendidikan Nonformal di Kongo terus berkembang sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang tidak hanya berfokus pada pemberantasan buta huruf tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan rekonstruksi sosial pasca-konflik.

C. Kebijakan Penyelenggaraan PNF di Kongo

Kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (PNF) di Republik Demokratik Kongo mencerminkan upaya pemerintah untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan yang dihadapi oleh negara tersebut. Sebagai negara dengan luas geografis yang besar dan tingkat akses pendidikan formal yang rendah akibat konflik bersenjata berkepanjangan, pemerintah Kongo mengadopsi pendekatan strategis dalam pengembangan sistem pendidikan alternatif melalui kebijakan-kebijakan yang ditargetkan secara khusus untuk menjangkau kelompok masyarakat yang rentan. Secara historis, kebijakan awal PNF di Kongo berfokus pada penanggulangan buta huruf dan peningkatan keterampilan dasar bagi warga dewasa, khususnya mereka yang terkena dampak konflik serta hidup dalam kemiskinan absolut. Kebijakan ini merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk pembangunan sosial yang inklusif serta pengentasan kemiskinan yang telah dirumuskan sejak awal 2000-an.

Salah satu kebijakan penting yang menandai transformasi PNF di Kongo adalah implementasi Strategi Nasional Literasi dan Pendidikan Nonformal (2012–2020). Strategi ini bertujuan menurunkan tingkat buta huruf secara nasional sebesar 10% setiap tahunnya melalui berbagai program terpadu yang mencakup peningkatan literasi dasar dan fungsional, pelatihan keterampilan kerja, serta pendidikan kesehatan. Strategi ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara sektor pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah (NGO), serta lembaganya internasional seperti UNESCO dan UNICEF. Dalam implementasinya, strategi ini melibatkan dua fase utama, yakni fase pertama yang difokuskan pada perluasan akses terhadap pendidikan dasar Nonformal dan fase kedua yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional.

Pemerintah Republik Demokratik Kongo melalui Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan Literasi Nasional juga menetapkan kebijakan khusus yang mendukung

pendekatan berbasis komunitas dalam penyelenggaraan PNF. Kebijakan ini mengedepankan prinsip keterlibatan aktif komunitas lokal sebagai pengelola sekaligus penerima manfaat utama dari program-program pendidikan Nonformal yang diselenggarakan. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa kurikulum, metode pembelajaran, serta materi pendidikan benar-benar relevan dengan kebutuhan lokal dan budaya setempat. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong penggunaan bahasa lokal dalam program literasi dan pelatihan keterampilan, sebagai langkah untuk memudahkan proses pembelajaran serta meningkatkan tingkat penerimaan di kalangan masyarakat.

D. Bentuk Penyelenggaraan PNF di Kongo

1. Program Literasi

Program literasi menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan utama PNF di Kongo yang bertujuan mengatasi tingginya tingkat buta huruf di kalangan penduduk dewasa dan remaja putus sekolah. Program ini biasanya dilaksanakan dalam bentuk kelas-kelas kecil di lingkungan komunitas dengan metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif. Dalam program ini, peserta tidak hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung dasar, tetapi juga diberi kemampuan literasi fungsional yang melibatkan keterampilan praktis sehari-hari, seperti mengelola keuangan keluarga, membaca petunjuk kesehatan, serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. UNESCO dan lembaga internasional lainnya berperan penting dalam penyelenggaraan program ini dengan menyediakan dukungan teknis serta materi pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal Kongo.

2. Pendidikan Kesehatan Masyarakat

Pendidikan kesehatan masyarakat juga menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan PNF yang sangat penting di Republik Demokratik Kongo. Mengingat negara ini menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat seperti tingginya angka

kematian ibu dan anak, penyebaran penyakit menular, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang sanitasi dasar, program pendidikan kesehatan menjadi sangat vital. Bentuk kegiatan ini meliputi penyuluhan kesehatan reproduksi, kampanye pencegahan penyakit seperti malaria dan HIV/AIDS, serta pendidikan tentang gizi dan kebersihan lingkungan. Program-program ini dilaksanakan melalui sesi pelatihan interaktif, workshop komunitas, serta kampanye kesehatan yang melibatkan petugas kesehatan lokal dan fasilitator terlatih.

3. Proyek EDU'KAS: pendidikan berkualitas untuk anak-anak di Republik Demokratik Kongo

AVSI meluncurkan proyek EDU'KAS, yang didanai oleh Uni Eropa, yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi 16.400 anak dan mendorong integrasi sosial dan ekonomi dari 400 remaja yang terkena dampak krisis.

Akses sekolah terbatas, infrastruktur buruk dan konflik: tantangan bagi murid-murid Kongo Republik Demokratik Kongo (RDK) menghadapi tantangan besar di sektor pendidikannya, dengan akses terbatas, infrastruktur buruk, dan dampak konflik yang berkepanjangan yang menghambat jalur pendidikan bagi banyak anak. Meskipun telah menerapkan pendidikan dasar gratis, sebagian besar penduduk muda masih kekurangan akses ke sekolah, sehingga memperburuk ketimpangan yang ada. Kelompok yang terpinggirkan, termasuk anak perempuan dan mereka yang terkena dampak konflik bersenjata, terus menghadapi hambatan dalam memperoleh pendidikan, sehingga terus berlanjut dalam siklus kemiskinan.

Dengan adanya Uni Eropa, Pendidikan berkualitas diberikan kepada 16.400 anak-anak dan 440 remaja, dalam kerja samanya dengan organisasi TPO (Transcultural Psychosocial Organization) dan AIDES (Action et Intervention Pour Le Development Social), Yayasan dan Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan Teknis, AVSI bermaksud untuk menanggulangi isu-isu tersebut dengan pendekatan holistic yang

menjamin inklusi anak Perempuan dan anak berkebutuhan khusus, serta keberlanjutan jangka Panjang.

Selama 4 tahun, proyek EDUK’KAS menugaraikan tujuan strategis yang ditujukan untuk mengubah lanskap pendidikan:

- a. Akses terhadap pendidikan: dengan menyasar anak-anak yang rentan, terlantar, dan kembali ke kampung halaman, proyek ini bertujuan untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan bagi 16.400 anak di distrik yang menjadi sasaran (distrik Demba dan Dibaya). Inisiatifnya meliputi penciptaan lingkungan belajar yang aman dan higienis serta penguatan sistem identifikasi dan rujukan.
- b. Kualitas pengajaran: melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pemangku kepentingan pendidikan, termasuk guru dan kepala sekolah, proyek ini berupaya meningkatkan praktik pengajaran yang disesuaikan dengan konteks krisis. Hal ini melibatkan penyediaan materi pendidikan dan dukungan bagi anak-anak yang rentan dalam sistem sekolah.
- c. Pelatihan kejuruan: proyek ini bertujuan untuk memfasilitasi integrasi sosial dan ekonomi 440 remaja melalui pelatihan kejuruan dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Dengan menghubungkan remaja dengan jaringan dan sumber daya yang relevan, tujuannya adalah untuk menumbuhkan mata pencaharian yang berkelanjutan dan ketahanan ekonomi.

4. Bekerja sama dengan EAC dan Pemerintah Republik Demokratik Kongo (DRC), UNICEF melaksanakan Proyek Pendidikan Dasar yang Adil dan Berkualitas untuk Semua Anak di DRC

Tujuan dari proyek ini adalah untuk memastikan bahwa sekitar 1,5 juta anak di DRC memiliki akses dan terdaftar serta berpartisipasi dalam pendidikan dasar yang berkualitas. Proyek Pendidikan Dasar yang Adil dan Berkualitas untuk Semua Anak bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperbaiki manajemen, akuntabilitas, dan pemantauan

berbasis sekolah. Proyek ini dimaksudkan untuk menjamin pendidikan berkualitas bagi 3,7 juta anak usia enam dan tujuh tahun tanpa pendidikan dasar melalui mobilisasi masyarakat, pembangunan dan rehabilitasi 400 ruang kelas, peningkatan hasil pembelajaran, dan pengembangan sistem tata kelola dan akuntabilitas. Proyek ini mengatasi hambatan terhadap pendidikan baik dari sisi penawaran maupun permintaan, terutama bagi anak perempuan dan anak-anak yang paling terpinggirkan dan rentan.

Mengingat tingginya permintaan akan ruang belajar, pendanaan membantu mendukung pembangunan, rehabilitasi, atau perluasan 400 ruang kelas dasar. Setidaknya dua guru dari masing-masing sekolah sasaran sedang dilatih dalam metodologi yang berpusat pada peserta didik tentang cara mengubah pengajaran untuk meningkatkan hasil belajar. Kemitraan sedang dikembangkan dengan asosiasi perempuan dan kelompok lokal lainnya sehingga para pemimpin dari kelompok-kelompok ini dapat membimbing anak perempuan muda dan mendukung mereka dalam pendidikan mereka. Selain itu, sistem manajemen dan akuntabilitas sekolah sedang diperkuat melalui pelatihan para pemimpin sekolah dan komite manajemen. Pelatihan ini difokuskan pada cara menganalisis, mengembangkan, menerapkan, dan memberikan kepemimpinan dan akuntabilitas manajerial untuk mendukung upaya pencapaian akses yang adil, retensi, dan hasil yang terkait dengan kualitas

Kemitraan akan dikembangkan dan dipertahankan untuk meningkatkan keberlanjutan proyek. UNICEF dan mitra akan mengadvokasi pemerintah untuk secara bertahap mengambil tanggung jawab dalam memenuhi biaya pendidikan melalui penerapan kebijakan pendidikan dasar gratis yang efektif. Untuk keberlanjutan dan pemeliharaan sekolah, pembangunan dan rehabilitasi akan dicapai melalui keterlibatan dan partisipasi masyarakat.

a. Program Remaja Putus Sekolah

Program remaja putus sekolah juga menjadi prioritas dalam penyelenggaraan PNF di Kongo. Banyak remaja terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena berbagai alasan seperti kemiskinan, konflik, atau masalah sosial lainnya. Dalam mencapai tujuan untuk transformasi konflik di RDK, SFCG menyusun beberapa strategi yang kemudian diturunkan ke dalam beberapa program salah satunya program terkait remaja. Strategi-strategi tersebut antara lain: melakukan rehabilitasi remaja melalui pendidikan, membuka ruang dialog dan pemberdayaan remaja, serta membangun jejaring komunikasi antar remaja.

Sebagai salah satu INGO, SFCG memiliki peran penting di dunia utamanya ketika kita berbicara mengenai konflik dan resolusi konflik. SFGC merupakan INGO yang bergerak dalam transformasi konflik dimana program yang dilaksanakannya meliputi strategi-strategi yang mendukung agar suatu konflik dapat diselesaikan atau bahkan dihindari melalui cara-cara yang konstruktif dan telah membuat INGO ini menjadi salah satu dari seratus INGO paling berpengaruh di dunia berdasarkan The Global Journal (The Global Journal, 2012).

SFCG kemudian menggunakan 3 (tiga) strategi yang diimplementasikan dalam bentuk program di RDK dengan keterlibatan remaja agar mereka dapat secara aktif terlibat dalam proses perdamaian di negaranya.

b. Melakukan rehabilitasi melalui pendidikan Nonformal

Program SFCG dibentuk dengan tujuan agar konflik kekerasan dapat dihindari dengan mengubah konflik destruktif menjadi konstruktif. Dalam rangka untuk mencapai tujuannya itu, SFCG memulai perubahan dengan mengubah pola pikir tiap individu yang menjadi objeknya dalam hal ini pemuda dan remaja. Diharapkan melalui bantuan berupa implementasi program terkait remaja yang dibentuk oleh SFCG, remaja tersebut dapat mengelola dampak konflik terhadap kehidupan mereka.

Strategi SFCG yang pertama yaitu melalui pendidikan baik secara formal maupun Nonformal. SFCG menyebutkan strategi melalui pendidikan formal dan Nonformal ini sebagai strategi education. Pendidikan Nonformal yaitu pendidikan yang diperoleh diluar dari pendidikan formal dengan tujuan untuk lebih mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan sikap dari objek didik. Pendidikan Nonformal dapat diikuti oleh semua kelompok usia melalui metode seperti kursus, workshop, dan seminar.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, konflik yang terjadi di RDK membawa dampak negatif bagi berlangsungnya pendidikan formal di sana seperti rusaknya beberapa sarana pendidikan, sehingga untuk mengatasinya SFCG mengoptimalkan pendidikan luar sekolah atau dalam hal ini tergolong sebagai pendidikan Nonformal. Melihat kondisi RDK sebagai negara yang rawan konflik, SFCG melihat bahwa pemahaman remaja sebagai generasi penerus terkait perdamaian dan pengelolaan konflik merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

c. Membuka ruang dialog dan pemberdayaan remaja

Strategi kedua yang digunakan SFCG yaitu menciptakan kesempatan bagi pemuda dan remaja agar dapat menyampaikan opininya dan berpartisipasi dalam dialog nasional mengenai isu yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh ahli S.P.R.L pada tahun 2008 menunjukkan sekitar 84% populasi di RDK tidak mengetahui dengan baik tindakan pemerintah dan 57% tidak mengetahui bagaimana cara agar pemerintah dalam hal ini pejabat elit dapat mendengar aspirasi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa di RDK masih belum terjadi proses demokrasi yang baik.

Melalui strategi yang oleh SFCG sebut dengan istilah voice ini, remaja memberikan kesempatan bagi warga sipil di RDK untuk dapat didengar dan menyuarakan opini mereka. Program SFCG ini diturunkan dalam bentuk program yang

menyebarkan opini serta sikap remaja dan pemuda dalam berbagai isu seperti hak asasi anak, demobilisasi mantan kombatan, dan konflik antar etnis. Sehingga dalam strategi ini, pemuda dan remaja dapat menyerukan hak, melakukan advokasi, dan melakukan dialog nasional. Dalam strategi voice ini, SFCG menggunakan metode-metode yang inovatif melalui radio, musik dan teater agar dapat dijangkau oleh banyak orang (Gratton, 2010). Salah satu contoh program SFCG yang menggunakan strategi ini yaitu Sisi Watoto (We Are the Children). Sisi Watoto merupakan suatu program SFCG yang berusaha untuk memfasilitasi anak-anak dan remaja agar dapat mendiskusikan resiko dan dampak terjadinya perang terhadap kehidupan mereka (sfcg.org, 2016).

Program Sisi Watoto ini merupakan salah satu program SFCG yang cukup memberikan pengaruh terhadap remaja di RDK karena lebih dari 95% remaja mendengarkan program radio tersebut (sfcg.org, 2009). Pendengar remaja dengan jumlah yang banyak tersebut dianggap sebagai suatu keberhasilan dari program Sisi Watoto dimana konten yang dibawakan oleh program radio ini kebanyakan ditujukan kepada remaja agar mereka dapat memahami resiko konflik dan mengetahui metode resolusi konflik secara kooperatif.

Selain itu, melalui strategi ini aspirasi remaja juga dapat disebarkan dengan mudah dan tentunya menjangkau banyak remaja lainnya sehingga sangat mudah bagi mereka untuk melakukan kampanye terkait isu di lingkungan mereka. Melalui Sisi Watoto ini, kebebasan remaja dan pemuda untuk dapat menyuarakan opini dan memberikan pengaruh dalam komunitasnya dapat lebih teraktualisasi secara demokratis. Keberhasilan program Sisi Watoto dapat dilihat dari pencapaiannya dalam memenangkan hadiah pertama pada kompetisi UNICEF dan OneWorld terkait program radio untuk anak pada Mei 2004 (globalgiving.org, 2004).

d. Membangun jejaring komunikasi antara remaja untuk bertukar pikiran

Strategi terakhir yaitu membangun jejaring komunikasi antara remaja untuk bertukar pikiran dengan tujuan agar tercipta sikap toleransi diantara remaja tersebut. Salah satu program SFCCG yang menggunakan strategi ini yaitu *Génération Grands Lacs* (GGL). Program ini merupakan salah satu program radio antara RDK, Rwanda, dan Burundi dimana dalam programnya, topik yang dibahas meliputi hal-hal umum tentang ketiga negara seperti bidang politik, pemerintahan, maupun fenomena sosial. Ketiga wartawan dari negara yang berbeda tersebut melakukan kolaborasi dan membahas topik yang berbeda tiap minggunya. Pertukaran informasi tersebut disiarkan secara langsung sehingga memungkinkan warga dari ketiga negara dapat menghubungi program radio dan mengajukan pertanyaan serta memberi komentar.

Remaja yang berasal dari tiga negara yang pernah terlibat konflik ini diharapkan mampu menjadi mediator dalam proses pemahaman konflik bukan hanya bagi remaja tapi bagi seluruh warga sipil ketiga negara yang mendengar program tersebut. Melalui program ini, diharapkan remaja dapat mentransformasi hubungan yang sempat rusak dengan cara membangun komunikasi efektif melalui dialog di segala lapisan masyarakat juga meningkatkan kesadaran pada peran tiap individu utamanya remaja dalam suatu konflik sehingga dapat saling memahami satu sama lain dengan baik.

Remaja yang berasal dari ketiga negara yang berbeda ini dianggap sebagai aktor yang dapat membangun hubungan yang harmonis antara negara yang sempat terlibat konflik tersebut. Keterlibatan mereka dalam program GGL ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata bahwa remaja dapat menjadi perwakilan dari komunitasnya dalam melaksanakan dialog serta dapat mengembangkan skill mereka dalam meresolusi konflik dengan menyampaikan pesan-pesan perdamaian melalui radio sehingga SFCCG menyebut strategi ini dengan istilah *action*.

E. Kelompok Sasaran PNF di Kongo

1. Orang Dewasa yang Buta Huruf

Kelompok sasaran utama PNF di Kongo adalah orang dewasa yang buta huruf, yang sebagian besar berada di daerah pedesaan dan terpencil. Tingkat buta huruf di Kongo masih cukup tinggi, terutama di kalangan perempuan dan orang-orang yang tinggal di daerah yang dilanda konflik. Oleh karena itu, program-program literasi Nonformal sangat penting untuk memberikan akses kepada mereka yang tidak memperoleh pendidikan formal. Program literasi ini membantu mereka untuk menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan akses mereka terhadap layanan sosial dan ekonomi.

2. Remaja Putus Sekolah

Selain orang dewasa, remaja putus sekolah juga menjadi salah satu kelompok sasaran utama PNF. Di Kongo, banyak remaja yang terpaksa meninggalkan sekolah formal karena berbagai alasan, termasuk kemiskinan, konflik, atau kekurangan akses ke sekolah. Program PNF untuk remaja bertujuan untuk memberi mereka keterampilan yang berguna, baik dalam bentuk keterampilan teknis maupun keterampilan hidup, sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan atau memulai usaha mereka sendiri. Program ini juga mencakup pendidikan mengenai hak asasi manusia, demokrasi, dan partisipasi aktif dalam pembangunan sosial.

3. Perempuan dan Kelompok Perempuan Rentan

Perempuan, terutama yang tinggal di daerah pedesaan dan terpinggirkan, merupakan salah satu kelompok sasaran utama pendidikan Nonformal di Kongo. Keterbatasan akses pendidikan formal, terutama bagi perempuan di daerah pedesaan, telah menjadi tantangan besar bagi pemberdayaan perempuan di Kongo. Oleh karena itu, berbagai program PNF difokuskan untuk meningkatkan literasi perempuan serta memberikan keterampilan praktis yang dapat mendukung kesejahteraan

keluarga mereka. Program pelatihan keterampilan ini mencakup berbagai bidang seperti menjahit, kerajinan tangan, pertanian, serta kewirausahaan. Selain itu, program-program ini juga memperkenalkan konsep kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, serta pemberdayaan ekonomi perempuan.

4. Pengungsi Internal dan Korban Konflik

Pengungsi internal dan korban konflik merupakan kelompok sasaran PNF yang memerlukan perhatian khusus. Kongo telah lama dilanda konflik bersenjata, yang mengakibatkan banyak masyarakat terpaksa mengungsi dari tempat tinggal mereka. Pendidikan Nonformal bagi pengungsi dan korban konflik di Kongo dirancang untuk memberikan mereka keterampilan dasar untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan baru, serta untuk memfasilitasi reintegrasi sosial mereka. Program-program ini mencakup pendidikan dasar, pelatihan keterampilan kerja, serta terapi psikososial untuk membantu korban trauma akibat konflik.

F. Penyelenggara PNF di Kongo

1. Pemerintah Republik Demokratik Kongo

Pemerintah Kongo memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan PNF. Melalui Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan Literasi Nasional, pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mengatur pendidikan Nonformal di negara ini. Salah satu kebijakan utama adalah Strategi Nasional Literasi dan Pendidikan Nonformal (2012-2020), yang bertujuan untuk meningkatkan angka literasi dan akses terhadap pendidikan Nonformal bagi masyarakat yang terpinggirkan. Pemerintah juga mengalokasikan sebagian anggaran untuk mendanai program-program PNF, meskipun pendanaan dari sumber eksternal sangat dibutuhkan untuk memperluas jangkauan program.

2. Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dan Lembaga Masyarakat Sipil

Organisasi non-pemerintah (NGO) memiliki peran besar dalam penyelenggaraan PNF di Kongo. Banyak NGO internasional dan lokal yang bekerja di bidang pendidikan, khususnya dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada kelompok sasaran PNF. NGO seperti FIAFED (Fédération des Institutions d'Assistance aux Femmes et Enfants Défavorisés) dan Save the Children seringkali menjadi mitra utama pemerintah dalam mengimplementasikan program PNF, terutama di daerah-daerah yang terkena dampak konflik atau di wilayah pedesaan yang terpencil. NGO ini tidak hanya menyediakan pendanaan tetapi juga melatih pengajar, menyusun kurikulum, serta memastikan bahwa program yang diselenggarakan relevan dengan kebutuhan lokal.

3. Lembaga Internasional

Lembaga internasional, termasuk UNESCO, UNICEF, dan Bank Dunia, juga memainkan peran penting dalam penyelenggaraan PNF di Kongo. Lembaga-lembaga ini memberikan dukungan teknis, pendanaan, serta pelatihan bagi para pendidik dan penyelenggara PNF di lapangan. Selain itu, lembaga internasional ini juga terlibat dalam merumuskan kebijakan pendidikan Nonformal, menyediakan materi pembelajaran, serta mendukung inisiatif yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan di Kongo. Melalui program-program seperti Education for All (EFA) dan Literacy Initiative for Empowerment (LIFE), mereka bekerja sama dengan pemerintah Kongo untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

G. Karakteristik

Sumber daya alam (SDA). Negara ini memiliki cadangan besar mineral seperti emas, berlian, kobalt, tembaga, coltan (mineral penting untuk elektronik), dan minyak bumi. Kongo

juga memiliki hutan hujan tropis luas yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia, serta potensi besar di sektor pertanian dan perikanan. Kekayaan alam ini seharusnya bisa menjadi sumber utama pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun ironisnya, kekayaan sumber daya alam tersebut justru menjadi salah satu faktor utama penyebab konflik berkepanjangan di Kongo.

Karakteristik pendidikan Nonformal di Kongo sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakatnya yang sangat beragam dan sering kali menghadapi tantangan struktural. Untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu, pendidikan Nonformal biasanya difokuskan pada program literasi dasar, pelatihan keterampilan praktis, dan pendidikan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh organisasi non-pemerintah dan lembaga internasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dasar membaca, menulis, serta keterampilan kerja yang dapat mendukung kelangsungan hidup sehari-hari. Karena keterbatasan infrastruktur dan dana, akses pendidikan Nonformal bagi kelompok kurang mampu sering kali terbatas dan sangat bergantung pada bantuan donor luar negeri.

Sementara itu, untuk kelompok masyarakat menengah di Kongo, pendidikan Nonformal mulai berkembang dalam bentuk pelatihan vokasional yang lebih terstruktur dan program pengembangan keterampilan teknis yang dapat meningkatkan peluang kerja dan mobilitas sosial. Namun, fasilitas dan program yang tersedia masih terbatas dan belum menyeluruh, sehingga pendidikan Nonformal untuk kelompok ini masih menghadapi kendala terkait kualitas dan jangkauan layanan.

Di sisi lain, bagi kelompok masyarakat yang lebih kaya dan urban, pendidikan Nonformal cenderung berbentuk kursus-kursus khusus, pelatihan profesional, dan pendidikan bahasa atau teknologi yang diselenggarakan oleh institusi swasta atau lembaga internasional. Kelompok ini memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya pendidikan Nonformal yang berkualitas dan dapat mengikuti program-program yang lebih variatif dan

modern. Namun, kelompok ini hanya merupakan minoritas kecil dibandingkan mayoritas penduduk Kongo yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan.

Secara keseluruhan, pendidikan Nonformal di Kongo sangat terfragmentasi dan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta ketersediaan infrastruktur pendidikan. Upaya pemberdayaan melalui pendidikan Nonformal terutama diarahkan pada kelompok masyarakat kurang mampu, namun tantangan akses, pendanaan, dan kualitas layanan menjadi hambatan utama yang masih perlu diatasi untuk menciptakan sistem pendidikan Nonformal yang inklusif dan merata.

H. Sumber Pendanaan

Pendanaan menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (PNF) di Republik Demokratik Kongo. Sebagai negara yang baru pulih dari konflik berkepanjangan dan menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, termasuk PNF, sangat terbatas. Oleh karena itu, sumber pendanaan untuk program-program pendidikan Nonformal di Kongo sangat bergantung pada kombinasi antara anggaran pemerintah, bantuan internasional, dan kontribusi dari sektor swasta serta masyarakat.

1. Anggaran Pemerintah

Meskipun sektor pendidikan merupakan prioritas nasional di Kongo, anggaran yang dialokasikan untuk Pendidikan Nonformal (PNF) masih terbatas. Pemerintah Kongo berusaha meningkatkan pendanaan untuk pendidikan Nonformal melalui berbagai kebijakan dan program strategis seperti Strategi Nasional Literasi dan Pendidikan Nonformal (2012-2020). Namun, keterbatasan pendapatan negara yang disebabkan oleh ekonomi yang masih terbelakang, serta tantangan dalam sistem pengumpulan pajak, menyebabkan pemerintah kesulitan untuk mengalokasikan dana yang cukup besar untuk mendukung

program-program PNF secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pendanaan dari pemerintah sering kali tidak mencakup seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan Nonformal di seluruh wilayah Kongo.

2. Bantuan dari Lembaga Internasional dan Donor

Karena keterbatasan anggaran nasional, Kongo sangat bergantung pada bantuan internasional dan dana yang disalurkan oleh lembaga-lembaga donor, seperti UNESCO, UNICEF, Bank Dunia, serta negara-negara donor bilateral. Bantuan ini sering digunakan untuk mendanai program literasi, pelatihan keterampilan, dan pendidikan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) di seluruh wilayah Kongo. Lembaga-lembaga internasional ini tidak hanya menyediakan dana tetapi juga memberikan dukungan teknis dan keahlian dalam merancang program-program pendidikan yang relevan dan berkualitas.

3. Peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO)

Organisasi non-pemerintah (NGO) memainkan peran penting dalam pendanaan PNF di Kongo, baik sebagai penyelenggara langsung maupun sebagai mitra pemerintah dalam implementasi program pendidikan Nonformal. Banyak NGO internasional seperti Save the Children, World Vision, dan FIAFED menyediakan dana dan sumber daya lainnya untuk mendukung program-program PNF yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan. Dana ini digunakan untuk membiayai pelatihan, pengadaan materi pendidikan, honorarium pengajar, serta biaya operasional lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan Nonformal di lapangan.

I. Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan PNF di Kongo

1. Kelebihan

a. Aksesibilitas yang Lebih Tinggi

Salah satu kelebihan terbesar dari PNF di Kongo adalah aksesibilitas yang lebih tinggi bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Pendidikan formal di Kongo, seperti di banyak negara berkembang lainnya, sering kali tidak dapat diakses oleh banyak orang, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau daerah yang terdampak konflik. PNF menyediakan kesempatan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal untuk memperoleh keterampilan dasar dan pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Program-program PNF sering kali diselenggarakan di lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal peserta, seperti pusat komunitas atau rumah ibadah, yang membuatnya lebih mudah diakses oleh orang-orang yang kesulitan menghadiri sekolah formal yang sering terletak jauh dari tempat tinggal mereka.

b. Peningkatan Keterampilan yang Relevan

PNF di Kongo berfokus pada pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Program-program PNF memberikan peserta keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan di pasar kerja lokal. Keterampilan yang diajarkan, seperti menjahit, bertani dengan teknik yang lebih berkelanjutan, memasak yang sangat berguna dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi kemiskinan. Pelatihan semacam ini sering kali lebih adaptif terhadap kondisi lokal dan perubahan ekonomi yang cepat, serta memberikan solusi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Kelemahan

a. Infrastruktur yang Tidak Memadai

Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai. Banyak disana yang tidak memiliki fasilitas dasar seperti bangunan yang layak dalam

belajar. Kondisi ini membuat proses belajar mengajar menjadi sangat sulit dan tidak efektif.

b. Kurangnya Guru yang Berkualitas

Kekurangan guru yang berkualitas juga menjadi masalah serius. Banyak guru di Kongo tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk mengajar.

c. Konflik dan Ketidakstabilan Politik

Konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan di Kongo telah berdampak negatif pada sektor pendidikan. Banyak bangunan yang hancur atau ditutup akibat konflik, dan banyak anak-anak yang terpaksa mengungsi atau bekerja demi membantu keluarga mereka.

d. Kurangnya Sumber Daya dan Pendanaan

Pendidikan di Kongo juga menghadapi masalah kurangnya sumber daya dan pendanaan. Anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan sangat terbatas, dan banyak bergantung pada bantuan dari organisasi non-pemerintah dan donor internasional. Namun, bantuan ini sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada.

e. Kualitas Pendidikan yang Rendah

Kualitas pendidikan di Kongo masih sangat rendah. Kurikulum yang tidak relevan, metode pengajaran yang ketinggalan zaman, dan kurangnya bahan ajar yang berkualitas membuat banyak siswa tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Akibatnya, tingkat melek huruf dan keterampilan dasar di kalangan anak-anak dan remaja masih sangat rendah.

J. Studi Komparatif PNF di Kongo dengan Negara Lain

1. Kongo

Di Kongo, PNF memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi dan keterampilan di kalangan orang dewasa dan remaja yang putus sekolah, terutama di daerah pedesaan dan kawasan yang terkena dampak konflik. Dengan tantangan yang besar terkait dengan kemiskinan dan ketidakstabilan politik, program PNF lebih difokuskan pada pemberdayaan kelompok rentan, seperti perempuan dan pengungsi internal. Meskipun pendanaan utama berasal dari bantuan internasional dan organisasi non-pemerintah (NGO), keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerjasama multisektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

2. Indonesia

Di Indonesia, PNF sangat berperan dalam memberikan akses pendidikan kepada kelompok-kelompok yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, seperti orang dewasa yang buta huruf dan remaja putus sekolah. Program-program seperti Paket A, B, dan C memungkinkan peserta untuk mendapatkan ijazah setara dengan pendidikan dasar, menengah, dan atas. Indonesia memiliki kebijakan yang terintegrasi untuk mendukung PNF, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga terkait. Program pelatihan keterampilan, termasuk kursus vokasional dan kewirausahaan, juga banyak diselenggarakan oleh pemerintah dan sektor swasta. Keunggulan PNF di Indonesia adalah pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Meskipun demikian, kesetaraan akses masih menjadi isu besar, terutama di daerah terpencil yang kurang mendapatkan perhatian dalam pendanaan dan sumber daya.

3. Jepang

Jepang memiliki sistem PNF yang lebih maju dan berorientasi pada pendidikan seumur hidup (lifelong learning),

yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan sepanjang hidup mereka. Program PNF di Jepang sangat fokus pada keterampilan praktis dan kejuruan, serta peningkatan kualitas hidup melalui berbagai kursus berbasis komunitas. Salah satu bentuk penyelenggaraan PNF yang khas di Jepang adalah kursus yang diselenggarakan di pusat- pusat pembelajaran komunitas yang ada di setiap kota besar dan pedesaan. Program- program ini mencakup pelatihan bahasa, komputer, seni, dan keterampilan teknis lainnya, yang tidak hanya bermanfaat untuk individu, tetapi juga untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam masyarakat. Di Jepang, pemerintah memiliki peran yang besar dalam mendanai dan mengelola pendidikan Nonformal, dengan dukungan dari sektor swasta yang kuat. PNF di Jepang juga terkenal dengan pendekatan sistematis dan terorganisir, yang memungkinkan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan.

4. Thailand

Thailand memiliki sistem PNF yang kuat dan berfokus pada pendidikan masyarakat dengan program-program yang mendukung literasi, kewirausahaan, serta keterampilan vokasional. PNF di Thailand banyak difasilitasi oleh Departemen Pendidikan Nonformal dan Informal, yang bertanggung jawab atas pendidikan untuk orang dewasa dan remaja putus sekolah. Program ini sangat relevan dengan konteks ekonomi Thailand, yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan industri kecil. Di Thailand, terdapat juga program kewirausahaan yang ditujukan untuk memberdayakan individu dalam mengelola usaha kecil atau mikro, yang menjadi penggerak utama perekonomian negara. Keunikan PNF di Thailand adalah keterlibatan aktif pemerintah daerah yang menyelenggarakan program berbasis lokal, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing komunitas. Thailand juga mendukung pendidikan berbasis teknologi, seperti pelatihan keterampilan IT, untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi digital.

Meskipun tujuan Pendidikan Nonformal di Kongo, Indonesia, Jepang, dan Thailand adalah serupa, yaitu untuk menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh pendidikan formal, implementasi dan karakteristik program-program PNF di masing-masing negara sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi dan kebutuhan lokal. Di negara-negara berkembang seperti Kongo, PNF berfokus pada pemberdayaan kelompok marginal, pemberantasan buta huruf, dan pelatihan keterampilan yang langsung dapat diterapkan untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, negara-negara maju seperti Jepang dan Thailand menekankan pendidikan seumur hidup dan keterampilan vokasional, dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan terorganisir. Meskipun demikian, tantangan terbesar yang dihadapi oleh semua negara dalam melaksanakan PNF adalah pendanaan, kesetaraan akses, dan integrasi antara sektor pendidikan, ekonomi, dan sosial.

Pendidikan Nonformal (PNF) memainkan peran penting dalam menyediakan akses pendidikan bagi individu yang tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal. Di Republik Demokratik Kongo, PNF berfokus pada pemberdayaan kelompok rentan, seperti orang dewasa buta huruf, remaja putus sekolah, dan perempuan, serta mereka yang tinggal di daerah terpencil atau terkena dampak konflik. Fleksibilitas dalam waktu, tempat, dan materi pembelajaran menjadi salah satu keunggulan utama PNF di Kongo, yang memungkinkan pendidikan tetap berjalan meskipun dengan tantangan besar terkait pendanaan dan ketidakstabilan politik.

BAB XI

Pendidikan Nonformal di Victoria (Australia)

Sistem pendidikan di Victoria, Australia, terdiri dari tiga jenis pendidikan utama, yaitu pendidikan formal, Nonformal, dan informal, yang saling melengkapi dan mendukung perkembangan individu serta masyarakat. Pendidikan formal di Victoria diselenggarakan melalui jalur sekolah dan perguruan tinggi yang terstruktur, diatur oleh kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendidikan ini mencakup tahap pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Di tingkat dasar dan menengah, siswa mengikuti program pendidikan yang melibatkan pembelajaran akademis di sekolah dengan kurikulum yang mencakup berbagai mata pelajaran seperti matematika, sains, bahasa, dan seni. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, siswa dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi di universitas atau perguruan tinggi untuk mempersiapkan diri ke dunia kerja dengan keterampilan dan pengetahuan yang lebih mendalam dalam bidang tertentu. Pendidikan formal di Victoria berfokus pada pemberian pengetahuan teoritis dan praktis yang diakui secara resmi melalui sertifikat atau ijazah.

Pendidikan Nonformal di Victoria mencakup berbagai program yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan, literasi, dan kompetensi masyarakat. Program pendidikan Nonformal ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Contohnya adalah kursus keterampilan, pelatihan vokasional, dan program-program pemberdayaan yang bertujuan membantu masyarakat meningkatkan keterampilan kerja atau melanjutkan pembelajaran sepanjang hayat. Di Victoria, program Nonformal ini sering kali diselenggarakan oleh lembaga-lembaga seperti Learn Local, yang menyediakan pendidikan bagi orang dewasa yang ingin meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi atau mempelajari keterampilan baru.

Sementara itu, pendidikan informal di Victoria berfokus pada proses belajar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi sosial di luar struktur pendidikan formal atau Nonformal. Pendidikan informal melibatkan pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman, observasi, dan interaksi dengan orang lain dalam lingkungan keluarga, teman, atau komunitas. Misalnya, seseorang dapat belajar keterampilan hidup atau budaya tertentu melalui pengalaman kerja, hobi, atau kegiatan sosial. Meskipun tidak terstruktur atau diakui secara resmi, pendidikan informal tetap memainkan peran penting dalam pengembangan keterampilan pribadi, sosial, dan emosional seseorang.

A. Sejarah PNF di Victoria

Pendidikan Nonformal di Victoria, Australia, memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Sejarah ini dimulai pada abad ke-19, ketika kebutuhan untuk menyediakan pendidikan bagi masyarakat pekerja dan mereka yang tidak dapat mengakses pendidikan formal semakin dirasakan. Pada awalnya, pendidikan Nonformal di Victoria lebih bersifat sporadis, dengan

sejumlah inisiatif lokal yang berupaya memenuhi kekurangan dalam sistem pendidikan formal yang belum mencakup semua lapisan masyarakat.

Pada tahun 1850-an, munculnya Mechanics' Institutes menjadi tonggak awal penting dalam sejarah pendidikan Nonformal di Victoria. Institusi ini didirikan dengan tujuan memberikan akses pendidikan kepada pekerja yang tidak dapat mengikuti sistem pendidikan formal. Mereka menyediakan kursus-kursus seperti bahasa, matematika, sains, dan keterampilan praktis lainnya yang berfokus pada pengembangan keahlian untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Institusi tersebut mulai tersebar di kota-kota besar dan daerah-daerah terpencil, dengan semakin banyak individu yang mendapatkan manfaat dari program-program yang ditawarkan.

Selanjutnya, pada awal abad ke-20, sektor pendidikan Nonformal di Victoria berkembang seiring dengan adanya pergeseran sosial yang mendorong kesadaran akan pentingnya pemberdayaan masyarakat. Meskipun pendidikan formal semakin berkembang, banyak orang dewasa yang merasa bahwa pendidikan formal tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka untuk memperoleh keterampilan praktis yang relevan dengan pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, lebih banyak kursus dan program pendidikan alternatif yang didirikan untuk menjawab kebutuhan ini. Beberapa dari program ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan untuk pekerja perempuan dan pria di industri manufaktur dan pertanian.

Namun, perkembangan pendidikan Nonformal di Victoria baru mengalami kemajuan signifikan pada 1947, ketika didirikan Council of Adult Education (CAE). Organisasi ini dibentuk untuk memberikan program pendidikan bagi orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang tertentu, namun tidak memiliki akses ke pendidikan formal. CAE menjadi pusat untuk program pendidikan Nonformal di Victoria, menyediakan kursus-kursus yang

meliputi literasi, seni, keterampilan praktis, serta bahasa dan budaya bagi penduduk dewasa. CAE juga berperan dalam memperkenalkan berbagai metode pengajaran baru yang lebih terfokus pada pengembangan keterampilan dan pengalaman belajar yang lebih praktis. Memasuki era 1970-an dan 1980-an, pendidikan Nonformal di Victoria semakin terstruktur dan terorganisir dengan lebih banyak lembaga yang menyediakan kursus berbasis komunitas dan keahlian teknis. Pada tahun 1982, lembaga Adult and Community Education (ACE) dibentuk untuk memperluas jangkauan dan akses pendidikan Nonformal bagi berbagai kelompok masyarakat. Program-program pendidikan di bawah ACE berfokus pada penyediaan keterampilan hidup, pengembangan karier, dan program pemberdayaan masyarakat yang menargetkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti imigran, kaum muda, serta individu dengan kebutuhan khusus.

Di tahun 1990-an, sistem pendidikan Nonformal di Victoria berkembang lebih terintegrasi, dengan pengakuan terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang menyediakan program Nonformal. Pemerintah Victoria melalui Adult, Community and Further Education (ACFE) Board semakin aktif mendanai dan mendukung penyelenggaraan kursus dan pelatihan bagi masyarakat dewasa, dengan fokus pada pengembangan literasi, numerasi, dan kesiapan kerja.

Pada abad ke-21, pendidikan Nonformal di Victoria semakin berkembang dengan penerapan teknologi digital. Lembaga-lembaga pendidikan Nonformal mulai mengembangkan kursus online dan pelatihan berbasis teknologi untuk menjangkau lebih banyak orang, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki jadwal yang fleksibel. Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah dan berbagai organisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah dan memperluas jangkauan pendidikan Nonformal.

B. Kebijakan Penyelenggaraan PNF di Victoria

Salah satu kebijakan utama yang mengatur pendidikan Nonformal di Victoria adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Adult, Community and Further Education (ACFE) Board, yang didirikan pada tahun 1992. ACFE Board berfungsi untuk mengawasi dan mendanai penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Victoria, dengan tujuan utama meningkatkan keterampilan orang dewasa dalam bidang literasi, numerasi, dan keterampilan vokasional yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Sebagai badan pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan pendidikan Nonformal, ACFE Board bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan lokal untuk memastikan bahwa program yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu kebijakan yang sangat penting adalah Learn Local, sebuah program yang diluncurkan oleh ACFE Board untuk mendukung penyelenggaraan kursus-kursus pendidikan Nonformal di berbagai komunitas. Program ini menyasar individu yang mungkin tidak dapat mengakses pendidikan formal, seperti orang dewasa, penyandang disabilitas, imigran, dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Learn Local memberikan pelatihan di bidang literasi dasar, numerasi, keterampilan hidup, dan persiapan kerja. Melalui kebijakan Learn Local, pemerintah Victoria bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dasar masyarakat, memperluas kesempatan belajar, dan mendukung mereka dalam berpartisipasi aktif di pasar tenaga kerja.

Selain itu, kebijakan pendidikan Nonformal di Victoria juga mendukung adanya fleksibilitas dalam penyelenggaraan program. Pemerintah memberikan keleluasaan kepada lembaga-lembaga penyelenggara untuk menentukan jenis pelatihan atau kursus yang ditawarkan, berdasarkan kebutuhan lokal atau permintaan pasar. Hal ini memungkinkan adanya penyesuaian kurikulum yang lebih relevan dan tepat sasaran, baik dalam bidang keterampilan teknis, seni, ataupun pengembangan pribadi. Kebijakan ini juga mendorong kerjasama antara sektor

publik dan swasta, di mana lembaga swasta dapat menyediakan pelatihan dalam bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan oleh industri lokal.

Kebijakan lainnya yang sangat mendukung pendidikan Nonformal di Victoria adalah pendanaan berbasis kebutuhan. Program-program pendidikan Nonformal di Victoria sebagian besar dibiayai oleh pemerintah negara bagian melalui ACFE Board, dengan fokus pada daerah-daerah yang paling membutuhkan perhatian. Selain itu, pendanaan juga mencakup pengembangan bahan ajar, pelatihan bagi pengajar, dan peningkatan infrastruktur pendidikan. Pemerintah Victoria mengalokasikan dana untuk berbagai program, termasuk program literasi bagi imigran, pelatihan keterampilan bagi pengangguran, serta inisiatif untuk meningkatkan keterampilan digital di kalangan orang dewasa.

Kebijakan ini juga mencakup upaya untuk memastikan kualitas pendidikan Nonformal. Pemerintah Victoria menerapkan standar akreditasi yang ketat untuk lembaga penyelenggara, memastikan bahwa program yang ditawarkan memenuhi persyaratan yang relevan dengan dunia kerja dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, evaluasi dan peninjauan berkala terhadap program-program yang dijalankan dilakukan untuk memastikan efektivitas dan dampak jangka panjang dari pendidikan Nonformal.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan pendidikan Nonformal di Victoria juga semakin berfokus pada integrasi teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan berkembangnya teknologi digital, kebijakan ini mendukung pengembangan platform e-learning dan kursus online yang memungkinkan peserta didik dari berbagai daerah untuk mengakses pelatihan dengan lebih mudah. Hal ini sangat relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada keterampilan digital untuk dapat bersaing di pasar global.

C. Bentuk Penyelenggaraan PNF di Victoria

Salah satu bentuk utama penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Victoria adalah Learn Local. Program ini terdiri dari lebih dari 200 lembaga penyelenggara pendidikan Nonformal yang terdaftar di seluruh wilayah Victoria. Learn Local menyelenggarakan kursus-kursus yang mencakup literasi dasar, numerasi, keterampilan hidup, serta keterampilan praktis lainnya yang dibutuhkan oleh individu untuk mengakses peluang kerja atau meningkatkan kualitas hidup mereka. Kursus-kursus ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan sering kali dirancang untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja yang spesifik. Selain itu, Learn Local juga berperan dalam mendukung kelompok-kelompok yang kurang terlayani, seperti penyandang disabilitas, imigran, dan individu yang menghadapi kesulitan ekonomi.

Selain Learn Local, terdapat Center for Adult Education (CAE) yang menyediakan berbagai kursus pendidikan Nonformal, mulai dari kursus seni dan budaya hingga pelatihan keterampilan teknis. CAE memberikan pendidikan berorientasi pada pengembangan keterampilan yang dapat diterapkan langsung dalam dunia kerja. Kursus-kursus ini seringkali berfokus pada pengembangan keterampilan hidup dan seni praktis yang membantu peserta didik dalam meningkatkan keterampilan pribadi atau profesional mereka.

Penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Victoria juga mencakup program pelatihan vokasional yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan swasta. Program pelatihan ini ditujukan untuk mempersiapkan individu dalam pekerjaan teknis atau sektor industri tertentu. Misalnya, kursus dalam bidang perawatan kesehatan, teknologi informasi, atau konstruksi. Program-program ini sering kali mencakup pelatihan berbasis praktik, yang memberikan peserta didik pengalaman langsung di lapangan, sehingga mereka siap untuk bekerja di bidang tersebut.

Selain itu, kursus berbasis komunitas juga menjadi bagian penting dari sistem pendidikan Nonformal di Victoria. Program

ini sering kali diadakan oleh organisasi masyarakat atau lembaga swadaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi komunitas lokal. Kursus-kursus ini berfokus pada keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup sehari-hari, seperti pertanian berkelanjutan, pengelolaan keuangan pribadi, atau pelatihan dalam bidang kerajinan tangan.

Dengan berbagai bentuk penyelenggaraan ini, pendidikan Nonformal di Victoria tidak hanya memberikan keterampilan praktis bagi individu, tetapi juga berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Penyediaan akses pendidikan yang fleksibel ini memungkinkan lebih banyak orang untuk mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, sambil mengatasi kesenjangan yang ada dalam sistem pendidikan formal.

D. Kelompok Sasaran PNF di Victoria

Pendidikan Nonformal di Victoria, Australia, dirancang untuk melayani berbagai kelompok masyarakat yang mungkin tidak dapat mengakses atau memperoleh manfaat penuh dari sistem pendidikan formal. Program-program pendidikan Nonformal ini menargetkan kelompok-kelompok tertentu dengan kebutuhan belajar yang spesifik, guna meningkatkan keterampilan, literasi, dan numerasi mereka, serta membantu mereka mengakses peluang kerja dan pemberdayaan sosial.

Salah satu kelompok sasaran utama adalah orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan atau mendapatkan kualifikasi tambahan untuk mendukung perkembangan karier mereka. Banyak individu dewasa yang mengikuti program pendidikan Nonformal untuk meningkatkan kemampuan literasi dasar atau keterampilan vokasional yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja, misalnya dalam bidang teknologi, perawatan kesehatan, dan keterampilan teknis lainnya.

Kelompok imigran dan pengungsi juga merupakan sasaran penting dalam pendidikan Nonformal di Victoria. Program-program ini memberikan pelatihan bahasa Inggris, literasi dasar,

serta keterampilan hidup yang diperlukan untuk membantu mereka berintegrasi dengan lebih baik ke dalam masyarakat Australia. Kursus-kursus ini juga memberi mereka kesempatan untuk memahami sistem hukum, budaya, dan kebijakan di Victoria, yang penting untuk beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja.

Selain itu, individu dengan disabilitas juga menjadi kelompok sasaran utama pendidikan Nonformal. Program-program Nonformal memberikan pelatihan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu, termasuk keterampilan hidup, keterampilan sosial, dan pelatihan untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja atau kehidupan sosial yang lebih mandiri.

Kaum muda yang keluar dari sistem pendidikan formal lebih awal juga diberikan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan Nonformal untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan peluang mereka dalam dunia kerja. Program-program ini berfokus pada pengembangan keterampilan praktis, seperti pelatihan vokasional, yang dapat membantu mereka memulai karier atau melanjutkan pendidikan mereka di masa depan.

E. Penyelenggara PNF di Victoria

Penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Victoria dilakukan oleh berbagai lembaga dan organisasi yang berperan dalam menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat di luar jalur pendidikan formal. Salah satu penyelenggara utama pendidikan Nonformal adalah Learn Local providers, yang merupakan jaringan lebih dari 200 lembaga yang menyediakan pelatihan berbasis komunitas di seluruh Victoria. Lembaga-lembaga ini menawarkan berbagai kursus, mulai dari literasi dan numerasi hingga keterampilan vokasional dan keterampilan hidup, dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi lebih aktif dalam dunia kerja dan kehidupan sosial.

Selain Learn Local, lembaga penting lainnya adalah Council for Adult Education (CAE), yang menyediakan berbagai kursus dan pelatihan untuk orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan mereka dalam berbagai bidang, termasuk seni, bahasa, dan keterampilan praktis. CAE juga menawarkan kursus dalam bidang keterampilan kerja yang lebih terstruktur, sehingga peserta dapat memperoleh kualifikasi yang relevan dengan industri tertentu.

Adult, Community and Further Education (ACFE) Board juga merupakan penyelenggara penting dalam pendidikan Nonformal di Victoria, yang mengatur dan mendanai berbagai program yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut. ACFE Board mendukung lembaga-lembaga penyelenggara dengan menyediakan dana dan sumber daya untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan program-program pendidikan Nonformal.

Selain itu, berbagai organisasi swadaya masyarakat (NGO), lembaga keagamaan, dan sektor swasta juga turut berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal. Mereka sering kali berfokus pada pemberdayaan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti imigran, kaum muda, atau penyandang disabilitas, dengan menawarkan program-program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan mereka.

F. Karakteristik penyelenggaraan PNF di Victoria

Di Victoria, pendidikan Nonformal memiliki karakteristik yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang sosial ekonomi pesertanya. Bagi kalangan masyarakat berpenghasilan tinggi, PNF seringkali difokuskan pada program-program pengembangan keterampilan lanjutan, pelatihan profesional, dan kursus-kursus pengembangan pribadi seperti kepemimpinan, teknologi terbaru, atau bahasa asing. Program ini biasanya diselenggarakan oleh lembaga pelatihan swasta atau institusi pendidikan yang menawarkan fasilitas dan materi pembelajaran premium dengan pendekatan yang sangat

personalisasi. Sementara itu, untuk kelompok menengah, PNF di Victoria menekankan pada pelatihan vokasional dan keterampilan praktis yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja, seperti pelatihan kejuruan, digital literacy, dan kursus sertifikasi keterampilan yang fleksibel dengan biaya yang lebih terjangkau dan didukung oleh subsidi pemerintah. Sedangkan bagi kelompok kurang mampu, pendidikan Nonformal dirancang dengan pendekatan inklusif dan aksesibilitas tinggi, sering kali melibatkan program literasi dasar, pelatihan kerja sederhana, serta pendampingan sosial yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, komunitas lokal, dan LSM. Program ini fokus pada pemberdayaan ekonomi dan sosial, memberikan peluang belajar yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari peserta.

Untuk pekerja imigran, termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Victoria, pendidikan Nonformal dirancang secara khusus untuk mendukung integrasi sosial dan ekonomi mereka. Program PNF bagi pekerja imigran umumnya mencakup kursus bahasa Inggris sebagai bahasa kedua (ESL), pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan sektor-sektor industri tempat mereka bekerja, serta pelatihan kesadaran hukum dan budaya untuk membantu adaptasi sosial. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan komunikasi dan keterampilan teknis para pekerja, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri dan keterlibatan mereka dalam komunitas lokal. Penyedia pendidikan Nonformal bagi pekerja imigran biasanya melibatkan lembaga pemerintah, organisasi komunitas, dan pusat pembelajaran migran yang menawarkan program dengan biaya terjangkau atau gratis, dengan dukungan fasilitas pendampingan dan konsultasi yang memperhatikan kebutuhan khusus kelompok imigran.

G. Sumber Pendanaan PNF di Victoria

Pendanaan pendidikan Nonformal di Victoria, Australia, sebagian besar berasal dari pemerintah negara bagian melalui

Adult, Community and Further Education (ACFE) Board. ACFE Board bertanggung jawab untuk mendanai dan mengawasi program pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga, termasuk Learn Local providers, Center for Adult Education (CAE), dan berbagai organisasi komunitas lainnya. Dana yang diberikan oleh ACFE Board bertujuan untuk memastikan bahwa program-program pendidikan Nonformal dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang terlayani oleh sistem pendidikan formal.

Selain pendanaan dari pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan Nonformal juga dapat menerima dana dari sumber filantropi, seperti yayasan atau lembaga swasta yang mendukung pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa lembaga juga menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk mendanai program-program pelatihan yang khusus disesuaikan dengan kebutuhan industri. Misalnya, program pelatihan keterampilan di bidang teknologi informasi atau perawatan kesehatan yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar di industri tersebut.

Pendanaan juga melibatkan biaya kontribusi dari peserta. Meskipun banyak program pendidikan Nonformal di Victoria yang didanai oleh pemerintah, sebagian besar kursus mengenakan biaya yang wajar untuk partisipasi. Biaya ini digunakan untuk menutupi biaya operasional, termasuk pengembangan materi ajar, honorarium pengajar, dan biaya administrasi lainnya. Pemerintah memberikan subsidi bagi individu dari kelompok tertentu yang mengalami kesulitan ekonomi untuk memastikan bahwa biaya tidak menjadi hambatan bagi mereka yang ingin mengakses pendidikan Nonformal.

H. Kelebihan dan Kelemahan PNF di Victoria

1. Kelebihan

Pendidikan Nonformal di Victoria memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya pilihan yang sangat relevan bagi

masyarakat. Salah satu kelebihan utama adalah fleksibilitas. Program-program pendidikan Nonformal diselenggarakan dengan jadwal yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, seperti kelas di sore atau malam hari, sehingga memungkinkan orang dewasa yang bekerja atau memiliki komitmen lain untuk tetap berpartisipasi. Fleksibilitas ini juga mencakup penyesuaian materi ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal atau individu, seperti pelatihan keterampilan tertentu yang relevan dengan industri lokal.

Selain itu, pendidikan Nonformal di Victoria sangat inklusif. Program-program ini dirancang untuk dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang memiliki latar belakang pendidikan rendah, penyandang disabilitas, dan imigran. Hal ini memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan dan semua orang memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas hidup mereka.

2. Kelemahan

Namun, meskipun memiliki banyak kelebihan, pendidikan Nonformal di Victoria juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan utama adalah keterbatasan akreditasi dan pengakuan. Meskipun pendidikan Nonformal memberikan keterampilan praktis, banyak program yang tidak menghasilkan sertifikasi resmi yang diakui secara nasional, sehingga bisa membatasi kesempatan peserta untuk melanjutkan pendidikan formal atau mendapatkan pengakuan yang lebih luas di dunia kerja.

Kelemahan lainnya adalah pendanaan yang terbatas. Walaupun ada dukungan dari pemerintah melalui ACFE Board, banyak program yang bergantung pada subsidi atau biaya partisipasi peserta, yang bisa menjadi hambatan bagi individu dengan kondisi ekonomi yang lebih rendah. Ketergantungan pada pendanaan yang terbatas bisa mempengaruhi keberlanjutan dan kualitas program-program pendidikan Nonformal.

I. Analisis Studi Komparatif PNF Victoria dengan Negara Lain

Pendidikan Nonformal di Victoria, Indonesia, Kongo, dan Vietnam memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan keterampilan dan kualitas hidup masyarakat, namun penyelenggaraannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan pendidikan masing-masing negara. Di Victoria, pendidikan Nonformal berkembang dengan sangat terstruktur, didukung oleh kebijakan pemerintah yang kuat, seperti Adult, Community and Further Education (ACFE) Board yang mendanai dan mengawasi program-programnya. Program ini mencakup Learn Local, yang menyediakan kursus untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan keterampilan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pendidikan Nonformal di Victoria juga sangat inklusif dan fleksibel, dengan banyak kursus yang dapat disesuaikan dengan waktu dan kebutuhan peserta, serta didanai sebagian besar oleh pemerintah dan sektor swasta.

Sementara itu, Indonesia juga memiliki sistem pendidikan Nonformal yang luas, diwakili oleh program-program seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja, literasi, dan pengembangan sosial. Namun, di Indonesia, pendanaan untuk pendidikan Nonformal cenderung terbatas dan bergantung pada dana pemerintah serta sektor swasta. Meskipun telah ada kebijakan yang mendukung pendidikan Nonformal, seperti dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tantangan terbesar di Indonesia adalah ketidakmerataan akses antar daerah, terutama di daerah terpencil. Sebagian besar program Nonformal di Indonesia lebih terfokus pada pelatihan dasar dan tidak selalu terkait langsung dengan dunia industri.

Di Kongo, pendidikan Nonformal terutama dilaksanakan oleh organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga internasional yang mendukung pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bidang keaksaraan dan keterampilan hidup. Tantangan utama di Kongo adalah keterbatasan infrastruktur

dan pendanaan, yang menghambat keberlanjutan dan jangkauan program. Sebagian besar program pendidikan Nonformal di Kongo lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan upaya membangun kembali masyarakat pasca-konflik, namun masih terbatas pada daerah-daerah tertentu.

Sedangkan di Vietnam, pendidikan Nonformal juga memainkan peran penting dalam pengembangan keterampilan kerja, terutama di sektor pertanian dan industri ringan. Pemerintah Vietnam telah mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan pelatihan vokasional melalui lembaga pendidikan Nonformal yang bekerja sama dengan sektor swasta. Program-program pelatihan vokasional di Vietnam sangat fokus pada peningkatan keterampilan praktis yang langsung diterapkan di lapangan kerja. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi Vietnam adalah disparitas antara kota dan pedesaan dalam hal akses dan kualitas program pendidikan Nonformal.

Secara keseluruhan, meskipun tujuan dan struktur pendidikan Nonformal di keempat negara ini serupa, Victoria memiliki sistem yang lebih terorganisir dan didanai dengan baik, sementara Indonesia, Kongo, dan Vietnam menghadapi tantangan terkait dengan pendanaan, akses, dan ketidakmerataan kualitas pendidikan. Masing-masing negara memanfaatkan pendidikan Nonformal sebagai cara untuk mengatasi kekurangan dalam sistem pendidikan formal, tetapi dengan berbagai tingkat keberhasilan dan kendala yang berbeda.

Pendidikan Nonformal (PNF) di Victoria, Australia, telah berkembang menjadi bagian integral dari sistem pendidikan yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengembangan keterampilan sepanjang hayat. Melalui kebijakan yang kuat, seperti *Adult, Community and Further Education* (ACFE) Board dan *Learn Local providers*, PNF di Victoria berhasil menyediakan akses pendidikan bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk orang dewasa, penyandang disabilitas, imigran, dan kaum muda. Program-program ini difokuskan pada peningkatan literasi, numerasi, keterampilan vokasional, dan

persiapan kerja, yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan pasar tenaga kerja.

Salah satu kelebihan utama dari PNF di Victoria adalah fleksibilitasnya. Program-program ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan peserta, dengan kursus yang dapat diakses pada waktu yang fleksibel, seperti sore atau malam hari. Selain itu, PNF di Victoria juga sangat inklusif, memberikan kesempatan belajar bagi kelompok-kelompok yang kurang terlayani oleh pendidikan formal. Pendanaan yang sebagian besar berasal dari pemerintah, ditambah dengan dukungan dari sektor swasta dan kontribusi peserta, memastikan keberlanjutan dan aksesibilitas program-program ini. Namun, meskipun pendidikan Nonformal di Victoria memiliki banyak keunggulan, seperti fleksibilitas dan inklusivitas, terdapat juga tantangan terkait dengan keterbatasan akreditasi dan pengakuan resmi dari kursus-kursus Nonformal. Hal ini bisa mempengaruhi pengakuan keterampilan yang diperoleh peserta di pasar kerja atau dalam melanjutkan pendidikan formal. Selain itu, meskipun pendanaan dari pemerintah cukup signifikan, ketergantungan pada dana yang terbatas masih menjadi tantangan untuk memastikan bahwa semua program dapat terus beroperasi dengan kualitas yang tinggi.

BAB XII

Pendidikan Nonformal di Tasmania (Australia)

A. Sejarah PNF di Tasmania

Pendidikan Nonformal di Tasmania berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat untuk akses pembelajaran yang lebih inklusif, fleksibel, dan berorientasi pada pemberdayaan, terutama bagi kelompok yang tidak dapat mengakses pendidikan formal secara optimal. Sejarah pendidikan Nonformal di Tasmania tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk perkembangan sistem pendidikan di negara bagian ini.

Tasmania, sebagai bagian dari Australia, mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan sejak masa kolonial. Pada awalnya, pendidikan di Tasmania sangat terbatas dan lebih fokus pada pendidikan formal yang diatur oleh pemerintah kolonial. Namun, seiring dengan industrialisasi dan perubahan demografis, kebutuhan akan pendidikan yang lebih fleksibel mulai muncul. Kelompok-kelompok masyarakat, termasuk para pekerja dan komunitas adat, membutuhkan akses pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada teori akademis,

tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka.

Perkembangan pendidikan Nonformal di Tasmania mulai mendapatkan perhatian serius pada pertengahan abad ke-20. Pada periode ini, pemerintah Tasmania mulai menyadari pentingnya pendidikan sepanjang hayat dan peran pendidikan Nonformal dalam menyediakan kesempatan belajar bagi orang dewasa dan kelompok yang terpinggirkan. Laporan-laporan nasional Australia tentang pendidikan pada era 1970-an menekankan perlunya pengembangan pendidikan Nonformal untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memperbaiki mobilitas sosial.

Salah satu tonggak penting dalam sejarah pendidikan Nonformal di Tasmania adalah pembentukan Community Education Centres (Pusat Pendidikan Komunitas) yang berfungsi sebagai lembaga penyelenggara berbagai program pendidikan Nonformal. Pusat-pusat ini menawarkan kursus-kursus keterampilan, pelatihan kerja, dan program pengembangan pribadi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendidikan yang bersifat top-down menjadi lebih partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan komunitas.

Perkembangan kebijakan pendidikan pada akhir abad ke-20 semakin memperkuat posisi pendidikan Nonformal dalam sistem pendidikan Tasmania. Pemerintah Tasmania, melalui Departemen Pendidikan dan Pelatihan, mengintegrasikan pendidikan Nonformal sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya menekankan penyediaan akses pendidikan, tetapi juga pengakuan terhadap hasil belajar yang diperoleh melalui pendidikan Nonformal, misalnya melalui sistem Recognition of Prior Learning (RPL) yang memungkinkan individu mendapatkan pengakuan kompetensi dari pengalaman belajar di luar pendidikan formal.

Selain itu, peran organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga sangat dominan

dalam perkembangan pendidikan Nonformal di Tasmania. Mereka menyediakan berbagai program pelatihan vokasional, literasi, dan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup peserta didik. Kolaborasi antara pemerintah dan pihak-pihak ini memperkaya ragam program pendidikan Nonformal dan memperluas jangkauan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Tasmania.

Dalam konteks global, pendidikan Nonformal di Tasmania juga dipengaruhi oleh tren internasional yang menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) sebagaimana dikemukakan oleh UNESCO dan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Konsep lifelong learning menegaskan bahwa pendidikan tidak terbatas pada masa anak-anak atau jenjang formal saja, tetapi merupakan proses kontinu yang harus didukung oleh berbagai jenis pendidikan, termasuk Nonformal.

Secara keseluruhan, sejarah pendidikan Nonformal di Tasmania merupakan cermin dari upaya negara bagian ini dalam menjawab tantangan sosial dan ekonomi melalui pendidikan yang inklusif dan adaptif. Pendidikan Nonformal berkembang dari kebutuhan praktis masyarakat akan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, hingga menjadi bagian integral dari sistem pendidikan yang mendukung pengembangan kapasitas individu dan komunitas secara berkelanjutan.

B. Kebijakan Penyelenggaraan PNF di Tasmania

Pendidikan Nonformal di Tasmania berkembang secara signifikan berkat dukungan kebijakan yang sistematis dan berorientasi pada peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Tasmania tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari kerangka kebijakan pendidikan dan pelatihan nasional Australia yang mengacu pada prinsip lifelong learning (pembelajaran sepanjang hayat) serta inklusivitas pendidikan.

Pemerintah Tasmania, melalui Departemen Pendidikan dan Pelatihan (Department of Education and Training Tasmania), telah menetapkan kebijakan strategis yang mendukung pengembangan pendidikan Nonformal sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran masyarakat yang beragam. Kebijakan ini menegaskan pentingnya pendidikan Nonformal sebagai pelengkap pendidikan formal dan sebagai mekanisme vital untuk meningkatkan keterampilan, literasi, dan partisipasi sosial-ekonomi warga Tasmania.

Salah satu fokus utama kebijakan pendidikan Nonformal di Tasmania adalah menjamin aksesibilitas dan kesetaraan pendidikan. Kebijakan ini menekankan bahwa pendidikan harus tersedia bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti orang dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan formal, komunitas adat, imigran, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang berada di wilayah geografis terpencil. Dalam hal ini, kebijakan memberikan perhatian khusus untuk mengurangi hambatan akses pendidikan melalui berbagai program fleksibel, seperti pembelajaran jarak jauh dan program pelatihan komunitas.

Dalam ranah kualitas dan relevansi, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Tasmania mendorong penggunaan kurikulum dan materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan perkembangan teknologi. Pemerintah mengadopsi standar nasional Australia untuk pelatihan vokasional (Australian Quality Training Framework – AQTF) yang mengatur persyaratan kualitas bagi lembaga pendidikan Nonformal, termasuk penyedia pelatihan dan pendidikan keterampilan (Registered Training Organizations – RTOs). Standar ini menjamin bahwa pendidikan Nonformal yang diberikan memenuhi kriteria mutu, sehingga hasil belajar peserta dapat diakui secara resmi dan berkontribusi pada pengembangan karir.

Kebijakan di Tasmania juga menekankan pengakuan hasil belajar Nonformal, terutama melalui mekanisme Recognition of Prior Learning (RPL) dan Credit Transfer. Mekanisme ini

memungkinkan individu mendapatkan pengakuan atas keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman kerja atau pelatihan informal tanpa harus mengikuti seluruh proses pembelajaran formal. Dengan demikian, pendidikan Nonformal tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi juga berkontribusi dalam sistem pendidikan yang inklusif dan fleksibel.

Dukungan kebijakan lainnya mencakup pendanaan dan subsidi untuk program-program pendidikan Nonformal yang ditujukan bagi kelompok sasaran tertentu, seperti program peningkatan literasi dewasa, pelatihan keterampilan kerja bagi pengangguran, serta program pemberdayaan komunitas adat. Pemerintah Tasmania bekerja sama dengan pemerintah federal Australia dan organisasi masyarakat sipil untuk mengoptimalkan pendanaan serta pelaksanaan program-program tersebut agar efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan pendidikan Nonformal di Tasmania mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat. Kolaborasi ini dianggap penting untuk menciptakan sinergi dalam penyediaan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Pendekatan ini sejalan dengan model governance pendidikan yang modern, yang mengedepankan kemitraan dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pendidikan.

Kebijakan pendidikan Nonformal di Tasmania juga menaruh perhatian pada pengembangan kapasitas tenaga pendidik dan fasilitator Nonformal. Program pelatihan profesional dan sertifikasi bagi tenaga pengajar Nonformal menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan efektivitas proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan teori pembangunan kapasitas dalam pendidikan yang menegaskan pentingnya kualitas sumber daya manusia sebagai faktor utama keberhasilan program pendidikan.

Secara keseluruhan, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Tasmania mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut dirancang untuk menjawab tantangan perubahan sosial-ekonomi dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan pendidikan sepanjang hayat. Dengan dukungan kebijakan yang komprehensif ini, pendidikan Nonformal di Tasmania dapat berperan signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing.

C. Bentuk Penyelenggaraan PNF di Tasmania

Pendidikan Nonformal di Tasmania diselenggarakan dalam berbagai bentuk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran masyarakat yang beragam, serta menyesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Bentuk-bentuk penyelenggaraan ini mencerminkan fleksibilitas dan inovasi dalam metode pembelajaran di luar jalur formal yang memungkinkan partisipasi luas dari berbagai kelompok sasaran. Berikut ini adalah bentuk-bentuk utama penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Tasmania yang diadopsi secara luas:

1. Kursus dan Pelatihan Keterampilan

Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan Nonformal yang paling umum di Tasmania adalah kursus dan pelatihan keterampilan (skills training). Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi praktis peserta dalam bidang tertentu, seperti teknologi informasi, keterampilan teknis, kerajinan tangan, pertanian, dan lain-lain. Kursus-kursus ini biasanya diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terdaftar (Registered Training Organizations – RTOs) yang memenuhi standar kualitas nasional Australia, sehingga lulusan kursus memiliki sertifikat yang diakui secara resmi. Bentuk ini sangat

relevan untuk meningkatkan employability atau keterampilan kerja masyarakat, terutama bagi orang dewasa yang ingin meningkatkan kualifikasi atau berpindah profesi.

2. Pendidikan Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat

Pendidikan Nonformal di Tasmania juga banyak diselenggarakan dalam bentuk program pendidikan komunitas yang berorientasi pada pemberdayaan sosial dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Program ini biasanya difokuskan pada pengembangan literasi, kesehatan, keterampilan hidup, dan kesadaran sosial. Bentuk ini sering kali dikembangkan oleh organisasi masyarakat sipil, pusat komunitas, atau lembaga pemerintah lokal yang bekerja sama dengan masyarakat setempat. Pendidikan komunitas ini bertujuan membangun partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara holistik.

3. Program Pendidikan untuk Kelompok Khusus

Tasmania juga mengembangkan program pendidikan Nonformal yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran tertentu yang memiliki hambatan atau kebutuhan khusus dalam mengakses pendidikan. Contohnya adalah program pendidikan untuk penyandang disabilitas, program bahasa dan integrasi sosial bagi imigran dan pengungsi, serta program literasi bagi orang dewasa yang putus sekolah. Program-program ini disusun secara inklusif dengan metode yang adaptif agar dapat menjangkau kelompok yang rentan dan memfasilitasi integrasi mereka ke dalam masyarakat luas.

4. Pembelajaran Jarak Jauh dan Digital

Seiring dengan kemajuan teknologi, penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Tasmania semakin memanfaatkan platform digital dan pembelajaran jarak jauh. Bentuk ini memungkinkan peserta didik yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan waktu untuk tetap dapat mengakses program pembelajaran. Pembelajaran daring ini

didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang semakin berkembang dan kebijakan pemerintah yang mendukung digitalisasi pendidikan. Metode ini juga memfasilitasi pembelajaran mandiri yang lebih fleksibel dan personal.

5. Workshop dan Seminar

Workshop, seminar, dan pelatihan singkat juga merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan Nonformal yang sering digunakan di Tasmania. Kegiatan ini biasanya bersifat intensif dan tematik, dengan durasi singkat namun fokus pada pengembangan keterampilan atau pengetahuan tertentu. Bentuk ini banyak digunakan oleh organisasi profesional, lembaga pemerintah, maupun komunitas untuk meningkatkan kapasitas anggotanya dalam bidang spesifik, seperti kewirausahaan, pengelolaan lingkungan, atau teknologi baru.

6. Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan

Program-program pemberdayaan ekonomi melalui pendidikan Nonformal juga menjadi bagian penting di Tasmania. Program ini berfokus pada pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha kecil, dan pengembangan keterampilan ekonomi produktif lainnya. Program ini sering kali dijalankan oleh lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat untuk mendorong kemandirian ekonomi warga, terutama di kalangan pemuda dan komunitas yang berpotensi menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Secara keseluruhan, bentuk-bentuk penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Tasmania menunjukkan keberagaman dan penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik dan konteks sosial lokal. Fleksibilitas ini menjadi salah satu kekuatan utama pendidikan Nonformal dalam memberikan kesempatan belajar yang inklusif, relevan, dan berkelanjutan. Dengan berbagai bentuk tersebut, pendidikan Nonformal tidak hanya berperan sebagai pelengkap pendidikan formal, tetapi juga sebagai

wahana strategis dalam membangun kapasitas masyarakat sepanjang hayat.

D. Kelompok Sasaran PNF di Tasmania

Pendidikan Nonformal di Tasmania dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok sasaran yang memiliki kebutuhan belajar yang beragam dan tidak selalu terpenuhi oleh sistem pendidikan formal. Keberadaan kelompok sasaran yang spesifik ini mencerminkan komitmen pemerintah dan penyelenggara pendidikan Nonformal dalam mewujudkan prinsip inklusivitas dan pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning). Kelompok sasaran pendidikan Nonformal di Tasmania meliputi berbagai demografi dan latar belakang sosial yang membutuhkan pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan mereka. Berikut adalah uraian mengenai kelompok sasaran utama pendidikan Nonformal di Tasmania:

1. Orang Dewasa yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Formal

Salah satu kelompok sasaran utama adalah orang dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan formal hingga tingkat tertentu, atau yang memerlukan peningkatan keterampilan dan pengetahuan untuk menghadapi perubahan sosial dan ekonomi. Kelompok ini meliputi mereka yang putus sekolah, pekerja dengan keterampilan terbatas, atau mereka yang ingin meningkatkan kualifikasi demi pengembangan karir. Pendidikan Nonformal menyediakan jalur alternatif untuk belajar melalui kursus keterampilan, pelatihan vokasional, dan program literasi. Program-program ini dirancang agar dapat diakses dengan jadwal fleksibel dan metode yang tidak membebani peserta, sehingga memungkinkan mereka untuk belajar sambil tetap bekerja atau menjalani aktivitas lainnya.

2. Kelompok Marginal dan Terpinggirkan

Tasmania memberikan perhatian khusus kepada kelompok marginal yang sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan formal. Kelompok ini mencakup komunitas adat (Aboriginal Tasmanians), imigran, pengungsi, dan kelompok dengan keterbatasan sosial ekonomi. Pendidikan Nonformal berperan sebagai sarana pemberdayaan mereka dengan menyediakan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan budaya dan bahasa mereka, serta menawarkan dukungan integrasi sosial. Misalnya, program literasi bahasa Inggris sebagai bahasa kedua (ESL – *English as a Second Language*) dan pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan pasar tenaga kerja lokal.

3. Penyandang Disabilitas

Kelompok penyandang disabilitas merupakan salah satu sasaran penting pendidikan Nonformal di Tasmania. Pendidikan formal sering kali belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan belajar mereka secara optimal. Oleh karena itu, pendidikan Nonformal hadir dengan program-program yang lebih inklusif dan adaptif, menyediakan materi pembelajaran dan metode yang ramah disabilitas. Hal ini mencakup pelatihan keterampilan hidup mandiri, penggunaan teknologi asistif, serta program sosial dan rehabilitasi yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian penyandang disabilitas.

4. Pemuda dan Remaja

Pemuda dan remaja yang belum memasuki atau telah keluar dari pendidikan formal juga menjadi fokus pendidikan Nonformal di Tasmania. Program-program yang ditujukan untuk kelompok ini sering kali berorientasi pada pengembangan keterampilan sosial, kepemimpinan, kewirausahaan, dan persiapan kerja. Melalui kegiatan seperti workshop, pelatihan magang, dan program mentoring, pendidikan Nonformal membantu pemuda untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan sosial.

5. Masyarakat Umum dan Pembelajaran Sepanjang Hayat

Selain kelompok-kelompok khusus di atas, pendidikan Nonformal di Tasmania juga terbuka untuk masyarakat umum yang ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru, baik untuk tujuan profesional maupun pribadi. Konsep pembelajaran sepanjang hayat sangat ditekankan dalam kebijakan pendidikan Tasmania, sehingga berbagai program kursus, seminar, dan pelatihan disediakan untuk mendukung pembelajaran mandiri dan pengembangan diri di segala usia. Misalnya, kursus seni, teknologi, literasi digital, dan kesehatan yang dapat diakses oleh siapa saja yang berminat.

E. Penyelenggara PNF di Tasmania

Pendidikan Nonformal di Tasmania diselenggarakan oleh berbagai aktor yang memiliki peran strategis dalam penyediaan program pembelajaran di luar jalur formal. Keberagaman penyelenggara ini mencerminkan kompleksitas dan fleksibilitas pendidikan Nonformal yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan konteks lokal. Para penyelenggara ini tidak hanya berasal dari sektor pemerintah, tetapi juga sektor swasta, lembaga pendidikan tinggi, serta organisasi masyarakat sipil.

Pemerintah Tasmania merupakan penyelenggara utama pendidikan Nonformal melalui berbagai departemen dan lembaga resmi, terutama Departemen Pendidikan dan Pelatihan (Department of Education and Training Tasmania). Pemerintah berperan dalam merumuskan kebijakan, menyediakan dana, dan mengawasi pelaksanaan program-program pendidikan Nonformal. Selain itu, pemerintah juga menjalankan berbagai inisiatif langsung seperti program literasi dewasa, pelatihan vokasional, serta program pemberdayaan masyarakat yang menjangkau berbagai kelompok sasaran. Pemerintah lokal di tingkat kota dan komunitas juga memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan dan mendukung

pelaksanaan pendidikan Nonformal di wilayahnya masing-masing, terutama dalam menyediakan fasilitas dan sumber daya.

Lembaga pendidikan tinggi di Tasmania, seperti Universitas Tasmania (University of Tasmania), turut menyelenggarakan program pendidikan Nonformal yang bersifat pelatihan keterampilan, kursus pendek, dan pendidikan masyarakat. Selain universitas, terdapat juga Registered Training Organizations (RTOs), yaitu lembaga pelatihan yang diakui secara nasional dan beroperasi dalam bidang pendidikan vokasional. RTOs menyediakan kursus-kursus yang memenuhi standar Australian Quality Training Framework (AQTF) dan memberikan sertifikasi yang diakui secara resmi. Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Organisasi masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah (LSM) memiliki kontribusi besar dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal, khususnya dalam program pemberdayaan komunitas, pelatihan keterampilan hidup, dan literasi. LSM seringkali bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk menjangkau kelompok marginal dan rentan, seperti komunitas adat, pengungsi, dan penyandang disabilitas. Melalui pendekatan yang berbasis masyarakat dan partisipatif, LSM mampu mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal serta memberikan dukungan sosial dan psikologis bagi peserta didik.

Sektor swasta, termasuk perusahaan-perusahaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, juga menjadi penyelenggara pendidikan Nonformal yang signifikan di Tasmania. Banyak perusahaan menyediakan program pelatihan internal maupun eksternal untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan calon tenaga kerja. Selain itu, asosiasi industri dan lembaga profesi mengadakan seminar, workshop, dan pelatihan khusus yang relevan dengan bidang pekerjaan tertentu. Peran sektor swasta ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan

Nonformal selalu terhubung dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

Selain penyelenggara formal dan semi-formal, komunitas lokal dan kelompok informal juga menjadi bagian dari ekosistem pendidikan Nonformal di Tasmania. Misalnya, kelompok seni, komunitas olahraga, dan organisasi keagamaan sering mengadakan kegiatan pembelajaran yang bersifat Nonformal seperti pelatihan keterampilan, kursus hobi, atau pendidikan nilai-nilai sosial dan budaya. Meskipun bersifat tidak formal dan kadang-kadang tidak terstruktur, kegiatan-kegiatan ini berkontribusi pada pembelajaran sepanjang hayat dan pengembangan kapasitas sosial masyarakat.

F. Karakteristik penyelenggaraan PNF di Tasmania

Pendidikan Nonformal di Tasmania memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari pendidikan formal maupun informal. Karakteristik ini mencerminkan bagaimana pendidikan Nonformal di Tasmania dirancang dan dijalankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam dan dinamis. Dengan memperhatikan aspek fleksibilitas, inklusivitas, relevansi, dan partisipasi, penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Tasmania berupaya menjawab tantangan sosial-ekonomi serta mendorong pemberdayaan individu dan komunitas. Berikut ini adalah karakteristik utama dari penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Tasmania:

1. Fleksibilitas dalam Sistem Pembelajaran

Salah satu karakteristik utama pendidikan Nonformal di Tasmania adalah fleksibilitas yang tinggi dalam hal jadwal, kurikulum, dan metode pembelajaran. Berbeda dengan pendidikan formal yang memiliki struktur dan waktu yang ketat, pendidikan Nonformal memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan waktu dan kemampuan mereka. Fleksibilitas ini sangat penting terutama bagi orang dewasa yang harus menyeimbangkan antara pekerjaan, keluarga, dan kegiatan

belajar. Program pembelajaran dapat diselenggarakan secara tatap muka, daring, atau campuran (blended learning), sehingga memudahkan akses dan partisipasi.

2. Inklusivitas dan Aksesibilitas

Pendidikan Nonformal di Tasmania sangat menekankan prinsip inklusivitas, yang berarti membuka akses pembelajaran untuk semua kelompok masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, usia, atau kondisi fisik. Program-program pendidikan Nonformal dirancang khusus untuk menjangkau kelompok marginal seperti komunitas adat, penyandang disabilitas, imigran, dan kelompok rentan lainnya. Fasilitas dan materi pembelajaran juga diadaptasi agar dapat diakses oleh peserta dengan kebutuhan khusus, termasuk penggunaan teknologi asistif dan pendekatan pembelajaran yang ramah budaya.

3. Relevansi terhadap Kebutuhan Masyarakat dan Pasar Kerja

Pendidikan Nonformal di Tasmania dirancang untuk memberikan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan nyata peserta didik dan pasar tenaga kerja. Kurikulum dan materi pelatihan disusun berdasarkan analisis kebutuhan keterampilan yang terus berkembang, sehingga lulusan program Nonformal memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Hal ini menjadikan pendidikan Nonformal sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan employability dan adaptabilitas tenaga kerja di tengah perubahan ekonomi dan teknologi yang cepat.

4. Pendekatan Partisipatif dan Berbasis Komunitas

Pendidikan Nonformal di Tasmania menerapkan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Program-program sering kali dikembangkan bersama komunitas lokal untuk memastikan bahwa konten dan metode pembelajaran sesuai dengan konteks sosial dan budaya mereka.

Pendekatan ini memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab peserta terhadap pembelajaran, sekaligus memperkuat jaringan sosial dan solidaritas komunitas.

5. Penekanan pada Pengembangan Keterampilan Praktis dan Hidup

Berbeda dengan pendidikan formal yang lebih menekankan aspek teori, pendidikan Nonformal di Tasmania fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan keterampilan hidup (life skills) yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan. Contohnya termasuk keterampilan teknologi, komunikasi, kewirausahaan, pengelolaan keuangan, serta keterampilan sosial dan emosional. Pendekatan ini membantu peserta didik menjadi lebih mandiri dan produktif dalam berbagai aspek kehidupan.

6. Pengakuan dan Validasi Hasil Belajar

Meskipun bersifat Nonformal, penyelenggaraan pendidikan ini di Tasmania memberi perhatian pada pengakuan dan validasi hasil belajar. Melalui mekanisme Recognition of Prior Learning (RPL) dan sertifikasi kompetensi, peserta didik dapat memperoleh pengakuan resmi atas keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan Nonformal maupun pengalaman kerja. Sistem ini meningkatkan motivasi belajar dan integrasi hasil pendidikan Nonformal ke dalam sistem pendidikan dan dunia kerja yang lebih formal.

G. Sumber Pendanaan PNF di Tasmania

Pemerintah Tasmania memainkan peran utama sebagai penyedia dana pendidikan Nonformal melalui alokasi anggaran dari Departemen Pendidikan dan Pelatihan serta instansi pemerintah terkait lainnya. Dana ini diarahkan untuk mendukung program-program peningkatan literasi dewasa, pelatihan vokasional, pemberdayaan komunitas, serta inisiatif

pendidikan bagi kelompok marginal dan rentan seperti komunitas adat, imigran, dan penyandang disabilitas.

Selain pendanaan dari pemerintah negara bagian, pemerintah federal Australia juga memberikan dukungan keuangan melalui skema dan program nasional yang relevan dengan pendidikan Nonformal. Contohnya adalah program National Agreement for Skills and Workforce Development yang menyediakan dana bagi pelatihan keterampilan dan pengembangan tenaga kerja secara luas. Pendanaan dari pemerintah federal ini sering kali dialokasikan melalui kontrak dengan lembaga pelatihan terdaftar (RTOs) dan organisasi masyarakat sipil yang aktif di sektor pendidikan Nonformal di Tasmania.

Sektor swasta di Tasmania turut berkontribusi dalam pendanaan pendidikan Nonformal, terutama melalui investasi dalam pelatihan keterampilan bagi karyawan dan calon tenaga kerja. Banyak perusahaan menyediakan dana untuk program pelatihan internal maupun bermitra dengan lembaga pendidikan Nonformal guna menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pendanaan sektor swasta ini penting untuk menjamin relevansi keterampilan yang diajarkan dan memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan pasar kerja.

Selain itu, asosiasi industri dan lembaga profesi juga berperan dalam mendukung pendanaan program pendidikan Nonformal melalui sponsorship, donasi, dan kerjasama dalam pelaksanaan seminar, workshop, dan pelatihan khusus. Pendanaan pendidikan Nonformal di Tasmania juga didukung oleh kontribusi dari masyarakat dan peserta didik itu sendiri. Beberapa program memberlakukan biaya pendaftaran atau iuran partisipasi yang terjangkau, yang membantu menutup biaya operasional penyelenggaraan kursus dan pelatihan. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana tambahan, tetapi juga meningkatkan komitmen peserta dalam mengikuti proses pembelajaran.

Di samping itu, komunitas lokal juga memberikan dukungan berupa sumber daya non-finansial, seperti

penyediaan tempat, tenaga pengajar sukarela, dan bantuan logistik. Bentuk partisipasi masyarakat ini menjadi elemen penting dalam keberlangsungan pendidikan Nonformal, terutama pada program-program yang berfokus pada pemberdayaan komunitas dan pengembangan kapasitas lokal. Beberapa program pendidikan Nonformal di Tasmania memperoleh pendanaan dari donor internasional dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang fokus pada pemberdayaan masyarakat, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas. Dana ini biasanya diberikan untuk proyek-proyek khusus yang memiliki dampak sosial tinggi, seperti pendidikan untuk komunitas adat, program literasi untuk kelompok marginal, atau pelatihan keterampilan untuk pengungsi dan imigran.

Pendanaan dari sumber ini sering bersifat hibah dan memiliki persyaratan pelaporan yang ketat, sehingga lembaga penyelenggara pendidikan Nonformal dituntut untuk memiliki kapasitas manajemen dan akuntabilitas yang baik agar dana dapat digunakan secara efektif dan transparan.

H. Kelebihan dan Kelemahan PNF di Tasmania

1. Kelebihan

Salah satu keunggulan utama pendidikan Nonformal di Tasmania adalah fleksibilitasnya yang memungkinkan peserta belajar sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia. Sistem ini sangat ideal bagi orang dewasa yang bekerja atau memiliki tanggung jawab lain, sehingga pendidikan Nonformal dapat diakses oleh lebih banyak kalangan. Fleksibilitas ini juga tercermin dalam metode pembelajaran yang beragam, seperti pembelajaran daring, tatap muka, atau blended learning.

Pendidikan Nonformal secara aktif dirancang untuk menjangkau kelompok-kelompok yang kurang terlayani oleh pendidikan formal, seperti komunitas adat, penyandang disabilitas, imigran, dan masyarakat berpendapatan rendah. Program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus kelompok ini membantu meningkatkan inklusivitas sosial dan

membuka peluang belajar yang lebih luas, sehingga mendukung pemberdayaan sosial dan ekonomi mereka.

Program-program pendidikan Nonformal di Tasmania umumnya dirancang berdasarkan analisis kebutuhan keterampilan yang mutakhir dan relevan dengan pasar tenaga kerja. Hal ini meningkatkan peluang lulusan untuk memperoleh pekerjaan atau meningkatkan kinerja mereka dalam pekerjaan saat ini. Dengan demikian, pendidikan Nonformal berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan ekonomi dan teknologi.

Mekanisme pengakuan hasil belajar melalui Recognition of Prior Learning (RPL) memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan pengakuan resmi atas keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh di luar jalur formal. Ini meningkatkan motivasi belajar dan membantu integrasi peserta dalam sistem pendidikan formal maupun dunia kerja. Pendidikan Nonformal di Tasmania sering melibatkan partisipasi aktif komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Pendekatan ini memperkuat rasa kepemilikan peserta terhadap proses pembelajaran serta memperkuat jaringan sosial yang mendukung pembangunan kapasitas berkelanjutan.

2. Kelemahan

Salah satu kelemahan yang dihadapi pendidikan Nonformal adalah variabilitas kualitas antara penyelenggara dan program. Meskipun ada standar nasional seperti AQTF, implementasi dan pengawasan kualitas tidak selalu konsisten, sehingga hasil belajar dan sertifikasi terkadang kurang terstandarisasi secara merata.

Pendanaan pendidikan Nonformal sering kali bergantung pada proyek dan kontrak yang bersifat sementara, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam keberlanjutan program. Keterbatasan dana juga membatasi kapasitas penyelenggara untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan.

Meskipun pembelajaran daring menjadi solusi fleksibel, masih terdapat keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi informasi di beberapa daerah terpencil di Tasmania. Hal ini menghambat akses peserta tertentu terhadap program pendidikan Nonformal berbasis digital.

Sebagian peserta pendidikan Nonformal menghadapi tantangan dalam menjaga motivasi belajar secara konsisten, terutama ketika pendidikan ini tidak diwajibkan atau tidak langsung menghasilkan pengakuan formal. Hal ini dapat berdampak pada tingkat penyelesaian program yang rendah.

I. Analisis Studi Komparatif PNF Tasmania dengan Negara Lain

1. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah

Tasmania, sebagai bagian dari Australia, memiliki kebijakan pendidikan Nonformal yang sangat terstruktur dengan dukungan pemerintah yang kuat. Pemerintah Tasmania dan pemerintah federal Australia menyediakan regulasi, pendanaan, dan mekanisme pengakuan hasil belajar melalui sistem Recognition of Prior Learning (RPL). Kebijakan ini memastikan kualitas dan relevansi program PNF dengan pasar kerja serta menjamin keberlanjutan pendanaan. Penyelenggaraan PNF di Tasmania juga mendapat pengawasan dari lembaga-lembaga resmi seperti Registered Training Organizations (RTOs) yang menjamin standar mutu.

Sebaliknya, di Indonesia, meskipun pendidikan Nonformal diatur melalui berbagai peraturan, implementasi kebijakan sering menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga dan pemerataan akses. Pendidikan Nonformal di Indonesia meliputi program Paket A, B, dan C, kursus keterampilan, serta pendidikan keaksaraan. Namun, keterbatasan pendanaan dan kualitas tenaga pengajar masih menjadi kendala signifikan, terutama di daerah terpencil. Pemerintah Indonesia berupaya memperkuat peran pendidikan

Nonformal dalam pembangunan sumber daya manusia, tetapi masih dalam tahap pengembangan yang relatif dinamis.

Di Kenya, pendidikan Nonformal banyak didorong oleh organisasi non- pemerintah dan komunitas lokal, dengan dukungan pemerintah yang terbatas dan fokus utama pada pemberdayaan kelompok marginal. Program-program PNF di Kenya terutama ditujukan untuk meningkatkan literasi dewasa, keterampilan hidup, dan pelatihan kerja bagi kelompok rentan, seperti perempuan dan pemuda di daerah pedesaan. Sistem pengakuan hasil belajar kurang berkembang, sehingga pengakuan formal terhadap kompetensi yang diperoleh melalui PNF masih terbatas.

Vietnam memiliki sistem pendidikan Nonformal yang relatif terorganisir dengan kebijakan pemerintah yang mendukung integrasi PNF dalam strategi pembangunan nasional. Pemerintah Vietnam fokus pada pelatihan keterampilan kerja dan pengembangan sumber daya manusia melalui lembaga-lembaga pelatihan vokasional dan pendidikan masyarakat. Pendanaan PNF sebagian besar berasal dari pemerintah dengan dukungan internasional. Mekanisme sertifikasi dan pengakuan kompetensi di Vietnam cukup maju, memungkinkan lulusan program PNF memperoleh pengakuan formal.

2. Bentuk dan Metode Penyelenggaraan

Tasmania menonjol dengan penyelenggaraan pendidikan Nonformal yang beragam, mulai dari kursus keterampilan, pelatihan vokasional, program pemberdayaan komunitas, hingga pembelajaran daring yang didukung teknologi. Fleksibilitas dan inklusivitas menjadi ciri khasnya, dengan program yang disesuaikan untuk kelompok sasaran khusus, seperti komunitas adat dan penyandang disabilitas.

Di Indonesia, bentuk PNF meliputi kursus kejuruan, pendidikan keaksaraan, dan program pendidikan masyarakat, namun masih didominasi oleh metode tatap muka konvensional dengan jangkauan yang belum merata, terutama di daerah luar

Jawa. Penggunaan teknologi pembelajaran jarak jauh masih dalam tahap awal pengembangan.

Kenya mengandalkan pendekatan berbasis komunitas dengan pelibatan organisasi lokal sebagai penyelenggara utama. Metode pembelajaran banyak berfokus pada pelatihan praktik dan pendidikan literasi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, namun infrastruktur dan akses teknologi menjadi hambatan besar.

Vietnam mengintegrasikan metode formal dan Nonformal dengan pengembangan kurikulum vokasional yang disertifikasi serta penggunaan teknologi untuk memperluas akses. Program PNF di Vietnam berorientasi kuat pada kebutuhan ekonomi dan pengembangan keterampilan yang relevan.

3. Tantangan dan Peluang

Tasmania menghadapi tantangan utama dalam standarisasi kualitas di antara berbagai penyelenggara dan memastikan pengakuan luas terhadap hasil belajar Nonformal. Namun, dukungan pemerintah yang kuat dan sistem sertifikasi yang mapan menjadi peluang besar bagi keberlanjutan PNF.

Indonesia dan Kenya masih menghadapi kendala besar dalam hal pendanaan, kualitas tenaga pengajar, dan pengakuan hasil belajar. Indonesia menunjukkan peluang dengan peningkatan dukungan kebijakan dan pengembangan teknologi pembelajaran, sementara Kenya memiliki peluang dalam pemberdayaan komunitas dan kerjasama dengan organisasi non-pemerintah internasional. Vietnam berpotensi menjadi model dalam pengintegrasian PNF ke dalam sistem pendidikan nasional dengan pendekatan vokasional yang kuat dan pengakuan formal, meski perlu terus memperkuat akses di daerah pedesaan dan terpencil.

Pendidikan Nonformal (PNF) di Tasmania merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan yang memberikan akses belajar bagi berbagai kelompok masyarakat yang tidak dapat terlayani secara optimal oleh pendidikan formal. Melalui fleksibilitas, inklusivitas, dan relevansi program, pendidikan

Nonformal di Tasmania berperan signifikan dalam pemberdayaan individu dan komunitas serta pembangunan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Sejarah perkembangan PNF di Tasmania menunjukkan transformasi dari inisiatif komunitas menjadi sistem yang didukung kebijakan dan regulasi pemerintah yang kuat, menjadikannya sebagai model pembelajaran sepanjang hayat yang inklusif.

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Tasmania menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan program yang berkualitas dan berkelanjutan melalui mekanisme pendanaan yang beragam dan dukungan pengakuan hasil belajar seperti Recognition of Prior Learning (RPL). Berbagai bentuk penyelenggaraan, mulai dari kursus keterampilan, pelatihan vokasional, pendidikan komunitas, hingga pembelajaran daring, menunjukkan adaptasi yang tinggi terhadap kebutuhan peserta dan kondisi sosial setempat. Kelompok sasaran yang luas dan beragam, termasuk orang dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan formal, komunitas adat, penyandang disabilitas, serta masyarakat umum yang mengedepankan pembelajaran sepanjang hayat, memperkuat karakter inklusif dari sistem PNF ini.

Namun, seperti halnya sistem pendidikan Nonformal lainnya, PNF di Tasmania juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti variabilitas kualitas antara penyelenggara, keterbatasan pengakuan formal, serta isu pendanaan dan akses teknologi di wilayah terpencil. Karakteristik khas PNF Tasmania yang menonjolkan fleksibilitas, partisipasi komunitas, dan orientasi pada keterampilan praktis menjadi kekuatan utama dalam mengatasi sebagian tantangan tersebut.

BAB XIII

Pendidikan Nonformal di Queensland (Australia)

Queensland, Australia, ketiga bentuk pendidikan tersebut diterapkan secara terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, produktif, dan inklusif. Pendidikan formal di Queensland meliputi sistem sekolah negeri dan swasta, serta perguruan tinggi yang diatur oleh Departemen Pendidikan Queensland. Sementara itu, pendidikan Nonformal memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan keterampilan vokasional dan pemberdayaan komunitas, terutama melalui lembaga-lembaga seperti TAFE Queensland dan berbagai program pemerintah daerah. Pendidikan Nonformal di Queensland mengedepankan prinsip inklusivitas, fleksibilitas, dan relevansi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, sekaligus menyediakan akses belajar bagi kelompok-kelompok marginal dan dewasa yang ingin meningkatkan kapasitas diri (Queensland Department of Education, 2021).

Seiring perkembangan ekonomi dan teknologi yang cepat, kebutuhan akan pembelajaran yang adaptif dan berkelanjutan semakin meningkat. Pendidikan Nonformal menjadi jembatan yang menghubungkan pendidikan formal dengan kebutuhan

nyata masyarakat dan pasar kerja, serta mendukung transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai pendidikan Nonformal di Queensland sangat penting untuk memahami mekanisme, kebijakan, dan tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan ini, serta sebagai landasan untuk pengembangan strategi yang efektif dan inklusif.

Buku ini akan membahas secara komprehensif pendidikan Nonformal di Queensland, mulai dari sejarah, kebijakan, bentuk penyelenggaraan, kelompok sasaran, penyelenggara, metode, karakteristik, pendanaan, hingga kelebihan dan kelemahannya. Selanjutnya, akan dilakukan studi komparatif dengan Indonesia, Jepang, dan Kongo untuk memberikan gambaran global mengenai praktik dan dinamika pendidikan Nonformal di berbagai konteks negara.

A. Sejarah PNF di Queensland

Pendidikan Nonformal di Queensland memiliki akar sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan sosial dan ekonomi wilayah tersebut sejak masa kolonial hingga era modern. Awalnya, sistem pendidikan di Queensland lebih terfokus pada pendidikan formal yang berlangsung di sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial dan lembaga keagamaan. Namun, kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, terutama kelompok dewasa, komunitas terpencil, dan kelompok marginal, mendorong lahirnya berbagai inisiatif pendidikan Nonformal yang bertujuan memperluas akses dan memberikan pembelajaran yang lebih fleksibel.

Sejak abad ke-19, masyarakat Queensland telah mengembangkan berbagai bentuk pendidikan alternatif di luar sistem sekolah formal. Pendidikan Nonformal ini berawal dari inisiatif komunitas lokal, gereja, dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan pelatihan keterampilan, kelas literasi, serta pendidikan kejuruan secara informal. Pada masa itu, akses pendidikan bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dan

terpencil sangat terbatas, sehingga pendidikan Nonformal menjadi solusi penting untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Pada pertengahan abad ke-20, terutama pasca Perang Dunia II, Queensland mulai mengalami percepatan industrialisasi dan urbanisasi yang membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan kebutuhan tenaga kerja. Pemerintah mulai melihat pentingnya pengembangan keterampilan dan pelatihan vokasional sebagai upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja. Pada periode ini, pendidikan Nonformal berkembang menjadi lebih terorganisir, terutama dengan pendirian Technical and Further Education (TAFE) di Queensland. TAFE menyediakan berbagai program pelatihan kejuruan dan kursus keterampilan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang terus berubah.

Seiring dengan munculnya konsep pembelajaran sepanjang hayat pada tahun 1970-an dan 1980-an yang digaungkan oleh UNESCO dan organisasi internasional lainnya, pendidikan Nonformal di Queensland semakin mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa pembelajaran tidak terbatas pada jenjang pendidikan formal saja, melainkan merupakan proses berkelanjutan yang berlangsung sepanjang hidup seseorang. Oleh karena itu, pendidikan Nonformal di Queensland dikembangkan sebagai mekanisme untuk mendukung pembelajaran dewasa, pemberdayaan komunitas, dan integrasi sosial.

Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, pendidikan Nonformal di Queensland semakin didukung oleh kebijakan pemerintah yang progresif dan pendanaan yang memadai. Pemerintah Queensland melalui Departemen Pendidikan dan Pelatihan memperkuat peran lembaga-lembaga seperti TAFE dan komunitas pendidikan dalam menyediakan program pelatihan yang inklusif, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik dan pasar tenaga kerja. Selain itu, penggunaan teknologi informasi mulai diintegrasikan ke dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal, memungkinkan akses

pembelajaran yang lebih luas, termasuk bagi masyarakat di daerah terpencil.

Peran organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta juga semakin signifikan dalam sejarah pendidikan Nonformal di Queensland. Mereka turut berkontribusi dalam menyelenggarakan program-program pemberdayaan yang berfokus pada kelompok-kelompok marginal seperti komunitas adat Aborigin dan Torres Strait Islanders, pengungsi, imigran, serta penyandang disabilitas. Pendekatan berbasis komunitas ini memperkaya ragam program dan meningkatkan relevansi pendidikan Nonformal dengan konteks sosial budaya lokal.

B. Kebijakan Penyelenggaraan PNF di Queensland

Pendidikan Nonformal (PNF) di Queensland diatur dan didukung oleh kebijakan yang komprehensif dan progresif, yang dirancang untuk memastikan akses yang luas, kualitas yang terjaga, serta relevansi dengan kebutuhan sosial-ekonomi dan pasar kerja. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang lebih luas yang diadopsi oleh pemerintah negara bagian Queensland dan didukung oleh pemerintah federal Australia. Penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Queensland didasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*), inklusivitas, dan pengembangan keterampilan yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Salah satu kebijakan utama yang memandu penyelenggaraan PNF di Queensland adalah integrasi pendidikan Nonformal ke dalam sistem pelatihan vokasional yang lebih luas melalui lembaga Technical and Further Education (TAFE) Queensland. TAFE Queensland memainkan peran sentral dalam menyediakan program pelatihan keterampilan yang diakui secara nasional, menghubungkan pendidikan Nonformal dengan sertifikasi resmi yang diakui oleh industri dan pemerintah (Queensland Department of Education, 2021). Kebijakan ini memastikan bahwa pendidikan Nonformal bukan

hanya alternatif pendidikan, tetapi juga jalur yang valid untuk pengembangan karir dan peningkatan kemampuan tenaga kerja.

Selain itu, kebijakan Recognition of Prior Learning (RPL) juga sangat penting dalam konteks pendidikan Nonformal di Queensland. RPL memberikan mekanisme bagi individu untuk mendapatkan pengakuan atas keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman kerja atau pembelajaran Nonformal sebelumnya tanpa harus mengikuti seluruh proses pendidikan formal (Australian Government Department of Education, Skills and Employment, 2020). Kebijakan ini memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kompetensinya secara fleksibel.

Pemerintah Queensland juga mengembangkan kebijakan untuk memastikan bahwa pendidikan Nonformal dapat diakses oleh kelompok-kelompok marginal dan rentan, termasuk komunitas adat Aborigin dan Torres Strait Islanders, penyandang disabilitas, imigran, dan pengungsi. Kebijakan inklusivitas ini diwujudkan melalui program-program khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan budaya dan sosial kelompok tersebut, serta menyediakan dukungan pendampingan dan fasilitas yang ramah bagi mereka (Queensland Government, 2022). Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjamin kesetaraan kesempatan belajar bagi semua warga.

Pendanaan pendidikan Nonformal di Queensland juga diatur secara strategis melalui anggaran negara bagian dan federal yang dialokasikan khusus untuk mendukung program pelatihan vokasional, peningkatan literasi dewasa, dan pemberdayaan masyarakat. Pendanaan ini tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi juga melibatkan kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil, sehingga memungkinkan penyelenggaraan program yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan lokal (Productivity Commission, 2021).

Selain itu, kebijakan penyelenggaraan PNF di Queensland menekankan pentingnya kemitraan lintas sektor dan kolaborasi antar lembaga pendidikan, industri, dan komunitas. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sinergi yang efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan Nonformal, memastikan bahwa program yang diselenggarakan sesuai dengan tuntutan pasar kerja dan kebutuhan sosial (Billett, 2019). Kolaborasi ini juga mendukung inovasi dalam metode pembelajaran dan penggunaan teknologi untuk memperluas akses pendidikan.

Lebih lanjut, pemerintah Queensland memberikan perhatian pada pengembangan kapasitas tenaga pendidik dan fasilitator pendidikan Nonformal melalui program pelatihan profesional dan sertifikasi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan efektivitas pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memperoleh manfaat maksimal dari program yang disediakan (Oliver, 2020).

C. Bentuk Penyelenggaraan PNF di Queensland

Pendidikan Nonformal (PNF) di Queensland diselenggarakan dalam berbagai bentuk yang beragam, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta konteks sosial dan ekonomi yang ada. Bentuk penyelenggaraan ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas, inklusivitas, dan relevansi yang tinggi sehingga dapat menjangkau berbagai kelompok sasaran, mulai dari dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan hingga komunitas marginal. Berikut adalah beberapa bentuk utama penyelenggaraan pendidikan Nonformal yang berkembang di Queensland.

1. Kursus dan Pelatihan Vokasional

Bentuk penyelenggaraan PNF yang paling dominan di Queensland adalah kursus dan pelatihan vokasional yang diselenggarakan oleh Technical and Further Education (TAFE) Queensland dan lembaga pelatihan terdaftar (Registered

Training Organizations -RTOs). Kursus ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan praktis peserta didik di bidang-bidang spesifik seperti teknologi informasi, perawatan kesehatan, konstruksi, dan perhotelan. Program ini dilengkapi dengan sertifikasi yang diakui secara nasional, yang meningkatkan peluang kerja dan mobilitas peserta dalam pasar tenaga kerja (Queensland Department of Education, 2021). Keunggulan dari bentuk ini adalah penekanan pada praktik langsung dan penerapan keterampilan sesuai kebutuhan industri.

2. Pendidikan Literasi dan Numerasi Dewasa

Literasi dan numerasi menjadi aspek fundamental dalam pendidikan Nonformal di Queensland, terutama untuk kelompok dewasa yang belum menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Program-program ini sering diselenggarakan melalui komunitas lokal, pusat pembelajaran masyarakat, dan organisasi nirlaba. Pendekatan yang digunakan biasanya sangat partisipatif dan adaptif, memperhatikan latar belakang budaya dan kebutuhan spesifik peserta, termasuk imigran dan komunitas adat Aborigin dan Torres Strait Islanders (Australian Bureau of Statistics, 2019). Bentuk ini tidak hanya meningkatkan kemampuan dasar tetapi juga membuka peluang lebih luas untuk pembelajaran dan pemberdayaan lebih lanjut.

3. Program Pemberdayaan Komunitas dan Pendidikan Sosial

Di Queensland, banyak program PNF yang fokus pada pemberdayaan sosial dan pengembangan kapasitas komunitas. Bentuk ini mencakup pelatihan kepemimpinan, pendidikan kesehatan, pengembangan keterampilan hidup, serta program integrasi sosial untuk kelompok marginal. Penyelenggaraan bentuk ini biasanya dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah dengan dukungan pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup peserta melalui pendekatan holistik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya (Fitzpatrick & Sterling, 2021).

4. Pembelajaran Jarak Jauh dan Digital

Dengan kemajuan teknologi informasi, pendidikan Nonformal di Queensland semakin banyak mengadopsi pembelajaran jarak jauh dan metode digital. Program online memungkinkan peserta dari daerah terpencil dan dengan keterbatasan waktu untuk tetap mengakses pendidikan berkualitas. Pendekatan blended learning yang mengombinasikan pembelajaran tatap muka dan daring juga banyak digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas proses pembelajaran. Penggunaan teknologi ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong digitalisasi pendidikan sebagai bagian dari strategi inklusivitas dan pemerataan akses (Oliver, 2020).

5. Workshop, Seminar, dan Pelatihan Singkat

Bentuk penyelenggaraan lain yang populer adalah workshop, seminar, dan pelatihan singkat yang bersifat tematik dan intensif. Kegiatan ini biasanya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dengan fokus pada pengembangan keterampilan atau pengetahuan tertentu, seperti kewirausahaan, teknologi baru, atau pengembangan soft skills. Bentuk ini banyak digunakan oleh sektor swasta, lembaga profesional, dan komunitas untuk memberikan pelatihan yang cepat dan relevan sesuai kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi.

D. Kelompok Sasaran PNF di Queensland

Pendidikan Nonformal di Queensland dirancang untuk melayani beragam kelompok sasaran yang memiliki kebutuhan belajar yang spesifik dan tidak selalu dapat terpenuhi oleh sistem pendidikan formal. Fokus utama dari pendidikan Nonformal adalah menyediakan akses pendidikan yang inklusif, fleksibel, dan relevan bagi semua kalangan, terutama bagi mereka yang selama ini kurang terlayani oleh pendidikan formal.

Salah satu kelompok sasaran utama adalah orang dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan formal atau mereka yang ingin meningkatkan keterampilan dan kualifikasi mereka untuk memasuki atau bertahan di pasar kerja. Kelompok ini meliputi pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan teknis maupun non-teknis, serta individu yang membutuhkan pelatihan ulang atau pengembangan karir. Pendidikan Nonformal memberikan fleksibilitas waktu dan metode yang memungkinkan mereka belajar sambil tetap bekerja.

Komunitas adat Aborigin dan Torres Strait Islanders merupakan kelompok penting yang menjadi fokus program pendidikan Nonformal di Queensland. Program yang disesuaikan dengan kebutuhan budaya dan sosial mereka dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan, literasi, serta mendukung pelestarian budaya dan integrasi sosial. Pendekatan yang sensitif budaya ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pendidikan dan memberdayakan komunitas adat secara berkelanjutan.

Imigran dan pengungsi juga termasuk kelompok sasaran utama. Program literasi bahasa Inggris sebagai bahasa kedua (ESL), pelatihan keterampilan kerja, serta program integrasi sosial disediakan untuk membantu mereka beradaptasi dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Pendidikan Nonformal menjadi sarana vital dalam mempercepat proses integrasi sosial-ekonomi mereka.

Kelompok penyandang disabilitas juga menjadi perhatian khusus dalam pendidikan Nonformal di Queensland. Program-program dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan mereka melalui pendekatan inklusif dan penggunaan teknologi asistif, yang memungkinkan peningkatan kemandirian dan kualitas hidup.

Selain itu, pemuda yang berada di luar jalur pendidikan formal dan kelompok marginal lainnya juga menjadi sasaran program Nonformal yang fokus pada pengembangan keterampilan hidup, kewirausahaan, dan partisipasi sosial. Dengan melayani kelompok-kelompok ini, pendidikan

Nonformal di Queensland berperan strategis dalam meningkatkan kesetaraan kesempatan dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

E. Penyelenggara PNF di Queensland

Pendidikan Nonformal di Queensland diselenggarakan oleh berbagai aktor yang memainkan peran krusial dalam menyediakan program pembelajaran yang inklusif, fleksibel, dan relevan. Keberagaman penyelenggara ini memungkinkan pendidikan Nonformal dapat menjangkau berbagai kelompok sasaran dengan kebutuhan yang berbeda-beda, sekaligus menyesuaikan dengan konteks sosial-ekonomi lokal.

Pemerintah Queensland, terutama melalui Departemen Pendidikan dan Pelatihan, merupakan penyelenggara utama pendidikan Nonformal. Pemerintah bertanggung jawab dalam merancang kebijakan, menetapkan standar kualitas, menyediakan pendanaan, dan mengawasi pelaksanaan program-program Nonformal. Salah satu peran penting pemerintah adalah mengelola Technical and Further Education (TAFE) Queensland yang merupakan lembaga utama penyelenggara pelatihan vokasional dan kursus keterampilan yang diakui secara nasional. TAFE menyediakan berbagai program pendidikan Nonformal yang mendukung pengembangan keterampilan teknis dan profesional peserta didik.

Selain pemerintah, sektor swasta juga berperan signifikan sebagai penyelenggara pendidikan Nonformal di Queensland. Banyak perusahaan dan organisasi industri yang menyelenggarakan pelatihan kerja, workshop, dan program pengembangan sumber daya manusia secara internal maupun bekerjasama dengan lembaga pelatihan. Peran sektor swasta ini sangat penting dalam menjamin bahwa program pendidikan Nonformal relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan perkembangan teknologi.

Organisasi masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah (LSM) juga menjadi penyelenggara yang vital, khususnya dalam

mengelola program pemberdayaan komunitas, pendidikan literasi, dan pelatihan sosial yang menargetkan kelompok marginal seperti komunitas adat, imigran, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. LSM dan komunitas lokal sering menggunakan pendekatan partisipatif yang berbasis kebutuhan masyarakat setempat sehingga program-programnya lebih responsif dan berkelanjutan.

Selain itu, institusi pendidikan tinggi dan perguruan tinggi juga turut berkontribusi melalui penyediaan kursus singkat, pelatihan profesional, dan program pendidikan masyarakat. Kolaborasi antar berbagai penyelenggara ini menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan ekosistem pendidikan Nonformal yang dinamis dan berdaya guna.

F. Karakteristik penyelenggaraan PNF di Queensland

1. Fleksibilitas Tinggi

Salah satu ciri khas utama pendidikan Nonformal di Queensland adalah fleksibilitasnya dalam hal waktu, tempat, dan metode pembelajaran. Program-program PNF dirancang agar dapat diakses oleh berbagai kelompok peserta, termasuk mereka yang bekerja penuh waktu, tinggal di daerah terpencil, atau memiliki keterbatasan waktu belajar. Fleksibilitas ini memungkinkan peserta untuk menyesuaikan jadwal pembelajaran dengan aktivitas keseharian mereka. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan beragam, mulai dari tatap muka, pembelajaran daring (online learning), hingga metode blended learning, yang menggabungkan keduanya. Pendekatan ini membuka peluang belajar yang lebih luas dan efektif, terutama bagi kelompok yang sulit mengakses pendidikan formal.

2. Inklusivitas dan Sensitivitas Budaya

Pendidikan Nonformal di Queensland sangat menekankan inklusivitas, terutama dalam melayani kelompok-kelompok marginal seperti komunitas adat Aborigin dan Torres Strait

Islanders, imigran, penyandang disabilitas, dan pemuda yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Program-program PNF dirancang dengan pendekatan yang sensitif budaya, yang memperhatikan nilai-nilai, bahasa, dan konteks sosial budaya peserta didik. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pembelajaran tetapi juga memperkuat pemberdayaan komunitas dan pelestarian identitas budaya. Pemerintah Queensland serta lembaga penyelenggara bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengembangkan program yang relevan dan bermakna bagi peserta.

3. Relevansi dengan Kebutuhan Pasar Kerja dan Masyarakat

Karakteristik penting lainnya adalah orientasi kuat pada relevansi program dengan kebutuhan nyata pasar tenaga kerja dan komunitas. Pendidikan Nonformal di Queensland dirancang untuk mengembangkan keterampilan yang langsung dapat diterapkan di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Kurikulum dan materi pembelajaran disusun berdasarkan analisis tren industri dan kebutuhan ekonomi regional, sehingga lulusan program memiliki peluang lebih baik untuk memasuki pasar kerja dan meningkatkan produktivitas mereka. Selain itu, program-program pemberdayaan komunitas menargetkan pengembangan kapasitas sosial dan ekonomi secara holistik.

4. Pendekatan Partisipatif dan Berbasis Komunitas

PNF di Queensland mengadopsi pendekatan partisipatif yang melibatkan komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Pendekatan ini memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Partisipasi aktif komunitas juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan program, sehingga pendidikan Nonformal bukan sekadar layanan eksternal tetapi menjadi bagian dari pembangunan komunitas yang berkelanjutan.

5. Pengakuan Hasil Belajar dan Integrasi Sistem

Berbeda dengan banyak negara, pendidikan Nonformal di Queensland memiliki mekanisme pengakuan hasil belajar yang cukup maju, seperti Recognition of Prior Learning (RPL) dan sistem sertifikasi vokasional yang diintegrasikan dengan sistem pendidikan formal. Mekanisme ini memungkinkan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan Nonformal atau pengalaman kerja diakui secara resmi, membuka jalur untuk pengembangan karir dan pendidikan lebih lanjut. Hal ini juga meningkatkan motivasi belajar dan menghubungkan PNF dengan ekosistem pendidikan yang lebih luas.

6. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pembelajaran

Queensland juga dikenal sebagai wilayah yang mengadopsi teknologi dan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal. Penggunaan platform digital, pembelajaran daring, serta teknologi komunikasi modern memungkinkan pendidikan Nonformal menjangkau wilayah geografis yang luas, termasuk daerah terpencil. Selain itu, teknologi juga digunakan untuk meningkatkan interaktivitas dan personalisasi pembelajaran, menjadikan pengalaman belajar lebih efektif dan menyenangkan.

G. Sumber Pendanaan PNF di Queensland

Pendanaan merupakan aspek vital dalam penyelenggaraan pendidikan Nonformal (PNF) di Queensland, karena kualitas dan keberlanjutan program sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya finansial yang memadai. Sistem pendanaan PNF di Queensland mengadopsi model multi-sumber, yang melibatkan kontribusi dari pemerintah negara bagian dan federal, sektor swasta, serta partisipasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa pendidikan Nonformal dapat diakses secara luas, berkualitas, dan berkelanjutan.

Pemerintah Queensland melalui Departemen Pendidikan dan Pelatihan menyediakan anggaran signifikan untuk mendukung berbagai program PNF, terutama yang berorientasi pada peningkatan keterampilan vokasional, literasi dewasa, serta pemberdayaan kelompok marginal. Dana publik ini dialokasikan untuk lembaga-lembaga seperti Technical and Further Education (TAFE) Queensland yang menjadi tulang punggung pelaksanaan pelatihan vokasional dan kursus keterampilan Nonformal. Pemerintah juga memberikan subsidi langsung kepada peserta didik untuk mengurangi beban biaya dan meningkatkan partisipasi (Queensland Department of Education, 2021). Selain itu, pemerintah federal Australia berperan dalam menyediakan dana melalui berbagai skema nasional seperti National Skills Agreement dan program pembangunan tenaga kerja, yang secara khusus mendukung pengembangan keterampilan dan pelatihan Nonformal di seluruh negara bagian, termasuk Queensland. Dana ini sering kali dialokasikan secara kompetitif kepada lembaga penyelenggara PNF berdasarkan kapasitas dan relevansi program terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja (Australian Government Department of Education, Skills and Employment, 2020).

Kontribusi dari sektor swasta juga penting dalam sistem pendanaan PNF di Queensland. Perusahaan-perusahaan dan asosiasi industri sering kali berinvestasi dalam pelatihan karyawan dan program pengembangan keterampilan melalui kemitraan dengan lembaga pendidikan Nonformal. Sponsorship dan dukungan keuangan dari sektor swasta ini membantu menjembatani kebutuhan pelatihan khusus yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar, sehingga memastikan relevansi program yang ditawarkan (Productivity Commission, 2021).

Partisipasi masyarakat dan kontribusi peserta didik, baik dalam bentuk iuran kursus yang terjangkau maupun sumbangan sukarela, juga menjadi bagian dari pendanaan PNF. Meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan sumber pemerintah dan swasta, kontribusi ini menambah diversifikasi sumber dana dan

meningkatkan rasa kepemilikan peserta terhadap proses pembelajaran.

Selain itu, lembaga non-pemerintah (LSM) dan donor internasional terkadang menyediakan dana hibah untuk program-program khusus yang menargetkan kelompok rentan, seperti komunitas adat, pengungsi, dan penyandang disabilitas. Dana hibah ini biasanya bersifat terbatas waktu dan fokus pada proyek tertentu, sehingga membutuhkan pengelolaan yang baik untuk memastikan keberlanjutan dampak program.

H. Kelebihan dan Kelemahan PNF di Queensland

Pendidikan Nonformal di Queensland memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya sebagai komponen penting dalam sistem pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Salah satu keunggulan utamanya adalah fleksibilitas tinggi yang memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan waktu dan kebutuhan mereka. Fleksibilitas ini sangat krusial bagi kelompok dewasa yang memiliki tanggung jawab pekerjaan dan keluarga, sehingga mereka tetap dapat mengakses pembelajaran tanpa harus meninggalkan aktivitas utama. Selain itu, pendidikan Nonformal di Queensland sangat inklusif, menyediakan akses kepada kelompok-kelompok marginal seperti komunitas adat Aborigin dan Torres Strait Islanders, penyandang disabilitas, imigran, dan masyarakat di wilayah terpencil. Program-programnya dirancang dengan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan budaya dan sosial peserta, sehingga memperkuat pemberdayaan dan integrasi sosial. Relevansi pendidikan Nonformal dengan kebutuhan pasar kerja juga menjadi kelebihan penting, di mana kurikulum dan pelatihan disesuaikan secara dinamis berdasarkan permintaan industri dan tren teknologi, sehingga lulusan program memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, mekanisme pengakuan hasil belajar melalui Recognition of Prior Learning (RPL) memberikan nilai tambah dengan memungkinkan peserta

mendapatkan pengakuan resmi atas keterampilan dan pengalaman yang diperoleh, memperkuat motivasi belajar dan keterhubungan dengan sistem pendidikan formal.

Namun, di balik kelebihan tersebut, pendidikan Nonformal di Queensland juga menghadapi sejumlah kelemahan yang perlu menjadi perhatian. Salah satu tantangan utama adalah ketidakmerataan akses, terutama bagi masyarakat di daerah sangat terpencil yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi dan konektivitas internet. Hal ini membatasi efektivitas program pembelajaran daring yang menjadi salah satu metode utama PNF. Variasi kualitas antar penyelenggara pendidikan Nonformal juga menjadi masalah, meskipun ada standar nasional, implementasi dan pengawasan belum selalu konsisten sehingga hasil pembelajaran dapat bervariasi. Keterbatasan pendanaan jangka panjang menjadi kendala lain, terutama bagi program-program pemberdayaan komunitas dan kelompok marginal yang sering bergantung pada dana proyek atau hibah dengan masa terbatas. Selain itu, beberapa peserta menghadapi tantangan dalam menjaga motivasi dan konsistensi belajar, terutama ketika pendidikan Nonformal tidak menghasilkan pengakuan formal yang jelas atau imbalan langsung, sehingga tingkat penyelesaian program bisa rendah. Terakhir, kompleksitas administrasi dan regulasi yang mengatur penyelenggaraan PNF kadang menjadi hambatan bagi lembaga kecil atau komunitas lokal untuk berpartisipasi secara optimal.

I. Analisis Studi Komparatif PNF Queensland dengan Negara Lain

Di Queensland, pendidikan Nonformal berkembang dengan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah negara bagian dan federal. Sistem PNF di Queensland terintegrasi dalam strategi pembangunan sumber daya manusia melalui lembaga seperti TAFE, yang menyediakan pelatihan vokasional dan keterampilan yang diakui secara nasional. Pendanaan yang

berkelanjutan, pengakuan hasil belajar lewat mekanisme Recognition of Prior Learning (RPL), serta kolaborasi multi-sektor antara pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi pilar utama keberhasilan PNF di Queensland (Queensland Department of Education, 2021). Fleksibilitas, inklusivitas, dan pemanfaatan teknologi digital memperluas akses pembelajaran hingga ke daerah terpencil.

Sebaliknya, Indonesia mengembangkan PNF dengan fokus kuat pada literasi dewasa dan pendidikan keterampilan dasar, melalui program-program seperti Paket A, B, dan C, serta pelatihan vokasional yang tersebar di berbagai daerah. Namun, koordinasi kebijakan yang masih fragmented, keterbatasan pendanaan, serta disparitas akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi tantangan utama. Meskipun demikian, Indonesia menunjukkan kemajuan dalam mengintegrasikan teknologi pembelajaran dan memperluas akses ke kelompok marginal seperti perempuan dan komunitas adat (Yusuf, 2020).

Jepang memiliki sistem pendidikan Nonformal yang sangat terstruktur dan berorientasi teknologi. Pendidikan Nonformal di Jepang banyak diselenggarakan oleh lembaga swasta dan komunitas lokal dengan dukungan pemerintah yang kuat, khususnya melalui program pelatihan keterampilan berbasis teknologi tinggi dan sistem sertifikasi yang ketat. Jepang menekankan pembelajaran sepanjang hayat dan pengakuan hasil belajar melalui sistem yang terintegrasi dengan baik, sehingga PNF berkontribusi besar dalam menjaga daya saing tenaga kerja di pasar global (OECD, 2018).

Kongo menghadapi tantangan berat dalam pengembangan pendidikan Nonformal akibat kondisi sosial-politik yang tidak stabil, keterbatasan infrastruktur, serta kekurangan pendanaan. Pendidikan Nonformal di Kongo banyak diselenggarakan oleh organisasi internasional dan LSM yang fokus pada literasi dasar dan pemberdayaan masyarakat. Namun, kurangnya koordinasi kebijakan, minimnya sumber daya, dan akses terbatas membuat PNF di Kongo belum dapat berkembang optimal sebagai sarana pengembangan kapasitas sumber daya manusia (Zani, 2017).

Secara keseluruhan, Queensland menonjol dengan sistem PNF yang komprehensif dan terintegrasi, sementara Indonesia dan Jepang menunjukkan pendekatan yang berkembang dengan kekuatan masing-masing, dan Kongo masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Studi ini menegaskan pentingnya dukungan kebijakan yang kuat, pendanaan berkelanjutan, serta inovasi dalam metode pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pendidikan Nonformal di berbagai konteks.

Pendidikan Nonformal di Queensland merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai pelengkap pendidikan formal dan menyediakan alternatif pembelajaran yang fleksibel dan inklusif bagi berbagai kelompok masyarakat. Sejarahnya yang berkembang dari inisiatif komunitas hingga menjadi bagian integral dari kebijakan pemerintah menunjukkan bagaimana PNF di Queensland telah bertransformasi untuk menjawab kebutuhan sosial-ekonomi yang terus berubah. Kebijakan pemerintah yang kuat, terutama melalui dukungan kepada lembaga TAFE dan mekanisme pengakuan hasil belajar seperti Recognition of Prior Learning (RPL), memberikan fondasi yang kokoh.

Bentuk penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Queensland sangat beragam, mencakup kursus vokasional, pelatihan keterampilan, pendidikan literasi, program pemberdayaan komunitas, serta pembelajaran daring. Fleksibilitas metode pembelajaran memungkinkan partisipasi luas dari berbagai kelompok sasaran, termasuk orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan, komunitas adat, imigran, penyandang disabilitas, dan pemuda yang membutuhkan pengembangan kapasitas. Penyelenggara pendidikan Nonformal yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat sipil, dan komunitas lokal menciptakan ekosistem yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Karakteristik unik pendidikan Nonformal di Queensland meliputi fleksibilitas tinggi, sensitivitas budaya, relevansi dengan

kebutuhan pasar kerja, partisipasi komunitas, serta pemanfaatan teknologi digital. Namun, pendidikan Nonformal juga menghadapi tantangan seperti ketidakmerataan akses, variasi kualitas penyelenggara, keterbatasan pendanaan, dan motivasi peserta yang bervariasi. Pendanaan yang berasal dari berbagai sumber, termasuk pemerintah negara bagian dan federal, sektor swasta, serta masyarakat dan donor.

Dalam studi komparatif dengan Indonesia, Jepang, dan Kongo, Queensland menonjol dengan sistem PNF yang terintegrasi dan didukung kebijakan kuat serta mekanisme pengakuan hasil belajar yang maju. Indonesia dan Jepang menunjukkan pendekatan yang berkembang dan beradaptasi dengan kondisi masing-masing, sementara Kongo masih menghadapi hambatan struktural yang cukup berat. Studi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pendidikan Nonformal sangat bergantung pada dukungan kebijakan, sumber daya, inovasi pembelajaran, serta kemitraan multi-sektor.

[illegible]

BAB XIV

ANALISIS

PERBANDINGAN DAN

REKOMENDASI

Pendidikan Nonformal (PNF) telah menjadi komponen vital dalam sistem pendidikan di seluruh dunia, memainkan peran strategis sebagai pelengkap, penambah, sekaligus pengganti pendidikan formal. PNF hadir untuk mengakomodasi kebutuhan individu dan masyarakat yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh pendidikan formal, baik karena keterbatasan akses, waktu, biaya, maupun kebutuhan akan keterampilan yang lebih kontekstual dan praktis. Melalui pendidikan Nonformal, individu diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan diri secara pribadi, sosial, dan profesional, serta untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas masyarakat secara keseluruhan.

Studi komparatif yang dilakukan terhadap 12 negara dan wilayah Indonesia, Jepang, Filipina, Turki, Italia, Belanda, Kenya, Mesir, Kongo, Victoria (Australia), Tasmania (Australia), dan Queensland (Australia) menunjukkan bahwa setiap negara

memiliki pendekatan yang unik dalam mengembangkan, mengelola, dan mengimplementasikan pendidikan Nonformal. Di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Filipina, pendidikan Nonformal berkembang pesat sebagai respons atas tantangan pemerataan pendidikan formal dan kebutuhan masyarakat akan pembelajaran yang lebih fleksibel dan relevan dengan kondisi sosial-budaya setempat

Di Indonesia, misalnya, PNF berperan penting dalam menjangkau masyarakat di daerah-daerah pelosok yang belum terjangkau pendidikan formal, serta memberikan pelatihan keterampilan kerja yang langsung dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, di negara-negara maju seperti Belanda, konsep *lifelong learning* atau pembelajaran sepanjang hayat menjadi landasan utama dalam pengembangan pendidikan Nonformal. Pemerintah Belanda secara aktif mendorong masyarakat untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui berbagai program vokasional, kursus keterampilan, dan pelatihan yang dirancang agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang dinamis

Pusat-pusat pendidikan regional di Belanda, seperti ROC (Regional Education Centers), menyediakan berbagai program yang tidak hanya meningkatkan kemampuan profesional, tetapi juga mendukung integrasi sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin beragam. Hal serupa juga terlihat di Australia, di mana wilayah seperti Victoria, Tasmania, dan Queensland mengembangkan sistem pendidikan Nonformal yang adaptif terhadap kebutuhan lokal, termasuk pelatihan kerja, pendidikan bagi masyarakat adat, dan program pemberdayaan komunitas.

Negara-negara di Afrika seperti Kenya, Mesir, dan Kongo memanfaatkan pendidikan Nonformal untuk mengatasi tantangan buta huruf, meningkatkan keterampilan dasar, serta memberdayakan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Di Jepang dan Italia, pendidikan Nonformal juga diintegrasikan dengan sistem pendidikan formal sebagai upaya memperkuat pembelajaran sepanjang hayat dan

menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta globalisasi.

Dari hasil studi komparatif ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pendidikan Nonformal sangat bergantung pada kemampuan setiap negara dalam merancang program yang adaptif dan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakatnya. Dukungan kebijakan pemerintah, keterlibatan masyarakat, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem pendidikan Nonformal yang inklusif, relevan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan Nonformal tidak hanya menjadi solusi alternatif, tetapi juga motor penggerak utama dalam menciptakan masyarakat pembelajar yang siap menghadapi tantangan zaman.

Analisis ini bertujuan untuk menggalikan kesamaan dan perbedaan mendasar di antara negara-negara tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan serta tantangan yang dihadapi, dan menyajikan rekomendasi strategis yang dapat membantu pengembangan PNF di Indonesia maupun negara-negara lain yang memiliki karakteristik serupa.

A. Kesamaan Sistem Pendidikan Nonformal Antar Negara

Meskipun latar sosial, ekonomi, dan budaya setiap negara sangat beragam, terdapat beberapa kesamaan mendasar dalam pelaksanaan Pendidikan Nonformal (PNF) yang dapat diamati secara global. Kesamaan ini muncul karena pada dasarnya PNF dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat dalam hal pendidikan yang fleksibel, inklusif, dan relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Salah satu kesamaan utama adalah fokus pada pemberdayaan individu dan komunitas melalui pendekatan pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual, yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan praktis serta meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi mereka.

Selain itu, hampir di semua negara, PNF menekankan pentingnya aksesibilitas dan fleksibilitas waktu belajar, sehingga

dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena keterbatasan waktu, biaya, atau lokasi geografis. Program-program PNF juga cenderung bersifat non-hierarkis dan berorientasi pada kebutuhan nyata peserta, seperti pelatihan keterampilan kerja, literasi dasar, dan pengembangan kewirausahaan. Hal ini terlihat dalam berbagai konteks, mulai dari negara berkembang seperti Indonesia dan Turki hingga negara maju seperti Italia, di mana PNF menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan

Kesamaan lain yang dapat diamati adalah peran aktif komunitas dan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan PNF. Di banyak negara, keberhasilan PNF tidak lepas dari keterlibatan masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan relevansi dan efektivitas pendidikan, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan komunitas

Dengan demikian, meskipun setiap negara memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda, pelaksanaan Pendidikan Nonformal menunjukkan pola-pola kesamaan yang mencerminkan tujuan universal pendidikan itu sendiri: menyediakan kesempatan belajar yang inklusif, adaptif, dan memberdayakan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesamaan ini menjadi landasan penting dalam mengembangkan model PNF yang dapat saling belajar dan beradaptasi antarnegara, demi meningkatkan kualitas dan dampak pendidikan Nonformal secara global.

Meskipun latar sosial, ekonomi, dan budaya setiap negara sangat beragam, terdapat beberapa kesamaan mendasar dalam pelaksanaan PNF yang dapat diamati.

1. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Semua negara yang dikaji memandang pendidikan Nonformal sebagai sarana pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang terlayani oleh pendidikan formal. PNF berfokus pada peningkatan keterampilan hidup, literasi, dan partisipasi sosial-ekonomi, terutama untuk kelompok rentan seperti orang dewasa, perempuan, pekerja informal, dan komunitas pedesaan.

2. Fleksibilitas Metode Pembelajaran

Sifat fleksibel menjadi ciri khas PNF di semua negara. Baik di Jepang yang lebih teknis dan vokasional, maupun di Filipina yang mengedepankan pendekatan komunitas dan pembelajaran alternatif (Alternative Learning System), pendidikan Nonformal diselenggarakan dengan jadwal dan metode yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.

3. Kolaborasi Multi-Sektor

Keterlibatan pemerintah, lembaga swasta, NGO, dan komunitas lokal merupakan praktik umum dalam penyelenggaraan PNF. Kerja sama ini memperkuat sumber daya, memperluas akses, serta meningkatkan relevansi program dengan kebutuhan pasar kerja dan kondisi sosial setempat.

4. Fokus pada Keterampilan Praktis dan Kewirausahaan

Kurikulum PNF banyak mengandung elemen pengembangan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan, termasuk pelatihan kejuruan, kewirausahaan, teknologi, dan literasi digital. Hal ini menjadi jawaban atas kebutuhan dunia kerja yang dinamis dan tuntutan peningkatan daya saing tenaga kerja.

B. Perbedaan Karakteristik dan Tantangan

Walaupun memiliki kesamaan tujuan, PNF di masing-masing negara juga memperlihatkan perbedaan signifikan dalam hal kebijakan, pendanaan, akses, dan pengakuan.

1. Kebijakan dan Regulasi

Negara maju seperti Jepang, Italia, dan Australia (Victoria, Tasmania, Queensland) memiliki kerangka kebijakan dan regulasi yang jelas dan terintegrasi, termasuk mekanisme pengakuan hasil belajar seperti Recognition of Prior Learning (RPL). Sebaliknya, Indonesia dan Kongo masih dalam tahap pengembangan regulasi yang memadai dengan tantangan koordinasi antar lembaga dan implementasi kebijakan di daerah terpencil.

2. Pendanaan

Finlandia dan Australia menonjol dengan dukungan pendanaan yang kuat dan berkelanjutan dari pemerintah dan sektor swasta. Hal ini mendukung pengembangan infrastruktur, kualitas pengajar, dan perluasan akses. Negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, dan Kongo menghadapi keterbatasan pendanaan, ketergantungan pada dana donor, serta kesenjangan distribusi dana yang memengaruhi kualitas dan keberlanjutan program.

3. Kualitas dan Kualifikasi Tenaga Pendidik

Jepang dan Belanda memiliki standar tinggi dalam pelatihan dan sertifikasi tenaga pendidik PNF sehingga kualitas pengajaran dapat terjamin. Di Indonesia dan beberapa negara Afrika seperti Kenya dan Kongo, kualifikasi tenaga pendidik masih bervariasi dan sering kali menjadi faktor penghambat efektivitas program.

4. Teknologi dan Akses Digital

Di Tasmania dan Queensland, penggunaan teknologi digital dan pembelajaran daring telah menjadi bagian penting dalam pengembangan PNF, meski akses di daerah terpencil tetap menjadi tantangan.

Beberapa negara berkembang seperti Filipina dan Indonesia baru mulai mengintegrasikan teknologi digital secara

luas, dengan hambatan utama adalah infrastruktur dan literasi teknologi.

C. Temuan Kunci dari Studi Komparatif

1. PNF Sebagai Pilar Pendidikan Sepanjang Hayat (Lifelong Learning)

PNF bukan sekadar pelengkap pendidikan formal, melainkan bagian integral dari pembelajaran sepanjang hayat yang mendukung pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Sistem seperti ALS di Filipina dan TAFE di Queensland mengilustrasikan bagaimana PNF dapat menjadi motor penggerak literasi, keahlian, dan inklusi sosial.

2. Kontekstualisasi dan Adaptasi Program

Keberhasilan PNF sangat bergantung pada kemampuannya menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal. Pendekatan berbasis komunitas di Victoria dan Tasmania, serta penekanan pada pengembangan keterampilan pasar kerja di Jepang dan Turki, menunjukkan bagaimana adaptasi kontekstualisasi menjadi kunci efektivitas.

3. Pengakuan dan Sertifikasi Kompetensi

Pengakuan hasil belajar Nonformal melalui mekanisme sertifikasi dan akreditasi sangat penting untuk meningkatkan motivasi peserta dan memperkuat legitimasi PNF di mata dunia kerja dan pendidikan formal.

4. Kolaborasi dan Kemitraan Multi-Sektor

Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, NGO, dan komunitas menjadi faktor utama dalam pengembangan PNF yang berkualitas dan inklusif.

D. Rekomendasi Pengembangan Pendidikan Nonformal di Indonesia

Berdasarkan analisis perbandingan dengan negara-negara lain, berikut beberapa rekomendasi strategis yang dapat diadopsi untuk memperkuat PNF di Indonesia:

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi

Membangun kerangka kebijakan nasional yang lebih terpadu dan operasional, termasuk standar nasional pendidikan Nonformal yang jelas.

Memperkuat koordinasi lintas sektor dan daerah untuk mengatasi fragmentasi program dan duplikasi upaya.

2. Peningkatan Pendanaan dan Sumber Daya

Diversifikasi sumber pendanaan melalui kemitraan dengan sektor swasta, CSR, dan donor internasional. Mendorong pendanaan yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan tenaga pendidik.

3. Pengembangan Kapasitas Tenaga Pendidik

Menyediakan program pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pendidik PNF agar memiliki kompetensi profesional yang memadai.

Mengintegrasikan pengembangan profesional berkelanjutan untuk menjaga kualitas pengajaran.

4. Penerapan Teknologi Digital

Mendorong penggunaan platform pembelajaran daring untuk menjangkau daerah terpencil dan meningkatkan fleksibilitas pembelajaran.

Memberikan pelatihan literasi digital bagi peserta dan pendidik.

5. Mekanisme Pengakuan dan Sertifikasi Kompetensi

Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional dan industri, untuk meningkatkan pengakuan dan kredibilitas PNF.

6. Pendekatan Kontekstual dan Berbasis Komunitas

Memperkuat program PNF yang berbasis kebutuhan lokal dan komunitas, termasuk pelestarian budaya dan literasi digital melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan evaluasi program.

7. Mendorong Budaya Belajar Sepanjang Hayat

Memasyarakatkan nilai pembelajaran sepanjang hayat melalui kampanye, pelatihan, dan pengembangan program PNF yang relevan untuk berbagai kelompok usia.

E. Penutup

Analisis komparatif pendidikan Nonformal antar negara ini memberikan wawasan penting bahwa PNF merupakan elemen pendidikan yang sangat dinamis dan esensial dalam pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan PNF sangat tergantung pada kesesuaian program dengan konteks sosial-ekonomi, dukungan kebijakan yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor yang efektif.

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks, memiliki potensi besar untuk mengembangkan PNF yang adaptif dan transformatif dengan mengadopsi praktik terbaik dari berbagai negara sambil memperhatikan karakteristik lokal. Studi ini diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan, inovasi, dan kolaborasi yang semakin memperkuat peran PNF dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan, berdaya, dan mampu bersaing di era globalisasi.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

GLOSARIUM

Alternative Learning System (ALS)	Sistem pendidikan alternatif yang memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dan orang dewasa yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal, seperti yang diterapkan di Filipina.
Community Learning Centre (CLC)	Pusat pembelajaran masyarakat di Jepang yang menyediakan pendidikan Nonformal untuk warga belajar di komunitas lokal, dikenal juga sebagai Kominkan.
Education Formal	Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang mencakup sekolah dan perguruan tinggi dengan kurikulum baku dan sertifikasi resmi.
Education Informal	Proses pembelajaran yang berlangsung secara mandiri dalam keluarga dan lingkungan sekitar tanpa kurikulum baku atau jenjang tertentu.
Education Nonformal (PNF)	Pendidikan yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal, terorganisasi, bersifat fleksibel, dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tertentu.

Education Kesetaraan (Paket A, B, C)	Program pendidikan Nonformal di Indonesia yang memberikan kesempatan memperoleh ijazah setara SD (Paket A), SMP (Paket B), dan SMA (Paket C).
Kominkan	Institusi pendidikan sosial di Jepang yang berfungsi sebagai pusat pendidikan Nonformal, menyediakan berbagai program pembelajaran untuk masyarakat dari berbagai usia.
Lembaga Kursus dan Pelatihan	Organisasi atau tempat penyelenggaraan Pendidikan nonformal yang fokus pada pengembangan keterampilan praktis, seperti kursus komputer, bahasa, dan kejuruan.
Lifelong Learning	Konsep pembelajaran sepanjang hayat yang menekankan pentingnya pendidikan dan pembelajaran dari masa kanak-kanak hingga lanjut usia.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Program pendidikan yang ditujukan bagi anak usia sebelum sekolah dasar, dengan tujuan mendukung perkembangan holistik anak.
Pendidikan Keaksaraan	Program pendidikan nonformal yang bertujuan mengurangi angka buta huruf melalui pengajaran membaca, menulis, berhitung, dan keterampilan hidup.
Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education)	Program yang membekali individu dengan keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing.
Pendidikan Kepemudaan	Program pendidikan Nonformal yang berfokus pada pengembangan karakter, keterampilan, dan jiwa kepemimpinan

	generasi muda.
Pendidikan Pemberdayaan Perempuan	Program pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kewirausahaan dan kesehatan reproduksi.
Pendidikan Layanan Khusus	Pendidikan Nonformal yang disesuaikan untuk kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus seperti anak jalanan, buruh migran, komunitas adat, dan penyandang disabilitas.
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Lembaga pendidikan nonformal di Indonesia yang menyediakan program belajar untuk masyarakat, termasuk pendidikan kesetaraan.
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Tempat penyelenggaraan kegiatan pendidikan nonformal yang berorientasi pada pengembangan keterampilan dan minat masyarakat.
Social Education (Pendidikan Sosial)	Istilah di Jepang yang mengacu pada pendidikan nonformal dan pendidikan luar sekolah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat luas.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003	Peraturan di Indonesia yang mengatur sistem pendidikan nasional, termasuk definisi dan peran pendidikan formal, nonformal, dan informal.
Voluntary Learning (Pembelajaran Sukarela)	Kegiatan pembelajaran yang dijalankan oleh relawan atau masyarakat tanpa paksaan, sering terjadi di lembaga pendidikan nonformal seperti Kominkan.

[illegible]

INDEKS

A

akademik, v, vi, 3, 5, 17, 82, 178, 181
akses, v, 2, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 21,
22, 23, 27, 33, 42, 46, 47, 52, 54,
59, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72,
73, 76, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88,
89, 90, 91, 93, 94, 97, 105, 107,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 117,
118, 120, 125, 130, 134, 137, 138,
139, 141, 142, 143, 144, 145, 148,
149, 151, 152, 158, 159, 160, 163,
164, 166, 169, 171, 174, 178, 184,
186, 195, 198, 199, 203, 205, 206,
207, 209, 211, 212, 213, 215, 216,
217, 222, 223, 225, 226, 230, 231,
232, 235, 240, 241, 246, 247, 249,
250, 251, 252, 261, 266, 267, 268,
269, 270, 271, 272, 273, 274, 276,
278, 285, 286, 287, 289, 291, 295,
296
Altbach, 9, 311
alternatif, vi, 4, 5, 19, 21, 149, 151,
160, 174, 184, 201, 211, 212, 213,
235, 257, 272, 275, 288, 293, 295,
301

B

baku, 7, 167, 301
berjenjang, 1, 7, 11, 87, 301
Bray, 22, 45, 46, 311

C

Covid-19, 13

D

daring, 13, 123, 128, 131, 132, 133,
139, 142, 163, 255, 261, 265, 266,
268, 270, 278, 281, 283, 286, 288,
296, 298
Desentralisasi, 153
deskriptif, 6
diploma, 7, 147
disabilitas, 28, 33, 48, 50, 52, 59, 62,
68, 76, 93, 94, 101, 110, 118, 126,
127, 129, 130, 134, 136, 138, 139,
151, 152, 153, 155, 157, 159, 161,
165, 166, 171, 180, 195, 201, 237,
239, 241, 242, 245, 247, 252, 255,

258, 260, 262, 263, 265, 268, 270,
274, 275, 279, 281, 285, 288, 303
doktor, 7, 318

E

efektif, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 52, 53, 55,
57, 58, 70, 85, 88, 91, 98, 111, 142,
172, 192, 203, 206, 217, 221, 228,
253, 265, 272, 276, 281, 283, 299
Ekstrakurikuler, 17, 19
esensi, 6
evaluasi, 14, 28, 43, 53, 59, 60, 61, 63,
167, 231, 238, 282, 299

F

fasilitator, 14, 15, 55, 155, 161, 162,
163, 168, 172, 192, 215, 253, 276
fleksibel, 15, 17, 18, 27, 29, 36, 38,
40, 45, 46, 48, 50, 51, 55, 56, 57,
58, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 90, 91, 96, 98, 105, 109,
117, 121, 128, 131, 132, 142, 157,
158, 165, 169, 171, 187, 201, 205,
234, 236, 240, 243, 246, 248, 249,
252, 253, 256, 257, 266, 272, 273,
275, 278, 280, 288, 292, 293, 295,
301
formal, v, vi, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28,
29, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,

158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 180, 182,
183, 184, 185, 186, 187, 188, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 211, 212,
213, 214, 218, 219, 222, 223, 224,
225, 226, 227, 228, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281,
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288,
289, 291, 292, 293, 294, 295, 297,
298, 299, 301, 302, 303, 311, 312,
314, 315

G

global, vi, vii, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 20, 23,
65, 68, 81, 83, 86, 104, 118, 135,
138, 144, 198, 238, 251, 272, 287,
293, 294, 315
globalisasi, v, 8, 26, 90, 293, 299

H

Hasbullah, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 312
Holistik, 91

I

Ideologis, 82
ijazah, 10, 12, 230, 233, 302
individu, 6, 7, 8, 19, 26, 27, 29, 33, 36,
39, 45, 46, 47, 57, 60, 61, 73, 74,
75, 76, 85, 89, 90, 91, 92, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 105, 106,
107, 109, 113, 115, 116, 117, 118,
119, 121, 122, 123, 125, 126, 128,
129, 130, 133, 134, 139, 140, 141,
148, 149, 152, 156, 174, 177, 185,

186, 187, 197, 199, 201, 202, 205,
206, 218, 221, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 239, 240, 241, 244,
245, 250, 251, 253, 261, 269, 275,
279, 291, 293, 302
informal, 2, 7, 11, 33, 45, 46, 101,
156, 173, 183, 211, 233, 234, 253,
260, 261, 272, 295, 303, 315
inklusif, vii, 4, 9, 10, 23, 29, 33, 47, 55,
56, 66, 69, 72, 73, 76, 80, 83, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 94, 99, 101, 109,
113, 115, 117, 123, 134, 139, 141,
142, 144, 149, 150, 152, 153, 154,
158, 164, 168, 172, 196, 197, 198,
205, 213, 216, 226, 243, 245, 246,
248, 249, 251, 253, 254, 255, 256,
258, 269, 270, 271, 272, 273, 278,
279, 280, 285, 288, 293, 294, 297,
299
Instruktur, 14, 15

J

jalan pembebasan, 6

K

keterampilan, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16,
17, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30,
31, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 78, 81, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 169, 170, 171, 172, 174,
178, 179, 182, 183, 185, 187, 188,

191, 192, 193, 195, 196, 197, 198,
200, 201, 202, 203, 204, 205, 211,
212, 213, 214, 219, 222, 223, 224,
225, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 250, 251, 252, 253, 254, 255,
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262,
263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276,
277, 278, 279, 280, 282, 283, 284,
285, 286, 287, 288, 291, 292, 293,
294, 295, 297, 302, 303

Knowles, 16, 19, 20, 313

kolaborasi, 5, 13, 23, 28, 29, 42, 53,
54, 62, 70, 83, 107, 111, 138, 164,
165, 193, 205, 212, 213, 221, 253,
276, 287, 293, 299

Kolaboratif, 16, 99, 131

kolonialisme, 9

Kominkan, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 301,
302, 303, 313

komparatif, v, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 21, 23,
25, 26, 41, 43, 46, 59, 81, 82, 83,
87, 149, 193, 203, 206, 232, 270,
272, 289, 291, 293, 299

kompetensi, 7, 12, 15, 22, 23, 73, 90,
92, 102, 129, 193, 234, 250, 254,
262, 263, 268, 298

Kompetensi, iv

kompleks, 23, 272, 299

komprehensif, 2, 3, 87, 170, 254, 272,
274, 288

kontekstual, 15, 17, 21, 201, 291, 293

kredibilitas, 102, 106, 298

kurikulum, 7, 13, 14, 22, 27, 35, 45,
53, 61, 62, 68, 70, 78, 79, 81, 83,
162, 167, 174, 176, 177, 181, 184,
187, 188, 192, 197, 199, 214, 224,
233, 237, 252, 261, 269, 285, 301

kursus, 7, 10, 12, 14, 15, 19, 27, 35,
37, 40, 41, 47, 50, 51, 52, 57, 59,
60, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76,
77, 79, 86, 89, 96, 97, 98, 100, 101,

102, 103, 104, 105, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 125,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 150, 152, 162,
163, 166, 174, 183, 186, 187, 195,
196, 197, 198, 204, 205, 212, 219,
225, 230, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 241, 242, 243, 244, 246, 248,
250, 254, 257, 259, 261, 264, 267,
268, 270, 273, 276, 280, 281, 284,
288, 292, 302

L

La Belle, 8, 12, 14, 189, 313
Lembaga, 12, 14, 18, 19, 32, 40, 42,
47, 53, 66, 68, 78, 95, 96, 101, 104,
108, 112, 116, 119, 127, 128, 129,
132, 134, 138, 154, 161, 165, 180,
183, 187, 194, 196, 212, 223, 224,
227, 236, 241, 259, 302, 303
Lintas Budaya, 4, 193
literatur, 5, 191, 192
Lokakarya, 92

M

magister, 7
majalah, 36
masa kolonial, 9, 47, 211, 249, 272
Masyarakat, i, iv, 7, 14, 15, 18, 20,
34, 39, 41, 42, 52, 77, 78, 79, 81,
94, 96, 104, 106, 112, 135, 139,
161, 169, 187, 194, 196, 200, 214,
223, 246, 255, 258, 262, 282, 294,
303, 314, 317
melengkapi, 8, 11, 95, 188, 200, 233
memperkaya, vi, 5, 11, 54, 101, 251,
274
Migran, 73, 122, 126
modul, 16, 51
monitoring, 14

N

Noer, 9, 313

O

OECD, 13, 15, 251, 287, 314
Ogawa, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 314
Otonomi, 33, 82

P

paedagogos, 1
paidagogia, 1
Partisipatif, 40, 55, 262, 282
pascakolonialisme, 9
Paulo Freire, 4, 189
pelatihan kerja, 7, 117, 120, 183, 198,
243, 250, 267, 280, 292
Pemberdayaan, iv
pemberdayaan masyarakat, vii, 6, 7,
17, 20, 25, 39, 47, 61, 71, 81, 95,
103, 110, 143, 144, 151, 161, 170,
171, 172, 174, 235, 236, 240, 244,
246, 247, 251, 259, 264, 270, 275,
280, 287
pemerataan, 8, 18, 21, 23, 134, 136,
164, 267, 270, 278, 292
pendidik, 13, 14, 188, 199, 205, 224,
253, 276, 296, 298
Pendidikan Keaksaraan, 17, 61, 302
pendidikan kesetaraan, 7, 303
platform digital, 13, 100, 255, 283
platform online, 16, 162
populasi, 26, 46, 61, 66, 69, 73, 80,
82, 174, 179, 188, 211, 219
potensi, v, 5, 6, 23, 26, 63, 87, 177,
206, 224, 270, 294, 299
praktik, vi, 2, 3, 5, 8, 10, 21, 25, 53,
74, 81, 83, 87, 132, 135, 175, 186,
190, 203, 206, 216, 239, 268, 272,
277, 295, 299
Program, 3, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 28,
31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57,

60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
89, 91, 92, 93, 96, 97, 99, 100, 101,
103, 104, 107, 110, 111, 112, 113,
114, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 129, 130,
133, 134, 135, 136, 137, 139, 142,
143, 148, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 163,
164, 165, 166, 167, 169, 170, 171,
174, 180, 182, 185, 186, 187, 188,
191, 192, 193, 195, 196, 197, 198,
200, 201, 202, 203, 204, 212, 214,
215, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 225, 228, 230, 231, 234, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
245, 246, 247, 248, 253, 255, 256,
257, 258, 261, 262, 265, 267, 269,
277, 278, 279, 281, 282, 285, 294,
297, 302, 303
Proyek, 16, 39, 55, 56, 97, 98, 130,
200, 215, 216

R

rekomendasi, 3, 10, 293, 298
relevan, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 28, 34, 47,
51, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 66, 70,
71, 74, 75, 77, 79, 81, 91, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105,
106, 107, 109, 110, 111, 113, 114,
119, 121, 125, 131, 133, 135, 139,
141, 142, 148, 151, 153, 154, 155,
157, 160, 161, 163, 164, 166, 168,
169, 170, 171, 174, 182, 185, 188,
201, 205, 214, 216, 224, 227, 228,
229, 231, 232, 235, 237, 238, 242,
243, 244, 250, 251, 252, 254, 256,
257, 258, 260, 262, 263, 265, 269,
275, 278, 280, 282, 292, 293, 299
remaja, 9, 35, 125, 134, 140, 152,
157, 159, 192, 195, 201, 207, 209,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 229, 230, 231, 232, 258
Rogers, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 25,
27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46,
47, 48, 183, 184, 188, 314

S

Sanggar, 7, 303
sarjana, 7
sertifikasi resmi, 7, 245, 274, 301
sinergi, 14, 23, 70, 81, 83, 253, 276
Sistem, 7, 8, 11, 49, 65, 79, 82, 85, 88,
102, 108, 111, 115, 117, 173, 175,
176, 180, 181, 184, 194, 207, 208,
210, 233, 246, 261, 263, 264, 265,
267, 282, 283, 286, 293, 297, 301,
315
Smith, 22, 315
struktur, v, 4, 5, 61, 69, 82, 88, 89,
116, 178, 180, 234, 247, 261, 273
Sudjana, 1, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17,
19, 21, 315
surat kabar, 36, 191

T

taraf, 13, 195, 201, 291
Terintegrasi, 79
terorganisir, 61, 144, 171, 231, 232,
236, 247, 268, 273
terstruktur, 1, 7, 9, 11, 25, 41, 45, 59,
77, 89, 104, 111, 120, 151, 170,
171, 225, 232, 233, 234, 236, 242,
246, 261, 267, 270, 287, 301
Tilaar, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 315
transformasi sosial, 6, 189, 272
transportasi, 33, 51, 158
Tutoring, 17

U

Undang-Undang, ii, 7, 8, 11, 30, 49,
303, 315
UNESCO, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 21,
22, 45, 46, 47, 48, 49, 58, 68, 97,
104, 138, 150, 162, 165, 185, 191,
200, 208, 212, 213, 214, 224, 227,
251, 273, 311, 315

UNICEF, 15, 18, 77, 150, 162, 165,
200, 212, 213, 216, 217, 220, 224,
227

V

Variasi, 80, 286
vokasional, 45, 48, 51, 57, 60, 62, 66,
69, 70, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 83,
89, 96, 97, 100, 102, 104, 105, 110,
111, 112, 113, 116, 121, 122, 125,
139, 143, 145, 152, 153, 155, 160,
162, 182, 185, 187, 195, 197, 198,
201, 225, 230, 231, 232, 234, 237,
239, 240, 241, 243, 246, 247, 251,
252, 257, 259, 260, 263, 268, 269,

270, 271, 273, 274, 275, 276, 280,
283, 284, 286, 287, 288, 292, 295

W

wacana, 3, 186
workshop, 37, 156, 163, 182, 192,
193, 215, 219, 258, 260, 264, 278,
280
World Bank, 13, 162, 165, 315

Y

Yamaguchi, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
315

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, M. (2017). Nonformal education and lifelong learning in developing countries Dhaka: BRAC University Press.
- Altbach, P. G. (2004). Globalization and the university: Myths and realities in an unequal world. *Tertiary Education and Management*, 10 (1), 3–25. <https://doi.org/10.1080/13583883.2004.9967114>
- Arcaro, J. S. (1995). *Quality in education: An implementation handbook*. Delray Beach, FL: St. Lucie Press.
- Arceo, M. (2016). *Nonformal education in the Philippines: Access and equity*. Manila: Philippine Education Research Institute.
- Asian Development Bank. (2017). *Education in the Philippines: Policies and reforms for inclusive learning*. Manila: ADB Publications.
- Bates, T. (2015). *Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning*. Vancouver: Tony Bates Associates.
- Bray, M. (2003). *Community initiatives in education: Goals, dimensions and linkages with governments*. Paris: UNESCO.
- Brookfield, S. D. (1987). *Developing critical thinkers: Challenging adults to explore alternative ways of thinking and acting*. San Francisco: Jossey-Bass.

- Coombs, P. H., & Ahmed, M. (1974). *Attacking rural poverty: How nonformal education can help*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- DVV International. (2014). *Community learning in Turkey*. Retrieved from [\[https://www.dvv-international.de/en/adult-education-and-development/editions/aed-812014-communities/community-learning-in/community-learning-inturkey\]](https://www.dvv-international.de/en/adult-education-and-development/editions/aed-812014-communities/community-learning-in/community-learning-inturkey)(<https://www.dvv-international.de/en/adult-education-and-development/editions/aed-812014-communities/community-learning-in/community-learning-inturkey>)
- European Association for the Education of Adults. (2018). *Country report on adult education in Turkey*. Retrieved from [\[https://eaea.org/wp-content/uploads/2018/01/turkey_country-report-on-adult-education-in-turkey.pdf\]](https://eaea.org/wp-content/uploads/2018/01/turkey_country-report-on-adult-education-in-turkey.pdf)(https://eaea.org/wp-content/uploads/2018/01/turkey_country-report-on-adult-education-in-turkey.pdf)
- Gibbons, M. (2019). *Nonformal education and community empowerment in Asia: Comparative perspectives*. London: Routledge.
- Hasbullah. (2017). *Dasar-dasar ilmu pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, S. (2013). *Manajemen pendidikan nonformal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Illeris, K. (2018). *Contemporary theories of learning: Learning theorists... in their own words*. New York: Routledge.
- Jarvis, P. (2010). *Adult education and lifelong learning: Theory and practice* (4th ed.). New York: Routledge.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). *Learning together and alone: Cooperative, competitive, and individualistic learning* (5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka*. Jakarta: Kemdikbud.
- Knowles, M. S. (1984). *The adult learner: A neglected species* (3rd ed.). Houston: Gulf Publishing.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- La Belle, T. J. (2000). Nonformal education and social change in Latin America. *Comparative Education Review*, 44 (1), 66–89.
<https://doi.org/10.1086/447591>
- Livingstone, D. W. (2001). *Adult education in Canada: Historical and contemporary perspectives*. Toronto: Thompson Educational Publishing.
- Maruyama, K. (2006). *Social education in Japan: Historical development and policy perspectives*. Tokyo: University of Tokyo Press.
- Mulyono. (2010). *Manajemen administrasi & organisasi pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Narushima, M. (2004). Adult education in Japan: Challenges and perspectives. *International Journal of Lifelong Education*, 23 (5), 443–456.
- National Kominkan Association. (2006). *Kominkan guidelines and operational standards*. Tokyo: National Kominkan Association.
- Noer, D. (1999). *Gerakan modern Islam di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3ES.
- Nurhadi. (2020). Pendidikan nonformal di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, 11(2), 145–158.
- OECD. (2019). *Benchmarking higher education system performance*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2025, June). *The role of subnational governments in adult skills systems: Country notes – Turkey*. Paris: OECD Publishing.

- Ogawa, K. (2020). Lifelong learning and Nonformal education in Japan: Community-based approaches. *International Journal of Lifelong Education*, 39 (2), 145–162.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89 (1/2), 62–77.
- Public Education Centres. (2025, January 8). Comprehensive public education centers (Halk Eğitimi Merkezleri) in Türkiye. Retrieved from [\[https://epale.ec.europa.eu/et/node/378716\]](https://epale.ec.europa.eu/et/node/378716)(<https://epale.ec.europa.eu/et/node/378716>)
- Rogers, A. (2004). Nonformal education: Flexible schooling or participatory education Hong Kong: Comparative Education Research Centre, University of Hong Kong.
- Rogers, A. (2019). The roots of Nonformal education in Asia: Comparative and historical perspectives. Hong Kong: Comparative Education Research Centre.
- Rohidi, T. R. (2018). Pendidikan nonformal dalam perspektif masyarakat belajar sepanjang hayat. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 23 (3), 211–223.
- Salazar, Z. (2009). Education in the Philippines: Historical perspectives. Manila: Ateneo de Manila University Press.
- Smith, M. K. (2021). What is Nonformal education The encyclopedia of pedagogy and informal education. Retrieved from [\[https://infed.org/\]](https://infed.org/)(<https://infed.org/>)
- Sudjana, D. (2010). Pendidikan nonformal: Wawasan, sejarah perkembangan, falsafah, teori pendukung, asas. Bandung: Falah Production.
- Tan, C. (2018). Lifelong learning through Nonformal education in Singapore and East Asia. *International Review of Education*, 64 (1), 63–78.

- Thomas, J. W. (2000). A review of research on project-based learning. San Rafael, CA: Autodesk Foundation.
- Tilaar, H. A. R. (2012). Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- UNESCO. (2011). Recognizing Nonformal and informal learning: Outcomes, policies and practices. Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning.
- UNESCO. (2015). Rethinking education: Towards a global common good Paris: UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2016). Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action. Paris: UNESCO.
- World Bank. (2021). The COVID-19 pandemic: Shocks to education and policy responses. Washington, DC: World Bank.
- Yamaguchi, M. (2017). Government policies and Nonformal education in Japan: Addressing social and economic challenges. *Asia Pacific Education Review*, 18 (3), 345–358.

[illegible]

TENTANG PENULIS



Dr. Lili Dasa Putri, M.Pd., adalah dosen di Universitas Negeri Padang. Ia lahir pada tanggal 7 Desember 1989 di Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tamat tahun 2001, di Desa Marunggi; Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2004; dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tamat tahun 2007. Tahun 2013 menamatkan S1 pada Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada tahun 2015 menamatkan program S2 jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2022 menamatkan program S3 pada Jurusan Pendidikan Masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada tahun 2016 merupakan awal karier sebagai dosen di perguruan tinggi swasta, pada tahun 2019 hingga kini menjadi dosen tetap di Universitas Negeri Padang. Pada tahun 2017 menikah dengan Jerry Arifindra, dari pernikahannya melahirkan seorang Putra yakni Arsakha Virendra Sharkan. Ia

sempat menjadi pembimbing Himpunan Mahasiswa Departemen hingga tahun 2023, selanjutnya menjadi Kepala Laboratorium Departemen Pendidikan Nonformal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang hingga saat ini. Di samping itu aktif menulis di berbagai jurnal, aktif dalam pembinaan kegiatan Pendidikan Nonformal diantaranya sebagai narasumber dalam berbagai pelatihan.



Prof. Dr. Solfema, M.Pd., adalah guru besar ilmu pendidikan di Universitas Negeri Padang. Ia lahir pada tanggal 12 Desember 1958 di Kenagarian Padang Luar, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tamat pada tahun 1971, di Nagari Padang Luar; Madrasah Tsanawiyah Agama

Islam Negeri (MTsAIN) tamat pada tahun 1974, di Nagari Batu Tebal; dan Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SPIAIN) tamat tahun 1977. Tahun 1983, menamatkan S1 pada Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Padang; Pada tahun 1993 menamatkan program S2 pada Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Fakultas Pascasarjana, IKIP Malang. Selanjutnya, pada tahun 2011 menamatkan program doktor (S3) pada Jurusan Psikologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Karirnya sebagai dosen Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Nonformal dimulai pada tahun 1985. Hingga saat ini ia sebagai dosen tetap pada Departemen Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Padang. Ia sempat dua periode menjadi ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang,

pada periode 1999-2003 dan periode 2003-2007. Di samping itu ia juga aktif dalam pembinaan berbagai kegiatan pendidikan luar sekolah, di antaranya sebagai nara sumber dalam berbagai pelatihan. Tahun 1985, menikah dengan Dr. Syafruddin Wahid, M.Pd., dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, UNP Padang. Dari pernikahannya tersebut, dia telah dikurniai empat orang putra putri, yakni Dilla Solisa Wahid, Taufika Oka Wahid, Fifeka Onanda Wahid, dan Zioga Zolzinska Wahid.

[illegible]



Studi Komparatif Pendidikan Nonformal Antar Negara

Gagasan dari Seluruh Dunia

Buku ini berupaya menelusuri keragaman tersebut melalui pendekatan komparatif lintas benua. Penulis berangkat dari keyakinan bahwa setiap negara memiliki pengalaman unik yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi negara lain. Studi perbandingan ini bukan untuk mencari siapa yang lebih unggul, melainkan untuk menemukan nilai-nilai universal, inovasi kebijakan, dan praktik terbaik yang dapat diadaptasi sesuai konteks lokal, termasuk bagi penguatan sistem pendidikan nonformal di Indonesia.

Dr. Lili Dasa Putri, M.Pd.
Prof. Dr. Solfema, M.Pd.



*Partnership for Action
on Community Education*

**Komplek Pondok Pinang, Padang
Sumatera Barat**



Tahun 2025